>> BAHAN KULIAH

SEDJARAH MODERN INDONESIA

Pramoedya Ananta Toer

PRAMOEDYA ANANTA TOER

SEJARAH MODERN INDONESIA ; BABAK PERINTIS

Bahan Kuliah : SEJARAH MODERN INDONESIA

Tingkat : I & II

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS "RES PUBLICA"

Pemberi Kuliah : PRAMOEDYA ANANTA TOER

BAHAN KULIAH INI DIPERBANYAK UNTUK DAPAT DIPERBAIKI BERSAMA-SAMA

BUKU PERTAMA : BABAK PERINTIS

Untuk Jurusan :

1. Indonesia

2. Tionghoa

3. Inggris

Jakarta, 1964

Penstensilan mulai halaman I-XI, dan mulai halaman 1-61, ternyata kurang baik

PENGANTAR

1. BEBERAPA PENJELASAN ISTILAH

Bicara tentang "Sejarah Modern Indonesia" atau "Sejarah Indonesia Modern" adalah bicara tentang perpaduan dari 3 istilah : Sejarah, Modern dan Indonesia. Batasan dari ketiga-tiga istilah tersebut., sebelum mulai memasuki Sejarah Modern Indonesia itu sendiri, perlu dikemukakan.

a) Apakah Sejarah ?

Sampai sekarang belum diperoleh batasan yang dapat diterima oleh semua orang apakah sejarah itu sebenarnya.

Apabila diambil pengertian dari Barat, yaitu, "sejarah adalah histori, maka dapat diterangkan, bahwa kata histori adalah kata Yunani, yang mana orang menjadi tahu sebagai akibat dari penyelidikan". Artinya, bahwa sejarah atau histori bukan (hanya) rangkaian kejadian-kejadian yang dianggap atau diketaui telah terjadi, karena sejarah lebih tepat untuk dikaji, dianalisa, dan harus dapat menerangkan inti kejadian-kejadian di masa lalu, terutama sekali dalam hubungan antar-manusia, antar-bangsa, atau bila dipergunakan pendapat R.G. Collingwood, *"to tell man what man is by telling him what man has done"*.

Karena sejarah bagi Indonesia merupakan hal baru yang diperkenalkan oleh Barat kepada kita, maka banyak kali kita akan bertemu dengan pendapat sejarawan - sejarawan Barat itu. Tetapi ini tidak berarti, bahwa bangsa Indonesia tidak mempunyai sejarah atau tidak mempunyai tradisi penulisan sejarah. Setiap bangsa yang telah mempunyai aksara sendiri, atau mengenal aksara dari bangsa lain, hampir dengan sendirinya menuliskan sejarahnya, hanya pandangan sejarahnya penuh diliput puji-pujian atau sebaliknya kutukan – jadi bukan analisa – sedang faktor - faktor subjektif ..... baik sebagai pribadi maupun penyusun fakta-fakta lebih berkuasa. Sejarah yang disusun berdasarkan pandangan-sejarah demikian dinamai : babad, riwayat, tambo, hikayat, dan sekali-dua juga dinamai sejarah, seperti halnya dengan "Sejarah Melayu", yang konon disusun oleh Tun Sri Lanang, dan kemudian disusun kembali oleh Abdullah bin Abdulkadir Munsji. Sastra daerah-daerah Indonesia menghasilkan banyak sekali naskah sejarah menurut pandangan sejarah tradisional demikian. Pada bangsa-bangsa yang belum mempunyai aksara, sejarah pun dicatatnya, disusun secara lisan dan disampaikan dari turunan yang satu kepada yang lain. Sejarah dengan pandangan sejarah tradisional ini penuh dengan legenda dan mitos.

Untuk waktu yang lama legenda serta mitos dianggap tidak penting, dan dianggap sebagai kabut belaka yang justru mengaburkan sejarah yang sewajarnya. Tetapi lama-kelamaan orang menginsyafi, bahwa legenda dan mitos hanyalah bentuk dari suatu cara dalam memandang dan mengemukakan fakta-fakta sejarah, berhubung kondisi-kondisi tertentu yang tidak memberikan kemungkinan ...... untuk menyatakan sebagaimana adanya.[1]

Dalam penyusunan sejarah yang dianggap ilmiah, dimana banyak terdapat bagian-bagian yang tidak bisa dijelaskan lewat bukti-bukti konkrit, misalnya dokumen-dokumen atau peninggalan-peninggalan, biasanya dicari bantuan pada babad, hikayat, riwayat, tambo dsb., sekalipun semua itu menggunakan pandangan sejarah tradisional, seperti yang diperbuat oleh Fruin-Kees dalam bukunya *"Geschiedenis van Java"*, yang mengambil bahan pembantu dari kitab "Babab Tanah Jawa".

---

[1] Piet Santoso Istanto : "Deus Ex Machina" dalam *"Lentera"* II/30 Des 1962.

Sejarah yang dianggap ilmiah menurut pandangan Barat dianggap mulai pada abad ke-5 SM. Sejarah ini dianggap memberikan jalan pendekatan pada masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada akal, serta dipadu dengan kemungkinan untuk menganalisa, mengkaji akibat-akibat daripadanya, dan sebagai hasilnya dibangunkanlah laporan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Herodotus, seorang pujangga Yunani, telah membuat karya yang disusun dengan metode-kerja demikian, dan karya itu dinamainya *"Histori"*, yang ia maksudkan dengannya ialah : penyelidikan. Dari penggunaan judul karyaya tersebut, serta pertumbuhannya kemudian, maka Herodotus kemudian dianggap sebagai Bapak dari histori atau sejarah. Dalam kerjanya tersebut, bukan saja ia menceritakan kembali pertentangan antara Yunani dan Persia, tapi juga tafsirannya sendiri tentang konflik tersebut. Sebagai perjuangan antara otokrasi Timur kontra konstitusionalisme Holliinis (Yunani Purba). Dianggap sebagai pengembang ilmu sejarah di dunia Barat setelah Herodotus adalah Thucydides, yang waktu dalam penjara telah menyusun sejarah peperangan Peloponesia, yang tidak saja mengutarakan sebab-sebab peperangan, tapi juga mengedepankan persangkutpautan, seluk-beluk dan sebab-sebabnya.

Apabila diatas dikatakan, bahwa sejarah itu diperkenalkan oleh Barat kepada kita, bukanlah berarti , bahwa selain bangsa-bangsa Barat tidak mengenal sejarah yang dianggap ilmiah. Bangsa Tionghoa dan Arab dalam abad-abad yang telah jauh berlalu telah menyusun yang demikian itu. Kronik-kronik Arab dan Tionghoa telah banyak membantu para sarjana sejarah dalam menyusun sejarah kuno Indonesia. Kronik-kronik yang dihasilkan oleh tenaga Indonesia sendiri juga sangat banyak. Tetapi pada umumnya kronik-kronik tersebut, masih merupakan bahan mentah yang harus digarap lagi dalam penyusunan yang dianggap ilmiah.

Setelah membandingkan sejarah berdasarkan pandangan-sejarah tradisional dengan sejarah yang dianggap ilmiah, dapatlah ditarik kesimpulan – sekalipun yang belakangan ini disusun "seobyektif" mungkin, – karena interpretasi, kesimpulan dan analisa ikut mengambil bagian penting didalam penyusunan, dan karena interpretasi, kesimpulan dan analisa sedikit-banyak mempunyai bahkan berasal dari pandangan pribadi atau pandangan kelas, maka juga setiap sejarah, bagaimanapun obyektif nampaknya ditentukan dan diwarnai oleh penyusunnya masing-masing, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota dari kelasnya. Yang demikian memang tidak pernah dapat dielakkan, sekalipun obyektifitas selalu diutamakan, dan dipergunakan sebagai pegangan. Lebih daripada itu adalah, bahwa bukan saja faktor pribadi atau kelas ikut menentukan penyusunan sejarah, juga ikut menentukan batasannya tentang apa itu sejarah.

Menurut galibnya, batasan sejarah ditentukan oleh pemerintah dari negara masing-masing, sesuai dengan pandangan atau filsafat nasional bangsa itu, atau lebih tepat, sesuai dengan kepentingan nasional bangsa bersangkutan. Maka sesuai dengan taraf perkembangan nasion Indonesia dewasa ini – sesuai pula dengan zaman modern di Indonesia yang jadi garapan kita – ialah :

"Searah adalah garis besar perjuangan hidup bangsa/nasion, golongan ataupun individu dalam meningkatkan dirinya.”

Setiap batasan untuk sejarah memang tidak pernah mencukup dan tidak pernah memuaskan setiap dan semua orang ataupun golongan, karenanya yang tersebut diatas itu hanya bersifat sementara.

Apakah sebabnya batasan tersebut, dipergunakan ? ialah karena :

i) Inti pokok kehidupan bangsa, golongan ataupun individu ialah mempertahankan, mengembangkan dan memperindah hidupnya. Dalam mempertahankan, mengembangkan dan memperindah hidupnya, nasion, bangsa, golongan atau individu itu berjuang mengalahkan kesulitan-kesulitan atau musuh-musuhnya. Yang tidak berjuang tidak akan mendapatkan peningkatan. Itu pula sebabnya sejarah tidak boleh diartikan sebagai rangkai kejadian-kejadian ditambah dengan tafsrian, analisa dan kesimpulan saja, tetapi terutama sekali mengedepankan pergulatannya yang fundamental, baik dalam mengalahkan kesulitan-kesulitan atau musuh pokok maupun yang tidak pokok atau sampingan, sehingga sejarah lebih tepat dikatakan terdiri dari rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah. Jelasnya bahwa sejarah tidak harus disusun menurut kejadian-kejadian, tetapi terutama sekali pada sebab-sebab terjadinya pergulatan, proses pergulatan, kemenangan atau kekalahannya, serta faktor-faktor yang memungkinkan kemenangan atau kekalahan itu, sedang kejadian-kejadian haruslah dinilai sebagai mata rantai kecil-kecil dari proses tersebut sebagai materi obyektif.

ii) Nasion Indonesia adalah nasion yang dilahirkan oleh Revolusi dalam tingkat-tingkatnya yang telah dilaluinya, dan bicara tentang Revolusi adalah juga bicara tentang kawan dan lawan Revolusi, landasan, kekuatan dan tujuannya dalam segala seginya. Berdasarkan itu, maka sangat penting dalam mempelajari sejarah memberikan perhatian yang cukup pada kontradiksi-kontradiksi yang berlaku, baik yang pokok maupun yang sampingan.

iii) Revolusi Indonesia menuju kearah Sosialisme, suatu masyarakat tanpa penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, nasion atas nasion. Dan karena Sosialisme Indonesia haru sosialisme yang ilmiah[2] dan bukan sosialisme khayalan (sosialisme utopi), titik berat daripadanya adalah proses atau perkembangan yang terus menerus dari pergulatan itu, tanpa akhir, apalagi kalau akhir itu diwujudkan dalam tokoh-tokoh, sehingga menjadi kultus individu, yang dalam sejarah menurut pandangan-tradisional melahirkan mitos-mitos, sedang lebih jauh lagi melahirka dongengan-dongenan khayangan dan juga legenda-legenda.

b) Apakah Modern ? :

Istilah ini sampai kini pun belum mempunyai batasan yang pasti. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan modern ialah "yang menjadi bagian zaman baru", sedang yang dimaksudkan dengan "zaman baru" adalah zaman kita hidup dewasa ini. Tidak jarang kata ini disinonimkan dengan "baru", dan sekali dua diterjemahkan dengan kata "mutakhir".

Pada mulanya kata ini berasal dari nama suatu aliran dalam agama Katholik Roma modernisme, yang timbul dan berkembang dalam abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Aliran ini dianggap suatu perbuatan skisma dan pemisahan (penyelewangan) dari theolozi Katholik Roma yang lazim. Salah seorang eksponen modernisme, G. Tyrel, merumuskan, bahwa modernisme adalah *"the desire and effort to found a new theological synthesis consistent with the data of historico-critical research"*. Pada tanggal 3 September 1907 seluruh susunan doktrin kaum modernis telah dikutuk oleh ensiklik Paus "Pascondi Dominici Gragis". Semua pendeta Katholik diminta melakukan sumpah untuk menentang modernisme tersebut.

---

[2] Lihat juga : *"Materialisme, Dialektika, Histori"* atau "M.D.H. oleh : J.W. Stam

Tetapi istilah modern itu kemudian mempunyai daya hidup yang lebih besar daripada hanya di lingkungan dunia Katholik Roma, dan dengan cepat menjadi milik masyarakat zaman baru diseluruh dunia. Pada tahun 1903 dalam salah sepucuk suratnya, Kartini pernah menyatakan keinginannya untuk berkenalan dengan "gadis Tionghoa modern". Ini berarti bahwa pada tahun 1903, atau kurang lebih 4 tahun sebelum modernisme dikutuk, kata tersebut, telah umum dipergunakan oleh kaum terpelajar Indonesia.

Pada umumnya, bila orang menggunakan istilah modern, maka yang dimaksudkannya bukan hanya "baru", tetapi juga "telah lepas dari bentukan lama atau tradisional". Bahkan tidak jarang istilah ini ditempatkan sebagai lawan atau kebalikan daripada lama, tradisional atau tua. Tetapi istilah ini sebenarnya mencakup makna yang lebih luas daripada hanya baru, atau tidak lama, tidak tradisional, tidak tua, karena modern sesungguhnya tidak lain daripada perwujudan dari pandangan dan sikap yang modern.

Dikatakan perwujudan dari pandangan dan sikap yang modern, karena adalah juga yang nampaknya modern, tetapi bukan perwujudan dari pandang dan sikap modern, misalnya dalam penggunaan mode.

Apabila modernisme bersumber pada pandangan dan sikap modern, maka sikap dan pandangan modern berasal dari perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik. Modernisme muncul sebagai produk dari proses ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik yang telah meninggalkan feodalisme, memasuki liberalisme. Atau lebih tepatnya : modernisme adalah produk daripada kapitalisme. Maka apabila dikatakan zaman modern, maka itu tidak lain artinya daripada : zaman kapitalisme. Modernisme timbul tanpa dapat dipisahkan daripada usaha kapital untuk memproduksi lebih murah, lebih cepat, lebih banyak, dan untuk mencapai pembeli sebanyak mungkin. Dapat dikatakan, bahwa industri yang dilahirkan oleh revolusi industri bukan saja menghasilkan barang dagangan keseluruh dunia, juga modernisme.

Dari keterangan tersebut, diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pandangan dan sikap modern adalah perkembangan yang jauh lebih maju daripada pandangan dan sikap feodal. Bila harus dikatakan secara sejarah, modernisme berasal dari Revolusi Prancis, karena yang belakangan inilah sumber dari perubahan-perubahan yang meninggalkan feodalisme. Walaupun pada mulanya dasar kelahiran dan perkembangan modernisme adalah perdagangan, kapital, namun kemudian modernisme ikut mengubah pula sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, sesuai dengan kebutuhan kapitalisme dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Karena itu adalah kurang tepat apabila ia dianggap bermula dalam abad ke-19 setelah timbulnya skisma dalam Gereja Katholik Roma. Ia bermula dan berkembang dengan bermulanya kaum borjuasi Prancis mendapat kekuasaan. Istilahnya sendiri dipergunakan baru setelah munculnya kaum modernis tersebut.

Diatas telah dikatakan, bahwa modernisme bersumber pada pandangan dan sikap yang modern. Penggunaan alat-alat modern, atau bentuk-bentuk organisasi modern, yang tidak bersumber pada sikap dan pandangan modern, menurut arti kata yang sebenarnya, tidak bisa dikatakan modern. Yang dapat dikatakan modern adalah alat yang dipergunakannya, tetapi manusiannya tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kejadian dalam sejarah :

i) penyerbuan Mataram terhadap Batavia pada tahun 1628-1629, yang telah menggunakan artileri berat,

ii) bentuk pemerintahan Majapahit dibawah Hayam Wuruk-Gadjahmada yang mendekati kesempurnaan kementerian-kementerian atau departemen-departemen dewasa ini, sehingga J. Nehru menamainya "modern"[3]
iii) keilmuan yang telah maju seperti dibidang kimia sehingga bangsa Indonesia dimasa jauh silam, telah dapat membuat keris dengan prosede dingin,
iv) logistik, yang memungkinkan Pati Unus dapat mengirimkan pasukan sebanyak 20.000 orang dalam sekali angkut, yang dipecah dalam dua bagian dan menempuh jarak dari Jepara-Palembang sampai Malaka untuk melakukan penyerangan (1512-1513),
v) ilmu hitung dengan mana dibangunkan candi-candi raksasa seperti Prambanan dan Borobudur dalam abad ke-8, betapapun tinggi mutu keilmuan yang telah dicapai dan dipraktekkan, namun belumlah bisa dikatakan modern, karena memang tidak bersumber pada pandangan dan sikap yang modern, karena semua itu bukanlah produk kapitalisme dan bertugas menyelamatkan kapitalisme, tapi produk dari feodalisme. Selama ketinggian mutu keilmuan itu diabdikan pada feodalisme, tak dapat dikatakan hal itu modern sejalan dengan wataknya, modernisme mempunyai persangkutan yang tiada terpisahkan dengan kepentingan kapital yang melayani semua dan setiap orang asal bisa memberikan keuntungan kepadanya. Jadi :

"Modern adalah nama dari suatu watak dari masyarakat kapital, yang terjadi sebagai produk kapitalisme dalam usahanya untuk melayani semua dan setiap orang yang bisa memberikan keuntungan kepadanya"

c) Apakah Indonesia ? :

Indonesia adalah nama dari suatu kesatuan antara wilayah, pemerintahan dan nasion kita.

Sampai waktu yang lama nama Indonesia diangga ciptaan Bastian, sedang sebenarnya adalah ciptaan Logan. Pada mulanya Indonesia tidak lebih daripada sebuah istilah geografi, tapi dengan pasangnya gerakan kemerdekaan nasional non-koperatif kemudian menjadi juga istilah politik. Sebelum itu, menjelang tutup abad ke-19, istilah ini telah juga digunakan sebagai istilah hukum oleh Ir. H.H. van Kol dalam perdebatan-perdebatan di dalam Parlemen Belanda (Lih : Pokok-Pokok "Asal Usul Istilah Indonesia").

Karena Indonesia dewasa ini telah menjadi istilah politik, hukum, dan menjadi nama dari negara kita, pada umumnya orang mudah melupakan bagaimana asal-usulnya sampai diterima menjadi nama dari negara kita. Terutama adalah perjuangan politik yang memungkinkannya demikian. Dan naskah sejarah ini seluruhnya adalah garis dari proses dan pergulatan bangsa Indonesia yang menghasilkan ditingkatkannya nama Indonesia dari istilah geografi menjadi istilah politik, dan kemudian menjadi nama negara kita.

Sebagai istilah politik ia mulai dipergunakan pada tahun 1922 oleh *"Indische Vereeninging"* (Nederland), setelah mengubah namanya menjadi "Perhimpunan Indonesia" atau disingkat PI. Tetapi sebagai kenyataan histori istilah politik ini disetujui bersama baru

[3] J. Nehru : *"Lintasan Sejarah Dunia"*, pada Bab : "Kemaharadjaan Malaysia dari Majapahit dan Malaca", terjemahan : Bahrum Rangkuti.

pada tahun 1928 dalam Kongres Pemuda ke-II pada 28 Oktober 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda.[4] "Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa".[5]

Sebelum menjadi istilah politik, terdapat beberapa nama yang dipergunakan untuk menyatakan gagasan tentangnya. Dibawah E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1911 telah didirikan organisasi politik *Indische Partij*, dengan singkatan IP, yang mengajarkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, artinya perjuangan yang memungkinkan Indonesia menjadi negara. Tetapi waktu itu ia belum menggunakan istilah Indonesia, baru Indische. Ialah pula untuk pertama kali menggunakan kata Indisch sebagai istilah politik. Sebelum itu kata *Indisch* (= kata sifat dari Indie atau Hindia) hanya istilah geografi kemudian meningkat menjadi istilah etnolo. Tetapi secara politik kemerdekaan Indonesia dewasa ini baru IP saja dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, perjuangannya diteruskan oleh partai *Insulinde*, sedang nama *Insulinde* adalah sama dengan Indisch yang dipergunakan oleh IP, dan mula-mula dipergunakan oleh Multatuli. Sebagai istilah etnologi kata Indisch dipergunakan jauh lebih dahulu, beberapa puluh tahun setelah penjajahan Belanda, bahkan pada tahun 1898 dipergunakan sebagai nama organisasi, yaitu *Indische Bond*. Sebagai istilah geografi, biasa dipergunakan di lapangan keilmuan sebagai dapat dilihat dari indeks penerbitan antara abad 18 hingga permulaan abad ke-20. Setelah Insulinde dinyatakan bubar oleh pemerintah kolonial pada tahun 1919, istilah Indisch masih dipergunakan, yaitu oleh *Nationaal Indische* Partai, disingkat NIP (1919-1923), bukan sebagai istilah etnologi, tetapi istilah politik.

Setelah *Indische Verreniging*, yang biasa juga disebut Perhimpunan Hindia, diubah menjadi Perhimpunan Indonesia, Indonesia sebagai istilah politik mempunyai perkembangan lebih cepat untuk diterima oleh gerakan nasional Indonesia. Lebih jelas dan agak terperinci tentang perkembangan ini dapat diikuti dari uraian dibawah ini, susunan Drs J.B. Ave.[6]

2. ASAL - USUL ISTILAH INDONESIA

B.H.M. Vlekke didalam bukunya *"Geschiedenis van den Indischen Archipel"* (1947) halaman 402 n3, menulis bahwa nama "Indonesia" ditemukan dan dipakai untuk pertama kali oleh seorang etnograf Jerman, A. Bastian dalam tahun 1884. Ucapan itu diulangi lagi dalam edisi Inggris dari tahun 1961 halaman 6, empat belas tahun kemudian, H.J. de Graaf, ahli sejarah Belanda lainnya, menulis hal yang sama dalam bukunya *"Geschiedenis van Indonesie*" (1949) halaman 11.

Memang, A. Bastian memakai nama *"Indonesien"*, yakni sebagai judul karangannya yang lengkap berbunyi *"Indonesian oder die insien des Malayischen Archipel"*, yang jilid pertamanya tentang Maluku, terbit di Berlin dalam tahun 1884. Di dalam teks karyanya tidak kami jumpai lagi nama *"Indonesien"*. Ia sendiri tidak menerangkan dari mana diambilnya nama *"Indonesien"* itu. Yang terang ialah, bahwa dengan *"Indonesien"* dimaksudkannya "Kepulauan Melayu", yang dalam ilmu Etnologi pada waktu itu meliputi kepulauan daratan Asia Tenggara dan benua Australia, termasuk Filipina tanpa Irian.

---

[4] Departemen Penerangan RI : *"Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa "Indonesia"* penerbitan khusus no. 185, 1961.

[5] Yang dimaksudkan dengan "satu bahasa" adalah "bahasa persatuan".

[6] Uraian drs J.B. Ave "Asal - usul/Istilah Indonesia", yang dipergunakan disini dari "Lentera"/Penggunaanya disini mengalami sedikit perubahan. /Pemakaian/II/23; 25 Agustus 1963.

Apakah Bastian, sarjana yang pertama yang menyamakan "kepulauan Melayu" dengan "Indonesien" ? Tidak, 34 tahun lebih dulu, dalam tahun 1850, nama lain bagi "kepulauan Hindia" dan untuk penduduk-penduduknya telah dipersoalkan oleh dua sarjana etnologi Inggris.

Dalam sebuah majalah terbitan Singapura yang bernama "The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia" volume IV tahun 1850, seorang etnolog Inggris G.W. Earl, menggunakan istilah *"the Malayunesian branch of this ?"* (hlm. 71). Di bawah halaman ditambahkannya catatan yang menjelaskan pemakaian istilah baru itu: dengan mengambil contoh pada istilah yang pada waktu itu telah lazim dipakai, yakni "Polynesia", diusulkannya nama baru bagi penduduk - penduduk kepulauan Hindia atau kepulauan Melayu (inhabitants of the *"Indian Archipelago"* or *"Malayan Archipelago"*), yaitu *"Indu-nesians"* atau *"Malayuesians"*. Earl lebih suka pada istilah Malayunesians untuk menandai "the brown races of the Archipelago" (ras-ras berwarna sawo matang di Kepulauan). Antara lain karena istilah Malayunesians mengandung penghargaan atas kegiatan rakyat Melayu yang telah menjelajah seluruh Kepulauan sebelum orang Eropa datang di daerah itu.

Usul itu, juga dalam majalah yang sama, oleh kepala redaksi (editor) majalah J.R. Logan, juga seorang etnolog, juga seorang Inggris. Tetapi Logan tidak menyetujui pilihan Earl tentang istilah Malayuneasians, ia lebih suka nama : *"Indonesia". Tulisnya : "I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synoym for the Indian Archipelagan or Archipelagian, and Indonesians or Indian Archipelagians or Indian Islanders"* (hlm. 254 n), artinya : "Saya lebih suka nama dengan arti geografi saja – Indonesia – singkatan untuk Pulau-Pulau India atau Kepulauan India. Jadi penduduk-penduduk Kepulauan India atau Pulau-Pulau India menjadi orang Indonesia).

Beberapa halaman lebih jauh ia mengusulkan tiga nama bagi *"the whole Indian region"* (seluruh daerah India) yang (menurut dia) terdiri atas bagian-bagian daratan yang diberi dua oleh Teluk Benggala dan bagian pulau - pulau di sebelah Timur yang semuanya mengalami dengan langsung pengaruh India (menurut dia). Nama-nama yang diusulkanya itu ialah : India, Ultraindia atau Trensindia dan Indonesia.

Dengan Ultraindia atau Transindia dimaksukannya daerah yang kemudian lebih lazim disebut Hindia Belakang (Achter Indie; Hinterindien) yakni daratan Asia Tenggara. Dengan "Indonesia" ia maksudkan kepulauan kita ditambah kepulauan Filipina, tetapi tanpa Irian Barat, yang menurut Logan termasuk Melanesia, bersama dengan Australia dan "pulau Papua disebelah Timur" (hlm. 277 n dan 278 n).

Jelas kiranya bahwa bagi Logan istilah Indonesia merupakan istilah geografi belaka. Dalam arti itu juga dipakainya dalam karangan-karangan tentang etnologi dan bahasa-bahasa Asia Tenggara dan Oceania sesudah tahun 1850.

Selama 30 tahun istilah Indonesia tetap menjadi milik pribadi Logan. Baru dalam tahun 1881 nama "Indonesia" muncul dalam sebuah majalah Inggris "Nature".

Dalam tahun 1882 terbit sebuah buku pelajaran bahasa Melayu karangan W.E. Maxwell, sarjana Inggris pula, yang menyebut *"The islands of Indonesia....."*

Dua tahun kemudian istilah "Indonesia" dipakai oleh sarjana etnologi A. Bastian sebagai judul karyanya.

Sarjana etnologi Belanda, A.G. Wilkon, yang dengan tepat disebut peletak dasar etnologi Indonesia, selanjutnya sering kali memakai "Indonesians" dalam karangan-

karangannya mulai tahun 1886. Dengan "Indonesiens", Wilken maksudkan penduduk-penduduk kepulauan Indonesia dengan Irian Barat, ditambah penduduk - penduduk Filipina, sebagian penduduk Madagaskar dan sebagian penduduk Taiwan.

Misalnya, sudah dalam tahun 1925 seorang antropolog (fisik) Belanda yang terkenal, J.P. Kleiweg de Zwaar, menyebut J.R. Logan sebagai penemu istilah "Indonesia", yakni dalam bukunya *"De Rassen van cen Indischen Archipel"* (1925) hlm. 146. Disini ia juga mengusulkan agar nama "Indonesiens" itu dipakai untuk penduduk-penduduk seluruh wilayah *"Nederlandsch-Indie"*, jadi termasuk Irian Barat.

Di dalam politik "Indonesia" sudah luas diakai juga pada waktu itu, yakni oleh tokoh-tokoh dan partai-partai yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Mungkin inilah yang menyebabkan nama "Indonesia" sekali lagi dibicarakan. Pertama-tama dalam tahun 1927, oleh seorang Belanda yang bernama Kraemer, yang menulis juga tentang Logan dan asal-usul "Indonesia", didalam majalah *"Koloniaal Weekblad"* tanggal 3 Februari 1927. Dalam tahun itu juga dimuat sebuah karangan di dalam majalah resmi perhimpunan nasional terkenal "Perhimpunan Indonesia", yakni didalam "Indonesia Merdeka" tahun 1927 halaman 50-53. Karangan itu ditulis oleh seseorang yang tidak menyebut namanya, tetapi ia terang seorang Indonesia dan terang seorang nasionalis. Karena karangan itu merupakan uraian yang jelas dan tepat tentang asal-usul dan pemakaian nama "Indonesia" oleh kaum nasionalis maka kami akan membicarakan dengan agak mendalam.

Penulis menunjuk kepada tulisan Kraemer diatas itu dan juga mengakui Logan sebagai pemakai pertama nama Indonesia dalam arti geografi saja. Tetapi – tulisnya – lalu istilah "Indonesia" dalam ilmu Etnologi menjadi lebih luas artinya dan kemudian nama itu masuk dalam bidang politik praktis, terutama dalam sepuluh tahun belakangan ini.

Mula-mula dipakai istilahnya Multatuli *"Insulinde"* tetapi nama ini tidak memuaskan. Terutama kaum pemuda yang dengan penuh kesadaran berjuang untuk mewujudkan satu tanah air yang bebas - merdeka, telah merasa kekurangan akan nama yang tepat bagi tujuan mereka. Merekalah yang menyambut dengan gembira nama "Indonesia".

Apa arti nama itu bagi kita ? Pendeknya : Indonesia adalah sama dengan Hindia Belanda sekarang. Tegasnya, mendapat arti politik, biarpun politik hari depan, yaitu negara Indonesia di kemudian hari. Tetapi bagi kita Indonesia berarti lebih banyak lagi : bukan saja tujuan yang ingin kita capai, tetapi juga, kesatuan, kekuasaan untuk berdiri sendiri.

Karena nama Indonesia dalam arti ini telah umum dipakai di tanah air, maka sebaiknya ilmu etnologi berdasarkan peristilahannya (terminologi) pada politik.

Ada orang-orang yang menentang istilah ini, misalnya *Commisie tot Herziening va de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie*, tahun 1918, tetapi itu tidak penting karena suatu negara Indonesia yang merdeka tidak dapat menuruti ketentuan-ketentuan dalam sebuah Undang - Undang Dasar asing.

Bagi kaum sana istilah "Indonesia" telah menjadi kata yang mengerikan, karena pada hakekatnya istilah itu mengandung ide yang revolusioner.

Sebagai kesimpulan ditulisnya : istilah "Indonesia" untuk pertama kali dipakai oleh J.R. Logan dalam arti geografi, lalu mendapat arti etnologi, akhirnya diterima oleh kaum nasionalis Indonesia sebagai istilah politik, yang memberi arti politik kepada nama ini untuk menandai tujuan yang mulia yang diperjuangkannya ialah satu tanah air yang bebas dan merdeka : INDONESIA.

Dalam tahun 1928, ahli hukum adat yang termahsyur C.V. Vollenhoven membicarakan asal - usul "Indonesia" dalam bukunya *"De Ontdekking van het Adatrecht"*. Pada akhir tahun itu M. Hatta memberi uraian tentang "Indonesia" dengan menunjuk pada karangan Kraemer diatas itu, yakni dalam majalah Belanda *"De Socialist"* tanggal 8 Desember 1928. Dalam tahun 1941 ahli etnologi Belanda, H. Th. Fischer, menulis tentang istilah kita itu dalam *"Cultureel Indie"* III tahun 1941, akhirnya dalam tahun 1951 asal dan pemakaian nama Indonesia diuraikan dalam buku V. Purcell, ahli sinologi Inggris, yang berjudul : *"The Chinese in South East Asia"* yang juga mengutip sebuah tulisan oleh Lin Hui - Hsiang dalam bahasa Tionghoa dari tahun 1947.

Dalam tahun 1958 asal - usul nama kita itu disinggung oleh Koentjaraningrat dengan mengutip karangan Fischer diatas itu, yakni dalam bukunya "Beberapa Metode Anthropolog dalam Penjelidikan-Penjelidikan Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia". Akhirnya istilah Indonesia menarik perhatian M. Yamin, yang rupanya diilhami oleh karangan Hatta dalam tahun 1928 itu, yang juga disebutnya dalam "Tatanegara Majapahit" parwa I, tahun 1962.

3. SEJARAH DAN KEPENTINGANNYA

a) Segalanya Adalah Wakil Sejarah

Segalanya adalah wakil sejarah. Pakaian yang kita kenakan adalah wakil dan hasil dari proses pertenunan yang sangat lama, percobaan-percobaan dalam mencari bahan-bahan tenun yang mencocoki kebutuhan, proses yang terus menerus meningkat. Pakaian kita mewakili sejarah pertemuan berpuluh abad lamanya. Ia pun mewakili sejarah moral, sejarah pertanian, perburuhan, perindustrian, dan demikian seterusnya.

Dalam pada itu setiap orang mewakili pula suatu perkembangan sejarah yang amat panang, dalam masa hidup orang itu sendiri ataupun jauh sebelumnya. Bahasa yang kita pergunakan dewasa ini berasal dari ratusan dan ribuan tahun sebelumnya, juga oleh nenek moyang kita dibangunkan kata demi kata, sedang pada gilirannya setiap kata mewakili satu pengalaman dan pemikiran serta penyimpulan yang sangat lama. Jumlah kata yang dimiliki seseorang adalah jumah pengalaman jasmani dan rohani yang pernah ditempuhnya.

Dapat dikatakan, bahwa sejarah adalah induk dari masa setiap hal berasal. Sejarah adalah suatu proses dari masa lalu yang dinilai oleh anak yang dilahirkan olehnya sendiri, yang terus berproses di masa ini, untuk membentuk masa depan. Setiap anak mengenal dan harus mengenal ibunya, mencintainya, terkecuali apabila ada suatu aral yang mengasingkan si anak daripada ibunya tersebut. Dari ibunya, si anak mendapat pendidikan pertama, sejak dari menyusu sampai berjalan, bicara dan berpikir, merasa dan menimbang. Dari situlah setiap orang berasal, dan dari situ orang berangkat menjelajah dunia, dan kesitu pula orang pulang kembali. Dari perbandingan terakhir ini dapat ditarik pelajaran, bahwa setiap orang yang tidak tahu titik asalnya, yakni sejarah, tidak akan tahu pula tempat yang akan ditujunya.

Karena pentingnya sejarah dan pandangan-sejarah dalam hubungan dengan nation dan character-building, yang tidak akan terlepas daripada politik negara, itupula sebabnya Prof. Dr. Priono dalam kedudukannya sebagai Menteri PPK telah mengambil inisiatif mengadakan Seminar Sejarah pertama kali di Indonesia yang diserahkan tugas pelaksanaanya pada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia berdasarkan keputusan Menteri tersebut pada tanggal 13 Maret 1957 no. 28201/S. Yang membicarakan tentang "Konsepsi Sejarah Nasional" yang diberikan oleh Prof. Mr. H. M. Yamin dan Soedjatmoko dan "Periodisasi

Sejarah Indonesia" juga diberikan oleh Prof. Dr. Mr. Soekanto dan Drs. A. Sartono Kartodirjo.[7]

Karena sejarah adalah titik tolak dari masa kini dan masa datang, maka penyusunannya memang harus didasarkan pada falsafah sejarah yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu sosialisme, dan sejarah dengan itu maka filsafat sejarah yang paling tepat ialah filsafat yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila dengan program-umumnya Manipol.

Hal ini perlu ditekankan sebelumnya, karena, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sejarah diwarnai oleh pandangan penyusunannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota klas. Sejarah yang disusun oleh orang - orang Belanda dalam rangka mengisi program pengajaran Hindia Belanda mendukung tugas pengabdian pada imperalisme-kolonalisme Belanda, artinya pengabdian pada klas yang berkuasa di negeri Belanda, dan sama sekali bertentangan dengan kepentingan nasion Indonesia baik sebelum maupun selama kemerdekaan nasionalnya, serta juga untuk masa-masa seterusnya ...... pula halnya dengan buku-buku sejarah tentang Indonesia yang disusun oleh bangsa-bangsa lain. Ini tidak berarti, bahwa diantara para penulis sejarah bangsa asing itu selamanya berwatak imperialis atau kolonial, ada beberapa diantaranya yang menyusun dengan simpati yang dalam pada nasion Indonesia, dengan pandangan, tinjauan dan penyimpulan-penyimpulan yang mungkin tidak bertentangan dengan kepentingan nasion Indonesia, tetapi bagaimanapun pandangan, tinjauan dan penyimpulan-penyimpulan tersebut, sudah pasti tidak bersumber pada filsafat nasional kita. Karena itu sebaiknya sejarah nasional memang harus disusun oleh penulis sejarah bangsa itu sendiri yang memiliki "iman dan amal" nasional sebagaimana dikatakan oleh M. Yamin dalam Seminar Sejarah I.

b) Sejarah Adalah Guru :

Sejarah adalah guru yang tanpa belas kasiha mengajarkan kepada orang tentang sukses serta kegagalan dari perjuangan generasi-generasi sebelumnya. Ia pun guru yang menunjukkan kepada generasi-generasi kemudian, mana-mana kekuatan generasi-generasi sebelumnya juga harus diperkembangkan dan mana-mana kelemahan yang harus diberantas. Seseorang yang tidak mempunyai wawasan-sejarah tidak mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan kekuatan nenek-moyangnya yang diwariskan kepadanya. Demikian juga halnya dengan nasion, bangsa, golongan dan individu.

Dalam hubungan inilah sosialisme-ilmiah menuntut pada pengikutnya suatu kesadaran-sejarah yang tinggi dan keras. Sejarah bukan saja menjadi tempat berorientasi, juga menjadi tempat menggali kekuatan. Dari situ orang akan menemukan acuan-acuan dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan, memahami sukses-sukses dan kegagalan-kegagalan, ketepatan tindakan dan kekeliruan-kekeliruannya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang peristiwa rasial 10 Mei 1963. Peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau tidak perlu terjadi sekiranya para rasialis, korbannya ataupun petugas-petugas setempat, mengenal sejarah perkembangan golongan-golongan di dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa rasial 10 Mei, juga peristiwa rasial lain-lainnya yang terjadi setelah itu dan bermula sejak awal abad ini. Lain daripada satu tembusan yang buruk dari

[7] Universitas Gadjah Mada : a) "Laporan Seminar Sejarah; 14s/d 18 Desember 1957", 1957. b) "Seminar Sejarah; Acara I dan II", 1958.

peristiwa-peristiwa rasial sebelumnya.[8] Seluruh peristiwa rasial di Indonesia bersumber pada : ketiadaan wawasan-sejarah yang berpadu dengan ketidakpuasan pada pembagian rejeki, yang kedua-duanya tidak pernah bersumber pada kenyataan-kenyataan rasial, tetapi pada sistem ekonomi yang berlaku. Maka apabila dipelajari laporan-laporan pers tentang peristiwa-peristiwa rasial tahun belasan, dengan perasaan malu orang akan mengikuti peristiwa 10 Mei dan tembusan-tembusannya yang lain. Dan apabila dipelajari kembali karya Tan Boen Kim, *"Peroesoehan di Koedoes"* (1920), cepatlah ditarik kesimpulan, bahwa jarak antara peristiwa rasial Kudus tahun 1919 dan peristiwa rasial 10 Mei 1963, tidak memunculkan bukti adanya peningkatan kesadaran-nasional, kesadaran sejarah, wawasan-sejarah, apalagi daya ciptanya di bidang ekonomi.[9]

Politik yang dijalankan tanpa wawasan-sejarah di kemudian hari. Maka politik yang dijalankan tanpa wawasan-sejarah berakibat memutuskan hubungan dengan masa lalu, dengan titik-tolaknya sendiri, dengan induknya tanpa mengenal kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam dirinya sendiri, dan dengan demikian memudahkan terulangnya kembali kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dialami pada masa-masa sebelumnya, sebagaimana halnya dengan peristiwa rasial 10 Mei, dan akibatnya yang langsung ialah memundurkan – kalau bukan menghalangi – perjuangan untuk peningkatan itu.

Politik yang dijalankan tanpa wawasan-sejarah, akan lebih banyak terpukul oleh kegagalan daripada sebaliknya, pelaksanakannya lebih berat, dan nisbiah hasilnya dicapai dengan tenaga lebih banyak, waktu lebih banyak dan pengurbanan lebih banyak. Tanpa petunjuk sejarah sebagai petunjuk guru, pelaksanaan politik akan banyak menempuh jalan kelok – reform, kompromi, oportunisme – dan dengan demikian menjauhkannya dari jalan lurus : radikalisme kiri, revolusionerisme. Yang demikian inilah sesungguhnya hampir seluruh sejarah perjuangan nasional demi Babak Perintisan. Sebab utama daripadanya ialah : para pejuang dalam Babak Perintisan pada umumnya adalah kaum terpelajar yang belum dapat melepaskan diri dari pelajaran sejarah susunan orang-orang Belanda kolonial, atau mereka tidak mempelajarinya sama sekali, terkecuali sejarah-tradisional yang lebih banyak mengabdi kepada feodalisme, dan bukan pada bangsanya.

Karena pentingnya sejarah itulah pula yang menyebabkan ia diajarkan sejak sekolah dasar dan terutama di perguruan-perguruan tinggi jurusan ilmu-ilmu sosial, yang mempunyai hubungan erat dengan pekerjaan penggasan.

Tetapi sejarah bisa menjadi guru yang baik apabila disusun berdasarkan filsafat yang tepat bagi perkembangan bangsa bersangkutan. Dan karena sejarah merupakan salah satu kekuatan untuk membentuk dan mengembangkan penggagasan, maka dia merupakan bahaya, apabila disusun berdasarkan filsafat yang kurang atau tidak tepat, apalagi kalau bertentangan dengan perkembangan bangsa.

c) Tentang Pandangan - Sejarah :

---

[8] Bandingkan juga dengan C. Veeneklaas *"Het Rassenconcflict in de Opvoeding in Indonesie"*, 1949. Terbitan no. 44 dari "Mededeelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

[9] Lihat juga Naskah kerja Lanny Lie "Perosoehan di Koedoes" berdasarkan karya Tan Boen Kim ; pernah diumumkan berturut - turut dalam *"Lentera"* II/21-25, 11 Agustus, 18 Agustus, 25 Agustus, 1 September, 8 September 1963.

Sejarah disusun berdasarkan materi-materi yang telah disediakan. Pada yang satu lebih sedikit, pada yang lain lebih banyak, tapi pada umumnya materi yang dipergunakan adalah sama. Walaupun demikian hasil pekerjaan mereka akan berbeda-beda, sekalipun berdasarkan filsafat yang sama. Perbedaan ini berasal dari perbedaan pandangan, penilaian atas materi-materi yang bersangkutan. Sebuah materi dapat dinilai lebih tinggi oleh seorang penyusun sejarah, sebaliknya dapat dianggap kurang, bahkan tidak bernilai sesuatupun oleh penyusun yang lain. Kesamaan filsafat tapi perbedaan pandangan ini berasal dari faktor-faktor sosial masing-masing dan faktor-faktor psikologi masing-masing. Seorang penyusun sejarah yang berasal dari keluarga atau kelas buruh atau tani, sekalipun berpegangan falsafah Pancasila, akan menghasilkan tulisan sejarah yang berbeda daripada penyusun yang berasal dari kelas borjuis. Bagi yang pertama lebih terangsang oleh materi-materi tentang gerakan buruh dan tani, dan sebaliknya yang kedua akan lebih terangsang oleh materi-materi dimana faktor-faktor ekonomi dapat menentukan perkembangan nasional. Dan demikian seterusnya, dengan catatan akan adanya kekecualian-kekecualian, atau adanya perubahan pemihakan. Berdasarkan itulah mengapa di berbagai negara pernah terjadi pelarangan buku-buku sejarah tertentu serta turun tanggannya pemerintah dari negara-negara bersangkutan dalam penyusunan kembali buku sejarah, terutama sejarah nasional. Demikian pula halnya dengan buku sejarah yang disusun oleh partai-partai tertentu dimaksudkan untuk menggariskan terjadinya polemik masa lalu berdasarkan pandangan partai-partai bersangkutan. Tiada mengherankan apabila sejarah susunan orang-orag dari Partai A, akan berbeda dari susunan Partai B dst, dan tidak jarang perbedaan - perbedaan pandangan itu menyebabkan terjadinya polemik tanpa kesimpulan. Itu pula sebabnya sejarah nasional dari bangsa-bangsa yang revolusioner - kiri biasa disusun oleh sebuah komisi yang ditunjuk oleh negara, sedang pada bangsa-bangsa revolusioner - kiri bekas terjajah disusun oleh sebuah panitia yang terdiri atas kekuatan-kekuatan revolusioner yang ada dalam bangsa itu, yang bersama-sama ikut memenangkan perjuangannya.

Indonesia adalah negeri dengan bangsa revolusioner-kiri bekas terjajah, dan karenanya sejarah nasionalnya pun harus disusun oleh panitia yang terdiri atas kekuatan-kekuatan revolusioner yang hidup di dalam tubuhnya, yaitu kekuatan Nasakom. Sebab-sebab daripada kemestian Nasakom ialah, karena setiap golongan revolusioner dalam Nasakom – walaupun berpegangan pada filsafah negara yang sama-sama disetujui – masing-masing mempunyai prinsip dan pandangan sendiri. Imperialis - kolonialis dalam sejarah penjajahan telah menggunakan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat sebagai landasan dari kekuasaannya, dan karenannya di negara-negara bekas penjajahan terdapapt kekuatan-kekuatan revolusioner yang mempunyai perbedaan satu daripada yang lain, tetapi tidak ada perbedaan dalam menghadapi imperialis-kolonialis. Inilah ciri dari bangsa-bangsa revolusioner bekas jajahan, yang harus dipahami lahir dan batinnya serta manifestasi-manifestasinya, terutama sekali mengingat, bahwa lebih kurang separuh dari jumlah bangsa-bangsa di dunia dewasa ini, yaitu di Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah tergolong pada bangsa-bangsa yang disebutkan tadi sehingga akibatnya akan memberikan teraan mendalam pada sejarah umat manusia dalam paruh kedua abad ke-20 ini.

Tentang hal ini dapat disimpulkan :

i) sejarah nasional dari bangsa yang revolusioner-kiri disusun ole komisi yang ditunjuk oleh negara,
ii) sejarah nasional dari bangsa yang revolusioner-kiri bekas jajahan disusun oleh panitia yang terdiri atas kekuatan-kekuatan revolusioner yang hidup di dalam tubuhnya,

iii) kekuatan-kekuatan revolusioner yang hidup di dalam tubuh bangsa Indonesia ialah Nasakom.

Juga dalam penyuaraan sejarah modern kita, Nasakom merupakan poros sejarah itu sendiri. Perbedaan-perbedaan prinsip antara kekuatan revolusioner yang satu daripada kekuatan revolusioner yang lain tidak boleh menjadi sebab kontradiksi, tetapi harus menjadi alas konsolidasi, sebagaimana telah dirumuskan dalam lambang negara : Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Bila tidak, maka perbedaan-perbedaan bukan menjadi landasan konsolidasi, sebaliknya akan menjadi landasan kontradiksi. Perbuatan yang akhir ini adalah perbuatan kontra-revolusi.

Di bidang teori sejarah, kontradiksi-kontradiksi demikian pernah dipaksa untuk terjadi, misalnya tentang Piagam Jakarta, yang dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan reaksi pada sekitar tahun 1958. Demikian sendiri yang turun tangan dengan membubarkan Konstituante, dan akhirnya melahirkan ketentuan bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mempelajari sejarah, perlu sekali dipergunakannya beberapa sumber. Perlunya ialah, disamping membandingkan materi antara kedua-duanya terutama sekali untuk memahami problem-problem dan caranya menganalisa serta menyimpulkan, dan diarahkan kemana penyimpulan-penyimpulan tersebut. Hal ini sebenarnya telah meninggalkan sejarah atau teori sejarah, dan lebih banyak memasuki bidang politik. Sebabnya ialah, karena penyusunannya sendiri bukan merupakan bagian dari sejarah yang digarapnya, tetapi bagian dari masa kini, sebagai homo politikon. Bahkan terbitan-terbitan baru dari buku sejarah yang sama tidak jarang mengandung perbedaan atau peningkatan. Perbaikan, karena penyusunannya mengalami perubahan pandangan atau penilaian dan peningkatan, karena penyusunannya telah lebih maju daripada sebelumnya.

Satu pokok sejarah yang ditulis oleh dua orang dengan pandangan berbeda-beda ialah misalnya tentang Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama tulisan Adam Malik berjudul "Riwayat Dan Perjuangan Sekiatar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" (1948, stensilan) sedang yang lain tulisan Sidik Kertapati "Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945". Yang pertama dari Partai Murba, yang kemudian dari Partai Komunis Indonesia. Buku pertama diterbitkan kembali dengan perbaikan, dan pula cetakan cetakan ke-3 nama bukunya pun berubah menjadi "Riwayat Prokalamsi 1945:, sedang judul mula-mula dicetak pada titelblad. Cetakan ke-3 ini diterbitkan pada tahun 1956. Buku yang kedua pun telah mengalami cetak ulang ke-3, 1964, dan di dalamnya banyak didapatkan tambahan-tambahan yang penting dan menarik.

Seorang penyusun sejarah, mungkin karena peningkatan mungkin pula karena perubahan yang terjadi dalam pandangannya atas garis sejarah ataupun mungkin juga pada filsafatnya, bisa membantah susunannya sendiri yang telah lalu. Hal demikian tidak perlu membingungkan, dan adalah wajar terjadi dalam kegiatan ilmu-ilmu sosial. Terutama dalam meningkatnya Revolusi Indonesia yang berwatak kiri, tidak jarang terjadi perubahan sikap dan pandangan orang-orang yang tadinya tidak mempercayai berhasilnya Revolusi Indonesia, kemudian menjadi sadar akan kekeliruannya dan menjadi kekuatan yang membantu Revolusi secara langsung. Perubahan demikian, yang mengakibatkan perubahan dalam karya-karya sejarahnya, tidak dapat dianggap sebagai kesalahan, justru harus dianggap sebagai kemajuan. Demikian pula hanya dengan yang sebaliknya. Tetapi apabila yang belakangan ini yang terjadi, maka karya sejarahnya dalam semangat demikian bukan saja harus dibendung, tetapi harus dilawan dan dibinasakan.

Disamping itu, apapun filsafat seorang penyusun, apapun metode penyusunan yang dipergunakannya, dan apapun sikap dan pandangannya, tidak ada karya sejarah yang dapat dikatakan sempurna, dan tidak ada yang dapat memuaskan semua dan setiap orang. Karena itu setiap orang yang mempelajari karya sejarah perlu sekali menyediakan pencadangan-pencadangan.

d) Sejarah dan Perbedaannya dengan Yang Lain-Lain

Berita, komentar pers, roman sejarah, memoar, mempunyai unsur-unsur dasar yang sama dengan sejarah, yaitu jawaban atas 5 pertanyaan : apa, siapa, mengapa, dimana, dan kapan.

Tetapi kesamaan unsur dasar tersebut, tidak menyebabkan mereka menjadi sama. Mereka tetap dan akan tetap berlain-lainan karena faalnya yang berlain-lainan. Berita berfaal mencatat suatu kejadian dalam masa hidup sendiri. Komentar pers berfaal mengedepankan pertautan dan perkembangan satu berita dengan berita lainnya serta menarik kesimpulan daripadanya, analisa dan interpretasi atasnya. Roman sejarah berfaal menghayati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sejarah tertentu dan ditulis dalam bentuk sastra. Memoar berfaal mencatat dan mengedepankan kenang-kenangan seseorang tentang peristiwa-peristiwa sejarah tertentu dan ditulis dalam bentuk sastra. Memoar berfaal mencatat dan mengedepankan kenang-kenangan seseorang tentang peristiwa-peristiwa yang dianggapnya penting dalam hidupnya yang disaksikan atau dialaminya sendiri dan sifatnya sangat pribadi. Sejarah berfaal mendekatkan orang pada masa lalunya sebagai makhluk sosial (jadi bukan hanya sebagai pribadi) untuk dapat mengenal kondisi, posisi dan situasinya pada masa kini, dan dengan demikian dapat menjuruskan dirinya dengan tepat pada masa depannya.

Yang hampir-hampir menyerupai sejarah adalah roman-sejarah. Tetapi walaupun bahan-bahan penyusunannya diambil dari sejarah, namun dia bukanlah sejarah, dia adalah roman. Sejarah adalah sejarah. Dalam roman-sejarah, imajinasi pengarangnya mengambil peranan yang menentukan, jadi bukan materi-materi sejarah itu. Indonesia mengenal banyak roman-sejarah tanpa kita harus membuat perbedaan dalam penilaian, seperti *"Si Oenteng" Melati van Java*, yang diindonesiakan oleh F. Wiggers dan roman sejarah semacamanya *"Untung Surapati"* dan *"Robert, Anak Surapati"* Abdul Muis, *"Pieter Eberfeld"* dan *"Sarah Specx"* Tio Te Soei, *"Zaman Gemilang"* Matu Mona, *"Tambera"* Utuy Tatang Sontani dsb.

Lebih mendekati sejarah daripada roman-sejarah adalah memoar atau buku kenang-kenangan. Indonesia mempunyai banyak memoar, hanya sifatnya sangat pribadi dan dilihat hanya dari jurusan penulis atau penyusun. Jadi dalam memoar yang penting adalah tantangan penulisan .... dalam .... yang penting adalah ... materi penyelidikan, penyimpulan serta analisa terhadapnya. Juga Indonesia telah menghasilkan banyak memoar, diantaranya yang terpenting adalah memoar dalam bahasa dan tulisan Jawa yang ditulis sekitar Perang Jawa (1825-1830) oleh Pangeran Diponegoro, memoar yang ditulis dalam bahasa Belanda sekitar kehidupan dan penggagasan kaum terpelajar Indonesia pertama-tama (1890-1904) berjudul *"Door Duisternis tot Licht"* tulisan R.A. Kartini, *"Indonesische Overpeinzingen"* (1945) tuisan Sjahrazad atau Sutan Syahrir, "Dari Penjara ke Penjara" I, II, II oleh Tan Malaka, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *"Out of Exile"* dan Indonesia dengan judul "Renungan Indonesia", *"Herinneringen"* oleh P.A.A. Djajadiningrat, "Tenangkan Hidup" oleh Hamka.

Walaupun memoar bukanlah sejarah yang sesungguhnya, tetapi lebih hanya himpunan tanggapan atau kesaksian atas sejarah dan karenannya bersifat sangat pribadi, namun bisa membantu penyusunan tulisan sejarah, lebih-lebih untuk mengenal situasi daripada masa

yang digambarkan dalam memoar itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka memoar harus dianggap sebagai sumber bahan bagi sejarah yang seyogyanya diperhatikan.

e) Peristiwa Sejarah & Peristiwa Bersejarah :

Apabila sejarah dapat diperbandingkan dengan rantai dan terdiri atas mata rantai-mata rantai yang ikat-mengikat, maka mata rantai-mata rantai tersebut, dinamai peristiwa-peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah adalah sebuah istilah yang telah mempunyai batasan tertentu. Karenannya adalah penting untuk dapat membedakannya daripada peristiwa bersejarah. Penjelasannya dapat diikuti sebagai berikut dibawah ini :

i) Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang menjadi titik tolak perkembangan sejarah sesudahnya, tapi dalam pada itu juga merupakan klimaks daripada perkembangan sejarah sebelumnya. Bila dipergunakan istilah dialektika, maka peristiwa sejarah adalah sintesa dari proses antara thesa dengan antithesa bagi masa yang telah lewat, dan kembali menjadi thesa bagi masa mendatang.

Dengan demikian setiap orang tanpa terkecuali tercakup dalam setiap mata rantai yang bernama peristiwa sejarah tersebut.

Pada bangsa-bangsa yang telah maju peristiwa-peristiwa sejarah biasanya diperingati, sedang pada bangsa-bangsa primitif menimbulkan mitos-mitos baru. Contoh-contoh dari peristiwa sejarah adalah : Kebangkitan Nasional, Pemberontakan Nasional I (atau Revolusi Nasional I) November 1926, Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 1945, Hari Pahlawan, Konferensi Asia Afrika I dsb.

ii) Peristiwa sejarah selamanya adalah peristiwa bersejarah, tetapi peristiwa bersejarah tidak selamanya peristiwa sejarah.

Peristiwa bersejarah adalah peristiwa yang penting untuk diingat tetapi tidak berfaat sebagai sintesa ataupun tesa di dalam sejarah. Peristiwa bersejarah bisa dikenang dan dikisahkan kembali sampai puluhan bahkan ratusan tahun lamanya, tetapi ia tidak menyebabkan terejadinya perubahan-perubahan sejarah sesuai dengan hukum dialektika. Peristiwa-peristiwa percintaan yang menarik dari bagian dunia manapun biasanya bernialai sebagai peristiwa bersejarah. Banyak diantara peristiwa-peristiwa ini telah digubah dalam bentuk prosa atau puisi dan makin hari makin luas dikenal orang.

Indonesia mengenal banyak sekali karya yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, terutama berpusat pada percintaan, misalnya *"Roro Mendut - Pronocitro"* dari Jawa Tengah, *"Djajaprana"* dari Bali, *"Bangsatjara-Bagapadni"* dari Madura. Dari masa yang lebih muda adalah *"Nyai Dasima"* karya G. Francis pada menjelang tutup abad ke-19. Avontur tidak jarang melahirkan peristiwa bersejarah pula, seperti avontur Matahari, yang dikenal luas oleh seluruh dunia. Matahari adalah wanita cantik yang menjadi mata-mata Jerman dalam Perang Dunia I, adan akhirnya ditembak mati oleh pihak Sekutu setelah diadili, dan ia adalah seorang keturunan Eropa kelahiran Priangan. Peristiwa ini juga telah menarik perhatian pengarang revolusioner Mas marco yang kemudian menuliskannya dalam roman *"Matahariah"*.

Baik peristiwa *"Roro Mendut-Pranacitra"*, *"Djajaprana"*, *“Bangsatjara-Ragapadni"*, *"Nyai Dasima"*, *"Matahari"*, bagaimanapun menariknya tidak akan dan tidak mengubah jalannya sejarah.

4. TAFSIRAN SEJARAH MENURUT MANIPOL

Manipol adalah program umum Revolusi Indonesia bagi semua kekuatan revolusioner yang ada dalam nasion Indonesia. Ia adalah landasan kegotongroyongan nasional revolusioner yang anti imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme dan feodalisme. Karena Manipol adalah program umum Revolusi Indonesia, maka semua ilmu sosial, termasuk di dalamnya sejarah, harus dilihat dan ditafsirkan melalui dan berdasarkan program umum ini. Ini berarti, bahwa sesuai dengan Manipol, maka naskah yang disusun ini menghindari kecenderungan untuk meninggalkan prinsip kegotongroyongan nasional yang revolusioner, tetapi tanpa meninggalkan kontradiksi-kontradiksi yang memungkinkan tesa dan antitesa bersintesa.

Manipol bersumber pada Dekrit Presiden tentang Demokrasi terpimpin pada Februari 1957 yang menolak liberalisme Barat atau liberalisme borjusi sebagai hasil dari Revolusi Prancis, dan undangan untuk kepada para Revolusi Indonesia sendiri, artinya pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena kemenangan Revolusi Indonesia adalah kemenangan Nasakom, dan karena Nasakom sebagai poros nasional terbentuk sebagai sintesa daripada kontradiksi-kontradiksi yang berlaku di dalam masa perjuangan kemerdekaan sejak Kebangkitan Nasional, maka juga berdasarkan Manipol, kontradiksi-kontradiksi dibagai atas dua bagian, yaitu kontradiksi pokok dan kontradiksi sampingan. Kekuatan-kekuatan di dalam gerakan kemerdekaan dinilai dari sikpa dan tindakannya dalam menggarap kontradiksi pokok. Kekuatan-kekuatan yang pada masa tertentu atau seterusnya menganggap atau lebih menganggap, bahwa kontradiksi sampingan adalah kontradiksi pokok, yang pada umumnya merupakan warna dan watak dari gerakan kemerdekaan, akan dinilai sebagai taraf-taraf dalam perkembangan. Dengan demikian semua kontradiksi sampingan akan ditampilkan sebagai kekeliruan dipandang dari sejarah gerakan kemerdekaan sebagai proses dan bukan sebagai penilaian ataupun hukuman.

Berhubung kontradiksi-kontradiksi sampingan dalam sejarah kita pada pokoknya sangat menguntungkan pihak imperalis, dan banyak menimbulkan bencana pada gerakan nasional itu sendiri, maka dalam sejarah seyogyanya dipelajari dengan seteliti mungkin untuk memahami kegagalan-kegagalan dari perjuangan itu atau memahami kemubazirannya. Bahkan dapat dikatakan terciptanya Nasakom sebagai poros kekuatan Revolusi Indonesia tidak lain daripada sintesis kontradiksi-kontradiksi sampingan yang terlalu banyak meminta korban tiada berarti, disebabkan kekuranganpahaman dalam mengenal kawan dan lawan perjuangan.[10]

Dengan demikian maka tafsiran menurut Manipol dibidang sejarah adalah juga tafsiran yang mengutamakan persatuan nasional yang demokratik dan revolusioner dengan menampilkan kontradiksi-kontradiksinya yang wajar, baik kontradiksi pokok maupun sampingan. Dengan demikian berdasarkan tafsiran Manipol, susunan sejarah akan menjadi berlebihan daripada dengan tafsiran liberal. Karena itu pula susunan materi sejarah dalam naskah ini barang tentu akan menjadi berlainan daripada susunan-susunan sebelumnya atau susunan yang dibuat sebelum adanya Manipol.

---

[10] Lihat juga : "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi", khusus tentang "Manifesto Politik Dengan Perinciannya" dan "Penjelasan Manipol/USDEK".

BAGIAN PERTAMA :

ZAMAN GELAP SEBELUM KEBANGKITAN NASIONAL

Zaman penjajahan Belanda di Indonesia sebelum Kebangkitan Nasional merupakan rimba belantara, sebagaimana dikatakan oleh Kartini, sedang *"Bumi putranya di dalam kegelapan, sebagai katak di dalam tempurung"*, seperti kemudian dikatakan oleh salah seorang pemuka Budi Utomo.

Berbagai penilaian tentang zaman ini telah diberikan baik oleh pihak Pribumi maupun pihak penjajah sendiri. Kedua macam penilaian itu didasarkan atas pandangan dan kepentingan mereka masing-masing, dan karena itu tidak akan sama. Bila bidang-bidang nampak adanya kesamaan penilaian, hal itu tidak karena adanya kesamaan dasar atau kesamaan kepentingan, dan hanya suatu kebetulan semata, karena antara yang diajah dan yang menjajah terdapat pertentangan kepentingan yang asli.

1. ADMINISTRASI

Sebelum masuknya penjajahan putih di Indonesia terdapat dua macam pemerintahan, yakni pemerintahan musyawarah di daerah-daerah yang tidak mengenal raja dan pemerintahan feodal dan pemerintahan feodal di tempat-tempat atau negeri-negeri diperintah oleh raja. Pada umumnya kedua-dua macam pemerintahan tersebut tidak dijalankan berdasarkan Undang-Undang tertulis, sekalipun Majapahit dimasa-masa jayanya yang telah memiliki berbagai Departemen yang membantu pekeraan perdana menteri Gadjah Mada.

Dalam pemerintahan feodal, negeri dibagi dalam wilayah-wilayah, dan setiap wilayah diperintah oleh Gubernur (Bupati), sedang Gubernur-Gubernur hidup di dalam tembok kota ibukota kerajaan, terkecuali bila ia telah dipercayai penuh oleh Raja dan diizinkan memerintah langsung di wilayah yang dikuasakan kepadanya.

Dalam sejarah Indonesia, pemerintah feodal yang berkembang sangat intensif terutama di Jawa. Perubahan-perubahan yang fundamental tidak pernah terjadi. Pernah terjadi suatu reformasi dalam pemerintahan feodal demikian, ialah pada waktu pertama-tama agama Islam menjadi agama negara di Jawa. Reformasi ini dimungkinkan dengan masuknya golongan tengah atau bojuasi ke dalam pemerintahan. Tetapi setelah golongan tengah yang masuk ke dalam pemerintahan lambat - laun berubah menjadi feodal juga, maka lenyap kembali akibat-akibat daripada reformasi tersebut. Demikianlah keadaan berjalan terus sampai Belanda menjajah seluruh Jawa dan Madura.

Dengan masuknya Kompeni (*OIC = Oost Indische Compagnie*) di pusat-pusat produksi dan menghimpun produksi (rempah-rempah, mendirikan benteng-benteng dan kemudian berkuasa disini, selanjutnya juga di daerah-daerah pedalamannya, pemerintahan-pemerintahan setempat lambat laun terdesak, dan jatuhlah kedaulatannya di tangan Kompeni.

Pada tahun 1602 Kompeni yang terdiri atas berbagai macam perusahaan yang persaingan satu dengan yang lain dipersatukan menjadi VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), dan sebagai badan perdagangan monopoli dari pemerintah Nederland mendaptan oktroi, dalam mana diakui hak-haknya akan kedaulatan di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Dengan hak-hak kedaulatan dimaksudkan :

a) hak untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi hak negara Belanda
b) hak mengumumkan perang yang menjadi hak negara Belanda,

c) hak membangunkan angkatan perang yang menjadi hak negara Belanda,
d) hak membangunkan perbentengan yang menjadi hak negara Belanda, dan
e) hak-hak lain yang menjadi hak negara Belanda,

sehingga dengan demikian Kompeni praktis telah menjadi pemerintah Nederland diatas tanah asing, dan karena hak-haknya tersebut telah menjadi pemerintah yang mempunyai kedaulatan penuh atas negeri-negeri asing yang dikuasainya.

Dalam menjalankan hak-haknya – benar sekali bahwa ia bertindak atas nama *Staten Generaal di Nederland* – dalam kenyataannya Direktorium Kompeni yang 17 itu (*De Keeren XVII*), yang mengemudikan Kompeni itulah yang lebih berkuasa daripada pemerintah Nederland di seberang lautan.

Negeri-negeri dimana Kompeni memerintah menyebabkan terjadinya administrasi kembar sedang Rakyat yang terperintah hidup dalam dua macam kekaulaan, yaitu :

a) kekaulaan sebagai Rakyat pembesar pribumi, dan
b) kekaulaan sebagai Rakyat taklukan Kompeni.

Kekaulaan rangkap ini diperberat oleh dua tugas kekaulaan, yaitu tugas Rakyat ada pembesarnya sendiri, dan tugas Rakyat taklukan kepada penakluknya, baik dalam bentuk harta-benda, tenaga maupun jiwa.

Kompeni untuk daerah jajahannya mengangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai kepala pemerintahan dan perdagangan. Ia juga menjabat sebagai Wakil Direktorium Kompeni yang berpusat di Nederland. Dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada hanya ia memerintah sebagai seorang Kaisar, dan dibantu oleh sebuah badan penasihat, yang bernama Raad van Indie atau Dewan Hindia.

Kedudukan Dewan Hindia adalah sebagai penasihat. Nasihat-nasihatnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak, didengarkan atau tidak, pada dan oleh Gubernur Jenderal, tergantung pada imbangan kekuatan antara yang belakangan ini dengan Dewan Hindia. Dalam abad pertama kekuasaan Kompeni di Indonesia, kekuasaan Dewan Hindia sangat menentukan, bahkan ada kecenderungan pada Dewan ini untuk memerintah dan menempatkan Gubernur Jenderal sebagai pejabat eksekutif tertinggi, yang harus melaksanakan keputusan-keputusannya. Pengumuman-pengumuman perang, ultimatum-ultimatum, perintah-perintah penyerbuan, pada masa itu ditentukan olehnya. Lambat laun Dewan ini mengalami kemerosotoan kewibaan, dan kemerosotan ini mencapati titik paling rendah dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch (1830-33) karena untuk dapat melaksanakan cita-citanya, ia membutuhkan keuasaan lebih besar, menolak rintangan-rintangan dari Dewan Hindia, sehingga Dewan ini kemudian tinggal menjadi sebuah badan pertemuan atau badan diskusi tanpa makna. Van den Bosch berlaku demikian untuk menyukseskan rencana-rencana yang telah disetujui oleh Raja Nederland, yakni *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa.

Gubernur Jenderal pada galibnya diangkat untuk waktu 4 atau 5 tahun. Beberapa kali terjadi ia diangkat dua kali berurutan atau berantara.

Dalam melakukan pemerintahan Gubernur Jenderal dibantu oleh sebuah sekretariat negara yang dinamai *Algemeene Secretarie*, dan berkedudukan di Bogor. Badan ini menjadi penghubung antara pemerintahan dan pejabat-pejabat dengan Gubernur Jendral antara Jawatan dengan Jawatan, dan juga antara Dewan Hindia dengan Gubernur Jenderal. Dengan

demikian praktis yang memerintah Indonesia dalam penjajahan Belanda sebelum abad ke-20 adalah *Algemeene Secretaris*, atau Sekretaris Negara.

Karena sebelum ada ke-20 pemerintahan dilakukan langsung oleh Gubernur Jenderal sampai ke distrik-distrik, maka praktis *Algemeene Secretaris*lah yang mengendalikan pemerintahan tanpa sesuatu pengawasan. Urusannya meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, politik, sampai-sampai urusan keluarga bangsawan tinggi Pribumi dan hartawan-hartawan dari segala bangsa, dan kemudian dengan sendirinya juga kemiliteran. *Algemeene Secretaris* menjabat pangkatnya untuk waktu yang tidak ditentukan sampai ia dibebaskan dari tugasnya, baik karena pensiun, meninggal atau karena dipecat.

Karena Gubernur Jenderal diangkat untuk waktu tertentu, sedang *Algemeene Sekretaris* tidak, dan kadang-kadang menjabat pekerjaannya sampai belasan bahkan dua puluhan tahun, maka yang belakangan inilah pada umumnya yang menentukan politik seorang Gubernur Jenderal, terkecuali bila ia mempunyai pengetahuan, wawasan dan kepribadian sendiri yang luas dan kuat. Surut naiknya kewibawaan Dewan Hindia sebagian terbesar berasal dari kebijaksanaan *Algemeene Secretaris* pula. Maka dengan adanya kekuasaan sangat besar diluar ketentuan hukum, tanpa pengawasan, ia berada dipuncak pemerintahan sebagai semacam perdana menteri. Hal ini memungkinkan setiap *Algemeene Secretaris* pulang kembali ke negerinya sebagai hartawan besar.

Waktu VOC jatuh bangkrut dan segala hutang piutangnya diambil alih oleh Raja Belanda, sebagai kelanjutannya, maka Indonesia menjadi milik pribadinya. Tetapi perubahan ini yang fundamental tidak terjadi dalam administrasinya di Indonesia. Ini terjadi pada tahun 1799. Tetapi dengan dimulainya desentralisasi kecil (1903), kekuasaan *Algemeene Secretaris* mulai berkurang, dan kekuasaan ini merosot menjadi pejabat yang wajar setelah didirikannya *Volksraad* paa tahun 1918.

Baik dalam masa kekuasaan Kompeni maupun masa pemerintahan Hindia Belanda, pelaksana pemerintahan adalah kaum feodal Pribumi. Yang demikian terus berlangsung sampai diadakan perombakan-perombakan oleh van Heutsz, sewaktu jadi Gubernur Jenderal (1904-1909). Tetapi perombakan-perombakan tersebut, tidak mengubah pemerintahan yang terdiri atas dua lapisan, yakni pemerintahan Eropa dengan hukumnya dan pemerintahan Pribumi dengan hukumnya. Antara dua macam pemerintahan ini diadakan pejabat penghubung (komisaris) yaitu : kontrolir, dan dalam pemerintahan kedudukannya berada dibawah Asisten Residen. Tugas kontrolir selain jadi penghubung juga menjadi penasihat pemerintahan Pribumi yang dikepalai oleh Bupati, dan pihak kolonial suka menyatakan, bahwa kedudukan kontrolir adalah seperti kedudukan seorang "saudara tua" bagi pejabat tinggi Pribumi yang memerintah diluar swapraja. Tetapi karena pejabat-pejabat tinggi Pribumi tidak mengikuti kemajuan dunia, lama-kelamaan kedudukannya terdesak oleh kontrolir didaerahnya masing-masing, sehingga lambat laun kontrolir mendapatkan kekuasaan-kekuasaan yang lebih banyak dan lebih konkrit.

Dalam pemerintahan Pribumi, Bupati menduduki tempat tertinggi. Ia memerintah daerah dan Rakyat yang berada dalam kekuasaanya sebagai seorang Raja kecil. Kabupaten – atau tempat tinggal Bupati – menjadi pusat pemerintahan wilayahnya masing-masing. Pada umumnya Kabupaten menduduki tempat yang lebih besar daripada kantornya, sebagai lambang lebih pentingnya Bupati daripada alat pemerintahannya. Terkecuali orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, berada dibawah perintah Bupati.

Susunan pemerintahan demikian dapat digambarkan sebagai garis vertikal dengan Raja atau Ratu Belanda menduduki tempat puncak, dibawahnya Gubernur Jenderal, selanjutnya

dibawahnya terdapat cabang dua garis kebawah. Satu cabang adalah pemerintahan Eropa, sedang cabang yang lain pemerintahan Pribumi. Dalam pemerintahan Pribumi, Bupati menduduki tempat paling atas, dibawahnya pemerintahan Pribumi. Landasan tempat garis vertikal ini berdiri adalah masyarakat petani, atau masyarakat agaria. Diluar garis vertikal ini terdapat kekuatan lain, yaitu golongan tengah atau golongan borjuasi, yang berada diluar garis itu, tidak ikut terkena hisapan pemerintahan Hindia Belanda.

2. MASYARAKAT AGRARIA

Masyarakat agraria merupakan basis dari pemerintahan kolonila Hindia Belanda. Ini berarti, bahwa penjajahan Belanda dimungkinkan karena bisanya petani dihisap untuk membiayai kepentingan Belanda dan alat-alat yang diperlukan dalam melakukan penghisapan itu, yaitu pemerintahan kolonial.

Dalam melakukan penghisapannya, pemerintah kolonial mempergunakan berbagai cara, yang menjadi bagian daripada sistem penghisapannya. Cara-cara ini antara lain adalah : a) rodi atau gawai-raja, b) pajak-pajak, c) perampasan-perampasan milik pribadi atau kolektif dari petani, dan d) lain-lain kewajiban yang dibebankan pada petani.

a) Rodi :

Rodi atau gawai-raja – di beberapa tempat tertentu dinamai juga kompenian – berasal dari sistem administrasi sebelum masuknya penjajahan putih di Indonesia, kemudian diambil alih dan diteruskan oleh pemerintah kolonial.

Dalam Artikel 57 *Regeering Reglement* (R.R.) disebutkan, bahwa "dalam tiap-tiap negeri adaya dan lamanya pekerjaan, yang anak Bumiputera diwajibkan memikul, diatur oleh Sri Paduka Yang Dipertuan G.G. (*Gouverneur-Generaal*) menurut adat kebiasaan serta perlunya", sebagai ketetapan pemerintah, yang memindahkan hak akan rodi dari pembesar-pembesar Pribumi menjadi hak pemerintah Hindia Belanda.

Aturan tentang rodi di dalam penjajahan Belanda diperiksa setiap 5 tahun sekali, yang dilakukan setelah dihapuskannya Tanam Paksa secara perlahan-lahan (1870), tanpa mesti menghasilkan perbaikan atau perubahan yang menguntungkan pihak petani.

Rodi terutama dan khususnya dikenakan pada gogol – yaitu petani-petani yang menggarap tanah pemerintah – selama 42 hari dalam setahun, sedang pemerintah mendapat tanah ialah dengan jalan merampasnya dari petani dengan mempergunakan undang-undang. Menurut perhitungan tahun 1908, [1] jumlah gogol di Jawa dan Maduara dalah sejumlah 2.000.000 orang. Maka apabila upah kerja mereka dihargai sebnayak ƒ0,25 dalam sehari, maka kaum gogol dalam tahun 1908 itu saja telah menyerahkan uang pada pemerintah kolonial sebanyak 42 x 2.000.000 x ƒ0,25 + = ƒ21.000.000, atau ƒ59.000 dalam sehari. Uang yang dibayarkan pada pemerintah dalam bentuk kerja ini sama harganya dengan 1/3 dari seluruh Anggaran Belanda Hindia Belanda bila diperhitungkan tanpa adanya Perang Aceh. Hanya saja nilai dari pekerjaan rodi dalam bentuk uang tidak pernah diperhitungkan dalam anggaran belanja pemerintah pusat ataupun pemerintahan setempat.

Dalam peraturan rodi dimasukkan juga pekerjaan keprajuritan sebagaimana secara tradisi diwariskan oleh pemerintahan feodal sebelum penjajahan. Dalam *Staatsblad 1891 no. 248* antara lain ditetapkan dalam *Artikel*, bahwa disamping, a) membikin, membetulkan dan

---

[1] MEDAN PRIJAJI III/7, “Dari Hal Pendjaganja Negeri pada Heerendienst jang Tida Sah”, hlm. 67-75.

memelihara jalan besar, jembatan, ipeng, (dikecualikan jembatan ipeng yang ada di ibukota karesidenan), bendungan, irigasi, tanggul, b) menjaga gardu, c) menjaga pengairan, adalah tugas-tugas keprajuritan, d) membawa orang dan prajurit dan barang-barangnya seperti tersebut dalam ordonansi *Staatsblad 1875 no. 110* apabila tidak tersedia kuli bayaran, maka mereka dibayar menurut bayaran yang sudah ditentukan. Walaupun di dalam peraturan teresebut, disebut tentang "bayaran", namun dalam praktek mereka tidak mendapat sesuatupun, dan bila didalam buku, toh dikeluarkan bayaran, uang tersebut, bukan petani yang menerima.

Lama kerja rodi yang ditetntukan adalah 12 jam sehari, sedang dalam Ordonansi tersebut, ditambahkan, bahwa perodi yang tinggal lebih dari 8 paal dari tempat pekerjaan – atau 2,5 jam perjalanan – harus mendapat pembenaran dari Gubernur Jenderal. Ketentuan-ketentuan mengenai jam perjalanan ini perlu dikemukakan disini, karena dalam kerja rodi jam perjalanan tidak dianggap sebagai jam kerja.

Disamping rodi para petani terkena pula pekerjaan desa ditempat tinggalnya masing-masing, yang tidak dapat dianggap sebagai rodi karena buat kepentingan masyarakat desanya sendiri, sedang untuk masyarakat desanya sendiri tidak dapat dikatakan untuk negeri atau untuk pemerintah.

Pemerintah kolonial merasa perlu mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menertibkan rodi dalam rangka mengurangi dan menghapuskan kekuasaan pembesar-pembesar Pribumi, dalam rangka untuk memerintah secara langsung penduduk tanpa melalui kekuasaan para Bupati, atau dalam rangka melenyapkan *soūzereinita* yang diberikannya pada kaum feodal, atau dalam rangka membangunkan imperialisme modern.

Pengaturan-pengaturan tentang rodi terutama berasal dari gugatan-gugatan Mulatuli dalam karya *"Max Havelaar"*, dimana dilukiskan kebengisan pembesar-pembesar setempat dalam memperlakukan rodi buat kepentingannya sendiri secara berlebih-lebihan. Ini bukan berarti para petani mendapat keringanan dalam hal wajib rodi, hanya, apabila tadinya untuk kepentinga para pembesar Pribumi, kini adalah untuk pemerintah kolonial. Dalam rangka untuk membuat hak rodi menjadi milik pemerintah, pada tahun 1877 pemerintah kolonial memerintahkan kepada pejabat-pejabat bangsa Eropa untuk menahan kesukaan para Bupati dalam mengadakan pesta-pesta pada kesempatan kenaikan pangkat, perkawinan, khitanan dsb, yang menyebabkan bukan saja para Bupati itu tertimbun hutang tetapi terutama sekali hari-hari rodi petani itu menjadi lebih daripada semestinya, sedang bahan-bahan untuk pesta-pesta itu petanilah yang menyediakan.

Pada tahun 1905 pemerintah kolonial membuat peratutan baru tentang rodi, yaitu memperbolehkan petani-petani secara sedesa-sedesa menebus rodi mereka dengan uang. Peraturan ini terutama sekali dikenakan pada daerah-daerah subur yang menjadi daerah industri (terutama industri gula) atau di desa-desa perikanan yang kaya. Uang tebusan rodi ini kemudian menjadi pelopor daripada pajak kepala atau pajak patak.

Hapusnya rodi di berbagai tempat mendorong para petani untuk memiliki uang kontan guna pembayar pajak kepala, dan dengan demikian di dalam masyarakat agraria tumbuh suatu semangat, yang tidak muncul sebelumnya, untuk melakukan kerja guna mendapatkan upah atau untuk melakukan kerja-upah, sedang proses selanjutnya adalah proletariatisasi petani. Kerja-upah bukan saja mengakibatkan terjadinya urbanisasi, juga mempengaruhi peredaran uang, mengurangi tradisi desa yang kurang mempunyai kontak dengan dunia luarnya, menambah jumlah kekayaan masyarakat dengan adanya dan diadakannya kerja-kerja baru, juga mempengaruhi struktur dari kehidupan desa.

Menurut laporan resmi, rodi secara berangsur-angsur dihapuskan, dan akhirnya dinyatakan hapus pada tahun 1916. Tetapi sampai dalam waktu sesudah itupun baik dari pers maupun dari perdebatan-perdebatan di dalam *Volksraad* dapat diketahui, bahwa rodi masih berjalan sepenuh-penuhnya di daerah-daerah terpencil baik di dalam maupun di luar Jawa dan Madura.

Tindakan resmi pemerintah kolonial dalam menghapuskan rodi bukanlah pemurahnya kepada kaum tani, tetapi karena rodi tidak menghasilkan lebih banyak uang masuk untuk kas pemerintah, berhubung dengan makin berkembangnya kapital monopoli yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja bebas. Melalui kerja upah pemerintah secara tidak langsung bisa menerima penghasilan lebih banyak daripada rodi.

Inti daripada rodi adalah perampasan waktu dan tenaga kerja petani. Walaupun secara resmi telah diambil alih oleh pemerintah kolonial, dalam praktek sampai tutup abad ke-19, kaum tani mengalami penderitaan lebih banyak, karena apabila tadinya hanya pembesarnya sendiri yang berhak atas rodi, kini pemerintahpun berhak, sehingga karena kurangnya kontrol sosial serta susunan feodal yang menempatkan pembesar-pembesar pada tempat yang tiada tergugat di daerahnya masing-masing kaum tani harus menjalani rodi dobel. Bahkan sampai Lurahpun tidak jarang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan rodi pula, adapula pejabat-pejabat kecamatan.

Pada umumnya rodi dapat dikatakn tidak pernah mengakibatkan terjadinya pemberontakan tani. Yang menyebabkan pemberontakan-pemberontakan tani pada umumnya adalah perampasan-perampasan tanah dan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat setempat. Sampai dengan terjadinya reformasi pemerintahan pada awal pelaksanaan politik etis (1904-1909), pemberontakan-pemberontakan tani dengan mudah dapat dipadamkan karena pemberontakan-pemberontakan bersifat sangat setempat dan tiada terpimpin dengan baik, dengan menyadangkan satu kekecualian, yaitu pemberontakan dan perlawanan kaum Samin yang memakan waktu lebih dari setengah abad, baik dalam bentuk kekerasan maupun satyagraha. Sedang pemberontakan tani terpenting pada sekitar penutup abad ke-19 ialah pemberontakan petani Cilegon, sekalipun alasan yang dipergunakan untuk memberontak adalah bersifat keagamaan.

Dalam pemerintahan Raffles untuk pertama kali rodi dinyatakan hapus berdasarkan ketetapan, bahwa siapapun tidak boleh dikenakan kerja berdasarkan paksa. Tetapi setelah pemerintahan Inggris di Jawa kembali ketangan Belanda, ketetapan tersebut dibatalkan, dan rodi berlaku lagi seperti sebelumnya.

Pada tahun 1818 pemerintah kolonial mengeluarkan R.R. yang dalam Artikelnya bernomor 108 dinyatakan, bahwa sedikit atau banyak tidak mengakui rodi sebagai hak siapapun juga terkceuali negeri. RR ini kemudian diperbaiki pada tahun 1827, 1836 dan 1880, sekalipun praktis tidak berjalan, karena sampai dengan menjelang Kebangkitan Nasional, baik negeri maupun pejabat-pejabat Pribumi setempat masih melakukan perampasan waktu dan tenaga kerja petani dalam bentuk rodi yang itu juga. Para pejabat yang paling banyak menggunakan rodi ialah mereka yang disamping menjadi penjabat negeri juga menjadi tuan tanah besar atau kecil, dan yang demikian telah merupakan kelaziman, sehingga birokrat dan feodal sebelum Kebangkitan Nasional hampir-hampir dapat disebut dengan satu nafas.

Disamping itu pembesar-pembesar Pribumi setempat tidak jarang menjual rodi dari desa-desa tertentu buat kepentingan kapital asing, misalnya Tionghoa, Arab dan Eropa. Kejadian-kejadian semacam ini mencapai puncaknya yang paling menyedihkan dalam masa

pemerintahan Daendels, karena dalam masa pemerintahannya pemerintah mulai menjual atau menyewakan desa-desa yang berada di perbatasan kota serta tanah-tanah, yang tidak jelas pemiliknya menurut kesimpulan pemerintah, kepada kapital swasta dengan harga rendah. Untuk memberikan kesempatan agar kapital tersebut bisa menghasilkan diatas tanah yang telah disewa atau dibelinya, petani-petanilah yang dikerahkan untuk usaha itu. *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa [2] adalah perampasan-perampasan yang disistemkan oleh pemerintah kolonial. Dalam masa Tanam Paksa ini petani-petani dari tanah partikelir – yaitu tanah-tanah yang telah dijual oleh Daendels – pada umumnya mengalami perampasan-perampasan berlipat ganda, pertama perampasan yang dilakukan oleh pembesar Pribumi, kedua oleh negeri, dan ketiga oleh tuan tanah.

Mengikuti jejak Daendels dalam melakukan perampasan-perampasan tanah, waktu serta tenaga kerja petani, pada tahun 1819 dikeluarkan *Staatsblad no. 10*, yang antara lain menyatakan, bahwa karena Pribumi belum mempunyai pengertian dalam hal perjanjian-perjanjian dengan bangsa/kapital asing, maka hak mereka untuk mengadakan perjanjian tersebut, tidak diakui, maka :

a) segala perjanjian harus dimasukkan ke dalam register karesidenan,
b) dilarang membuat perjanjian dengan desa atau kepala desa,
c) dilarang membikin surat perjanjian lebih lama dari setahun,
d) Residen diwajibkan memperhatikan alasan-alasan perjanjian,

maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, praktis setiap perjanjian antara petani Pribumi dengan bangsa/kapital asing dipengaruhi oleh kebijaksanaan Residen. Dan ini tidak lain artinya daripada semakin memudahkan terjadinya perampasan-perampasan tanah lebih lanjut. Setiap perampasan tanah akan segera diikuti oleh datangnya panggilan rodi. Dengan demikian petani yang telah dirampas tanahnya tersebut harus melakukan kerja paksa diatas tanah yang tadinya miliknya sendiri, dan dengan hasil yang sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan dirinya atau keluarganya.

Perampasan-perampasan yang dilakukan atas petani pernah menyebabkan ethikus Belanda Baron van Hoevell, sebagai anggota Parlemen Nederland, membuka perdebatan tentang tidak efektifnya peraturan dan ketetapan-ketetapan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya perampasan dalam bentuk rodi tersebut dengan jalan mengusulkan agar pegawai-pegawai negeri dinaikkan saja gajinya.

Disamping rodi yang lazim, dalam kehidupan petani masih terdapat "rodi ketjil", yaitu ketentuan feodal yang mengharuskan seseorang melakukan kerja paksa pada perseorangan pada siapa ia tidak dapat melunaskan hutangnya. Ketentuan feodal ini bersifat menurun, artinya apabila orangtua dalam melakukan "rodi ketjil" atau kerja paksa tersebut, tenaganya belum juga cukup sebagai pembayar hutang, dan ia terburu meninggal, maka anaknyalah yang meneruskannya. Untuk waktu yang sangat lama *Raad Sambang* atau pengadilan keliling merupakan kekuatan hukum sah yang membenarkan "rodi ketjil" tersebut.

Rodi merupakan aniaya luar biasa kejamnya terhadap para petani Pribumi, terutama terhadap gogol. Ia tidak hapus di desa-desa terpencil sebelum tercapainya kemerdekaan nasional. Namun rodi bukanlah satu-satunya bentuk aniaya bagi petani. Ia hanya satu macam dari bentuk-bentuk aniaya yang ada dalam masyarakat feodal kolonial.

---

[2] Lihat Bung Karno : *"Indonesia Menggugat"*

Pemerintah kolonial hidup justru dari sistem eksploitasi yang intensif atas bumi dan manusia Indonesia. Rodi sebagai warisan sistem eksploitasi feodal yang tradisional, telah ikut memperkuat kedudukan penjajah, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Menteri Jajahan Baud, bahwa kaum feodal Pribumi dan otonomi desa adalah dasar daripada penjajahan Belanda di Indonesia.

Dalam masa berkembangnya imperialisme modern, rodi dianggap kurang efisien, karena kurang mendatangkan keuntungan. Mereka yang terkena rodi tidak mempunyai rangsang kerja untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, dan dengan demikian pajak yang bisa dipungut dari mereka pun kurang memuaskan.

Surat kabar *"Handelsblad"* dalam tinjauannya tentang ekonomi pada akhir tahun 1899 menilai rodi sebagai sistem kerja *"uit economisch oogpunt hoogst nadeelig"* atau bahwa "dipandang dari sudut ekonomi sangat merugikan", maksudnya "sangat merugikan bagi kapital monopoli yang sedang-sedangnya berkuasa di Indonesia. Mudah sekali untuk memahami alasannya, ialah karena rodi adalah urusan negeri, bukan urusan kapital monopoli. Tetapi rodi itu sendiri adalah salah satu modal utama dari pemerintah kolonial. Bukti bagaimana negeri tidak rela melepaskan rodi apabila petani tidak menebus dengan uang dapat dilihat dari perhitungan dagang yang ditawarkan pada penduduk Madura pada akhir abad ke-19 oleh Residen. Pejabat belakangan ini menyatakan, bahwa petani Madura bisa dibebaskan dari rodi, bila mereka mampu menggantinya dengan pajak kepala sebanyak ƒ1, sampai ƒ1,50 seorang untuk setahun. Sebagaimana diketahui, Residen mempunyai wewenang apakah rodi didaerah kekuasaannya cukup tidak merugikan negeri bila dihapuskan pada galibnya dinyatakan bahwa "pemerintah yang adil bermaksud mengurang kewajiban-kewajiban penduduk...." dsb. dsb.

b) Perampasan Tanah :

Penjajahan adalah perampasan kemerdekaan, dan perampasan kemerdekaan bagi penjajah menjadi permulaan daripada perampasan-perampasan lain, terutama yang merupakan sendi perekonomian Rakyat yang dijajahnya. Demikianlah pada tahun 1867 pemerintah Nederland telah mengangkat sebuah Komisi yang bertugas menyelidiki kedudukan dan hak-hak petani jajahannya di Indonesia. Keputusan-keputusan Komisi ini antaranya ialah, bahwa : semua tanah Hindia Belanda adalah milik negara terkecuali tanah-tanah hak milik (*eigendom*). Keputusan ini ditentang oleh ethikus van Volenhoven dengan tiada menghasilkan sesuatu. Keputusan ini merupakan pembuka jalan bagi perampasan-perampasan tanah buat kepentingan modal asing yang akan membuka perkebunan-perkebunan besar di Indonesia *"Agrarische Wet de Waal"* dan *"Domein Verklaring"*. Yang pertama mengandung ketentuan pemberian hak pada modal asing swasta untuk membuka perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan-perkebunan di Indonesia dengan jalan menyewa tanah secara erfpacht buat selama 75 tahun, sedang yang kedua menyatakan, bahwa semua tanah yang dengan langsung dikuasai oleh Gubernur Jenderal menjadi *"staatsdomein"* atau milik negara (pemerintah).

Dengan keluarnya *"Agrarische Wet de Waal"* dan *"Domein Verklaring"*, mulai tahun 1870 dapatlah Tanam Paksa dihentikan sedikit demi sedikit, dan justru kedua - duanya tersebut dikeluarkan untuk dapat menggantikan sistem eksploitasi Tanam Paksa yang sudah tidak dapat diperhatikan lagi itu, dan dengan demikian terjadilah penghisapan baru atas kaum tani, sehingga mereka diperas oleh, a) pemerintah kolonila Hindia Belanda, b) feodal Pribumi dan c) modal-modal monopoli swasta. Dan sebagaimana telah diterangkan pada pokok sebelumnya, petani-petani dari tanah-tanah partikelir yang paling menderita.

Di tanah-tanah partikelir petani diperlakukan sebagai penduduk sebuah negara miniatur di dalam penindasan yang besar. Tuan tanah - tuan tanah memerintah sebagai raja kecil dengan mendapatkan hak-hak kepolisian penuh sebagai komandan polisi untuk daerah yang dimilikinya. Ia berhak mendakwa, mengadili, dan menjatuhkan hukuman, bahkan juga sampai mati -- sekalipun banyak sekali perbuatan ini dilakukan dengan diam-diam untuk tidak menyebabkan banyak urusan dengan pembesar-pembesar di kota. Dalam pekerjaannya sebagai tuan tanah maupun sebagai komandan polisi ia dibantu oleh seseorang "tuan kuasa" atau disebut juga "tjutak", yang juga membantunya dibidang kepolisian. Berhubung kekuasaan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu dijalankan tanpa pengawasan, memudahkan tuan tanah melakukan kesewenang-wenangan, dan karena itu pula tanah-tanah partikelir merupakan bumi yang kaya daripada cerita-cerita pidana, sebagaimana dapat diikuti dalam novel-novel asimilatif karya Kommer, Wiggers, Francis, Pangemanann, Gouw Peng Liang, Tan Boen Kim, Kwee Tek Hoay, Tirto Adhisurjo, Hadji Mukti dll. Sedang pemberontakan tani yang mendarah, sekalipun bersifat sangat setempat, telah diabadikan oleh Pangemanann dengan karyanya *"Si Tjonat"* (1900), dengan catatan, bahwa pandangan politik dan sosial ekonomi pengarangnya belum bisa dipergunakan dalam ia menilai pemberontakan ini. Beberapa lakon lenong mengisahkan juga tentang pahlawan-pahlawan pemberontakan tani dari tanah-tanah partikelir ini diantaranya *"Si Puting"*, sedang dalam variasi yang agak lain adalah cerita ludruk berjudul *"Pak Sakerah"* dari Jawa Timur. Juga dalam lakon-lakon ketoprak kadang-kadang didapatkan cerita-cerita tentang pahlawan pemberontakan tani seperti *"Sondong Madjeruk"* yang pernah terjadi di daerah pesisir Utara Jawa Tengah, sedang pemberontakan/perlawanan tani yang paling lama terjadi ialah di daerah Blora, dan memakan waktu sejak keluarnya *"Agrarische Wet"* de Waal sampai tahun 1904, dan terkenal sebagai Pelawanan Samin.

Pemberontakan atau perlawanan-perlawanan tani disebabkan karena perampasan-perampasan tanah garapan sejak pemerintahan Daendels sampai lebih setengah abad kemudian, diperluas dengan campur tangan pemerintah kolonial melalui Undang-Undang *Agraria de Waal*, yang dengan terang-terangan merampasi tanah-tanah desa dan petani sepanjang pesisir utara Tanah Jawa dengan alasan, bahwa setiap perladangan yang digarap, secara roofbouw, dengan sendirinya jatuh ketangan pemerintah, karena tanah-tanah tersebut, tidak digarap secara permanen dan dianggap bukan tanah garapan. Ratusan ribu hektar tanah telah dirampas di daerah Jawa Tengah dan Timur, sedang para petani yang teraniaya itu dikarenakan rodi pula untuk menanami tanah yang dirampas mereka dengan jati. Hutan jati yang ditanami diatas tanah-tanah rampasan ini kemudian menjadi hutan larangan, dimana pemilik dan penanamnya, yakni para petani, tidak mempunyai sesuatu hak atas hasil hutan itu terkecuali atas daun-daunan dan ranting-ranting kayu yang jatuh atau mengering pada cabangnya, atau bila jati – yang biasanya masih muda - memang telah dia pikir untuk menyelamatkan pohon-pohon jati lainnya yang dianggap mempunyai pertumbuhan sebagaimana diharapkan. Malahan, apabila suatu kali seekor burung menjatuhkan benih ? dibelakang rumahnya, dan 40 tahun kemudian pohon itu menghancurkan teratainya, iapun tidak mempunyai hak menebangnya terkecuali dengan izin pembesar di tempat, dan pembesar setempat mendapat ijin dari Gubernur Jenderal.

Hutan-hutan jati di Jawa, yang ditanam diatas tanah rampasan berdasarkan Undang-Undang *Agraria de Waal* ini mengambil tempat rata-rata 2,5 dari wilayah menurut pembagian administrasi Hindia Belanda dimana hutan-hutan itu ada. Dan karena bagusnya, oleh ahli-ahli kehutanan dunia dinilai sebagai taman-taman terindah di dunia.

Dengan masuknya modal-modal perusahaan pertanian swasta yang besar dan bersifat monopoli, hutan-hutan desa – artinya bukan hutan pemerintah – praktis jatuh ketangan

mereka. Dengan terjadinya perampasan ini peternakan-peternakan besar di Pasundan, yang pada mulainya milik perseorangan atau desa, menjadi binasa atau dibinasakan,[3] dengan jalan menyebarkan racun pada sumber air tempat ternak tersebut minum. Maka dengan masuknya modal pertanian swasta monopoli ini berarti juga Tanah Jawa berhenti sebagai pengekspor ternak yang besar di Asia.

Dengan bermulanya pelaksanaan politik etis dalam pemerintahan van Heutsz, maka pada tahun 1905, pertanian dibagi atas 2 bagian, yaitu :

a) yang diusahakan oleh modal asing besar yang semakin maju, dan
b) yang diusahakan oleh Pribumi yang semakin terdesak

Dibidang agraria garapan politik etis terutama adalah irigasi, yang katanya untuk meningkatkan taraf hidup Rayat kecil. Ternyata bahwa pelaksanaan irigasi juga tidak kurang-kurangnya merugikan petani. Irigasi dibangunkan berdasarkan sistem kerja rodi itu bukan saja mengambil tanah petani, juga, bila irigasi telah jadi, para petani harus membayar pajak lebih tinggi, dan bila irigasi itu kemudian terletak di daerah pabrik gula, pertama-tama pengairannya harus diperuntukkan kebun-kebun tebu pabrik-pabrik gula itu, dan bila sudah barulah petani-petani boleh mendapat bagiannya. Sebaliknya bila niveau (level) air tinggi, kebun-kebun tebulah yang kecil. Disamping itu mereka masih terkena wajib memelihara selokan penyairan serta tanggul-tanggul apabila mengalami kerusakan, baik karena sudah tua, rusak karena hujan atau karena gangguan ketam dan tikus.

Perampasan tanah oleh pemerintah Hindia Belanda diperluas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad 1879 no. 279*, yang memberikan hak kepada pemerintah kolonial untuk merampas tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan akan hak miliknya. Untuk dengan cepat bisa melakukan perampasan-perampasan ini pemerintah menugaskan pejabat khusus untuk mencatat tanah yang tidak tergarap dan menyatakan tidak dimiliki oleh siapapun sebagai alasan untuk dapat merampasnya.

Perampasan-perampasan tersebut secara langsung telah mengubah kemampuan desa menjadi sedemikian kecilnya, basis ekonominya menjadi sempit, yang mempengaruhi perkembangan petani dibidang materiil dan sprirituil. Sedang *Staatsblad-Staatsblad* yang dibuat untuk melakukan perampasan-perampasan tanah tersebut pada uumnya tidak lain daripada hasil kompromi antara pemerintah Nederland dengan modal-modal pertanian besar untuk dalam waktu yang cepat dan biaya murah dapat mengambil alih perusahaan-perusahaan pertanian pemerintah dan menambahnya dengan pertanian-pertanian yang dimiliki Rakyat. Perampasan-perampasan tanah ini juga terjadi dengan hebat di Minahasa, dimana dipergunakan sistem pertanian *djorame* atau *roofbouw*, yaitu membiarkan tanah ditumbuhi semak-semak selama 6 sampai 8 tahun sesudah ditanami selama 2 tahun berturut-turut. Persekongolan-persekongkolan antara pejabat-pejabat Eropa dan Pribumi hampir selamanya menjadi biang keladi daripada menambahnya perampasan-perampasan tersebut. Dan dalam kejadiannya ini mereka mendapat perlindungan dari pejabat tinggi yang mempunyai kedudukan didekat Gubernur Jenderal, terutama yang bersarang pada *Algemeene Secretarie*.

Perampasan tanah ini diulangi kembali dalam tahun 1896 berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, setelah pemerintah Nederland membuat persengkokolan dengan modal

[3] Interpiu (1955) dengan seorang tua, yang meneruskan cerita kakeknya kepada penyusun. Pada waktu itu orang tua tersebut, berumur kurang lebih 75 tahun, berasal dari daerah Tasikmalaya.

pertambangan swasta. Pada pokoknya Undang-Undang Pertambangan ini diadakan untuk memungkinkan dibukanya konsensi-konsensi tambah minyak sebagai usaha baru yang mendatangkan keuntungan luar biasa. Dalam hubungan dengan perampasan tanah baru ini, seorang kepala sebuah negeri di Minahasa – sebagaimana dilaporkan oleh Ir. H.H. van Kol dalam Parlemen di Minahasa – telah menyatakan protes dengan mengatakan kepada bangsa Belanda, "bahwa kalian, orang-orang Belanda, kalian telah hukum pencuri-pencuri kami dihadapan pengadilan kalian apabila mereka mencuri padi sekedarnya dari ladang-ladang kami, tapi tanpa hukuman sesuatupun kalian sendirilah yang mencuri tanah-tanah dan ladang-ladang kami buat menjadi hak kalian".[4]

Disamping perampasan-perampasan tanah berdasarkan kekuasaan kolonial, masih terdapat perampasan-perampasan lain dalam bentuk pengambil alihan hak guna atas tanah-tanah garapan petani dalam bentuk persewaan terutama untuk areal-areal tebu, yang dilakukan oleh pabrik-pabrik gua dengan sangat agresif dan dengan menggunakan kekuasaan administrasi setempat-setempat. Hasil yang diperoleh para petani dari sewa tanahya dari pabrik tebu adalah dibawah penghasilannya sendiri bila tanah itu ditanaminya, sehingga akibatnya ialah mendorong mereka jauh ke dalam kemiskinan dan kemelaratan. Dalam pada itu, dimasa musim sewa tanah masuklah unsur-unsur destruktif dari kota, baik unsur itu berbangsa Pribumi, Tionghoa maupun Arab atau Eropa. Kerusakan pada lembaga-lembaga desa segera terjadi. Dalam pada itupun ketiadaan atau kurang kerja tidak jarang menjadi sumber peluang bagi pemerintah setempat untuk menggerakkan rodi lebih banyak serta pemungutan pajak panggaotan dengan lebih intensif.

c) Pabrik Gula Kontra Petani :

Berbeda dari perkebunan-perkebunan untuk tanaman keras atau setengah keras, perkebunan tebu membutuhkan waktu beberapa bulan saja, dan karenanya membutuhkan tempat-tempat yang terjamin pengairannya. Areal-areal tebu selamanya mendesak sawah-sawah yang sudah ada sebelumnya. Maka dimana kebun tebu mendesak persawahan, disana muncul kekurangan beras. Tetapi pabrik gula tidak membutuhkan beras. Mereka membutuhkan keuntungan dipasar dunia, sedang beras untuk penduduk bisa diimpor dari tempat lain. Maka juga dengan mulai masuknya kapital gula, pada waktu itu juga mulailah Indonesia mengalami kekurangan beras, bahkan kemudian mengimpor, dan dengan demikian negeri yang secara tradisional menjadi pengekspor beras ke Asia Tenggara ini kemudian menjadi pengimpor. Lambat laun dengan makin banyaknya areal padi didesak oleh tebu, ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin keras Indonesia tergantung pada impor beras.

Pemerasan terhadap petani yang dilakukan oleh pabrik gula ini dapat dilihat dari jumlah sewa tanah untuk setiap bahu. Tanah yang disewa oleh pemerintah kolonial untuk perusahaan-perusahaan pertanian negara pada tahun 1879 adalah ƒ43,50. Sebelum itu, pada tahun 1872, van Lennep dalam "Nota"nya kepada pemerintah telah menyampaikan laporan tentang ratap tangis petani yang tanahnya disewa dengan paksa oleh pabrik-pabrik gula, yang jumlah sewanya adalah lebih rendah daripada sewa dari pemerintah. Pemerasan ini dimungkinkan karena adanya persekongkolan-persekongkolan setempat antara pabrik gula dengan pangreh praja baik berbangsa Eropa maupun Pribumi. Sewa tanah pada tahun 1911 dari pabrik-pabrik gula telah sedemikian merosotnya sehingga tinggal ƒ38,75 sebahu, dan itupun telah dianggap naik dalam waktu 10 tahun belakangan sebelum 1911. Menurut

[4] INDISCHE GIDS XXI/1899, R.A. van Sandick : "De Bevolking van Minahasa en de Domeinverklaring van 'raakliggende Gronden" (hlm. 385-392).

perhitungan ahli-ahli Belanda, sewa tanah yang patut pada tahun-tahun itu ialah ƒ80, -sebahu, sedang wakil Sindikat Gula, Ramaer mengakui, bahwa sewa yang patut adalah antara ƒ70, - sampai ƒ80. Maka apabila dihitung secara kasar, pemerasan atas kaum tani oleh Sindikat Gula telah mendatangkan untung sebesar 50% dari sewa tanah saja. Menurut perhitungan itu selanjutnya, kapital yang ditanamkan untuk gula saja adalah sejumlah ƒ200.000.000 sedang keuntungan yang diperoleh dari pemerasan terhadap petani saja adalah sebesar ƒ20.000.000 dalam setahun, atau 10% dari modal perusahaan-perusahaan gula itu sendiri.

Heboh sewa tanah ini akhirnya meledak juga kemudian hari (1911-1912) dan mengisi koran-koran putih, Pribumi maupun Tionghoa di Indonesia, sampai-sampai Duys dari Partai Sosial Demokrat merasa perlu untuk mengajukan hal ini kehadapan sidang Parlemen Belanda. Heboh ini berasal dari pihak Sindikat sendiri yang terlalu meributkan banyaknya peristiwa pembakaran tebu dari kebun-kebun pabrik gula yang dilakukan oleh petani-petani setempat. Pembakaran itu sendiri telah menjadi tradisi sejak awal abad ke-20 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 1911, sehingga setiap areal tebu pabrik gula mengalami kebakaran 70 hektar dalam setahun. Berita pembakaran ini menyebabkan orang mencari-cari latar belakangnya, dan akhirnya diketahuilah bahwa hal itu tidak lain daripada bentuk perlawanan kolektif para petani terhadap kekuasaan pabrik gula, yang pada mulanya didasarkan atas motif ekonomi, tetapi kelak, dengan meningkatnya kesadaran politik petani-petani itu, meningkat menjadi gerakan politik.

Motif ekonomi dari tindak pembakaran kebun tebu itu didasarkan pada kenyataan, karena tebu bukanlah tanaman keras atau setengah keras, dan sangat tergantung penanamannya pada musim, maka setiap kebakaran akan menyebabkan kebun-kebun tidak bisa ditanami dengan tebu untuk beberapa bulan lamanya. Dengan demikian petani dapat menggarap diatas tanah bekas kebakaran itu untuk menanam palawija yang memakan waktu lebih kurang hanya 3 bulan itu.

Duys telah menggugat kebijaksanaan Gubernur Jenderal Idenburg, yang membenarkan tindakan Sindikat Gula. Surat Kabar *"Indische Mercuur"* dalam terbitannya tertanggal 9 Februari 1909 merasa perlu menceritakan sejarah pendirian Sindikat Gula dengan tujuan untuk menghadapi para petani secara uniform. Dengan adanya sindikat ini bukan saja petani-petani bisa ditekan lebih kebawah dan diperas lebih banyak, juga alat-alat negara bahkan sampai Gubernur Jenderal sendiri pun dapat didikte. Dalam waktu singkat Sindikat Gula tumbuh menjadi raksasa yang sangat berkuasa, didukung oleh persnya sendiri yang berkewajiban membela kepentingannya dan membentuk pendapat umum dalam menindas petani, sehingga surat kabar *"Medan Prijaji"* tanggal 4 Januari 1912 menamai Sindikat ini sebagai "negara dalam negara". Pers progresif di Nederland waktu itu mendesak pemerintah Belanda agar melakukan penyelidikan yang benar, sedang *"De Locomotief"*, Semarang, dalam edisinya tertanggal 5 Oktober 1911 memperingatkan kepada pemerintah kolonial agar menjalankan pemeriksaan atas Sindikat Gula serta mendapatkan fakta-fakta di sekitar kecurangan-kecurangan yang telah dilakukannya, terutama dalam hubungan dengan penandatanganan-penandatanganan kontrak sewa tanah. Dalam hubungan ini wakil Sindikat Gula, Ramaer menyatakan, bahwa petani itu mempunyai kemerdekaan penuh untuk menyewakan atau tidak menyewakan tanahnya masing-masing kepada Sindikat. Sebaliknya pers progresif waktu itu menunjukkan fakta-fakta bahwa pada tahun tersebut justru 18 buah pabrik gula telah mengadakan penurunan sewa lagi.

Polemik akhirnya tidak dapat dihindarkan. Pers pun tidak melewatkan penudingannya pada *Mindere Welvaart Commissie* (MWC), yang bertugas menyelidiki sebab musabab

kemerosotan kemakmuran orang kecil. Sindikat kemudian juga menuding MWC, dengan alasan, bahwa MWC telah memberikan angka-angka yang tidak benar. Sindikat mencoba membuktikan, bahwa dibeberapa tempat telah dilakukan penaikan uang sewa. Angka-angka tersebut ternyata benar, hanya saja kenaikan sewa tersebut, tidak jatuhh ketangan petani, karena kenaikan sewa dalam kalkulasi tersebut disebabkan karena naiknya komisi untuk pejabat-pejabat atau agen-agen pemerintah, baik berbangsa Eropa maupun Pribumi, yang telah berhasil menyerahkan sawah penduduk kepada pabrik gula.

Van Lennep dalam Parlemen Belanda menunjukkan, bahwa kebakaran-kebakaran pada kebun-kebun tebu mempunyai hubungan erat dengan masalah sewa tanah. Tetapi Menteri Jajahan, walaupun membenarkannya, bahwa "seyogyanyalah kalau keuntungan dari gula itu dibagi dengan para petani Pribumi, tetapi, adalah sulit untuk mendapatkan dan memberikan keterangan tentang sebab-sebab terjadinya kebakaran-kebakaran tersebut", katanya.

Perlawanan kolektif kaum tani lama kelamaan memang merupakan ancaman yang serius terhadap posisi Belanda dalam pasar dunia. Karena itu pemerintah kolonial mengusahakan berbagai daya upaya untuk memberantasnya dengan jalan memperlipatgandakan jumah personil kepolisian dan dinas-dinas penjagaan. Tetapi sia-sia, karena bila pembakaran-pembakaran menjadi reda, keredaan itu sangat sementara sifatnya.

Beberapa pabrik gula mencoba melawan aksi tani dengan jalan halus, sebagaimana pernah dilakukan oleh pabrik gula Djatiroto, yaitu kesehatan desa diperbaiki, kampung-kampung didirikan. Dengan jalan ini setiap tahun Djatiroto yang mengalami rata-rata 26 kali. Tetapi hal ini tak berjalan lama. Pada tahun berikutnya kemerosotan yang dibayar mahal itu disusul dengan kenaikan yang cukup menarik.

d) Pabrik Gula & Perekonomian Petani :

Keadaan ekonomi petani dimana pabrik gula berdiri dan bekerja selalu menyedihkan. Keuntungan selamanya jatuh ketangan bukan petani, sedang sebaliknya petanilah yang terus menerus menerima getahnya, atau bila menggunakan kata-kata yang dipergunakan waktu itu dalam hubungan dengan keganasan pabrik gula di Indonesia (1909) : "maka lakunya dunia, jika ada yang beruntung besar, niscayalah ada yang kerugian besar". Yang beruntung jelas pabrik gula dan orang-orang atasan yang ikut berkuasa, yang rugi besar adalah petani.

Dalam sebuah surat gugatan yang tertuju pada kekuasaan gula, oleh seseorang anonimus pada tahun 1909 dibeberkan betapa besarnya keuntungan yang diterima oleh seorang administratur atau kuasa pabrik gula. Katanya :

"Syahdan maka pembesar pabrik itu seorang kulit putih berpangkat *Administrateur*. Biasanya orang kebanyakan yang berdekatan pada pabrik menyebutkan Kanjeng Tuan Besar. Belanja *Administrateur* pabrik gula itu rata-rata dalam 1 bulan *ƒ*700,- kecuali persen yang diterima pada tiap-tiap tahun, tambah lebar tanamannya tebu, bertambah pula banyaknya uang persen, sampai ada yang mendapat persen *ƒ*50.00,- dalam setahun, bukan main. Maka punggawa Belanda lainnya itu banyak lagi, dan semuanya kecuali mendapat belanja tiap-tiap bulan, masih juga mendapat persen besar tiap-tiap tahun. Biasanya persen itu diberikan pada masa habis menggiling tebu, apabila sudah terhitung pendapatannya menjual gula. Menilik banyaknya persen itu, barang tentu keuntungan pabrik-pabrik gula itu besar amat.[5]

---

[5] MEDAN PRIJAJI III/1909, “Fabriek, Politie dan Orang Ketjil” (hlm. 607-609).

Keuntungan besar itulah pula yang menerangkan mengapa dalam tahun 1909 (Dia) saja telah diajukan pendirian 5 buah pabrik gula baru untuk karesidenan Madiun, sedang pabrik-pabrik tersebut selamanya memilih daerah yang paling subur. Selanjutnya anonimus tersebut mengatakan, bahwa yang rugi adalah "sekalian orang kecil-kecil yang sawahnya disewa pabrik, karena pabrik-pabrik gula itu biasanya menyewa sawahnya orang-orang kecil sampai sejumlah 900 bau, 1000 bau ataupun lebih lagi. Dan tidak mau menyewa sawah yang kering, dipilihnya sawah yang baik-baik saja. Lain dengan pabrik minyak, kopi, nila dan tembakau".

Dalam hubungan sewa menyewa tanah antara petani dan pabrik, penggugat itu menjelaskan latar belakang ekonomi petani, bahwa petani-petani itu mencari uang perlu akan dibuat makan dan kesenangan sedikit, tambahan lagi pajak bumi belum lunas, pajak patak (*hoofdgeld*) belum dibayar semua dan ini pula pajak krikil belum voldaan ; anaknya menangis minta ini itu, hendak pinjam tiada dipercaya sebab tak ada hasil yang tentu. Hendakpun menggadaikan, tiada punya barang yang berharga. Sekarang mau lari kemana ? Bekerja kuli 1 hari hanyalah terima upahan *ƒ*0,25 saja. Ah, sawahnya masih utuh, baik datang ke pabrik saja. Kejadian sawah disewa dengan murah-murah saja. Habis terima uang dalam 1, 2 atau 3 hari uangnya sudah terpegang ditangannya orang lain buat mencukupi kebutuhannya. Nah sekarang dalam 18 atau 20 bulan dia tak ada sawah lagi, tidak bisa panen padi, ubi, tinggal badan saja dan anak bini, pajak terus masih ditarik negeri".

Untuk mendapatkan penghasilan dari pabrik adalah tidak mudah, karena pabrik yang menelan ratusan dan ribuan hektar tanah tersubur dari petani itu membutuhkan tenaga kerja yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah petani yang telah menjadi penganggur.

Dalam pada itu perekonomian di daerah-daerah dimana terdapat pabrik gula segera berubah secara struktural setiap dibangunkannya pabrik gula di tempat itu, dan sebaliknya perekonomian itu segera kembali pada pada dasarnya semula apabila pabrik berhenti bekerja untuk selama-lamanya, baik karena salah urus yang parah atau karena situasi pasar dunia menghendaki tiadanya produksi gula. Misalnya pada pembukaan kembali pabrik gula Kalimanah di Probolinggo, sekaligus harga beras naik dari *ƒ*6, - menjadi *ƒ*9, - sedacin, demikian pula halnya pada pendirian baru atau pembukaan kembali pabrik gula - pabrik gula yang bersamaan waktunya di Majenang, Kalibagor, Meluwung, Bada dan Tjindaga.

Kemerosotan lebih buruk dari perekonomian petani semakin menjadi-jadi apabila petani menyewakan tanahnya untuk kedua kalinya, karena dapat dipastikan bahwa sewa itu diturunkan, sekalipun jumlah sewa seluruhnya mungkin naik, karena pejabat pabrik minta dengan paksa uang djawa yang lebih tinggi. Dengan demikian kemelaratan petani setiap musim tebu semakin mendalam.

Dalam pada itu pajak yang harus dibayar menjadi lebih tinggi karena dengan diterimannya uang sewa tersebut, ia harus membayar pajak tambahan, yaitu pajak panggaotan atau pajak penghasilan. Uang yang diambil secara paksa oleh pejabat-pejabat pabrik, petani pula yang harus membayar pajaknya. Pajak-pajak lama, yaitu pajak bumi, yang dimulia ditarik sejak pemerintahan Daendels, dan pajak kepala, tetap harus dilunasinya. Pajak pangaotan adalah sebesar 4%, sedang pajak bumi dihitung menurut lebarnya sawah atau ladang atau pekarangan yang lebih dari seperempat bahu. Pajak panggaotan didasarkan atas luas tanah yang ditanami, tidak peduli tanaman tersebut, menghasilkan sesuatu ataukah tidak. Dan bila tanah mereka disewakan dan ditanami tebu oleh pabrik, maka pajak untuk tanaman itu, mereka yang harus membayarnya. Pajak kepala adalah sebesar *ƒ*1 sampai *ƒ*1,50 sebagai pengganti rodi sesuai dengan *Staatsblad 1882 no. 137* dan *1884 no. 96* serta *144* (terkecuali untuk karesidenan Jakarta).

Walaupun pajak kepala menurut undang-undang adalah pengganti rodi, namun tidak urung rodipun terus dipaksakan pada petani.

Dari pajak bumi, yang dibayar oleh petani sejak pemerintah Daendel, pemerintah kolonial setiap tahun menerima penghasilan sebanyak 30% dari seluruh Anggaran Belanjanya. Apabila jumlah ini ditambah dengan harga rodi setiap tahunnya – hanya saja rodi tidak pernah diperhitungkan dalam bentuk uang – petani membiayai 50% dari penjajahan Belanda di Indonesia. Ditambah dengan pajak-pajak lain, yaitu pajak panggaotan, pajak raja kaya, pajak pohon keras, pajak penjualan hewan besar dll telah dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagian terbesar pembiyaan penjajagan dipikul oleh pajak yang ditarik dari tenaga dan uang petani.

Dengan makin banyaknya pabrik gula, yang berarti makin sempitnya areal untuk padi, pemerintah mulai mengeluarkan ordonansi yang memaksa petani-petani menjual padinya dengan harga yang ditentukan kepada penggilingan-penggilingan padi. Harga paksa ini adalah dibawah harga pasar yang berlaku. Ordonansi ini adalah hasil persekongkolan natara pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda dengan *Rijstpellerijen Bond*. Berdasarkan persekongkolan itu *Rijstpellerijen Bond* tidak terikat pada ketetapan harga dari pemerintah. Sebaliknya dalam menyerahkan padinya pada penggilingan-penggilingan, para petani masih terkena kerugian karena kecurangan-kecurangan atas alat-alat timbangan serta kecurangan-kecurangan lain dari pihak penggilingan padi. Kerugian lain dari para petani ialah kehilangan umpan/binatang piarannya, yang biasanya menghasilkan telor atau daging. Berdasarkan persekongkolan ini pula untuk di kemudian hari *Rijstpellerijen Bond* mendapatkan kursi di dalam *Volksraad*.

Apabila petani-petani tidak dapat melunaskan pajak-pajaknya, dan karena mereka memang tidak mempunyai sesuatu untuk disita, sedang tanah itupun pada umumnya hanya tanah pemerintah dimana ia hanya menggarapnya, maka setiap tahun berbondong-bondong petani masuk ke dalam penjara dan melakukan kerja paksa – biasanya menjalani hukuman "krakal". Tetapi karena terlalu banyak orang yang harus masuk kedalam penjara, dan pemerintah menderita rugi memberi makan, pembesar-pembesar Eropa setempat pada umumnya merasa lebih bijaksana apabila mereka tidak dituntut, ditunggu sampai mereka dapat memetik panennya. Tetapi dikenakan rodi kembali, dan dengan cara ini pemerintah kolonial tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai makan mereka.

e) Dari Petani Menjadi Buruh Musiman :

Nasib petani yang terlalu buruk memaksa terjadinya pauperisasi dan urbanisasi yang makin lama berjalan makin meluas. Mereka yang didorong oleh keadaan-keadaan yang memaksa, telah meninggalkan sebagian dari sentimen agrariknya, meninggalkan tanah garapan yang telah dikuasai pabrik gula atau tuan tanah, pergi ke kota atau ke pabrik gula dan pabrik-pabrik lain untuk berkuli atau menjual tenaga. Tetapi penghasilan mereka tidaklah lebih daripada sebelumnya.

Tetapi justru karena penindasan-penindasan luar biasa itu, kadang-kadang mereka berubah menjadi manusia baru yang tidak terduga-duga. Dalam berita-berita pers sejak tahun 1904 hingga 1910 itu saja, apabila sesudahnya, dapat diketahui, bahwa "kuli-kuli" pabrik telah mengorganisasi diri sedemikian rupa sampai dalam jumlah ratusan, dan dalam hubungan itu mereka mengadakan demonstrasi, pemogokan dan penuntutan kenaikan upah. Hal ini banyak terjadi sebelum ada serikat buruh di Indonesia. Demonstrasi-demonstrasi dari buruh musiman ini terutama dimulai dari daerah-daerah pabrik gula di Solo dan Yogyakarta. Berlandaskan pengalaman-pengalaman ini pada tahun 1911 berdiri PBP atau Persatuan Buruh

Pabrik, sebuah serikat buruh kiri yang pertama-tama dalam sejarah Indonesia. Tindakan-tindakan buruh pabrik gula di Solo dan Yogyakarta ini kemudian diikuti juga oleh buruh dari karesidenan-karesidenan lain – juga yang berkampung disekitar pabrik gula – tetapi sampai sebegitu jauh hasil tuntutan mereka sudah dapat ditentukan, yaitu :

a) mereka ditangkap dan dipenjarakan sebagai penganggu ketertiban umum,
b) seperti diatas dengan ditambah pengusiran dan pemecatan, atau
c) pegawai pabrik yang mengurus buruh pepecat,

namun nasib mereka sebagai buruh tetap tidak berubah.

Dalam peristiwa pembakaran tebu, bukan saja petani yang jadi buruh musiman berkewajiban ikut memadamkan, juga seluruh desa yang berada dalam kekuasaan pabrik, terkecuali orang-orang yang dibenarkan sakit.

Kesulitan buruh musiman itu tidak sampai disitu saja. Mereka terkenan peraturan yang keras dari pabrik yang dibiarkan atau dibenarkan oleh pemerintahan setempat. Seringkali anak-anak mereka mengambil sebatang tebu dan dimakannya. Dalam hubungan ini penjaga tebu membiarkan anak-anak tersebut, mengambil, kemudian mengikuti untuk mengetaui tempat tinggalnya. Setelah itu baru ia melapor pada pabrik, dan pengadilan pabrik memutuskan, bahwa orang tua anak tersebut harus membayar denda sebanyak ƒ1, buat setiap batang, atau berarti 4 hari kerja atau 12 jam atau sebesar pajak kepala untuk setahun.

Buruh yang mendapat kemajuan di dalam pekerjaannya biasanya lantas berpihak pada majikan dan ikut melakukan penghisapan dengan jalan mengurangi upah mereka, dan bila mereka tidak rela menyerahkan bagian yang ditentukan, mandor mempunyai kekuasaan untuk memecat dan menerima buruh baru. Banyak sekali diantara mereka menjadi raja-raja apabila merangkap juga sebagai leveransir kebutuhan pabrik sebagaimana diceritakan oleh Hadji Mukti dalam romannya "*Hikajat Siti Mariah*" (1910-1912).[6] Kebencian buruh pada mandornya juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran tebu, karena justru sektor kebun yang berada dibawah pengawasan mandor terbenci itulah yang terbakar, sedang akibatnya ialah bahwa mandor bersangkutan kehilangan haknya untuk mendapatkan hadiah tahunan, bila ia beruntung tidak dipecat.

Dalam waktu meningkatnya pembakaran-pembakaran tebu di beberapa tempat diadakan persekongkolan natara pembesar-pembesar setempat dengan pabrik, yang menetapkan, bahwa mereka yang terbukti telah melakukan pembakaran dapat dikenakan hukuman buang untuk seumur hidup.

Pihak pabrik dalam melakukan penghisapan tidak menyediakan dana untuk pemeliharaan sosial. Maka petani-petani yang telah menjadi buruh musiman tersebut bila terkena cedera sampai cacat atau meninggal dunia, mereka tidak akan mendapat uang pengganti ataupun uang berkabung.

Baik sebagai petani maupun sebagai buruh musiman nasib mereka tinggal buruk.

3. PERKEMBANGAN POLITIK KOLONIAL BELANDA

Sampai dengan pertengahan abad ke-19, politik kolonial Belanda di Indonesia terus menerus didasarkan atas kondisi-kondisi feodal yang ada di Indonesia sendiri. Dalam pada itu

---

[6] Diterbitkan kembali sebagai cersam dengan redaksi P. Santoso dalam *"Lentera"* (1962-64)

politik di Nederland sebagai negara induk bisa dipertahankan terus. Negara-negara tetangga Nederland, terutama Perancis dan Inggris, telah mulai mengadakan perombakan-perombakan, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, yang kedua-duanya mendorong majunya kapitalisme dan industri.

Pada menjelang pertengahan abad ke-19, baik di Nederland sendiri maupun di negara-negara tetangganya banyak didengung-dengungkan semboyan revolusi Perancis bahkan memperjuangkan agar semboyan tersebut – kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan – menjadi dasar daripada kehidupan baru, kehidupan yang meninggalkan feodalisme, memasuki alam liberalisme. Dari Indonesia sendiri juga datang suara-suara seperti itu, malahan telah mulai diperjuangkan. Perjuangan di Indonesia berpusat pada tiga orang tokoh penting dalam sejarah kolonial, yaitu Multatuli, Dr. ds Baron van Hoevell dan Roorda van Eysinga disamping tokoh-tokoh yang dalam hal ini agar kurang penting, seperti Junghuhn, van Vollenhoven dll.

Perubahan-perubahan dalam politik kolonial terjadi mulai pada tahun 1854 sebagai akibat dari kemenangan kaum liberal di Nederland. Dengan kemenangan itu dimulailah perombakan-perombakan di dalam tata pemerintahan dan perundang-undangan. Undang-undang Dasar Nederland diperbaiki, sedang semangat liberal menguasai Parlemen dan menerobosi Kabinet.

Kaum liberal menghendaki dikuranginya kekuasaan Raja, sedang kaum liberal atau kaum borjusi yang menganggap dirinya "bagian nasion yang berpikir" menghendaki agar pengaruhnya menjadi lebih besar di dalam pemerintahan. Mereka memperjuangkan dan memenangkannya. Mereka memperjuangkan juga dilaksanakannya kemerdekaan beragama, hak berserikat dan berkumpul, kemerdekaan pers, dan dalam perjuangan itu mereka memenangkan semuanya. Berdasarkan kemenangan-kemenangan itu kaum liberal meneruskan desakannya untuk juga diadakan liberalisasi di bidang perusahaan, yaitu agar perdagangan, pertanian dan industri tidak lagi menjadi monopoli pemerintah tetapi menjadi kegiatan swasta. Perjuangan mereka ini dibarengi dengan dengungan semboyan "persaingan bebas"

Tiga pokok perjuangan kaum liberal, yaitu

a) peranan dalam pemerintahan,
b) hak-hak perseorangan, dan
c) kebebasan berdagang dan berusaha,

telah mengakibatkan terjadinya pengaruh yang luas dalam kehidupan umum dan politik di Nederland, dan kemudian juga bergema di tanah-tanah jajahannya.

Hasil terpenting dari perjuangan kaum liberal ialah munculnya politik kolonial baru yang ke (_____) terkenal dengan nama "politik etis".

a) Politik Etis :

Penjajahan Belanda di Indonesia, yang nampaknya kokoh sepanjang zaman itu, terus menerus menerima pukulan-pukulan baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar ialah saingan dari negera kolonial lain, sedang dari dalam adalah pemberontakan-pemberontakan dapat dilokalisasikan, sebaliknya, walaupun oleh hanya beberapa orang, pikiran-pikiran baru dengan cepat dapat disiarkan melalui pers dan dapat diperganda dengan bantuan percetakan.

Pukulan yang paling keras dan menggoyahkan penjajahan sampai ke dasar-dasarnya adalah yang berasal dari karya Multatuli *"Max Havelaar"*. Dalam waktu cepat kerja ini diterjemahkan ke dalam Inggris dan Perancis, dan dari sini kemudian meluas ke negeri-negeri Eropa Timur, dan akhirnya membentuk opini dunia, bahwa kebesaran Nederlanda di dunia internasional, tidak lain asalnya daripada pemerasan yang luar biasa kejamnya terhadap Rakyat jajahannya di Indonesia. Pendapat dunia ini barang tentu tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun juga. Kekuatan reaksi dengan segala jalan – bahkan sampai tahun belasan dalam abad kemudiannya – dengan berbagai jalan mencoba membuktikan bahwa Multatulis (yaitu nama samaran Eduard Douwes Dekker), adalah orang yang tak dapat dipercaya, adalah seorang yang korup, adalah mengidap penyakit megalomania yang tak dapat dipuaskannya, semua bertujuan untuk mendiskreditkan. Tetapi sia-sia. Kenyataan, bahwa Rakyat jajahan diperas habis-habisan tidak dapat disembunyikan oleh siapapun. Maka apabila Multatulis berjuang dibidang sastra, Roorda van Eysinga dibidang pers, tidak kalah pentingnya adalah perjuangan ds dr Baron van Hoevell yang berjuang dibidang politik, terutama setelah diusir dari Hindia Belanda, pulang ke Nederland, ia diangkat menjadi anggota Parlemen. Ketiga-tiga kekuatan inilah yang mengguncangkan tanah jajahan Belanda diujung terselatan Asia.

Maka apabila pada mulanya Rakyat Nederlandpun menganggap, bahwa semua-muanya sudah beres di Hindia Belanda sana, dengan munculnya 3 kekuatan tersebut, orang menjadi bertanya-tanya : apakah sesungguhnya yang telah terjadi disana ? Apakah sebabnya Mulatuli begitu giat mendengungkan "kerja bebas" atau *vrije arbeid* ? Van Hoevell mengedepankan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa Indonesia, sebagai akibat dari adanya penjajahan, sedang bukan maunya bangsa Indonesia sendiri untuk dijajah ; penjajahan telah dilakukan oleh Belanda, maka Belandalah yang harus bertanggung jawab.

Salah satu hasil dari perjuangan mereka ialah dihapuskannya Tanam Paksa secara berangsur-angsur (1870), dan pintu mulai dibuka bagi modal swasta, dan semboyan "kerja bebas" mulai lebih banyak dipuji-pujian oleh kaum liberal. Perubahan-perubahan besar telah terjadi di Indonesia, yaitu perubahan daam dunia penjajah. Nasib Rakyat Indonesia dalam penjajahan tetap sama, bahkan menjadi semakin buruk, disebabkan kini disamping kolonialisme dan feodalisme, juga kapitalisme ikut menghisap mereka. Keadaan demikian berjalan terus sampai menjelang akhir abad ke-19. Propaganda agar Pribumi mendapat pendidikan selayaknya agar terdapat gerak seirama antara kepentingan kapital dan kebutuhan akan tenaga terdidik yang murah, tidak banyak mendapatkan pendengar, dan hanya segolongan kecil keturunan pembesar Pribumi, yang dicadangkan ikut memerintah bersama dan dibawah penjajah, yang dapat menikmati pendidikan yang agak lumayan.

Walaupun di Nederland sendiri telah terjadi reformasi-reformasi penting, namun politik kolonialnya terhadap Indonesia hampir-hampir tidak berubah dan tidak acuh terkecuali bila soalnya mengenai kewajiban Indonesia untuk mencicil hutang nasional Nederland. Ketidakacuhan pemerintah Nederland akhirnya tak dapat dipertahankan lagi, sewaktu pada tahun 1895 Nederland tertimpa krisis keuangan yang hebat, dan dalam pada itu tertimbun hutang nasional, sedang produksi industrinya makin lama makin terdesak oleh negara-negara lain yang mengalami perkembangan teknologi lebih maju, terutama dengan munculnya Jepang sebagai produsen katun. Jalan paling mudah untuk mengatasi keadaan adalah menuntut uang dari Indonesia. Hindia Belanda sendiri pun telah tertimbun oleh hutang berhubung dengan pembiayaan-pembiayaan untuk menyelesaikan perang kolonialnya, dan telah mempunyai hutang sebesar ƒ45,5 juta pada Nederlanda, sedang pada 1898 hutang itu ditambah lagi dengan ƒ55 juta. Niat Nederland untuk menagih hutang pada Hindia Belanda mendapat tentangan di dalam Parlemen.

Mr. C. Th. van Deventer, seorang bekas pengacara di Semarang dan pulang kembali ke Nederland sebagai hartawan, dalam hubungan ini menerbitkan sebuah karangan "Een Eereschuld" atau "Sebuah Hutang Kehormatan" atau "Sebuah Hutang Budi" yang menyarankan agar uang-uang bingkisan dari Indonesia yang ditarik oleh Nederland dikembalikan lagi kepada pengirimnya.

Bingkisan-bingkisan ini adalah ketentuan yang digariskan dalam apa yang dinamai *"batig-saldo-politiek"*, yaitu politik penghisapan Nederland atas Indonesia, yang harus mendatangkan keuntungan bagi Nederland. Salah sebuah praktek dari *"batig-saldo-politiek"* ialah dijalankannya Tanam Paksa yang mendatangkan hasil *ƒ*800.000.000 bagi Nederland. Dalam politik ini termaktub juga ketentuan untuk menekan Anggaran Belanda Hindia Belanda serendah mungkin, untuk dapat mengirimkan bingkisan ke Nederland sebanyak mungkin.

Dari hasil Tanam Paksa ini Nederland bukan saja dapat terlepas lebih dari hutang-hutang nasionalnya, bahkan memulai dengan pembangunan-pembangunan dasar baru, sepeti pembangunan hubungan kereta api, industri untuk memproduksikan barang-barang buat kepentingan perdagangan internasional. Untuk mengangkut bahan mentah hasil Tanam Paksa, pemerintah telah menandatangani kontrak pengangkutan dengan NHM (*Nederlandsche Handelmaatschappij* atau disingkat *"Handelmaatschappij"* saja), serta menjual menjual barang-barang angkutan tersebut di Nederland. Berhubung dengan kurangnya ruang kapal, sedang dalam perjanjian disebutkan bahwa barang-barang tersebut hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal Belanda, NHM dengan demikian terpaksa menggalang kapa-kapal baru sendiri, dan merintis kearah industri kapal. Disamping itu NHM juga ikut mengembangkan industri katun yang diimpornya ke Indonesia. Dengan demikian antara Nederland dan NHM terjadi kerjasama yang erat dalam menguras kekayaan bumi dan tenaga manusia Indonesia.

Dengan bocornya rahasia penindasan di Jawa, yang disiarkan oleh surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah, yang ditulis secara rahasia oleh pelapor-pelapor yang tinggal di Indonesia sendiri, diantaranya juga yang terang-terangan sebagaimana halnya dengan van Hoevell (lihat : pokok Pers dalam bagian ini), mulailah Tanam Paksa mendapat kecaman-kecaman, yang menyebabkan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Nederland, yaitu bahwa Kabinet mulai disahkannya perubahan itu pada 1848 berhak ikut campur dalam pemerintahan kolonial di Indonesia. Sebelum itu hanya Raja yang berhak.

Demikianlah sedikit latar belakang mengapa masalah tanah jajahan dapat dibicarakan baik diluar maupun didalam Parlemen.

Van Deventer mengajukan sarannya itu karena Nederland dalam kesulitan keuangan tersebut telah meminta kepada Hindia Belanda agar membayar hutang-hutangnya. Rakya di Jawa yang telah terbongkok-bongkok membiayai peperangan-peperangan kolonial itu secara objektif tidak dapat diperas lebih banyak lagi dalam rangka membayar kembali hutang kolonial tersebut. Mr. Broos hooft, redaktur "De Locomotief" Semarang, dalam brosur kolonialnya *"De Ethischo Koers"* (1899) memperinci banyaknya pajak-pajak yang dibayar oleh petani, yakni antara 20 sampai 27,5 %. Tetapi ia tidak membedakan antara pembayar pajak di kota dan yang di desa. Dengan ditambah pajak-pajak tidak tetap, petani di desa-desa membayar sejumlah 60 sampai 75% dari seluruh penghasilannya, termasuk didalamnya pajak-pajak partikelir yang dipungut oleh pejabat-pejabat secara tidak sah.

Satu kekuatan di dalam Parlemen menyimpulkan, bahwa Hindia tidak mungkin melunaskan hutangnya yang *ƒ*100.500.000 belum termasuk bunga. Keadaan mereka sudah

lebih daripada menyedihkan. Dan bukankah Nederland, waktu yang belakangan ini berada dalam kesulitan yang amat sangat ?

Tagihan Nederland itu mengingatkan siapapun juga pada Multatuli, yang menamai Nederland sebagai "negara perompak di tepi Laut Utara". Maka timbulah gerakan perlawanan baik di Indonesia sendiri maupun di Nederland. Perjuangan dalam barisan kolonial yang berlaku di Indonesia dibantu oleh pers putih non pemerintah yang mewakili kepentingan penetap Eropa di Indonesia. Golongan penentang ini kelak mendapat kehormatan dijuluki "kaum etis", sedang istilah "etis" tersebut, berasal dari brosur Brooshooft, sedang ia menggunakan kata tersebut, sebagai perasaan dari judul dan isi artikel van Deventer *"Een Eereschuld"* atau *"Sebuah Hutang Budi"*. Dikemudian hari mereka ini banyak ditampilkan orang-orang Belanda sebagai orang-orang yang sangat berjasa kepada Indonesia. Tetapi sejauh yang dapat dipelajari dari perjuangan mereka, tak pernah mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh seorang kapten Hungaria yang menggabungkan diri dengan pasukan perlawanan Jambi, atau seorang perwira yang melayani artileri pasukan-pasukan Bali dalam perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Yang dikehendaki para humanis tersebut adalah perlakuan yang lebih baik pada Rakyat jajahannya. Apabila dimasa pemerintahan Daendels, pulau Jawa masih dapat mengekspor bahan pakaian, diantaranya untuk pakaian seragam 18.000 serdadu Napoleon, maka selama dan sesudah Tanam Paksa seluruh segi keekonomian Pribumi terhenti. Disamping para petani yang terkena kewajiban menyerahkan tanah dan tenaganya untuk Tanam Paksa, maka mereka yang bukan tani terkena kewajiban kerja di ladang-ladang Tanam Paksa selama 1/5 dari seluruh waktunya. Kemerosotan luar biasa dari kemakmuran penduduk pada tahun 1902 kelak, dicoba ditutup-tutup oleh Menteri Jajahan Idenburg, bahwa kemiskinan penduduk di Jawa "berasal dari kenyataan, bahwa dalam 20 tahun terakhir abad ke-19, jumlah penduduk telah meningkat dengan 45%, sedang luas tanah garapan bertambah hanya dengan 23%".

Dalam heboh hutang itu pendapat umum berpihak pada golongan etis. Dalam pada itu dalam perhitungannya mengenai lalu lintas uang antara Hindia Belanda dengan Nederland didapatkan bahwa sampai dengan tahun 1898 dengan perhitungan bunga majemuknya, Nederland telah menahan uang Indonesia sebanyak *ƒ*764.000.000.

Van Deventer, kemenakan Multatuli itu, meneruskan perhitungannya. Ia kedepankan fakta-fakta, bahwa benar Hindia Belanda berhutang sebanyak tidak kurang dari *ƒ*100.000.000 antara 1893-1899, tapi itu disebabkan karena Nederland dengan bernafsu telah perintahkan Hindia Belanda untuk memasukkan Aceh dan juga Alfuru serta Irian Barat ke dalam wilayah penjajahannya. Untuk memenuhi keinginan Nederland ini Hindia Belanda yang setiap tahun tidak pernah menghabiskan Anggaran Belanja sampai *ƒ*100.000.000, terpaksa harus mengeluarkan lebih dari *ƒ*132.000.000, diantaranya lebih dari *ƒ*40.000.000 musnah menjadi asap peluru.

Lebih jauh van Deventer menemukan, bahwa antara tahun 1867-1877, jadi dalam jangka waktu 10 tahun, Hindia Belanda telah kirimkan juga bingkisan sebanyak tidak kurang dari *ƒ*151.000.000. Dan karena setelah 1877, berhubung dengan dihapuskannya Tanam Paksa dan berhubung dengan harus diteruskannya *"batig-saldo-politiek"*, Nederland membebankan pembayaran cicilan dan bunga dari hutang nasionalnya sebanyak *ƒ*36.000.000 kepada Hindia Belanda, maka jumlah uang Hindia yang ditanam di Nederland mencapai jumlah tambahan *ƒ*187.000.000 sampai buka tahun 1900. Dengan perhitungan van den Berg, yakni yang *ƒ*764.000.000, seluruh uang Hindia Belanda sejak dijalankannya Tanam Paksa sampai 1900 yang tertanam di Nederland adalah sebanyak *ƒ*951.000.000.

Angka-angka tersebut tidak pernah dibantah oleh pemerintah Nederland, sehingga kehidupan politik semakin menjadi goncang, lebih hebat daripada goncangan yang diakibatkan oleh Multatuli - Van Hoevell - Roorda van Eysinga. Nampaknya kesulitan-kesulitan dalam negeri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Raja Willem III meletakkan jabatannya (1898) dan digantikan Ratu Wilhelmina.

Dalam suasana pergantian kepala negara itu disamping van Deventer, munculah Ir. H.H.van Kol, yang dengan gigih berusaha membentuk pendapat umum agar membatasi kerakusan imperialisme Belanda yang hendak menelan daerah Nusantara lebih banyak lagi. Tetapi Brooshooft, sendiri seorang etikus, tidak menyetujui kampanye van Kol, karena menurut dia, apabila Aceh dibiarkan tidak menjadi wilayah Hindia Belanda, keadaan tidak akan menjadi lebih baik bagi Rakyat Aceh sendiri, katanya. Apakah Aceh akan dimasukkan kedalam wilayah Hindia Belanda atau tidak, bukan van Kol atau Brooshooft, yang bisa menentukan, tetapi keselamatan dari imperalisme Belanda. Dengan membiarkan Aceh tetap merdeka, imperialisme Belanda takut kalau-kalau imperialisem Inggrislah yang akhirnya akan mendahului mencaploknya. Dalam pada itu pembukaan terusan Suez, yang menyebabkan Aceh menjadi daerah lalu lintas internasional penting, akan menyebabkan negeri ini menjadi kuat bila dibiarkan di dalam kemerdekaan.

Hasil dari segala goncangan itu ialah, Aceh harus dikalahkan, disamping Nederland membebaskan kepada Hindia wajib bayar sebanyak ƒ45.000.000, tetapi masih dianggap berhutang ƒ55.500.000, sedang pada tahun 1904 untuk memudahkan jalannya pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz – orang yang dianggap paling berjasa setelah J.P. Coen bagi imperialisme Belanda itu – Nederland memberikan kredit sebesar ƒ40.000.000 kepada Hindia Belanda.

Kemenangan kaum etis merupakan salah satu sebab Ratu Wilhelmina mengadakan kompromi dengan mereka. Pada tahun 1901 diangkatnya Mr. J.H. Abendanon – orang yang untuk waktu lama dijuluki sebagai etikus praktis itu – menjadi Direktur Pendidikan, Pengajaran dan Ibadah dalam pemerintahan Hindia Belanda. Etikus Idenburg diangkat menjadi Menteri Jajahan, dan pada tahun 1904 etikus van Heutsz, menjadi Gubernur Jenderal.

Pada tahun 1904, Ratu menetapkan bernarnya politik kolonial gaya baru dalam sebuah pidato tahta, yang mengakui "kewajiban etis dan tanggung jawab moril Nederland terhadap Rakyat-Rakyat di Indonesia". Pidato 1901 ini oleh beberapa ahli sejarah Belanda dan juga penulis sejarah Indonesia yang menganut mereka, dianggap sebagai permulaan dari penggarisan politik etis dalam kenegaraan yang akan mengakibatkan terjadinya kemajuan-kemajuan pada bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan politik itu Ratu mengangkat etikus H.W.F. Idenburg menjadi Menteri Jajahan. Pada gilirannya Idenburg membentuk sebuah komisi untuk mempelajari dan mengatasi kesulitan dan kemerosotan kemakuran Rakyat, yang diketuai oleh Mr. C.Th. van Deventer dan dianggotai oleh G.P. Rouffaer, E.B. Kielstra, dan D. Fock. Ternyata komisi tidak dapat bekerja, karena bukan saja kaum Liberal dan Radikal Demokrat tidak setuju, juga karena memang pemerintah Nederland tidak menyediakan uang untuk pekerjaan itu.

Pada tahun 1903 Nederland menyatakan, bahwa Hindia Belanda dibebaskan dari wajib membayarkan hutang-hutang nasional Nederland, sedang pada tahun 1905, etikus D. Fock diangkat menjadi Menteri Jajahan menggantikan Idenburg. Dengan demikian bermulalah

babak etis dalam politik kolonial Belanda, atau babak yang orang Belanda lebih suka menyebutnya sebagai babak "*Welvaartspolitiek*"[7] atau "politik kemakmuran".

Tugas politk etis adalah "meningkatkan taraf kemakmuran materiil dan sprituil Rakyat", yang terbagi atas 3 garapan, yaitu a) edukasi, b) emigrasi, dan c) irigasi (2E-1I). Apakah dalam praktek benar-benar 2E-1I tersebut meningkatkan taraf kemakmuran materiil dan spirituil Pribumi ? Kelak akan ternyata, bahwa dalam melaksanakan ketiga-tiga garapan tersebut, program edukasi adalah membuat agar para siswa dan mahasiswa lebih setia*xxx* kepada imperialisme Belanda, program emigrasi adalah membuang petani-petani dari jawa ke daerah percobaan Lampung tanpa melupakan penjualan manusia Indonesia sebagai budak belian di perkebunan-perkebunan Deli, Suriname dan Selandia Baru, bahkan juga ke Malaya, sedang program irigasi telah dapat diketahui pelaksanaanya dalam pokok tambang agraria (lihat : hlm, 3-13).

Alasan objektif dari pelaksanaan politik etis – dan inilah yang terpenting – ialah, bahwa karena kemerosotoan taraf kemakmuran yang luar biasa itu, Rakyat Indonesia tidak mampu lagi membeli tekstil buatan Twente serta produksi industri lain-lainnya. Suatu Rakyat yang miskin tidak bisa menjadi langgangan yang baik bagi hasil kapitalisme yang "terbaik". Betul sekali, bahwa dengan dilaksankannya politik etis di Indonesia terdapat lebih banyak ruang hidup, tetapi yang sebenarnya naik taraf kemakmurannya adalah perusahaan-perusahaan monopoli swasta, bukan Rakyat Indonesia.

Bahwa politik etis bukanlah sumber dari kemajuan bangsa Indonesia dapat pula dilihat dari kenyataan, bahwa tidak mungkin penjajah akan memberikan kelonggaran pada Rakyat jajahannya untuk maju, karena Rakyat jajahan mengalami kemerosotan, kemiskinan dan penindasan, justru karena adanya penjajahan. Dalam redaksi lain kenyataan ini pernah dikemukakan juga oleh Suwardi Suryaningrat pada perayaan ulang tahun ke-10 Budi Utomo di Nederland *xxxx* mempersembahkan hadiah ulang tahun dari pemerintah Nederland kepada Budi Utomo dalam bentuk Volksraad, bahwa "hajat untuk memajukan bangsa Indonesia berarti jatuhnya politik pemerintah yang amat lamban itu", dan karena itu apa yang digembor-gemborkan tentang politik etis itu adalah omong kosong belaka, karena itu tiada mengherankan apabila ia pun menyatakan, bahwa "politik etis masih mengandung pengaruh, bahwa Nederland itu hendak tetap lebih berkuasa daripada Hindia". Karena itu, "apabila benar-benar Belanda berhajat baik" tidak lain yang harus diperbuatnya daripada membentuk "serikat kenegaraan lahir dan batin". Kata-kata ini diucapkannya di gedung Ruyterstraat-67 's-Gravenhage sewaktu ia masih menjalani pembuangannya.

Politik etis memang tidak mungkin untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bila bangsa Indonesia mengalami kemajuan-kemajuannya setelah adanya politik kolonial baru ini, ialah karena jaman makin memudahkan timbulnya kesadaran untuk maju, dan apabila bangsa Indonesia kemudia dapat memenangkan kemerdekaannya, adalah karena semangat untuk merdeka telah menjadi semakin kuat.[8] Kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak pernah dapat dibuktikan dalam program-program kerja pemerintah Nederland ataupun Hindia Belanda. Kapitalisme telah memudahkan perhubungan, sehingga jarak-jarak yang jauh menjadi dekat. Pers pada mulanya menjadi pembantu setia dari kapitalisme untuk membangunkan kerajaanya. Tetapi pers itu pula yang dengan langsung atau tidak, telah

---

[7] Diantaranya dalam buku dr E.Rijpma & M.V. Roelofs *"De Ontwikkelingsgang der Historie"*, II, cetakan ke-3, hlm. 126.

[8] Lihat : Bung Karno : *"Lahirnya Pantja Sila"*.

memperkenalkan bangsa jajahan itu pada soal-soal yang terjadi dan hidup diluar daerah hidupnya, dan ditariknya kesimpulan-kesimpulan daripadanya, dan dikembangkannya pikiran-pikirannya kepada lingkungannya. Apalagi karena kapitalisme membutuhkan kemerdekaan bersaing disegala bidang kehidupan, muncul pulalah sebagai akibatya luang bagi bangsa terjajah untuk juga menggunakan kemampuan dari pers itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada disebarkan mitos, bahwa semua kemajuan Pribumi disebabkan tidak lain karena kapitalisme telah mendirikan STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*). Tetapi mitos yang menyesatkan ini tidak bisa membantah kemungkinan, bahwa 100 buah STOVIA takkan mampu mengakibatkan kemajuan-kemajuan, apabila manusiannya itu sendiri tidak ada semangat untuk maju. Tegasnya, bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah karena semangat dan perjuangannya sendiri, sedang perkembangan kapitalisme telah memudahkan terjadinya hal ini.

Berdasarkan gagasan etis, beberapa humanis Belanda yang "baik hati" telah mencoba menemukan jalan-jalan apakah yang sebaiknya ditempuh agar benar-benar Nederland dapat "melakukan tugasnya pada Rakyat jajahannya". Gagasan yang paling kuat dan berpengaruh ialah : mensintetaskan Rakyat jajahan dengan Nederland sebagai penjajahnya. Dari sini kemudian lahir pikiran-pikiran tentang unifikasi dan asosiasi. Unifikasi menghendaki agar Hindia terdapat hanya satu macam hukum, bukan dua, pertama untuk penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan dengannya, dan yang lain khusus untuk Pribumi dan mereka yang dipersamakan dengannya. Dengan jalan unifikasi orang mengharap dapat dihilangkan batas antara Pribumi dengan kolonialis, mereka akan menjadi satu Rakyat tanpa perbedaan perlakuan. Pikiran ini tidak pernah mendapatkan bumi yang subur. Pikiran lain yang kemudian sangat berpengaruh di dalam masyarakat, terutama pada organisasi dan partai-partai politik kooperatif ialah : asosiasi. Yang akhir ini sebenarnya tidak lain daripada sebuah versi baru dari politik asimilasi Perancis. Penemu dan penganjur pikiran ini tidak lain daripada Dr. Snouck Hurgronje. Pikiran ini hidup lama dan berkembang dengan perlahan didalam masyarakat terpelajar, tetapi tidak pernah mengakibatkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam kehidupan Pribumi jajahan.

b) Politik Asimilasi/Asosiasi

Politik asimilasi adalah politik Perancis yang konstitusional dan merupakan bagian penting daripada usaha negara untuk dapat tetap mempertahankan koloni-koloninya.

Dalam sejarah kolonialisme internasional hanya Perancis lah yang melaksanakan politik ini dengan sadar dan berencana, dan tumbuh dari kenyataan bahwa jajahan Perancis harus dipertahankan dengan cara yang lebih mudah dan dalam pada itu bangsa jajahan itu sebaliknya juga dapat dikerahkan untuk mempertahankan negara Perancis sendiri dalam pertarungan internasional antara kekuatan-kekuatan imperialis-kolonialis yang lain. Tetapi tidak semua jajahan itu diperintahnya dengan politik asimilasi, sehingga pertumbuhan jajahan-jajahannya tidak sama. Jajahannya yang diperintah dengan politik asimilasi terutama sekali ialah yang berada di Afrika Utara : Aljazair dan bagian kecil Tunisia. Disamping itu juga Reunion dan Kaledonia Baru terkecuali daerah-daerah yang disediakan untuk tempat pembuangan.

Secara tidak langsung Belandapun menjalankan politik asimilasi dengan tujuan yang sama, dan ditujukan pada kelompok sangat kecil dan Rakyat jajahannya. Ia menjalankan setaraf demi setaraf dan dengan berbagai medium, antaranya : penasranian penduduk, pendidikan, dan naturalisasi, terutama di daerah Maluku dan Sulawesi Utara.

Politik asimilasi berasal dari kolonialisme Spanyol dan Portugis, yang dijalankan dengan paksa melalui penasranian dan perkawinan dan pendidikan, jadi bersifat dua muka : fisik dan spiritual. Sejarah kolonalisme mengajarkan, sekalipun penjajahan Portugis dan Spanyol dapat digulingkan di Amerika Latin, tetapi ciri-ciri kebudayaan mereka dianggap tetap hidup – dan ini adalah hiburan terakhir yang mungkin diberikan oleh kolonialisme yang dialahkan.

Perancis dalam melaksanakan politik asimilasi bertindak lebih luwes, tidak menempuh jalan paksaan, dan lebih banyak menitikberatkan pada bidang kebudayaan. Melalui dan dengan kebudayaan Perancis, politik kolonialnya mengharap dapat memperanciskan Rakyat-Rakyat jajahannya. Dalam usahanya ini sudah dengan sendirinya ia melakukan juga pengguntingan atas segi-segi kebudayaan bangsa yang sedang diperanciskan itu.

Faktor utama yang menyebabkan Perancis melaksanakan politik ini ialah kenyataan, bahwa ia – berbeda daripada Jepang, Belanda atau Belgia, yang menghadapi masalah kekurangan tanah dan memaksa mereka mengekspor manusia ke daerah-daerah jajahannya – menghadapi kekurangan jumlah penduduk di negerinya sendiri. Dengan tanahnya yang luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya menimbulkan masalah sulit dibidang pertahanan. Maka bila kesulitan itu telah timbul di negara induk penjajahan sendiri, adalah lebih sulit pemecahannya di negeri-negeri jajahannya. Maka dengan memPeranciskan bangsa-bangsa jajahan tersebut, Perancis mengharapkan timbulnya bangsa Perancis buatan yang baru, yang bukan saja sanggup mempertahankan jajahannya, juga mempertahankan Perancis, berdasarkan ketentuan hukum, bahwa baik bangsa Perancis maupun bangsa yang diPeranciskan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Perancis.

Tentang politik asimiasi ini Saussure[9] menyatakan, bahwa yang pokok dalam politik ini adalah "politik kemenangan atas penduduk jajahan", dan karena penduduk jajahan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bangsa penjajah di daerah jajahan itu, maka cara-cara paling efisien harus ditempuh. Maka demikian Saussure, "apabila Spanyol mendasarkan penjajahannya pada landasan keagamaan atas nama dogmatisme dan absolut sifatnya, maka Perancis mendasarkan penjajahannya pada politik asimilasi dan sosial....."

Dalam melaksanakan politk ini dilakukan perombakan-perombakan yang membongkar pandangan rasial, dan karenanya Perancislah kemudian satu-satunya negeri kolonial yang tidak mengenal rasialisme, bahwa perbedaan ras bukanlah perbedaan pokok antara bangsa-bangsa, dan bahwa perbedaan antara manusia di dunia hanya disebabkan karena perbedaan dalam pendidikan. Berdasarkan pendapat itu pula politik asimilasi dijalankan.

Untuk waktu yang lama politik ini nampaknya berhasil sebagaimana diharapkan yaitu dari selapisan penduduk jajahan yang di-asimilasi-kan, dan prosesnya berkembang intensif, terutama di kalangan terpelajar Pribumi, sehingga cara hidup dan pandangan dunia mereka telah mirip dengan yang dimiliki oleh bangsa Perancis sendiri, sehingga negara-negara kolonial lain mencoba-coba untuk mempraktekkannya juga. Sebaliknya negara-negara kolonial yang lebih yakin, bahwa jajahannya harus diselamatkankan dengan jalan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan rasial serta kebudayaan, pada umumnya bukan saja menentang, juga menertawakan praktek kolonial Perancis yang mereka anggap aneh itu. Dalam hubungan ini Colijn merumuskan, bahwa *"kolonials politiek is een raasenquestie"* atau bahwa "politik kolonial adalah soal rasial". Di India, Inggris telah menemukan adanya perbedan-perbedaan dalam bentuk pembagian kasta-kasta, dan demikian ia mendapatkan

---

[9] INDISCHE GIDS sda : R.A. van Sandick : *"Frankrijks' Inboorlingen Politiek"*, (hlm. 645-660).

harapan yang kuat untuk melakukan *devide et impera* nya banyak menemui kesulitan, disamping perbedaan-perbedaan suku, ras dan agama yang telah ada sebelum penjajahannya. Dengan materi ini ia tidak membutuhkan politik asimilasi. Belanda di Indonesia juga telah mendapatkan landasan bagi *devide et impera* nya, yakni kekayaan Indonesia akan mendapatkan perbedaan atau kebhinekaan Indonesia. Maka sebagaimana halnya dengan Inggris ia tidak membutuhkan politik asimilasi terkecuali untuk Maluku dan Sulawesi Utara untuk mengimbangi pengaruh Portugis. Lagipula baik Inggris maupun Belanda tidak mempunyai problem nasional dalam bentuk kekurangan penduduk. Dan walaupun di Indonesia tidak ada pembagian kasta yang keras sebagaimana hal dengan di India, tapi pengkastaan memang masih ada, yaitu feodal dan bukan feodal untuk daerah-daerah Jawa Barat, Tengah dan Timur, Madura dan Bali. Di Sumatera landasan divide et impera adalah adat dan agama, sebagaimana kemudian dirumuskan oleh dr Snouck Hurgronje sebagai cara yang tepat untuk memadamkan perlawanan patriotik Aceh. Maka berdasarkan kenyataan bahwa kasta feodal dan non feodal itu menjadi landasan penjajahan Belanda, menyebabkan Tirto Adhisurjo menamai kaum bangsawan sebagai "tongkat" kaum penjajah (1912). Dengan tongkat ini Belanda menyandarkan kekuasaanya, dan dengan tongkat ini pula ia memukul lawan-lawannya di dalam negeri, baik Rakyat maupun sesama feodal. Dan karena kaum feodal Pribumi telah banyak kehilangan kedudukannya sebagai "magis sentral" kehidupan karena pengaruh Islam, Belanda merehabilitasi kejatuhan ini *Staatsblad* 1857 no. 10, yang menyebabkan mereka terangkat lebih tinggi lagi dengan senjata Forum Privilegiatum sebagaimana tersebut di dalam *Staatsblad* itu (lihat:)

Belanda di Indonesia dengan konsekuen menolak politik asimilasi. Walaupun demikian ada diantara para cendekiawan kolonial Belanda yang merasa, bahwa bentuk penjajahan sebagaimana dikenal selama itu tidak cukup menjamin bahwa Indonesia akan terikat untuk selama-lamanya pada Nederland. Ia menghendaki dijalankannya politik kolonial yang lebih luwes, lebih licin, lebih "berperikemanusiaan" daripada politik etis. Orang ini adalah dr Snouck Hurgronje, sedang politik yang dimaksudkannya adalah : politik asosiasi. Politik ini tidak lebih dan tidak kurang daripada versi asimilasi Perancis, yang juga didasarkan pada gagasan melaksanakan asimilasi dibidang kebudayaan dan sosial. Tetapi gagasan yang ditawarkannya pada pemerintah Hindia Belanda itu ditolak dengan alasan, bahwa Hindia Belanda kekurangan uang untuk membiayai pelaksanaannya. Penolakan itu memang dapat dipahami, karena pemerintah kolonial sedang dalam kesulitan keuangan untuk menyelesaikan peperangannya di Aceh, belum dapat ditertibkannya Perang Banjar, dan belum diselesaikannya perlawanan-perlawanan di Tanah Alas serta Gayo.

Program politik asosiasi menurut penciptanya ialah memperluas pengajaran bagai anak-anak pembesar Pribumi, yang kelak akan ikut memerintah bersama dengan Belanda, anak-anak pembesar Pribumi yang tak bakal disangsikan kesetiaanya pada Nederland itu, pencabutan barrière-sosial dan rasial antara mereka dengan bangsa Eropa, dan memberikan kesempatan yang luas kepada mereka untuk menggauli orang-orang Eropa, membuka pintu keluarga - keluarga Eropa untuk menerima mereka memondok dan dengan demikian secara asimilatif mereka terpimpin secara kultur menjadi orang Eropa.

Waktu yang dipergunakannya untuk menawarkan gagasan tersebut memang tidak dapat dikatakan tepat, karena menurut pemberitaan pers internasional menjelang akhir abad ke-19, asimilasi Perancis yang dilaksanakan dengan susah payah selama puluhan tahun itu menjelang tutup abad ke-19 itu telah menghasilkan manusia-manusia baru yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Perancis sendiri. Menurut laporan Paul Dumas dalam *"Les Francais d'Afrique"* 4000 bocah-bocah Aljazair yang diasimilasi sejak tahun 1868 hanya 100 orang diantaranya yang mau menanggalkan agama Islam serta memasuki Nasrani, sedang pada

tahun 1880 mereka yang berhasil diasimilasi dan memasuki Nasrani justru telah mengeroyok pendetanya sendiri sampai mati. Perancis mengakui, bahwa asimilasi telah menaikkan taraf ekonomi dan sosial mereka – artinya untuk individu-individu bersangkutan – tetapi Gustaf le Bon berpendapat, bahwa "pendidikan Eropa tidak cocok bagi bangsa-bangsa setengah biadab", melihat dari adanya peristiwa yang mengejutkan tersebut. Dalam pada itu bocah-bocah yang diasimilasi secara sistemik melalui pendidikan Barat, ternyata pada menjelang akhir abad ke-19 itu sama sekali tidak memiliki semangat pengabdian Perancis, da justru merekalah yang melahirkan semboyan "Aljazair untuk bangsa Arab !" dan "Lemparkan Perancis keluar Aljazair !"

Dr. Snouck Hurgronje merasa prestisenya tersinggung. Ia masih tetap yakin pada kebenaran gagasannya. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Nederland telah memperlihatkan hasil-hasil yang baik, bahkan tidak jarang lebih baik daripada mahasiswa-mahasiswa Belanda sendiri. Maka untuk membuktikan kebenaran gagasannya tak ada jalan lain yang dapat ditempuhnya daripada mempraktekannya sendiri, yaitu dengan mengambil beberapa anak Indonesia yang sama sekali belum terkena pengaruh kebudayaan Eropa, dan dipondokkan di rumah keluarga Eropa, dan setiap minggu anak-anak tersebut diwajibkan datang kepadanya disuruhnya bercerita apa saja sedang ia sendiri mencatatnya. Demikianlah ia melakukan observasi atas proses asimilasi itu. Salah seorang diantara bocah-bocah yang berhasil di-asimilasi-kan adalah orang yang kelak terkenal dengan nama P.A.A. Djajadiningrat.[10]

Dengan atau tidak dengan program politik sebenarnya proses asimilasi telah berjalan di bidang kultur jauh sebelum dipolemikkan, diperdebatkan dan dilaksanakannya politik etis, dan melahirkan apa yang kelak di dalam sastra dinamai sastra asimilatif (lihat : Bahasa dan Sastra, hlm. Asimilasi fisik, sebagai salah satu dasar dari asimilasi kultur dari taraf yang paling primitif, jauh sebelum dipolitikannya proses itu telah melahirkan istilah khusus : nyai-nyai. Dan tidaklah mengehrankan apabila kehidupan nyai-nyai dari Solern dalam novel seni otobiografi Tirto Adhisurjo *"Boesono"* (1912), *Siti Mariah* dalam roman sosial yang besar dari Hadji Mukti (1910-1912), *Njai Dasima* karya G. Francis (1896) untuk memberikan beberapa contoh. Nyai-nyai dalam sejarah asimilasi ini melahirkan golongan Indo-Eropa dan Indo-Tionghoa. Untuk waktu yang cukup lama golongan Indo-Eropa adalah pendukung daripada kebudayaan Indo-Eroba yang tergolong dalam kebudayaan asimilasi, dan menjadi perintis daripada kesenian-kesenian baru non tradisional di Indonesia, baik dibidang sastra, musik, panggung, jurnalistik dan kemudian juga film. Dengan pengakuan hukum pada golongan Indo-Eropa, dimana mereka dipersamakan dengan bangsa Eropa, mereka berpihak pada imperialisme, dan kehilangan ciri-ciri spesifiknya di dalam pengucapan-pengucapan kebudayaan (1911), dan setelah selesainya peranan mereka, datanglah golongan Indo-Tionghoa mengembangkan kebudayaan asimilasi Pribumi-Tionghoa-Eropa.

Kembali pada gagasan asosiasi. Walaupun pemerintah kolonial menolaknya, dan walaupun kalangan Indo-Eropa melawannya, berdasarkan pertimbangan untuk tidak lebih memperburuk keadaan sosial mereka, namun gagasan ini diterima dan dikembangkan oleh perseorangan dan organisasi-organisasi tertentu. Organisasi pertama-tama yang menerima dan mengembangkan adalah *Oost en West* baik melalui majalahnya *"Koloniaal Tijdschrift"* maupun melalui pameran-pameran yang diusahakannya di Eropa dan Jakarta, yang

---

[10] P.A.A. Djajadiningrat : *"Herinneringen"*, 1936.

memamerkan hasil kerajinan tangan Pribumi, oleh organisasi *Kartini Vereeniging*, malah juga menjadi cita-cita Budi Utomo pada tahun belasan.[11]

Berkembangnya gagasan-gagasan di dalam Zaman Gelap ini, termasuk diantaranya gagasan asosiasi, adalah berkat adanya pers, baik putih, Pribumi maupun Tionghoa. Kemajuan Indonesia dan bangsa Indonesia sedikit atau banyak mempunyai persangkutan dengan kehidupan pers di Indonesia.

4. PERS DI ZAMAN GELAP

Sejarah pers di zaman gelap ini terbagi dalam dua babak. Babak pertama berlangsung sejak adanya surat kabar pertama-tama di Indonesia sampai dengan tahun 1854, sedang babak kedua berlangsung sejak 1854 sampai Kebangkitan Nasional yang bersamaan terjadinya dengan dilaksanakannya politik etis.

a) Babak Pertama Pers di Indonesia :

Babak pertama pers di Indonesia berlangsung antara 1744 sampai 1854. Dalam babak yang memakan waktu selama 90 tahun ini yang terdapat hanya pers putih, sehingga babak ini dapat juga disebut Babak Putih. Dikatakan Babak Putih, karena surat kabar pada waktu itu mutlak milik orang-orang Eropa, berbahasa Belanda, diperuntukkan pembaca berbahasa Belanda, tentang kehidupan orang-orang Eropa, dan tidak mempunyai persangkutan dengan kehidupan Pribumi.

Pers dimulai dengan adanya alat-alat yang memungkinkan, yakni percetakan. Dan pers itu dapat disebut pers apabila ia telah menjalankan tugasnya sebagai mass komunikasi. Karena itu adanya percetakan belum tentu dapat melahirkan pers. Tetapi adanya percetakan merupakan syarat mutlak bagi kemungkinan adanya pers. Karena itu, untuk bisa mengetahui, kapan ada pers pertama-tama di Indonesia harus terjawab : kapan di Indonesia mulai ada percetakan.

Sebelum datangnya orang Eropa di Indonesia, Indonesia yang tidak mengenal pers dalam arti sebagaimana tersebut diatas. Berita-berita yang harus diketahui umum disampaikan oleh punggawa-punggawa Raja dengan jalan memukul gong kemudian menyampaikan pengumuman yang ditugaskan kepadanya. Ia tidak menggunakan cetakan, dan karenanya pengumuman-pengumuman tersebut, sekalipun memenuhi syarat pemberitaan, belum dapat dikatakan pers. Pengumuman-pengumuman tertulis, baik diatas kerta, perkamen, batu ataupun lempengan tembaga, perak dan mas, pun tidak dapat dikatakan pers. Juga pengumuman dalam bentuk isyarat-isyarat, seperti pukulan pada tongtong, gendang tersebut, walaupun didalamnya terkandung penyampaian berita-berita secara massal, juga tidak bisa dinamai pers, karena berita-beritanya yang disampaikan tidaklah di "pers", tidak ditekan atau tidak dicetak. Berdasarkan ketentuan tersebut, haruslah dijawab kapan ada percetakan di Indonesia.

Walaupun bangsa Indonesia sudah lama menulis diatas kertas, dan mengimpornya sudah sejak dalam pemerintahan Airlangga (1019-1042 M) disamping membuat sendiri, dan walaupun impor itu berasal dari Tiongkok, namun sepanjang yang dapat diketahui, belum perna dilakukan impor alat-alat percetakan untuk mencetak kitab-kitab berbasa Pribumi.

---

[11] BOEDI OETOMO 1/10, 15 Agustus 1917, “Bondsvergadering Boedi Oetomo Jang Kesepoeloeh” oleh Topooetomo atas nama Hoofd Bestuur-Redactie Orgaan B.O. ; Keterangan Partai Program Boedi Oetomo pada punt VII dengan keterangan

Menurut laporan yang belum dapat dibuktikan oleh surat-surat resmi, percetakan pertama dimasukkan ke Indonesia pada pertengahan abad ke-17 (1659), dilakukan oleh seseorang Eropa bernama K. Pijl. Menurut laporan Nieuhoff dalam tulisannya *"Zee-en Lantreise"* atau "Pengalaman Di Laut dan Darat", K. Pijl tersebut dengan percetakannya telah menerbitkan buku untuk pertama kali di Indonesia berjudul *"Tijtboek"* atau "Alamanak". Tetapi laporan Nieuhoff tersebut tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya.[12]

Sembilan tahun setelah itu (1668) baru didapatkan bukti-bukti akan masuknya percetakan pertama-tama di Indonesia, karena pada tahun itu P.A. Overtwater dan M. van der Brouck telah menandatangani kontrak dengan *"boekbinder"* – artinya penjilid buku, yaitu istilah untuk pencetak pada waktu itu – yang bernama H. Brandt tentang pendirian sebuah percetakan, dalam nama disebutkan bahwa pihak Kompeni akan menyediakan huruf serta alat-alat lain yang diperlukan. Dalam kontrak tersebut diterangkan, bahwa yang akan bertindak sebagai "sensor" percetakan ialah Mr. Pieter Pauw. Percetakan ini hanya mencetak peraturan-peraturan, plakat-plakat, kontrak-kontrak dengan para Raja Pribumi serta buku doa S. Danckaerts.

Setelah berpindah-pindah tangan dan kekuasaan akhirnya percetakan ini jatuh ketangan padri Loderus. Walaupun banyak pengaduan terhadap pekerjaan percetakan ini, namun pada tahun-tahun pertama abad ke-18, percetakan ini pulalah yang mencetak kamus Melayu susunan Wiltens dan Danckaerts, van Heek dan Houtman, Heurnius dsb.

Hampir satu abad setelah berdirinnya percetakan tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1744 di Indonesia untuk pertama kali terbit surat kabar *"Bataviasche Nouvelles"*, sedang para pencetaknya – yaitu istilah untuk redaktur – adalah H. Mulder, F. Tetsch, L. Dominicus, E. Heemen dan P. van Geemen. Pada waktu itu karangan-karangan yang diumumkan tidak dibubuhi dengan nama pengarang, sehingga segala tanggung jawab jatuh kepundak "pencetak-penanggungjawab". Hal ini menyebabkan "pencetak-penanggungjawab" yang kurang waspada mudah terpancing oleh provokasi yang mengakibatkan runtuhnya surat kabarnya. Demikian pula halnya dengan koran pertama ini.

"Bataviasche Nouvelles" mendapat izin terbit dari Gubernur Jenderal van Imhoff, sedang penerima izin adalah onderkoopmen dan adjunct secretaris generaal Jordens, dengan oktroi untuk masa 6 bulan. Setelah oktroi habis, diperpanjang pula dengan 3 tahun. Dengan adanya pergantian Gubernur Jenderal, yang ternyata tidak menyukai adanya surat kabar, maka pada tahun 1747, koran ini berhenti terbit.

Kegagalan *"Bataviasche Nouvelles"* dialami juga oleh surat kabar-surat kabar sesudah itu. Selain provokasi-provokasi yang merupakan ranjau, salah satu sebab yang tidak kurang pentingnya dari kegagalan adalah karena para "pencetak" biasanya bukanlah orang-orang yang berpengalaman apalagi karena pekerjaan itu bukan pekerjaan khusus, hanya sambilan saja, sedang orang-orang Eropa yang mempelopori pekerjaan ini kebanyakan adalah orang-orang totok yang pergi ke Indonesia untuk mencari penghidupan, dan sudah sejak meninggalkan negerinya membawa prasangka "diri lebih tinggi" daripada segala apa yang ada di Indonesia. Prasangka ini kelak akan meninggalkan cap yang dalam dalam kehidupan pers putih di Indonesia. Prasangka ini pula, ditambah dengan tiadanya pengalaman, menyebabkan tulisan-tulisan yang diumumkan bernada kursus, baik dibidang politik, sosial, militer, pendidikan maupun kebudayaan, sehingga kehilangan segi-seginya yang aktual, lebih banyak bersemangat akademi, sehingga tidak jarang menimbulkan buah tertawaan para ahli.

[12] Encylopaedie van Nederlandsch Indie. “Drukpers” (hlm. 641-643)

Maka untuk waktu yang cukup lama koran terbitan Indonesia merupakan bacaan yang tidak populer.

Pada tahun 1776 terbit koran lain, yaitu *"Vendunieuws"* atau "Berita Lelangan". Sebagaimana halnya dengan surat kabar pertama, yang belakangan ini pun terbit di Jakarta, dan sempat beredar sampai tahun 1809, suatu hal yang akan menimbulkan pertanyaan : mengapa berita-berita tentang lelangan memungkinkan surat kabar itu hidup sampai sekian lama ?

Lelangan pada masa itu, juga dalam masa seluruh penjajahan Belanda, merupakan bagian penting dalam kehidupan kepegawaian. Sukses tidaknya sebuah lelangan atas barang-barang seseorang pegawai tertentu, menjadi pentunjuk populer tidaknya orang bersangkutan di dalam masyarakatnya, dan (sudjut) tidaknya bawahannya kepadanya. Lelangan mempunyai pertautan yang erat dengan tugas-tugas negeri yang dikendalikan oleh *Algemeene Secretarie* disatu pihak, dan atau merupakan bentuk ? dipihak lain, yang juga dikendalikan oleh pejabat-pejabat pada *Algemeene Secretarie*. Untuk memindahkan seorang pejabat yang dibenci, orang bisa "membeli" jasa pada pejabat *Algemeene Secretarie* tersebut. Untuk meruntuhkan seseorang pegawai yang berada karena dinasnya yang sudah lama dan simpanannya sudah banyak, orang cukup dengan "membeli" jasa untuk memindahkannya 5 atau 7 kali berturut-turut dalam jangka setahun ditempat-tempat yang berjauhan satu dari yang lain, sehingga habis tandas seluruh kekayaannya sampai dapat dikatakan "menjadi pengurus".[13]

Lelang merupakan bagian yang tak perpisahkan daripada sistem kepegawaian kolonial. Banyak diantara para priyayi ikut serta dengan mengerahkan kekuangan baik diluar maupun didalam kemampuannya untuk menunjukkan "kecintaan"nya pada pejabat – biasanya atasannya – yang dipindahkan, sekalipun untuk itu ia harus membayar lebih mahal daripada di pasar bebas. Inilah yang menjadi basis dari kehidupan surat kabar *"Vendunieuws"*.

Beberapa waktu setelah itu tidak terdapat surat kabar terbitan Indonesia, sedang yang dibaca oleh golongan penduduk berbahasa Belanda ialah koran yang diimpor dari Nederland. Dalam pemerintahan Daendels kemudian terbit sebuah surat kabar pemerintah yang bernama *"Bataviasche Koloniale Courant"* (1810), sebagai terompet dari Daendels dalam melaksanakan program perombakan. Orang-orang Belanda, yang menganggap ia telah menjual jajahannya kepada Perancis, mengecam koran tersebut sebagai tempat ia menyalurkan puji-pujian kepada dirinya sendiri dihadaan umum. Daendels adalah seorang wali negeri yang ingin melaksanakan perombakan secara cepat, dan karena itu ia menggunakan tangan besi dan bertindak secara radikal dan keras. Untuk mendapat dukungan terhadap kerja perombakan itu ia membutuhkan pengertian dari masyarakat dan terutama sekali dari pegawai-pegawai negeri. Karena itu ia memerintahkan terbitnya koran tersebut yang terbit seminggu sekali.

Pada tahun 1811 dengan digantikan kedudukannya oleh Jan Willem Jansen, yang belum sempat melakukan sesuatu telah tersusul oleh pendaratan bala tentara Inggris di Jawa, surat kabar tersebut berhenti terbit. Dalam pemerintahan Inggris dibawah Letnan Gubernur Raffles, atas perintahnya diterbitkan surat kabar pemerintah *"Java Gouvernment Gazette"* sebagai pengganti *"Bataviasche Koloniale Courant"*. Dalam surat kabar ini pula ia mengumumkan artikel bersambung tentang meledaknya Gunung Tambora (1815), yang telah menewaskan kurang lebih 56.000 jiwa. Sama halnya dengan Daendels, penerbitan koran

[13] R.M. Tirto Adhisoerjo : *"Boesono"*, 1912, sebuah novel semi-otobiografi.

pemerintah tersebut merupakan bagian daripada usaha melaksanakan reformasi secara cepat, dan juga untuk mempercepat perkembangan penyelidikan ilmu-ilmu tentang Indonesia. Antara lain karena materi-materi yang dilaporkan di dalam *"Java Gouvernement Gazette"* maka kelak ia dapat menerbitkan karya standarnya *"History of Java"* (1817) yang tiada tandingannya untuk waktu yang lama, malahan satu setengah abad kemudian masih dipergunakan sebagai sumber bahan.

Setelah selesai penjajahan Inggris di Jawa (1816) terbitlah koran Belanda bernama *"Bataviasche Courant"* (1817), dan pada tahun 1828 terbit surat kabar pemerintah *"Javasche Courant"*, yang kelak biasa disebut dengan nama *"De Courant"* saja.

Dengan demikian semakin banyaknya percetakan didatangkan ke Indonesia dari Eropa, dan tersebar diberbagai kota besar, bertambah luas kesempatan untuk menerbitkan surat kabar. Semarang mendapat percetakan pada tahun 1837, Surabaya pada 1854, Pasuruan pada tahun 1856, Surakarta pada tahun 1854, Padang pada tahun 1858, dan menyusul kemudian kota-kota lain seperti Medan (Deli), Banjarmasin, Pulau Petah, Tomohon, Tondano, Ambon, Kupang dst, sehingga menurut perhitungan tahun 1914 telah terdapat 78 buah percetakan di Jawa dan 108 diluarnya.

Setelah terbit *"Javasche Courant"* barulah keluar pers putih swasta, mula-mula adalah *"Bataviaasch Advertentieblad"* (1829), tetapi kedua-dua surat kabar putih swasta yang mula-mula ini tak lama hidupnya, sekalipun mereka terbit di Jakarta. Rahasia dari kependekan umurnya terletak pada kenyataan, bahwa perdagangan monopoli yang dipegang oleh NHM tidak banyak membutuhkan propaganda melalui surat kabar, lagipula perdagangan umum waktu itu belum memasuki taraf liberalisasi. Perdagangan kecil pun tidak membutuhkan pers untuk menawarkan dagangannya, sedang syarat-syarat yang mencukupi untuk melakukan persaingan bebas belum tersedia.

Sebaliknya daripada koran-koran dagang terbitan Jakarta tersebut, justru koran-koran yang keluaran Surabaya, yaitu *"Soerabaia Courant"* yang lahir pada tahun 1831 berhenti terbit baru pada runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda (1942), sedang koran terbitan Semarang, *"Samarangsch Advertentieblad"*, yang lahir pada tahun 1845 dan pada tahun 1852 diubah menjadi *"De Locomotief"*, dapat terus hidup sampai tahun 1953 dengan terseling oleh zaman pendudukan Jepang. Koran-koran daerah ini ternyata memberi dorongan pada Jakarta. Pada tahun 1851 terbit koran dagang *"Bataviasche Advertentieblad"* dan setahun kemudian diubah namanya menjadi *"Java Bode"*, dan sebagaimana hal dengan *"De Locomotief"* hidup panjang sampai memasuki zaman kemerdekaan.

Sampai dengan terbitnya *"Java Bode"* dapat dikatakan Bapak Pertama Pers di Indonesia, atau Babak Putih, selesai, karena kemudian menyusul Babak Kedua.

Dalam Babak Putih ini terdapat hal-hal yang tipikal bagi mengenali watak penjajahan, dan khususnya penjajahan Belanda, sebagai pentunjuk, bahwa kekuasaan penjajahan di Indonesia tidak pernah menyukai adanya pers, selama pers itu tidak membenarkan segala tindakannya. Ciri-ciri itu ialah :

a) dibenarkannya hanya pers pemerintah : *"Bataviasche Koloniale Courrant"*, *"Java Gouvernment Gazette"* dan *"Javasche Courrant"*.
b) dihindarinya setiap kontrol sosial atas jalan dan pelaksanaan politik penjajahan oleh masyarakat dari golongan apapun, sebagai pencerminan dari watak kolonial yang tidak mengakui hak siapapun yang tidak memegang kekuasaan

politik untuk ikut campur dalam masalah-masalah politik, yang berarti bahwa pemerintah kolonial menganggap, bahwa politik hanya jadi haknya.

Khusus mengenai yang akhir ini dapat dijelaskan melalui beberapa fakta yang merupakan bagian penting dalam sejarah pers di Indonesia :

Dalam pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch (1830-1833) pemerintah pernah memberangus surat kabar pemerintah *"Javasche Courant"* karena mengumumkan tulisan-tulisan aktual tentang Tanam Paksa, yang oleh pemerintah dianggap bisa menimbulkan polemik. Nampaknya pemerintah kolonial menganggap bahwa Tanam Paksa adalah urusan pribadinya, sedang kesengsaraan para petani yang menjalankan kerja paksa itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, juga Nederland tidak boleh mengetahui terkecuali keuntungan-keuntungan yang dapat ditarik daripadanya. Pemberangusan tersebut kemudian terpaksa divanut karena dirasakan sia-sia, sebab bersamaan waktunya dengan itu di Nederland sendiri terbit sebuah brosur tentang kejahatan politik Tanam Paksa ini. Karena di Hindia Belanda sampai sejauh itu tidak ada peraturan yang dapat melarang masuknya barang-barang cetakan dari Nederland, maka brosur tersebut dengan bebas dapat memasuki Indonesia dan beredar dikalangan pembaca putih di Indonesia yang berbahasa Belanda. Tindakan selanjutnya dari van den Bosch untuk melindungi kejahatan Tanam Paksa nampak dari keluarnya perintah untuk menangkap seorang pegawai Eropa yang dipaksa untuk bersumpah, bahwa ia bukan penulis brosur tersebut. Pemberangusan terhadap *"Javasche Courant"*, yang adalah surat kabar pemerintah -- terulang dalam pemerintahan pengganti van den Bosch, yaitu J.C. Baud sebagai pejabat Gubernur Jenderal (1833-1836), dengan alasan yang sama.

Sikap keras pemerintah agak berubah dalam pemerintahan J.D. de Eerens (1836-1840) dengan kedatangan ds dr W. Baron van Hoevell di Jakarta pada tahun 1837. Ialah pelopor penerbitan majalah pertama-tama dalam sejarah pers di Indonesia -- sejauh yang dibicarakan adalah Babak Putih. Ialah pula yang menerbitkan *"Tijdschrift van Nederlandsch-Indie"*, yang dicetak pada percetakan negeri dengan harga murah dan dikirimkan cuma-cuma oleh pos, karena pemerintah menganggap, bahwa majalah ini menyiarkan pengetahuan dan peradaban tentang Hindia Belanda. Disamping pemerintah menerbitkan bantuan dan fasilitas, juga meminta konsensi pada majalah tersebut, bahwa majalah tersebut tidak diperkenankan membicarakan soal-soal politik dan hal-hal lain yang dianggap bisa menggelisahkan kepercayaan umum pada pemerintah. Dalam konsensi ini ditetapkan, bahwa, sekiranya redaksi merasa sangsi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diberikan, ia diharuskan mengirimkan naskah yang akan dicetak tersebut kepada *Algemeene Secretaris*, J.P. Cornets de Groot, dan selain daripada itu redaksi diwajibkan mengirimkan nomor-nomor bukti kepadanya.[14]

Sejalan dengan kehendak pemerintah, para pejabat negeri pada waktu itu tidak senang melihat diumumkannya berita-berita yang bersangkutan dengan politik, dengan pemerintahan, karena mereka menganggap, bahwa bidang itu harus ditabukan untuk umum, karena ada banyak hal yang tidak boleh diketahui "orang luar".

Dengan meninggalnya Gubernur Jenderal dan berhentinya *Algemeene Secretaris* pada tahun 1840, keadaan segera berubah. Ini terjadi dalam pemerintahan pejabat Gubernur Jenderal C.S.W. van Hogendorp (1840-1841) dan kemudian diteruskan dalam pemerintahan pejabat Gubernur Jenderal P. Merkus (1841-1843 ; 1843-1844), pejabat Gubernur Jenderal

---

[14] SIN PO, 1928, melalui Naskah kerja Lie Lan Mey, 1963 : *"Hikayat Pers di Indonesia"*, hlm. 44-46.

J.C. Reijnst (1844-1845), Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851), dan baru diperlunak dalam pemerintah Gubernur Jenderal A.J. Duymaer van Twist (1851-1856).

Pertama-tama yang dilakukan oleh *Algemeene Secretaris* baru ialah menghentikan disiarkannya berita-berita resmi yang biasanya diberikan pada majalah tersebut untuk diumumkan. Bantuan-bantuan resmi, yaitu fasilitas-fasilitas dan pengiriman gratis lewat pos, dicabut. Van Hoevell mengajukan permohonan kepada *Algemeene Secretaris* agar majalahnya boleh memuat kembali soal-soal yang menyangkut urusan pemerintahan, dan agar boleh mencetak kembai dengan ongkos rendah pada percetakan negeri. Tetapi permintaan itu ditolak. Akhirnya ia mencoba mengajukan permohonan pada pejabat Gubernur Jenderal sendiri, tetapi yang belakangan ini justru menganggap, bahwa adalah tidak pantas menyiarkan hal-hal yang berhubungan dengan politik kepada umum. Namun *"Tijdschrift van Nederlandsch-Indie"* ini dapat juga meneruskan penerbitannya, dan pada tanggal 19 Mei 1844 menerbitkan sebuah artikel yang mengecam politik Menteri Jajahan. Segera pemerintah kolonial mengeluarkan perintah pelarangan penyebaran majalah yang memuat kecaman tersebut.

Sudah pada waktu itu setiap pelarangan penyebaran ataupun pemberangusan dianggap sebagai hukuman yang dijatuhkan tanpa proses hukum, dan karenanya oleh pers pada waktu itupun sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap keadilan. Komisi van Hoevell mengajukan permohonan pada pejabat Gubernur Jenderal agar tidak mengambil tindakan keras terhadap majalahnya. Permohonan ternyata dikabulkan dan majalah diteruskan penerbitannya.

Dalam bulan Januari 1845, redaksi menerima sebuah karangan dari sarjana masyhur Franz W. Junghuhn, yang menulis tentang pengalamannya sendiri, tetapi yang dalam pada itu mengandung kecaman terhadap politik pemerintah yang berlaku waktu itu. Karangan tersebut dimuat tanpa sesuatu perubahan. Pemerintahan, yang merasa terkena kritik, tak dapat lagi mengendalikan kemarahannya, dan mengancam majalah tersebut untuk dilarang sama sekali penerbitannya, sedang penulisnya diancam akan diusir dari Indonesia dan akan dipecat jabatannya, bila berani mengulangi perbuatannya. Sejak terjadinya peristiwa ini pemerintah bersikap lebih keras lagi terhadap pers.

Adapun Franz W. Junghuhn sendiri (1809-1864) adalah seorang penyilidik alam bangsa Jerman dan masyhur karena penyelidikannya yang luas mengenai bangsa dan alam Tanah Tapanulis dan Tanah Jawa. Ia pulalah penanam pohon kina yang pertama-tama di Indonesia, yaitu di Pengalengan, Jabar, yang didatangkan dari Amerika Selatan.

Pada tahun 1845 ini juga Gubernur Jenderal (pejabat) J.C. Reijnst digantikan oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochussen. Tetapi karena *Algemeene Secretaris* tidak diganti, politik pemerintah terhadap pers masih tetap seperti sebelumnya. Maka untuk menerobos kekuasaan yang berlebih-lebihan ini pada bulan April 1848 van Hoevell membawa berkas majalahnya ke Nederland, dan penerbitannya diteruskan disana. Nederland sebagai negara merdeka tidak menghalang-halangi usaha ini dan disini ia mendapat keleluasaan untuk meneruskan tulisan-tulisannya yang menggugat kejahatan Tanam Paksa, sehingga, bukan saja dalam sebentar waktu majalah ini menjadi tempat para terpelajar mengumumkan tulisan-tulisannya yang progresif menurut ukuran waktu itu, juga menjadi sumber yang terpercaya dari kebengisan Belanda semasa dilaksanakannya Tanam Paksa.

Karena tidak ada ketentuan yang melarang majalah-majalah atau terbitan-terbitan tertentu dari Nederland untuk diimpor ke Indonesia, majalah inipun dimasukkan ke

Indonesia. Van Hoevell, yang sementara itu telah kembali ke Indonesia, meneruskan dinasnya di Jawa sambil terus memimpin majalahnya yang terbit di Nederland.

Pada tahun 1847, dengan maksud untuk menamatkan kegiatannya yang merugikan nama baik pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah mengambil keputusan untuk memindahkannya ke Serang. Tetapi sia-sia. *"Tijdschrift van Nederlandsch-Indie"* terus menerbitkan laporan-laporan tentang kejahatan Tanam Paksa, dan tiada sesuatupun pegangan hukum yang dapat dipergunakan melarang kegiatannya ini. Akhirnya ia dan pembantunya, Bloeker, dipanggil menghadap Gubernur Jenderal dan dimintai kemauan baiknya untuk menyatakan penyesalanya di depan umum dan dimintai pua agar ia menarik kembali tulisan-tulisan mereka, tetapi kedua orang itu menolak. Hal ini menyebabkan kemurkaan Gubernur Jenderal. Bloeker mendapat ancaman akan dipecat dari dinas pemerintah, karena ia adalah seorang pejabat militer. Tetapi pembesar-pembesar militer menolak ancaman Gubernur Jenderal itu. Ia meneruskan kegiatan jurnalistiknya tanpa dapat dihentikan dari dinasnya. Pada masa ini masyarakat Belanda di Indonesia, yang kebanyakan terdiri dari pejabat-pejabat negeri, praktis tidak suka membaca koran-koran, karena

a) peraturan pers yang keras dan ditangani sendiri oleh Gubernur Jenderal serta *Algemeene Secretaris*, sehingga pemberitaan-pemberitaan tidak menarik dilihat dari jurusan sensasi, sejauh hal itu mengenai surat kabar terbitan Indonesia,
b) b) pejabat-pejabat negeri yang membaca koran – sama halnya dan koran itu sendiri – tidak disukai oleh rekan-rekannya, bahkan dicurigai, dan
c) harga koran sangat tinggi.

Pada umumnya merekapun tidak membaca surat kabar impor dari Nederland sesuai dengan poin b) diatas, lagipula tulisan-tulisan tentang Indonesia pada umumnya ditulis oleh orang-orang yang tinggal di Indonesia sendiri, sehingga bisa menyebabkan pembaca koran dituduh terlibat dalam komplotan jurnalistik.

Sikap pemerintah yang demikian itulah antara lain yang menyebabkan pada tahun 1850, seorang bekas opsir marine H.J. Lion, yang telah mengumumkan laporannya tentang bencana kelaparan di Demak dan Grobogan di dalam surat kabar *"Nieuwe Rotterdamsche Courant"* menjadi bulan-bulan penguberan Kejaksaan Negeri Semarang. Yang belakangan ini memerintahkan agar ia ditangkap dan dituntut. Proses selanjutnya ialah, bahwa berdasarkan alasan hukum ia tidak bisa ditangkap, tetapi tetap dituntut. Proses selanjutnya ialah, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 1851 pengadilan telah membebaskannya dari tuntutan. Waktu ternyata bahwa Pengadilan menolak melakukan penangkapan dan menuntut Lion, pemerintah menginstrusikan agar alat-alat pemerintah, yaitu semua Residen, memata-matai segala tindak tanduknya. Jaksa Agung sendiri tidak menyetujui pembebasan tersebut dan meminta agar vonis pembebasan diganti dengan pengusiran dari Indonesia selama 5 tahun. Tekanan Jaksa Agung menyebabkan perkaranya kembali disidangkan, tetapi putusan pengadilan tetap : ia dibebaskan. Sekali lagi Jaksa Agung memperberat tuntutan agar ia dihukum penjara 5 tahun, tetapi pengadilan tetap membebaskannya.

Dari fakta sejarah dalam Babak Putih tersebut dapat dilihat, bahwa pemerintah betul-betul menolak ikut campurnya masyarakat dalam kehidupan politik, bahwa politik adalah mutlak urusan negeri. Setiap hal yang menyebabkan diketahuinya urusan negeri oleh umum dianggap memusuhi pemerintahan kolonial. Untuk menjunjung kebesaran dan kekuasaan Nederland atas Hindia Belanda, segala jalan harus ditempuh oleh Gubernur Jenderal dan alat-alat yang berada dibawah kekuasaannya, untuk menindas segala kemungkinan peningkatan

kehidupan politik di Indonesia, tidak peduli kehidupan politik itu untuk masyarakat Eropa ataukah Pribumi.

Walaupun *"Tijdschrift van Nederlandsch-Indie"* mengalami kekangan sekalipun penerbitannya telah dipindahkan ke Nederland, akhirnya dapat juga membentuk pendapat umum, bahwa ada banyak hal tidak beres telah terjadi di Tanah jajahan. Orang mulai melihat, bahwa kekayaan yang melimpah-limpah datang ke Nederland tidak lain daripada bentuk lain daripada air mata, darah dan jiwa Pribumi jajahan. Pendapat umum yang mulai terbentuk pada segolongan masyarakat Nederland yang mau mengerti ini, kemudian diperkeras dengan terbitnya buku Multatuli *"Max Havelaar"*, sedang bencana kelaparan Demak - Grobogan yang menewaskan sebagian terbesar penduduknya merupakan berita yang mendirikan bulu roma. Maka apabila aparatur pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengutuk perbuatan van Hoevell, maka kaum liberal menghargainya setinggi-tingginya, suatu faktor yang menyebabkan ia terpilih menjadi anggota Parlemen.

b) Babak Kedua Pers di Indonesia :

Pada tahun 1854, dalam pemerintahan Gubernur Jenderal A.J. Duymer van Twist, juga banyak disindir oleh Multatuli itu, dikeluarkanlah peraturan yang memberikan kelonggaran pada kegiatan pers. Akibat dari kelonggaran ini ialah, bahwa pers yang terbenci oleh pemerintah kolonial itu bukan saja hanya menjadi kegiatan yang boleh dikerjakan oleh orang-orang Eropa saja. Walaupun peraturan ini cukup maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, namun dibandingkan dengan kegiatan pers didaerah penjajahan Inggris, Indonesia mengalami ketinggalan yang banyak. Apabila pada tahun 1788 di Bengkulu jajahan Inggris telah terbit memoar *"Hikayat Nachoda Muda"* karangan Lauddin dari Lamppung, maka pada tahun 1820 di Bengkulu itu juga telah terbit majalah *"Malayan Miscellany"* yang menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Penggunaan bahasa Melayu dalam pers ini di Hindia Belanda baru dimulai jauh setelah keluarnya peraturan Duymaer van Twist.

Perubahan luar biasa dalam sikap kolonial ini bersumber pada kemenangan kaum Liberal di Nederland. Dengan menjadi besar dan menentukan pengaruh kaum Liberal dilapangan politik Menteri Jajahan mendapat kewajiban baru, yaitu membuat "koloniaal verslag" atau laporan tentang daerah jajahannya kepada *Staaten Generaal*. Kewajiban ini mengakibatkan anggota Parlemen pun dapat menuntut keterangan pemerintah tentang itu, dan perkembangan selanjutnya adalah, bahwa perdebatan-perdebatan tentang politik yang yang dijalankan di Indonesia mulai memasuki forum parlementer. Pada gilirannya perdebatan-perdebatan antara pihak pemerintah dengan anggota-anggota Parlemen makin lama makin banyak membutuhkan materi yang dapat diterima langsung dari Indonesia tanpa atau dengan melalui susunan pejabat kolonial di Hindia Belanda yang ditugaskan untuk itu. Dunia Barat pada waktu itu telah memahami dengan sebaik-baiknya, bahwa sumber bahan yang paling mudah, paling murah dan paling kaya ada pers. Demikianlah maka untuk pertama kali pers di Indonesia dianggap mempunyai fungsi yang penting dalam politik. Dan inilah yang menyebabkan diadakannya kelonggaran tersebut.

Pada tahun 1852 atau dua tahun sebelum keluarnya peraturan kelonggaran itu *"Samarangsch Advertentieblad"* telah diubah namanya menjadi *"Locomotief"* berdasarkan kenyataan, bahwa pada waktu itu lokomatif merupakan produk kapitalisme terbaru yang ajaib, yang untuk selanjutnya akan memecahkan kesulitan-kesulitan tentang jarak untuk seluruh dunia. Tahun 1852 juga merupakan tahun sejarah bagi pers di Indonesia, karena pada tahun itu *"De Locomotief"* untuk pertama kali mengeluarkan lampiran yang menggunakan

lithografi, berisikan pengumuman-pengumuman dan iklan-iklan, menggunakan bahasa Melayu, Jawa dan Tionghoa. Menurut pendapat Drewos[15], lampiran itu, dan bukan surat kabarnya, adalah pelopor dari surat kabar-surat kabar di Indonesia non pemerintah atau surat kabar - surat kabar merdeka.

Sejak dikeluarkannya peraturan kelonggaran tersebut, memang nampak adanya peningkatan kegiatan pers di Indonesia. Tetapi pada umumnya kegiatan itu masih tetap menjadi monopoli bangsa Eropa. Situasi penerbitan surat kabar setelah 1854 itu menjadi monopoli bangsa Eropa. Situasi penerbitan surat kabar setelah 1854 itu dapat dilihat dari daftar dibawah ini, terkecuali *"Tjaraka Walanda"* yang sekalipun bahasa dan huruf Jawa adalah terbitan 's-Gravenhage, Nederland.

Situasi Penerbitan Baru 1854 – 1860

No.	Tahun	Nama Terbitan	Tempat Terbit	Bahasa	Mati
1	1855	"*De Opwekker*" (majalah)	Jakarta	Belanda	?
2	1855	"*Tjaraka Walanda* (majalah)	's-Gravenhage	Jawa	?
3	1856	Mail Editie "*Java Bode*"	Jakarta	Belanda	1863
4	1856	"*Padangsche Nieuws – Advertentieblad*	Padang	Belanda	1861
5	1867	"*Nederlandsch Indie*" (surat kabar)	Jakarta	Belanda	1858
6	1867	"*Pasoeroeansch Nieuwsblad* (surat kabar)	Pasuruan	Belanda	1875
7	1858	"*Nieuwe Soerabia Courant*"	Surabaya	Surabaya	?
8	1858	"*Soerat Chabar Betawi*"	Jakarta	Melayu	?
9	1858	"*Jaarverslag der Nederlandsch Indische Escompto*	Jakarta	Belanda	
10	1859	"*Bataviaasch Handelsblad*"	Jakarta	Belanda	1865/1888/1894 /1918
11	1860	"*Slompret Melajoe*" (surat kabar percobaan)	Semarang	Melayu	1860

Antara masa 1854 - 1860 ini muncul suatu hal yang penting dalam sejarah pers di Indonesia, yakni :

a) penerbitan surat kabar lebih banyak daripada penerbitan majalah, sedang majalah yang terbit dalam kurun itu tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penting – bila tidak dipergunakan penggunaan bahasa sebagai ukuran – karena sampai sejauh ini masih juga *"Tijdschrift van Nederlandsch Indie"*, *"Indische Magazijn"* (1844-1865), *"Bianglala"* (1852-1855), *"Geneeskundig Tijdschrift"* (1852-1942) dan *"Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie"* (1853-1941) yang mengandung nilai lebih baik (dengan mengecualikan daerah Indonesia yang dijajah Inggris).
b) mulai dipergunakannya bahasa-bahasa Pribumi di dalam pers, dan dalam hal *"Tjaraka Walanda"* adalah yang pertama, sekalipun diterbitkan di Nederland. Tetapi *"Soerat Chabar Betawi"* menduduki tempat pertama dalam persuratkabaran berbahasa Pribumi terbitan Indonesia dan kemudian menyusul surat kabar percobaan "Slompret Melayu, yang terbit hanya beberapa lembar.

Dalam Babak Kedua ini orang putih tidak lagi menjadi aktivitas mutlak, karena surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu bukan lagi diusahakan atau dipimpin oleh orang-orang Eropa, tetapi oleh orang-orang Indo-Eropa. Apa sebabnya orang-orang Indo-Eropa menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu, ialah karena pada umumnya tidak berbahasa

[15] *KOLONIALE STUDIEN*, Februari 1934. Lihat juga Kwee Kek Beng : *"Westersche Invloeden op het Maleisch"* (hlm. 92-109).

Belanda, sedang bahasa-bahasa yang dikuasainya biasanya Melayu disamping bahasa daerah lainnya. Dalam abad ke-19 kedudukan mereka disamakan dengan kedudukan Pribumi, dan karenanya pun hidup dalam serba kesulitan. Hanya mereka yang sempat mengunjungi sekolah-sekolah agama mendapat keberuntungan mempelajari bahasa Belanda, dan jumlah yang beruntung itu adalah terlalu sedikit.

Surat kabar berbahasa Melayu ini bukanlah ditujukan kepada masyarakat pembaca Pribumi, karena Pribumi dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk itu tidak membaca. Dalam pada itu huruf Latin merekapun pada umumnya belum menggunakan.

Babak Kedua dalam sejarah pers inilah Babak Asimilatif, artinya pers yang menggunakan bahasa Pribumi, dipimpin dan ditujukan pada pembaca bukan Pribumi, tentang hal-hal yang tidak menyangkut Pribumi, tapi berada diatas bumi Pribumi. Babak Asimilatif dalam pers ini dikuasai oleh golongan Indo sampai dengan penutup abad ke-19

"Slompret Melajoe" yang diterbitkan pada tahun 1860 oleh van Dorp di Semarang sebagai percobaan, kelak, hampir 16 tahun kemudian, diterbitkan kembali dibawah pimpinan J.J.P. Halkema dalam bentuk mingguan, dan menggunakan bahasa Melayu - Indo, atau lebih tepat disebut bahasa Melayu kerja, atau bahasa pra Indonesia.

Surat kabar *"Soerat Chabar Betawi"* tidak begitu lama hidupnya. Tetapi *"Slompret Melajoe"* yang kemudian diterbitkan secara tetap mulai tahun 1876. Orang menamainya surat kabar Melayu Indo karena pimpinannya, sementara itu orang menamainya juga surat kabar Melayu Tionghoa, karea surat kabar ini diperuntukkan pembaca Tionghoa, dengan cersam-cersam yang diambil dari khazanah sastra Tionghoa klasik seperti *"San Kuo Chi"* atau *"Sam Kok"* yang justru dihidangkan pada nomor-nomor penerbitan pertama.

Pers yang menggunakan bahasa-bahasa Pribumi dalam Babak Kedua sama sekali tidak ada yang ditujukan kepada Pribumi sendiri, terutama tertuju pada golongan Indo Belanda atau Tionghoa. Hal ini disebabkan karena pada umumnya Pribumi tidak membaca huruf Latin dan dalam pada itu harga surat kabar pun terlalu mahal. Jadi alasannya masih sama dengan Babak Putih.

Setelah tahun 1860, terutama setelah 1870, penerbitan berbahasa pra Indonesia mengalami sedikit perubahan pada tempatnya. Munculnya surat kabar-surat kabar berbahasa Pribumi bukan pra Indonesia, terutama yang berbahasa Jawa, ditujukan tidak pada golongan Indo Eropa atau Indo Tionghoa, tetapi pada pembesar-pembesar Pribumi, terutama yang menjabat pekerjaan negeri atau pada pabrik-pabrik gula.

Gambaran penerbitan surat kabar antara tahun 1860 sampai 1880 adalah sebagai berikut :

Situasi Penerbitan Baru 1860 – 1880*

No.	Tahun	Nama Penerbitan	Tempat Terbit	Bahasa	Mati
12	1861	"*Nederlandsch Indie*" (Terbitan kembali. Lihat, no 5)			
13	1861	*Soerabaia Nieuwsbode - Dagblad*	Surabaya	Belanda	1869
14	1861	*Makasaarsch Weekblad* (majalah)	Makasar	Belanda	1862
15	1862	*Sumatra Courant*	Jakarta	Belanda	1894
16	1862	*Makasaarsche Handels Adv. Blad*	Makasar	Belanda	1866
17	1862	*Pengadilan* (majalah)	Bandung	Melayu	1865
18	1863	*De Oost Post* (majalah)	Surabaya	Belanda	1865
19	1863	*Bataviaasch Zendingsblad*	Jakarta	Belanda	1865

20	1864	*Djuru Martani*	Surakarta	Jawa	1870
21	1864	*Indische Humurist*	Jakarta	Belanda	1864
22	1865	*Bataviaasch Handelsblad* (terbitan kembali, lihat no. 10)			
23	1865	*Handelsblad Pasoeroean*	Pasuruan	Belanda	1876
24	1866	*Maandblad v. Opv. en Ondw*	Jakarta	Belanda	1868
25	1866	*Soerabiaasch Handelsblad*	Surabaya	Belanda	1942
26	1867	"*Java Bode*" Mail-Editie (Terbitan kembali. Lihat, No. 3)			
27	1868	*Dagelijks Advertentieblad*	Jakarta	Belanda	
28	1868	*Dagblad van Celebes*	Makasar	Belanda	
29	1868	*Nieuwe Advertentieblad Soerakarta*	Surakarta	Belanda	1869
30	1868	*Biang Lala* (majalah) **	Jakarta	Pra Indonesia	1870
31	1869	*Bintang Barat*	Jakarta	Pra Indonesia	1872
32	1869	*Insulinde*	Makasar	Belanda	1871
33	1869	*Matahari*	Jakarta	Pra Indonesia	1870
34	1869	*Tjahaja Siang*	Minahasa	Melayu	1923
35	1870	*Indisch Militair Tijdschrift*	Bandung	Belanda	1942
36	1870	*Handelsblad Makassar*	Makasar	Belanda	1883
37	1870	*Indische Spectator* (majalah)	Surabaya	Belanda	?
38	1870	*De Vorstenlanden*	Surakarta	Belanda	1879
	1871	Kosong			
39	1872	*Hindia Nederland*	Jakarta	Melayu	1874
40	1872	*Nederland op Java* (majalah)		Belanda	1874
41	1872	*Padangsch Handelsblad*	Padang	Belanda	?
42	1873	*Alg. Dagblad v. Ned Indie*	Jakarta	Belanda	1886
43	1874	*Bintang Barat* (terbitan kembali, lihat no. 31)			
44	1874	*Bintang Djohar*	?	Pra Indonesia	1883
45	1875	*De Nederlandsch Indische Mail*	?	Belanda	1878
46	1876	*Schoolblad van Ned – Indie* (majalah)	Semarang	Belanda	1880
47	1876	*Slompret Melajoe*	Semarang	Pra Indonesia	1911
48	1877	*Mataram*	Yogyakarta	Belanda	1887
49	1877	*Onze Getuigenis*	Surabaya	Belanda	?
50	1878	*Insulinde* (majalah) ***	Jakarta	Belanda	?
51	1878	*De Oost Post* (terbitan kembali, lihat no. 18)			
52	1878	*Wazier (H) India* (majalah)		Melayu	?
53	1879	*Hindia Nedeland* (terbitan kembali, lihat no. 39)			
54	1879	*Nieuwe Adv. Blad Celebes*	Makasar	Belanda	1880
55	1879	*Nieuwe Adv. Blad Probolinggo*	Probolinggo	Belanda	1895
56	1879	*Oost en West*	Jakarta	Belanda	1880
57	1879	*De Telegraaf*	Jakarta	Belanda	1881
58	1880	*Zondagbad van De Courant* ****	Jakarta	Belanda	1881

Keterangan :

*) Daftar ini harus dianggap sebagai sangat sementara ;

**) Yang dimaksudkan disini adalah "*Biang Lala*" ke - II, yang pertama (1852-1855) ;

***) *Insulinde* ini berbeda daripada *Insulinde* terbitan Makasar sebagaimana tersebut dalam no. 32 ;

****) Yang dimaksud dengan *De Courant* jelas bukan *Javasche Courant* yang belum terbit pada waktu itu. Baru jauh di kemudian hari "*De Courant*" adalah sebutan untuk "*Javasche Courant*".

Dari daftar sementara tersebut dapat dilihat, bahwa perbandingan terbitan antara yang berbahasa Belanda dengan berbahasa Pribumi adalah 35:11 untuk masa antara 1860-1880 atau kurang lebih 3:1. Sedang perbandingan terbitan antara keduanya untuk masa antara 1854-1860 adalah 8:3. Dalam perbandingan ini surat kabar atau majalah yang diterbitkan kembali dianggap sebagai terbitan baru berdasarkan pertimbangan belum menentunya kehidupan pers di Indonesia, yaitu 1854-1860 dan 1860-1880 dapat dilihat bahwa dalam perbandingan jumlah terbitan berbahasa Belanda masih memimpin, tetapi terbitan dalam bahasa-bahasa Pribumi dalam jumlah mengalami pergandaan yang luar biasa banyaknya, sekalipun masih kalah dibandingkan dengan yang pertama. Tetapi hal ini akan segera berubah dalam kurun 1880 sampai dengan Kebangkitan Nasional, dimana terbitan dalam bahasa-bahasa Pribumi mendesak terbitan berbahasa Belanda dari 3:1 menjadi 2:1, sedang mulai dengan Kebangkitan Nasional dan untuk seterusnya, angka perbandingan terbitan berbahasa Pribumi telah melampaui yang pertama, dan untuk selama-lamanya tiada bisa menyusul lagi.

Suatu hal yang positif dalam sejarah pers ialah, bahwa edisi minggu telah dimulai pada tahun 1880, dan sesudah tahun itu, pada umumnya surat kabar-surat kabar terkemuka juga mengikuti dengan penerbitan demikian.

Baik dalam kurun pertama maupun kedua dari Babak Kedua ini, belum ada seseorang pun wartawan Pribumi, sedang redaktur Pribumi barulah Stefanus Sandiman dan Maas Markus. Tetapi hal ini segera berubah setelah 1880. Walaupun terbitan-terbitan berbahasa Melayu atau Pra Indonesia adalah untuk golongan Indo Tionghoa, dengan makin banyaknya terbitan dalam bahasa ini mengakibatkan terbukanya lowongan bagi Pribumi untuk menjadi wartawan dan redaktur. Apabila terbitan dalam bahasa Melayu dan pra Indonesia dimasukkan dalam daftar tanpa menyertakan terbitan berbahasa Belanda dan berbahasa daerah lain, maka akan didapatkan gambaran sebagai berikut :

Situasi Penerbitan Melayu & Pra Indonesia 1881 – Kebangkitan Nasional :

No.	Tahun	Nama Terbitan	Tempat Terbit	Bahasa	Mati
1	1881	Pemberita Bahroe	Surabaya	Pra Indonesia	1896
2	1882	Bientang Timoor	Surabaya	Pra Indonesia	1896
3	1882	Macasar Matahari/Matahari Makasar	Makasar	Pra Indonesia	1883
4	1882	Tjahaja Hindia	Semarang	Pra Indonesia	1887
5	1883	Bintang Djohar (Terbitan kembali, lihat no. 44)			
6	1883	Tjahaja Molia	Surabaya	Pra Indonesia	1884
7	1884	Dini Hari	Jakarta	Melayu	?
8	1884	Pembrita Betawi	Jakarta	Pra Indonesia	1889
	1885	Kosong			
	1886	Kosong			
9	1887	Bientang Soerabia	Surabaya	Pra Indonesia	1924
10	1887	Chabar Hindia Ollanda	Surabaya	Melayu	1897
11	1887	Tjaja Soematra	Padang	Melayu	?
12	1888	Sinar Terang	Jakarta	Melayu	1891
	1889	Kosong			
	1890	Kosong			
13	1891	Bintang Barat (terbitan kembali, lihat no. 43)			
	1892	Kosong			
	1893	Kosong			
14	1894	Pengadilan (terbitan kembali, lihat no. 17, tabel sebelumnya)			

15	1894	Penghantar	Ambon	Melayu	1902
16	1895	Retno Dumilah	Yogyakarta	Melayu dan Jawa	
17	1896	Pewarta Boemi	Amsterdam	Melayu	1923
18	1897	Poestaka	Sibolga	Melayu	?
	1898	Kosong			
	1899	Kosong			
19	1900	Bintang Betawi	Jakarta	Pra Indonesia	1906
20	1901	Li Po	Sukabumi	Pra Indonesia	1907
21	1902	Perniagaan	Jakarta	Pra Indonesia	
22	1902	Warna Warta	Semarang	Pra Indonesia	
23	1903	Sunda Berita	Jakarta	Pra Indonesia	1905
24	1903	Bintang Hindia	Amsterdam	Melayu	1907
25	1904	Ik Po	Surakarta	Pra Indonesia	1909
26	1904	Kabar Perniagaan	Jakarta	Pra Indonesia	1930
27	1904	Taman Sari	Jakarta	Pra Indonesia	1914
28	1905	Sinar Sumatra	Padang	Melayu	
	1906	Kosong			
29	1907	Medan Prijaji	Bandung	Pra Indonesia	1912

Antara tahun 1881 sampai Kebangkitan Nasional adalah kurun ketiga dari Babak Kedua sejarah pers di Indonesia. Kurun ini mempunyai cirinya yang tersendiri. Para pekerja pers, terutama para redakturnya tidak lagi orang-orang Indo Eripa saja, tetapi mulai masuk orang-orang Indo Tionghoa dan Indonesia.

Terbitan bernomor 1 sampai dengan 10 dalam daftar tersebut diatas mutlak dikendalikan oleh orang-orang Indo Eropa. Tetapi mulai dengan no. 11, yaitu *"Tjaja Soematra"*, orang telah mulai mendapatkan seorang Indo Tionghoa, yaitu Liem Soen Hin sebagai pemimpin redaksi. Walau demikian pada umumnya surat kabar atau majalah yang berpengaruh masih dipimpin oleh orang-orang Indo Eropa, seperti *"Bintang Betawi"* yang dipimpin oleh J. Kieffer ataupun *"Warna Warta"* yang dipimpin oleh V.W. Doppert, walaupun surat kabar dan percetakannya (NV Hap Sing Kongsi) adalah milik keturunan Tionghoa, *"Taman Sari"* yang dipimpin oleh F. Wiggers, *"Pembrita Betawi"* yang dipimpin oleh W. Meulenhoff juga, dan seterusnya. Bahkan J. Kieffer sendiri dalam hidupnya telah menerbitkan beberapa koran [16] selain *"Pembrita Betawi"* juga *"Bintang Betawi"* dan *"Bintang Batavia"*.[17]

Di dalam redaksi *"Pembrita Betawi"* mulai tahun 1886 duduk juga tokoh jurnalistik keturunan Tionghoa Lie Kimhok, dan 10 tahun setelah itu duduk juga dalam redaksi surat kabar tersebut, Bapak Pers Nasional Indonesia, R.M. Tirto Adhisurjo.

Masuknya tenaga-tenaga keturunan Tionghoa dan Indonesia telah mengubah warna pers berbahasa Melayu dan Pra Indonesia pada waktu itu. Sebelum itu pandangan pers adalah pandanga J. Kieffer yang kolonial dan menganggap bangsa Tionghoa sedemikian rendah, apalagi bangsa Indonesia. Masuknya tenaga-tenaga keturunan Tionghoa dan Indonesia tidak lain artinya daripada membatasi sepak terjang Kieffer. *"Bintang Betawi"*, yang ia redaksi sendiri misalnya, surat kabar yang disediakan justru untuk golongan keturunan Tionghoa,

[16] Tio Ie Soei : "Lie Kimhok", 1958.

[17] Tentang "Bintang Batavia" ini belum ada keterangan yang jelas. Perbandingkan juga dengan tulisan-tulisan tentang Sejarah Pers di Indonesia tulisan Soebekti dan Soedarjo Tjokrosisworo dalam buku "Sekilas Perjuangan Surat Kabar".

banyak menyiarkan tulisan-tuisannya yang menyinggng perasaan pembaca-pembacanya sendiri. Karena itu timbul perlawanan yang kemudian menelorkan keputusan untuk mendirikan percetakannya sendiri, menerbitkan koran sendiri yang sengaja untuk menyaingi, menandingi dan menyingkirnya *"Bintang Betawi"*. Demikianlah maka pada tahun 1902 didirikan percetakan "Hoa Siang In Kiok" dan disitu diterbitkan surat kabar *"Perniagaan"*. Dua buah surat kabar ini kemudian melakukan pertarungan terus menerus selama hampir 4 tahun, yang menyebabkan *"Bintang Betawi"* gulung tikar pada tahun 1906 disebabkan kehilangan simpati dari pembaca-pembacanya.

Dalam kurun ini jumlah keturunan Tionghoa makin lama makin banyak yang bekerja dibidang pers, tetapi orang–orang Indo Eropa masih tetap lebih banyak, sedang dari golongan Pribumi sendiri menduduki tempat ketiga. Surat kabar- surat kabar yang langsung dipimpin oleh Indo Tionghoa setelah *"Tjaja Timoer"* sebagai pelopornya adalah *"Li Po"* terbitan Sukabumi yang dipimpin oleh Tan Ging Tiong, "Sinar Betawi" terbitan Jakarta yang dipimpin oleh Gouw Peng Liang.

Dari kalangan Pribumi dapat disebutkan Abdul Muis dan Hadji M. Arsad, yang menjadi pembantu tetap *"Bintang Hindia"*, R.Ng. Tjitro Adiwinoto dari *"Pewarta Hindia"* Bandung.

Imbangan jumlah tersebut bisa menimbulkan kecenderungan untuk menarik kesimpulan, bahwa seperti itu juga halnya dengan jumlah kaum terpelajarnya. Tetapi hal yang demikian tidak dapat dibenarkan mengingat, bahwa pekerjaan–pekerjaan bukan-negeri bukan pekerjaan yang disukai bagi Pribumi, sebaliknya pekerjaan negeri justru pekerjaan yang tidak disukai oleh golongan keturunan Tionghoa.

Dalam kurun ini yang terpenting dari semuanya adalah surat kabar *"Perniagaan"*. Berbeda halnya dengan koran–koran milik keturunan Tionghoa yang biasanya diserahkan pimpinannya kepada orang–orang Indo Eropa, pimpinan redaksi surat kabar ini diserahkan kepada orang Indonesia, yaitu F.D.J. Pangemanann, sedangkan anggota–anggota redaksi anatara terdiri dari dua orang adiknya. *"Perniagaan"* mendapat sokongan dari kelompok opsir–opsir Tionghoa yang berpengaruh pada waktu itu, sehingga tumbuh menjadi surat kabar kapitalis, terutama setelah namanya dibuah menjadi *"Siang Po"* dan dipimpin oleh Phoa Liong Gie, saudara dari Phoa Liong An, juru bicara *Rijstpellerijen Bond*, dan kemudian pun diangkat menjadi anggota *Volksraad* yang menyuarakan kepentingan Bond tersebut. Pada suatu masa tertentu *"Perniagaan"* hampir–hampir gulung tikar karena menjadi juru bicara angkatan tua golongan keturunan Tionghoa, karena yang belakang ini menolak terjadinya perubahan apapun dalam kehidupan mereka, sedangkan angkatan mudanya telah mulai bergerak sebagai akibat dari pergolakan yang terjadi di daratan Tiongkok sendiri. Dengan nama *"Siang Po"*, ia baru berhenti terbit dengan runtuhnya penjajahan Belanda pada tahun 1942, dan pada tahun terakhir dari hidupnya dengan gigih menentang fasisme, sejalan dengan semangat umum kaum nasionalis Indonesia pada umumnya.

Sampai dengan tahun 1907, tidak ada pers terbitan Indonesia, yang berbahasa Melayu dan Pra Indonesia, yang mengambil sikap menentang imperialisme Belanda. Satu – satunya terbitan yang melakukan penentangan adalah *"Bintang Hindia"* terbitan Amsterdam, sewaktu dr Abdul Rivai mendapat keleluasan menentukan kebijaksanaan redaksi. Maka majalah yang disambut dengan gembira oleh Hindia Belanda, karena pada tahun–tahun pertama penerbitannya (1903–1905) banyak mengedepankan sukses–sukses kemiliteran Hindia Belanda, dan karangan–karangan yang menarik dari Eropa untuk makin membuat jiwa pembacanya berkapitulasi terhadap kehebatan Barat, sehingga oleh Jawatan PTT dibebaskan

dari porto ini, oleh penerbitnya, N.J. Boon, terpaksa dihentikan penerbitannya. Sebagai penggantinya diterbitkan oleh N.J. Boon *"Bandera Wolanda"*, sebuah majalah loyalis dibawah pimpinan J.E. Thehupeiorij, orang Indonesia pertama-tama yang menjadi arts. Majalah ini berhenti terbit pada waktu Nederland diduduki oleh Jerman Nazi, dan setelah Perang Dunia II diterbitkan kembali.

Terkecuali Pangemanann sebagai orang Indonesia yang memimpin redaksi sejak 1902 *("Perniagaan")* terdapat juga R.M. Tirto Adhisurjo yang juga memegang pimpinan redaksi *"Pembrita Betawai"* sejak tahun 1902 itu juga, sedang setahun kemudian (1903) ia menerbitkan sendiri majalah *"Soenda Berita"*. Tahun 1904, Mas Ngabehi Wahidin Sudiro Husodo mulai memegang pimpinan redaksi *"Retno Doemilah"*.

Tirto Adhisurjo selain orang Indonesia pertama-tama disamping Pangemanann yang pemegang pimpinan redaksi surat kabar umum, juga telah mempelopori surat kabar sekolah sewaktu masih belajar di STOVIA, yang dicetak dengan hektograf. Surat kabar sekolah ini memuat berita – berita politik. Tidak jelas adakah surat kabar sekolah ini terus diterbitkan setelah tutup abad ke-19 atau tidak. Sudah sejak dalam surat kabar sekolah ini terdapat perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya surat kabar berpolitik, sedang J.E. Thehupeiorij berpendapat, bahwa :

"bangsaku anak Hindia misti didasari dulu dengan ilmu kepandaian, baharu boleh dipimpin bergerak pada dunia politik"[18]

sebagaimana ia nyatakan sejak tahun 1896. Walau demikian ia termasuk salah seorang pertama-tama yang menulis buku perjalanan sepulangnya dari Ekspedisi Borneo berjudul *"Thehupeiorij Onder De Dajak"*, dan iapun, disamping Sosrokartono, melalui ceramah-ceramah banyak memberikan pengertian di Eropa "bermaksud memajukan tanah dan rakyat Hindia Olanda".

Setelah kurun ini tidak menjadi masalah lagi adanya tenaga Indo Tionghoa dan Indonesia.

5. TENTANG GUBERNUR JENDERAL

Untuk menjalankan tugas mempertahankan imperialisme Belanda di Indonesia, Gubernur Jenderal dipersenjatai dengan *artikel–artikel 45-48 Regeering Reglement* (RR) dan *artikel 111 RR*.

Artikel 45–48 adalah artikel dalam Peraturan Pemerintah tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia Belanda atau terkenal juga sebagai hak–hak exorbitant Gubernur Jenderal, untuk melakukan pembuangan terhadap orang–orang bukan kelahiran Hindia Belanda keluar Hindia Belanda, sedang bagi mereka yang lahir di Hindia Belanda ditunjuk tempat tertentu untuk tempat tinggalnya di dalam wilayah Indonesia. Sedang artikel *111 RR* mengandung ketentuan, bahwa setiap perkumpulan dan rapat atau pertemuan yang bersifat politik, adalah terlarang di Hindia Belanda.

Dengan senjata artikel–artikel tersebut Gubernur Jenderal dapat membuang siapa saja, dengan alasan atau tidak dengan alasan, tanpa melalui pemeriksaan pengadilan. Walaupun dalam menggunakan hak–hak exorbitant ia harus mendapat persetujuan dari Dewan Hindia

[18] MEDAN PRIJAJI III/3, 1907. R.M. Tirto Adhisoerjo : "Aneka Warta", hlm. 40.

pada umumnya dalam usaha untuk menyelamatkan imperialisme Belanda, dalam menggunakan hak ini tidak terdapat sesuatu kesulitan.

Baik Gubernur Jenderal maupun Ketua Dewan Hindia adalah pejabat–pejabat pemerintah yang penghasilannya boleh dikatakan paling besar di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal, disamping gajinya sendiri, mendapat tunjangan untuk merawat perabot dan kebun–kebun istana di Jakarta, Bogor dan Cipanas sebanyak ƒ14.000, - setahun. Dan apabila dalam bepergian orang harus mengeluarkan biaya sendiri, setiap tahun Hindia Belanda menyediakan untuk ongkos–ongkos kepergiannya sebanyak ƒ37.000, - setahun. Sampai dengan Gubernur Jenderal van Rees (1884–1888) gaji tahunan Gubernur Jenderal adalah ƒ200.000 per tahun atau ƒ360, - sehari. Disamping itu ia masih mendapat tambahan yang diperolehnya dari jasa–jasa baiknya kepada perusahaan raksasa. Setelah masa jabatannya yang 5 tahun paling sedikit ia mempunyai simpanan ƒ500.000, - dari gaji, ditambah dengan pensiun kira–kira ƒ1000, - sebulan.

Gaji pegawai negara yang paling rendah, yaitu kaum magang, adalah tidak ada, karena, walaupun dalam Anggaran Belanja Hindia Belanda disediakan mata anggaran sebanyak ƒ3.000.000, - namun mereka tidak pernah menerima gaji barang satu sen pun. Banyak diantara magang–magang ini menjalani masa dinasnya sampai belasan tahun tanpa gaji. Mereka hanya menerima persen dari orang–orang yang membutuhkan surat–surat resmi sebanyak ƒ0,10 setiap surat.

Para punggawa desa, dari Lurah kebawah, sama sekali tidak menerima sesuatupun dari pemerintah, sedang buruh rendahan yang bekerja 8 sampai 10 jam sehari mendapat upah ƒ0,25.

Setelah van Rees gaji Gubernur Jenderal diturunkan menjadi ƒ160.000, - setahun. Masalah gaji Gubernur Jenderal ini menjadi pembicaraan ramai dalam Parlemen sewaktu Nederland tertimpa kesulitan keuangan menjelang tutup abad ke-19. Pada tahun 1898 anggota Parlemen Nederland, van der Zwaag, dan pada tahun 1899 anggota Parlemen lainnya, yakni Ketelaar, telah mengajukan mosi agar gaji yang luas biasa besarnya untuk pejabat negeri itu diturunkan. Perdebatan–perdebatan dalam Parlemen ini menyebabkan masalah gaji Gubernur Jenderal menjadi pengetahuan umum, sekalipun mosi untuk menurunkannya selalu gagal, juga pada tahun 1899 itu.

Setelah Gubernur Jenderal, orang kedua yang tertinggi gajinya ialah Susuhunan Solo – artinya setelah kerajaan tersebut takluk kepada Belanda – yakni pada sekitar permulaan abad ke-20 sebesar ƒ30.000, - sebulan, tetapi semua perongkosan harus ditanggung sendiri.

Dapat dikatakan, bahwa penghasilan pekerja–pekerja swasta tidak pernah mencapai jumlah penghasilan Gubernur Jenderal ataupun Susuhunan Solo.

Gubenur Jenderal yang pernah memerintah Indonesia adalah sebagai berikut :[19]

Nama	Tahun Memerintah
Pieter Both	1609–1614
Gerrit Reinst	1614–1615
Laurens Reael	1615–1619
Jan Pieterszoon Coen (I)	1619–1623
Pieter de Carpentier	1623–1627

[19] Diambil dari dr H.J de Graaf : “Geschidenis van Indonesie”, hlm. 484.

Jan Pieterszoon Coen (II)	1627–1629
Jacques Specx	1629–1632
Hendrik Drouwer	1632–1636
Anthony van Diemen	1636–1645
Cornelis van der Lijn	1645–1650
Carel Reiniersz	1650–1653
Joan Maetsuyker	1653–1678
Rijkloff van Goens	1678–1681
Corn. Jansz Speelman	1681–1684
Joannes Camphuys	1684–1691
Willem van Outhoorn	1691 –1704
Joan van Hoorn	1704–1709
Abraham van Riebeeck	1709–1713
Christoffel van Swol	1713–1718
Hendrik Zwaardecroon	1718–1725
Mattheus de Haan	1725–1729
Diederik Durven	1729–1732
Dirk van Cloon	1732–1735
Abraham Patras	1735–1737
Adriaen Valckenier	1737–1741
Johannes Thedens	1741–1743
Gust. Will. Bar. v. Imhoff	1743–1750
Jacob Mossel	1750–1761
Petr. Alb. van der Parra	1761–1775
Jeremias v Riemsdijk	1775–1777
Reinier de Klerk	1777–1780
Will Arnold Alting	1780–1796
Pieter Ger. v. Overstraten	1796–1801
Johannes Siberg	1801–1805
Albertus Henr. Wiese	1805–1808
Herm. Will. Daendels	1808–1811
Jan Willem Janssens	1811–1811
Penjajahan Inggris :	
Sir Gilb. Elliot (Lord Minto)	1811
Thomas Stamford Raffles (Letnan Gubernur)	1811–1816
John Fendall (Letnan Gubernur)	1816
G.A.G. PH. v.d. Capellen	1816–1826
H. Merkus de Kock (Letnan Gubernur Jenderal)	1826-1830
J. van den Bosch	1830–1833
J. Chr. Baud (pejabat)	1833–1836
D.J. de Eerens	1836–1840
C.S.W. van Hogendorp (pejabat)	1840-1841
P. Merkus (pejabat)	1841–1843
P. Merkus	1843-1844
J.C. Reijnst (pejabat)	1844-1845
J. J. Rochussen	1845–1851
A.J. Duymaer van Twist	1851-1856
Ch. F. Pahud	1856 – 1861
A. Prins (pejabat)	1861
L. A. J. W. Sloet van de Beele	1861 – 1866
A. Prins (pejabat)	1866
P. Meijer	1866 – 1872
J. Loudon	1872 – 1875
J. W. van Lansberge	1875 – 1881
Fr. s'Jacob	1881 – 1884
O. van Rees	1884 – 1888
C. Pijnacker Hordijk	1888 – 1893

C. H. A. van der Wijck	1893 – 1898
W. Rooseboom	1899 – 1904
J. B. van Heutsz	1904 – 1909

6. TENTANG KEMILITERAN

Militer merupakan tulang punggung dari imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kekuatan militer yang sangat modern dibandingkan dengan angkatan perang kerajaan–kerajaan Pribumi, ia melakukan tekanan–tekanan politik dan ekonomi terhadap kerajaan–kerajaan di luar Jawa dan Madura. Tugas militer Hindia Belanda adalah untuk mempertahankan dan meluaskan wilayah kekuasaanya di Indonesia, menindas pemberontakan–pemberontakan didalam negeri, serta melawan percobaan invansi dari negara–negara lain secara militer

Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda pernah mengalami invansi pada tahun 1811 oleh Inggris, dimana Belanda ternyata kalah, dan invansi melalui politik yang dikerjakan beberapa waktu sebelum itu oleh Perancis dalam pemerintahan Daendels.

Menjelang tutup abad ke-19 masalah invansi militer tetap menjadi soal yang meminta kewaspadaan Belanda. Dalam zaman memuncaknya imperialisme ini negara–negara Eropa Barat berlomba–lomba dalam memperluas tanah jajahan masing–masing. Bahkan juga Jepang ikut berlomba dengan memasuki Tiongkok. Barangkali dalam sejarah kemiliteran Hindia Belanda tak pernah dikedepankan masalah kemiliter secara jelas sebagaimana dikemukakan oleh Letnan Kolonel J.L. Koster dari *Generalen Staf* Bala Tentara Hindia Belanda pada bulan Januari 1895. Pada pokoknya dikedepankan adanya kegelisahan dalam hal pertahanan dengan semakin hausnya negara – negara imperialis akan tanah jaahan, dan karena itu Hindia Belanda harus selalu bersiap sedia dibidang militer. Bahaya pencaplokan atas Hindia Belanda bisa dilakukan oleh Jerman sebagaimana telah dilakukannya atas Irian Timur laut, bisa juga oleh Jepang, yang telah mulai mendesak Tiongkok, bisa juga oleh Australia sebagaimana dengan sesuatu cara telah melakukan pencaplokan atas Irian Tenggara.

Pokok yang sepenting itu tidak bisa diselesaikan dengan sekali ceramah. Diskusi–diskusi menyusul. Dalam salah sebuah diskusi yang juga dihadiri oleh Menteri Angkatan Laut Belanda, telah ditarik kesimpulan, bahwa pertahanan yang paling baik bagi Hindia Belanda sebagai benua kepulauan adalah dengan Angakatan Laut, karena pertahanan bagi benua kepulauan yang didasarkan atas Angkatan Darat secara relatif adalah lemah.

Ceramah dan diskusi ini diadakan karena kepercayaan Belanda, bahwa Hindia Belanda tidak akan dirampas oleh siapapun selama Nederland tetap dapat mepertahankan kemerdekaannya di Eropa, mulai menjadi goyah dengan terjadinya penyerbuan di Tiongkok oleh Jepang. Sedang menurut pertimbangan mereka, Pribumi yang tergabung dalam Angkatan Perang Hindia "yang kurang berbobot" itu tidak mempunyai sesuatu arti untuk menahan invansi negara besar. Dalam pada itu Hindia sampai pada saat itu masih tetap dianggap sebagai kunci bagi kemakmuran Nederland, tambahan pula Hindia Belanda adalah umpan yang sangat menggairahkan karena kesuburannya bagi negara–negara imperialis lainnya. Dengan terjadiya serbuan Jepang atas Tiongkok, telah terjadi perubahan–perubahan yang menggelisahkan pada negara–negara imperialis besar karena meluapkan rangsangan imperialisme masing–masing. Kemampuan Jepang dalam ikut berlomba meluaskan daerah jajahan, bukan saja menimbulkan kekhawatiran Belanda, juga memaksanya mengakui keunggulan "negeri cebol" yang telah dapat mengalahkan "negeri raksasa Tiongkok", dan karenanya iapun dianggap akan bisa mencaplok Hindia Belanda di kemudian hari. Hal ini

merupakan salah satu faktor yang memaksa Nederland, dan kemudian juga Hindia Belanda, mengakui kesamaan derajat antara bangsa Jepang dengan bangsa Eropa. Tetapi pengakuan kesamaan itu bukan tidak melahirkan kekhawatiran–kekhawatiran baru, karena dengan adanya pengakuan itu Belanda mengerti, bahwa hal itu akan mengakibatkan arus imigrasi yang deras dari Jepang ke Hindia Belanda. Munculnya Jepang juga telah membuat negara–negara imperialis Eropa lainnya mulai berjaga–jaga akan terjadnya bentrokan–bentrokan bersenjata dalam memperebutkan daerah–daerah jajahan baru. Lord Salisbury, Menteri Pertahanan Inggris, memperingatkan agar persiapan-persiapan untuk memasuki perang imperialis tidak dihentikan. Amerika Serikat menghadapi tutup abad ke-19 justru sedang mulai memperkuat persenjataannya untuk menghadapi kemungkinan itu. Suatu arus yang deras yang mendorong negara–negara imperialis kearah bentrokan–bentrokan bersenjata makin tahun makin terasa. Maka dalam diskusi–diskusi dikalangan kemiliteran itu didapatkan kata sepakat, bahwa :

“Apabila negeri maritim dan kolonial (kita) yang besar ini tidak diperlindungi secukupnya dengan kekuatan Angkatan Laut, boleh jadi dengan tiba–tiba saja akan jatuh seluruhnya”.

Tetap kata sepakat itu kemudian terlupakan setelah Amerika Serikat dalam usahanya berjaga–jaga agar tangan imperialisme Jepang tidak lebih giat meraba lebih keselatan lagi, telah mengadakan persekutuan dengan Inggris. Dengan persekutuan ini Amerika Serikat terjamin keselamatannya dalam mencaplok Filipna dari Spanyol, dan memencilkan yang belakangan ini dalam bentrokannya dengan Amerika Serikat. Dengan jatuhnya Filipna ke tangan Amerika Serikat, Belanda merasa terlindungi dari invansi dari Utara. Dan kembali Hindia Belanda dipertahankan secara tradisional, yaitu dengan Angkatan Darat, karena mereka menganggap, bahwa bahaya yang mungkin datang dari musuh luar negeri telah ditahan oleh Amerika Serikat di Filipina. Bahaya yang tinggal hanyalah pemberontakan–pemberontakan dan perlawanan–perlawanan di dalam negeri. Terutama dengan kemajuan–kemajuan yang diperoleh Hindia Belanda dalam perang kolonial di Aceh, dimana Inggris tidak terlalu banyak ikut campur tangan, Hindia Belanda merasa lebih terjamin keamanannya dalam usahanya untuk memperluas daerah jajahannya di Nusantara sendiri.

Dengan dilupakannya kata sepakat tersebut, yang berarti kembalinya Angkatan Darat sebagai sandaran kekuatan imperialisme Belanda, maka tidak terjadi sesuatu perubahan yang penting. Dan ini berarti, bahwa kembali Hindia Belanda menampung pemuda–pemuda tani dari Jawa dan Madura, yang telah kehabisan ruang hidup itu, dan direkrut menjadi serdadu kolonial, untuk meluaskan jajahan Belanda di luar Jawa dan Madura. Jumlah anak–anak petani dari Jawa dan Madura yang merupakan kekuatan pokok dalam Angkatan Perang Hindia Belanda adalah lebih dari 80%. Dengan dimulainya perlawanan Pangeran Diponegoro (1825–1830) barulah pemuda–pemuda Sulawesi Utara memasuki Angkatan Perang Hindia Belanda, dan setelah itu menyusul pemuda–pemuda dari Maluku. Kekuatan Angkatan Darat ini harus ditambah dengan tenaga–tenaga tidak terdaftar sebagai serdadu, yang terdiri atas orang–orang hukuman dari Jawa yang dikirim ke medan perang yang jauh dari tempat kelahirannya. Kurang lebih 10 persen dari kekuatan militer ini terdiri atas orang–orang Belanda, Indo Belanda, buangan sosial dari Eropa (Swiss, Perancis, Jerman, Belgia). Serdadu–serdadu Afrika yang secara tradisi dipergunakan oleh Portugis dan Spanyol sejak pertengahan pertama abad ke-19 secara perlahan–lahan telah dihapus. Yang dimaksudkan dengan serdadu Afrika, termasuk juga yang berasal dari Suriname dan Antillen Belanda, sedang yang berasal dari Afrika sendiri diperoleh dengan jalan *“werving”*

Kekuatan inti dari Angkatan Perang Hindia Belanda sendiri adalah kecil. Sampai dengan tahun 1839, kekuatan itu sedemikian kecilnya sehingga belum lagi terbagi–bagi

dalam resimen–resimen, dan baru alam batalyon–batalyon, dan itupun baru terdiri atas 9 batalyon. Setelah tahun itu ditambah dengan 3 batalyon lagi, sehingga menjadi 12 sebagaimana ditentukan dalam *"formatie-besluit"* tanggal 17 Juni 1839. Semua batalyon ini termasuk dalam kategori batalyon–batalyon tempur. Lapisan–lapisan yang terdapat dalam batalyon–batalyon tersebut dapat dilihat dari pelapisan dalam Batalyon-X yang terdiri atas 1 kompi Eropa, 1 kompi Ambon dan 4 kompi Pribumi yang lain.

Batalyon tempur X, XI dan XII terutama disediakan untuk ekspedisi di luar Jawa dan Madura. Batalyon X dan XI dipergunakan utuk menumpas pemberontakan di Sumatera Barat mulai tahun 1840, sedang Batalyon–Batalyon X dan XII ditugaskan untuk :

Batalyon X memadamkan pemberontakan – pemberontakan di :
Lampung (1856), Boni (1859), Bali (1868), Deli (1872-1873), Aceh (1878-1885), Lombok (1894), Bali (1906), dan kemudian juga Banten (1926)
Batalyon XII memadamkan pemberontakan–pemberontakan di :
Puntok (1851), Tomori, Sulawesi (1856), Jambi (1858), Asahan, Sumatera (1865), Aceh (1873-1874), Aceh (1875-1905) dan kemudian juga Banten (1926).

Angkatan Perang inti ini yang langsung menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda. Disamping itu terdapat pasukan–pasukan bantuan yang berjumlah lebih dua puluh kali lipat daripada pasukan inti. Mereka ini bukan saja terdiri dari orang–orang hukuman yang dipersenjatai dan dilatih kemiliteran, juga terdiri dari petani–petani yang terkena rodi, serta pasukan–pasukan setempat yang diminta oleh Hindia Belanda dari kaum feodal yang masih berkuasa. Bahan makanan dari seluruh pasukan yang dkerahkan ditanggung seluruhnya oleh daerah dimana dilakukan operasi militer tersebut. Dengan demikian pasukan–pasukan Hindia Belanda ini luar biasa mobilnya, karena tidak tergantung konsumsinya pada tempat–tempat diluar daerah operasi.

Pasukan–pasukan diluar pasukan inti yang merupakan bantuan sangat penting adalah misalnya Legiun Mangkunegara dan Barisan Madura. Terutama yang belakangan ini sangat disukai karena keberaniannya. Berbeda dengan dalam pasukan–pasukan inti, dalam pasukan–pasukan bantuan ini opsir–opsir tinggi sampai rendah adalah orang–orang Pribumi sendiri.

Panglima–panglima Hindia Belanda yang sangat berjasa pada imperialisme Belanda adalah sebagai berikut :

1) L.J.K. Pel, Komandan Batalyon-X (1868-1869), kemudian diangkat menjadi Mayor Jenderal dan Gubernur Aceh (April 1874 – Februari 1876). Juga ia dianggap berjasa pada imperialisme Belanda karena "kebijaksanaan sipil di Aceh Besar pada tahun 1875.
2) J.B. van Heutsz, Komandan Batalyon-XI (1891-1893), kemudian jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1904-1909).
3) H.N.A. Swart, Komandan Batalyon-XII (1903-1905), kemudian jadi Letnan Jenderal sipil dan militer, serta Gubernur Aceh (1908-1918) dan dianggap sebagai pasifikator Aceh.[20]

7. TENTANG EKONOMI

Perubahan ekonomi di Indonesia secara struktural dimulai dengan datangnya pedagang–pedagang Eropa ke Indonesia.

[20] SIANG PO, 1939, melalui Naskah kerja Khouw Tjioe Nio, 1963 : "Tindjauan Militer", hlm. 17-18

Pada bulan Maret tanggal 20 tahun 1602 di Nederland, *Oldenbarnevel*t mendirikan *"Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie*, yang mempersatukan perusahaan–perusahaan dagang kecil–kecil yang mencari rempah–rempah di Indonesia. Modal badan dagang gabungan ini ialah ƒ6.419.00,- Karena badan dagang inilah kelak yang menjajah Indonesia maka tanggal 20 Maret 1602 dapat dianggap sebagai Hari Bencana bagi Indonesia.

Badan tersebut yang singkatnya disebut *"Compagnie"*, kemudian disebut "Kompeni" dan kemudian lagi sebutan ini dikenakan juga pada angkatan perang Hindia Belanda. Dalam organisasi badan dagang ini terdapat beberapa Kamar atau Departemen, dan masing–masing Kamar mempunyai Ketuanya sendiri dan 60 orang pemimpin menjadi Ketua Umum. Sebuah Dewan yang terdiri atas 17 orang dipilih diantara 60 orang pemimpin tersebut dan merupakan Dewan atau Presidium yang mengurus perdagangan badan ini. Mulai tahun 1609 oleh Kompeni diangkat seorang pemimpin umum di Indonesia, yakni seorang Gubernur Jenderal, dibantu oleh seorang Dewan yang terdiri atas 4 orang anggota. Perwakilan yang ada di Indonesia mendapat wewenang untuk mengadakan perjanjian dengan raja–raja di Indonesia, yakni wewenang–wewenang yang hanya dimiliki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Betapa besarnya kekuasaan badan perwakilan ini dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh Kompeni, sedemikian besarnya, sehingga saham–saham Kompeni dalam waktu yang singkat naik harganya sampai 750%. Dividen setiap tahun rata–rata adalah 18%, dan dalam masa berdirinya selama 198 tahun (sampai 1800) adalah sebanyak 3600%.

Pemerintah jajahan Kompeni di negeri–negeri jajahannya adalah pemerintahan teror untuk kepentingan dagang. Dalam penjajahannya di Maluku setelah Kompeni berumur 20 tahun, tak ada seorangpun dari Pribumi Banda yang bukan budak Kompeni. Setiap orang dikerahkan untuk menghasilkan rempah–rempah di Maluku menjadi terlalu banyak, sehingga Presidium yang XII merasa takut bila harganya dipasar dunia menjadi jatuh. Untuk mengendalikan harga pasar dunia ini oleh Kompeni diperintahkan kepada Rakyat Maluku untuk membinasakan kebun rempah–rempahnya sendiri. Barangsiapa menentang perintah ini dibinasakan.

Penjajahan di pulau Jawa adalah berlainan daripada di Maluku, karena Jawa bukan penghasil rempah–rempah untuk pasar dunia, tetapi lebih banyak penghasil konsumsi Pribumi Nusantara dan Asia Tenggara, terutama beras dan gula. Di Jawa "Kompeni menundukkan pembesar–pembesar (pribumi)", demikian kata Colenbrander, "dan mereka disuruhnya memikul beberapa kewajiban, dan pada gilirannya para pembesar itu menggeserkan kewajiban-kewajibannya kepada Rakyat. Kompeni boleh dikatakan lebih banyak serakah dan kejam, tetapi kesudahannya sama saja : penindasan". Untuk membiayai usaha penjajahannya di luar Jawa dan Madura, bukan saja pulau Jawa harus menghasilkan serdadu juga–sebelum adanya peraturan perpajakan dalam bentuk uang–Rakyat dipaksa menyerahkan kontingen, yaitu pajak dalam bentuk hasil bumi dan hal ini dimulai baru dalam pemerintahan Raffles.

Pada tahun 1781 Kompeni meminjam uang sebesar ƒ14.000.000, - kepada kerajaan Belanda. Hutang ini menyebabkan Kompeni berada dibawah pengawasan kerajaan, dan kerajaan ikut campur dalam persoalan dalam. Sampai tahun 1799 hutang Kompeni dari kerajaan Belanda telah mencapai ƒ134.000.000, - dan dengan demikian Indonesia sebagai jajahan Kompeni jatuh kedalam kekuasaan kerajaan.

Setelah digantikannya Kompeni oleh kerajaan Nederland, keadaan tidak menuju kearah yang lebih baik bagi Rakyat Indonesia, apalagi sewaktu Nederland berada dibawah perintah Perancis. Pada waktu ini Indonesia diperintah oleh Daendels yang mencoba membuat perubahan–perubahan secara cepat, dan mencoba mengubah pemerintah Pribum menurut susunan Eropa. Untuk pekerjaan ini ia dianggap sebagai seorang organisator yang cakap. Tapi dalam pemerintahannya ini pengadilan belum diurus secara Eropa menurut perkembangan tingkat permulaan, dimana keadilan menjadi prinsip dari lembaga–lembaga pengadilan, sejauh hal itu berlaku dibidang sipil dan kriminal. Tetapi sebagai kekuatan imperialis, pemerintah terus menjalankan pemerintahan paksa dan teror. Waktu permintaan akan rempah–rempah makin menjadi merosot, Rakyat tidak lagi diwajibkan menanam merica, juga setelah pasar dunia kurang meminta nila, dihilangkan wajib tanam nila, dan karena pasar dunia minta kopi, Rakyatpun kena kewajiban menanam kopi. Tanah yang dikenakan untuk kopi adalah seperenam bagian. Dalam pemerintahan Daendels ini 45 juta batang kopi baru ditanam. Harga yang diterima mereka dari pemerintah adalah ƒ0,003 untuk satu pon. Untuk memajukan pertanian kopi ini para bupati mendapat premi ƒ2,50 buat setiap 128 pon atau sepikul. Artinya, buat setiap pikul para petani yang kehilangan seperenam dari tanahnya dan harus mengerjakan penanaman, perawatan dan pemetikan kopi itu menerima 128 x ƒ0,03 = ƒ3,84 sedang para bupati yang tidak mengerjakan sesuatupun mendapat ƒ2,50.

Dalam pemerintahan Pribumi, pajak yang dibayarkan oleh petani kepada pemerintah – artinya pada pembesaranya sendiri – berupa padi. Sampai dengan pemerintahan Raffles dalam sejarah penjajahan Eropa di Indonesia, peredaran uang adalah sangat kecil, karena desa–desa pada ummunya belum menggunakan sistem moneter yang seragam. Itu sebabnya sampai dengan Raffles, pajak bumi masih berbentuk padi, sebagai barang konsumsi yang dibutuhkan oleh semua orang. Kesulitan dalam menilai padi dalam tumpukan menyebabkan ia memerintahkan digantinya pajak dalam bentuk padi didalam bentuk mata uang dan dosalah yang harus ditanggungjaab atas pembayaran ini kepada pemerintah. Penggantian ini menyebabkan untuk waktu selanjutnya lurah–lurah menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada penduduk desa selebihnya. Pada tahun 1818 penghasilan pemerintah kolonial dari pajak bumi itu saja adalah sebanyak ƒ3.250.000, - sedang pada tahun 1826 meningkat hampir dua kali lipat, yakni ƒ6.200.000, - Bila jumlah–jumlah ini dijajarkan dengan seluruh ekonomi penjajahan, maka penghasilan dari pajak bumi ini menempati kedudukan yang sangat penting. Anggaran Belanda dalam tahun–tahun 1817–1819 adalah :

- Uang masuk : ƒ63.970.961,-
- Uang keluar : ƒ58.275.155,-
- Keuntungan : ƒ5.695.806,- sedang sebagian dari uang masuk terutama berasal dari kultur kopi.

Dalam seluruh sejarah penjajahan, Gubernur Jenderal van den Bosch adalah penjahat yang terbesar dengan *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksanya. Dasar–dasar Tanam Paksa ini terdiri atas 9 fasal, dan adalah : a) janji pada Rakyat agar sebagian dari sawah mereka dikecualikan untuk ditanami buat keperluan ekspor, b) bagian yang dikecualikan itu, seperlima dari tanah setiap desa, c) tanaman untuk keperluan ekspor tidak boleh melebihi tanaman padi, d) bagian yang dikecualikan tidak akan dikenakan pajak bumi, e) tanaman yang ditanam diatas bagian yang dikecualikan harus diserahkan kepada pemerintah. Jikalau harga hasil tanaman itu lebih daripada pajak bumi yang harus dibayarkan, kelebihan itu akan dibayar dengan uang, dan ini berarti, bahwa tanah–tanah yang harus ditanami sebagaimana dikehendaki Tanam Paksa, masih terus dikenakan pajak bumi, f) panen yang gagal ditanggung oleh pemerintah asal kegagalan itu tidak disebabkan karena kurang rajinnya Rakyat, g) penduduk akan bekerja dibawah pekerjaan dan pemungutan hasil, h) buat

beberapa kultur seperti gula, pekerjaan boleh dibagi–bagi , sehingga sebagian mengerjakan bagiannya sampai panen dan bagian lain sesudah panen, i) Kalau ada rintangan dalam memajukan Tanam Paksa, pegawai–pegawai diharuskan melaksanakan aturan kebebasan pajak bumi dengan keras. Kewajiban Rakyat hanya sampai waktu tanaman itu masak.

Pasal–pasal tersebut dalam praktek pelaksanaannya sama sekali berlainan dan adalah jauh lebih berat daripada sistem kontingen Kompeni, artinya sebelum Indonesia jadi milik kerajaan Belanda.

Di berbagai tempat, yang tadinya ditentukan seperlima dari tanah desa yang diperjualbelikan untuk Tanam Paksa, dibuah menjadi sepertiga. Di Priangan orang harus berjalan 26 jam untuk pergi ke tempat kerjanya. Dalam kultur nila, upah orang sehari paling tinggi ƒ0,06. Nila ditanam secara tumpangsari (*wisselbouw*), sehingga bagian yang harus dikecualikan untuk kultur semakin besar. Dalam pada itu pajak bumi naik pula.[21] Apabila pajak bumi pada tahun 1818 ada sebanyak ƒ3.250.000, pada tahun 1826 sebanyak ƒ6.200.000 maka pada tahun 1835 menaik lagi menjadi ƒ7.700.000 dan pada tahun 1845 telah menjadi ƒ11.000.000.

Sampai tahun 1845 kultur nila telah menyita tanah petani sebanyak 41.578 bahu dengan hasil sebanyak 1.432.793 pon, dengan mengerahkan 187.329 keluarga petani. Dalam pada itu juga gula menduduki tempat penting dalam ekonomi kolonial. Pada tahun 1850 telah disiapkan sebanyak 30 buah pabrik gula dan pada tahun itu hasilnya adalah 155.000 pikul.

Pada tahun 1853 terdapat 116.000.000 batang kopi. Keuntungan yang diperoleh pihak penjajah antara tahun 1831 sampai dengan 1848 adalah sebagai berikut :

Tahun	Impor	Ekspor	Keuntungan
1831	ƒ14.478.402	ƒ14.702.148	ƒ123.746
1832	ƒ13.071.291	ƒ22.002.751	ƒ8.931.460
1833	ƒ17.864.577	ƒ23.343.328	ƒ5.478.751
1834	ƒ 18.743.655	ƒ30.232.505	ƒ11.484.850
1835	ƒ17.865.805	ƒ32.494.467	ƒ14.628.662
1836	ƒ18.524.898	ƒ41.216.487	ƒ22.640.589
1837	ƒ 21.787.231	ƒ43.201.819	ƒ21.414.588
1838	ƒ24.181.877	ƒ43.340.227	ƒ19.158.350
1839	ƒ24.961.012	ƒ57.674.934	ƒ32.713.922
1840	ƒ28.873.893	ƒ74.230.553	ƒ45.356.660
1841	ƒ21.363.281	ƒ63.452.715	ƒ42.088.434
1842	ƒ26.081.203	ƒ58.383.493	ƒ32.302.290
1843	ƒ22.551.388	ƒ58.992.836	ƒ36. 442. 448
1844	ƒ25.342.343	ƒ70.085.641	ƒ44.743.298
1845	ƒ27.091.801	ƒ65.895.168	ƒ38.803.367
1846	ƒ27.386.519	ƒ58.158.485	ƒ30.771.966
1847	ƒ23.679.173	ƒ59.445.180	ƒ35.766.007
1848	ƒ20.091.754	ƒ53.064.476	ƒ32.972.732

Disamping Tanam Paksa, yang membinasakan ratusan ribu Rakyat Indonesia, masih ada pajak bumi, dan disamping itu masih ada rodi, yang semuanya menghasilkan uang pada pemerintah kolonial. Dalam keuntungan–keuntungan itu masih harus ditambahkan

[21] "Boekoe Peringatan P.P.P.I. 1926-1931", hlm. 46-69.

pendapatan–pendapatan yang diperoleh dari sewa pasar dan monopoli garam. Sewa pasar dalam setahun menghasilkan lebih dari ƒ3.500.000 sedang monopoli garam menghasilkan ƒ3.573.000 pada tahun 1847 itu saja. Sedang seluruh keuntungan itu tidak dipergunakan di Indonesia buat kepentingan Indonesia, tetapi untuk Nederland. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Belanja yang sangat primitif dari Hindia Belanda pada tahun 1840, yang ada sebagai berikut :

Anggaran Belanja Pemerintah Hindia Belanda, 1840 :

Nomor	Mata Anggaran	Jumlah dalam Gulden
1	Militer	ƒ7.000.000
2	Pamong Praja dan Polisi	ƒ3.500.000
3	Pengadilan	ƒ500.000
4	Pertanian dan sebagainya	ƒ± 500.000
5	Pembiayaan Tanam Paksa	ƒ30.000.000
	Jumlah seluruh Anggaran Belanja	ƒ± 41.500.000

Dari Anggaran Belanja tersebut, nyata bahwa sama sekali tidak tersedia mata anggaran untuk kesehatan dan pendidikan ataupun sosial. Dari Anggaran Belanja itu dapat dilihat, bahwa penjajah Belanda di Indonesia itu betul–betul menjalankan penghisapan dan teror yang luar biasa kejam dan kejinya. Di bidang pemerintahan nampak, bahwa yang dijalankan adalah politik kekerasan, sebagaimana nampak dari mata anggaran 1, 2 dan 3. Sedang mata anggaran ke-5 tidak lain daripada jumlah yang disediakan untuk mengintensifkan pemerasan atas bumi dan petani. Lima orang bagaimana penderitaan rakyat nampak dari daftar penghasilan dibawah ini :

Penghasilan Rakyat untuk setiap keluarga dalam setahun, 1846 :

1. Bila di dalam kultur gula ƒ18,16
2. Bila di dalam kultur kopi ƒ15,12
3. Bila di dalam kultur nila ƒ12,82
4. Bila di dalam kultur tembakau ƒ11,69
5. Bila di dalam kultur merica ƒ4,32

Apabila diambil penghasilan terbesar, yaitu di dalam kultur gula, yaitu ƒ18,26 sedang setiap keluar rata–rata terdiri atas 5 orang, yaitu suami, isteri dan 2 orang anak, dan bila angka itu terpaksa harus dibulatkan, maka setiap orang dari setiap keluarga mendapat penghasilan sebanyak ƒ3,65 dalam setahun, atau 30 persen dalam sebulan, atau 1 sen dalam sehari. Mudah sekali untuk mengerti, bahwa penghisapan yang luar biasa dari keserakahan luar biasa Belanda, menjadi sumber bencana dari kemerosotan fisik dan kultur yang juga luar biasa. Dan berapa keluargakah yang terkena penghisapan dan keserakahan Belanda ini ? Hal ini dapat dilihat dari daftar dibawah ini :

Jumlah keluarga yang terkena Tanam Paksa, 1846

1. Dalam kultur gula 157.786 keluarga
2. Dalam kultur kopi 409.773 keluarga
3. Dalam kultur nila 168.720 keluarga
4. Dalam kultur tembakau 29. 493 keluarga
5. Dalam kultur merica 13.406 keluarga
6. Dalam kultur sutra 1.310 keluarga
7. Dalam kultur kayu manis 8.301 keluarga

8. Dalam kultur lain – lain 10.030 keluarga
Jumlah 799.546 keluarga

Atau bila setiap keluarga rata–rata terdiri atas 5 orang anggota, jumlah yang dipekerjakan – tidak peduli pria ataukah wanita, kakek nenek ataupun bayi – aadalah 5 x 799.546 = 7.809.005 jiwa, suatu jumlah yang jauh lebih banyak dari seluruh jumlah bangsa Belanda sendiri waktu itu. Ada kalanya Rakyat harus berjalan kaki sejauh 45 km untuk sampai ditempat pekerjaan yang ditentukan.[22]

Dengan dihapuskannya Tanam Paksa secara perlahan–lahan mulai 1870, masuklah modal swasta. Kaum kapitalis melalui kaum liberal di dalam Parlemen Nederland menuntut supaya kerja paksa yang menjadi sistem produksi Tanam Paksa digantikan oleh kerja merdeka atau kerja upah. Maka modal swasta asing yang masuk ke Indonesia adalah "sebagai angin yang makin lama makin meniup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruhnya tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah...."[23]

Apabila dulu administratur–administratur perkebunan pemerintah adalah pemerintah itu sendiri, dengan masuknya modal swasta, modal–modal inilah yang menggantikannya menjadi pemerintah. Ratusan kapitalis asing memasuki Indonesia dan menundukannya dengan modal dan mesin–mesin yang dibawanya. Mereka mengusahakan kebun–kebun tebu, kopi, teh, tembakau, karet, coklat dsb. Mereka membawa mesin–mesin dan mendirikan pabrik–pabrik serta pertambangan–pertambangan. Untuk melayani kebutuhan mereka itu harus ada kerja bebas, kerja upah. Kekuasaan modal ini melahirkan jalan–jalan rata, kereta api, pelabuhan, alat–alat pengangkutan yang lebih cepat dengan daya angkut yang lebih besar, telegraf dan telepon. Kemudian juga muncul bank–bank, yang semua serba asing dan sama sekali tidak mempunyai persangkutan dengan kehidupan Pribumi.

Modal asing telah menggantikan pejabat – pejabat yang birokratik dan lamban. Dengan masuknya modal tersebut jumlah ekspor semakin meningkat. Ini berarti pengurasan terhadap kekayaan bumi dan tenaga manusia Indonesia semakin diperhebat. Pemerintah tidak lagi menjadi mandor atau administratur perkebunan negara. Ia cukup hanya dengan mengutipi pajak. Kepolisian diperlipatganda, karena usaha swasta, yang mendatangkan uang-gampang bagi pemerintah itu, harus dijamin keselamatannya. Apabila dalam zaman Tanam Paksa harus ada tanah yang kecualikan, modal swasta tidak perlu pengecualian itu tetapi merampasnya dengan kerjasama pihak pemerintah, baik melalui undang–undang (*agrarische wet De Waal, domein verklaring, Mijnwet* dll), baik melalui perlindungan administrasi langsung (Idenburg pada Sindikat Gula, Pangreh Praja pada administratur perkebunan dsb, dsb.). Dibawah ini adalah angka–angka yang menerjemahkan kerugian Pribumi dan keuangan modal swasta, termasuk di daerah Sumatera yang kemudian digarap oleh modal swasta ini :

Luas Tanah Modal Swasta & Hasilnya

Tahun	Luas dalam Hektar	Hasil dalam Ribuan Ton
1890	72.000	399.999
1900	91.000	744.257
1910	126.000	1.280.000

[22] Lihat Bung Karno : *"Indonesia Menggugat"*.

[23] Ibid.

Penghasilan Minyak

Tahun	Jumlah dalam Ton
1898	355.364
1908	1.254.859

Penghasilan Tambang Timah

Tahun	Hasil dalam Pikul (61,7 kg)
1850 – 1870	1.129.230
1890 – 1900	3.401.198

Ekspor Teh

Tahun	Jumlah dalam Ton
1860	800,0
1885	2.423,0
1895	4.816,7
1905	11.858,6

Hampir–hampir dapat dikatakan, bahwa keserakahan dari pihak modal yang luar biasa ini, tanpa meninggalkan sesuatu keuntungan yang berarti bagi Rakyat Indonesia, telah menyebabkan Rakyat Indonesia menjadi "*minigmumlijder"*[24], menjadi penderita minimum, menjadi Rakyat dengan syarat–syarat penghidupan yang paling rendah. Menurut perhitungan dr Heunder[25], rata–rata pendapatan seorang kepala keluarga dalam satu tahun – termasuk petani (lihat : halaman. 36) – adalah ƒ161, - yang harus dikurangi dengan ƒ22,50 untuk pembayaran pajak – pajak dsb, sehingga tersisa ƒ138,50 setahun. Kalau setiap keluarga terdiri atas 5 orang (suami, istri dan 3 orang anak) biaya penghidupannya sehari-hari adalah ƒ0,08 untuk setiap orang. Angka ini ternyata jauh lebih rendah lagi di daerah-daerah swapraja, karena dalam suatu penyelidikan oleh seorang ekonom disalah sebuah kabupaten di Yogyakarta, ternyata penghasilan setahun rata-rata cuma mencapai ƒ105,-

Ciri dari kehidupan ekonomi di Indonesia sampai sekitar permulaan abad ke-20 adalah ekonomi penghisapan, yang dalam abad ke-20 ternyata akan semakin menjadi-jadi.

8. TENTANG EDUKASI

Untuk waktu lama edukasi oleh kaum terpelajar Indonesia dianggap sebagai kunci wasiat yang bisa membukakan pintu bagi semua terlaksananya harapan. Inilah yang dinamakan takhayul modernisme. Anggapan ini berasal dari kekalahan moril Pribumi terhadap keserbabisaan kaum penjajah penjajah.[26] Siasat-siasat perang tradisional Pribumi sejak masuknya OIC Belanda terus-menerus dapat digagalkan oleh pihak penjajah, sehingga kegagalan-kegagalan militer, terutama kekalahan dibidang peralatan, malahan juga dibidang pertanian, lama-kelamaan menimbulkan pengetahuan, bawa kekalahan-kekalahan tersebut

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Acuan dari takhayul modernisme ini sudah muncul pada pertengahan abad ke-19 pada diri Tjondronegoro (lih. P.A.A. Djajadinigrat, *"Herrineringen"* dan A.b. Abdulkadir Munsji, *"Hikayat Abdullah"*.

bersumber pada kekalahan dibidang edukasi untuk menguasai modernisme. Karena itu justru dari kalangan terpelajar Pribumilah timbulnya takhayul modernisme ini.

a. <u>Sebelum Masuknya Islam</u> :

Sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, edukasi telah mengambil tempat penting dalam kehidupan. Kepustakaan-kepustakaan daerah, yang dapat ditemukan hampir diseluruh Indonesia, menjadi bukti yang tak terbantahkan akan adanya edukasi ini dalam berbagai tarafnya, sekalipun edukasi itu tidak pernah menjadi urusan negara, terkecuali bila menyangkut kepentingan kerabat dan anak-anak raja yang dincadangkan untuk menjadi pejabat-pejabat tinggi di kemudian hari. Tidak ada pusat-pusat atau lembaga-lembaga pengajaran dan pendidikan yang diurus oleh negara sejauh yang dapat dilaporkan oleh penyelidikan sejarah. Sampai sekarang belum lagi jelas adakah pengajaran tinggi pada univeristas Budha di Sriwijaya ataupun yang diberikan dalam hubungan dengan adanya candi-candi besar seperti Prambanan dan Borobudur dibiayai oleh negara atau tidak.

Sekolah-sekolah menurut sistem pengajaran Eropa (atau modern) sudah tentu tidak bisa ditemukan juga belum ada di Eropa sendiri, sekalipun pusat-pusat pengajaran telah terdapat dimana-mana, dan pada umumnya dibiayai oleh masyarakat sendiri atau oleh para siswa. Edukasi yang diberikan bertitik berat pada pengajaran agama, sebagaimana halnya dengan di Eropa pada waktu yang sama. Edukasi yang diberikan kepada para kerabat raja ditambah dengan soal-soal kenegaraan dan kemiliteran, pemerintahan dan etika, seni dan sastra.

Seseorang yang dimasyhurkan cendekia atau berilmu hampir dengan sendirinya akan menarik sekelompok siswa. Bertambah masyhur cendekiawan itu bertambah besar kelompok siswa yang berkampung disekitarnya, tak peduli ia tinggal dimana, bahkan ditengah-tengah hutan pun.

Standar elementer dalam edukasi tidak ada, dan karenanya tidak ada surat-surat yang menerangkan seseorang lulus dari sesuatu lembaga pengajaran.

Pada kaum bangsawan edukasi, yang menghasilkan keilmuan menurut pengertian tradisional, bukan saja merupakan keharusan, juga merupakan hiasan batin, jadi menyerupai intelektalisme, terkecuali, bila ilmu-ilmu yang dipelajari itu kemudian dipraktekannya di dalam pekerjaannya, misalnya dalam pemerintahan ataupun kenegaraan dan kemiliteran.

Berhubung tidak adanya pengajaran umum, maka tidak jarang cendekiawan-cendekiawan dan ilmuwan-ilmuwan yang sangat masyhur menarik sangat banyak siswa, sehingga timbulah perkampungan pelajar. Hal demikian masih terjadi dalam dasawarsa permulaan abad ke-2.

Para satria pada umumnya mendatangkan guru untuk mendidik anak-anaknya. Hanya apabila para guru yang didatangkan itu telah “habis” ilmunya, anak-anak satria itu dikirimkan ketempat lain. Jumlah guru yang dipanggil kerumah sampai 2 atau 4 orang untuk mengajarkan berbagai keahlian : baca tulis, agama, keprajuritan, kenegaraan, pemerintahan, sedang hukum dan etika termasuk pengajaran agama, sastra dan seni pada umunya. Pengajaran ini selamanya dengan praktek. Anak-anak para satria yang dikirmkan ketempat-tempat lain untuk belajar pada cendekiawan yang masyhur disertai oleh sejumlah pengiring yang berkewajiban mengurus keperluan sehari-hari tuannya. Mereka membawa perlengkapan sendiri, termasuk juga kelengkapan keprajuritan dan kelengkapan sehari-hari.

Di dalam madrasah atau padepokan guru yang masyhur itu – yang biasa berada di tempat yang tenang – anak-anak satria ini tidak dikenakan wajib kerja untuk masyarakat

madrasah, karena para pengiring atau punakawan itulah yang mengerjakannya. Yang disebut wajib kerja untuk kepentingan masyarakat madrasah ialah mengerjakan pertanian untuk penghidupan sehari-hari seluruh masyarakat siswa dan pengajar (2)[27] di tempat belajar itu.

Karena susunan feodal, dan terutama karena anak-anak satria selamanya datang ke madrasah setelah melalui pengajaran khusus di rumah masing-masing, artinya sudah dari rumah telah diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, biasanya mereka langsung diajar oleh cendekiawan itu sendiri. Tetapi mereka yang bukan anak satria, misalnya anak-anak saudagar atau petani kaya, ataupun anak-anak petani biasa, belajar dari para cantrik – yaitu siswa-siswa sang cendekiawan yang dianggap telah memadai ilmunya.

Karena tidak adanya program tertentu dalam pengajaran tradisional ini, banyak terdapat siswa yang telah belasan tahun tinggal di padepokan ini tidak mendapat sesuatu kemajuan, apalagi mereka yang datangnya masih terlalu muda dan sama sekali tidak pernah belajar. Kemajuan-kemajuan biasanya hanya dicapai oleh anak-anak satria, sedang anak-anak petani, baik karena kelasnya, maupun karena kurang berkembangnya tradisi pengajaran di rumah, biasanya selalu tercecer. Banyak kala, juga karena kelasnya, anak-anak petani ini hanya menjadi pelayan para anak satria, atau anak-anak saudagar atau petani kaya di dalam madrasah.

Kedudukan setiap siswa atau pelajar di dalam madrasah atau padepokan tersusun menurut asal sosial mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan feodal yang berlaku waktu itu.

Madrasah-madrasah tidak jarang menjadi tempat kegiatan politik yang menentang raja. Bila terjadi yang demikian, cendekiawan bersangkutan menganut suatu anggapan yang bertentangan dengan raja. Karena itu tidak jarang terjadi madrasah dihancurkan atas perintah Raja, apalagi bila madrasah-madrasah itu memperlihatkan tanda-tanda hendak membentuk kekuatan militer. Sebaliknya tidak jarang para cendekiawan dipanggil ke istana untuk dimintai nasihatnya.

Demikianlah pengajaran tradisonal ini berjalan berabad-abad tanpa sesuatu perubahan dalam sistem dan programnya.

Pada umumnya daerah-daerah Indonesia yang tidak mengenal feodalisme, pengajarannya tidak pernah mengalami peningkatan atau peningratan, disebabkan kebutuhan masyarakat demikian akan keilmuan dan pengetahuan pun tidak sebesar di dalam masyarakat feodal, apalagi dibidang kenegaraan dan sastra. Juga di dalam masyarakat juga tidak feodal belum tumbuh kebutuhan akan adanya perwira-perwira militer, maka juga pengajaran kemiliteran di daerah-daerah yang bukan feodal adalah sangat rendah.

Pengajaran kejuruan sama sekali tidak terdapat di madrasah, karena di dalam masyarakat feodal lama titik berat pengajaran adalah pengabdian pada Tuhan dan Raja, sedang kejuruan dianggap tidka mempunyai hubungan dengan ketuhanan dan pemerintahan. Dalam pendidikan kejuruan orang dididik melalui praktek tanpa teori. Calon-calon tukang hari demi hari mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dengan demikian calon tukang yang terampil dan cerdas saja bisa menjadi tukang, sedangkan yang tidak akan tertinggal menjadi bujang.

[27] Lihat juga *"Babad Tanah Djawa"*, *"Hikayat Sjech Siti Djenar"*, Poewolelono : *"Ngulandara"*

Baik cendekiawan maupun tukang yang sangat ahli dan berjasa pada Raja bisa menerima gelar “Mpu”, dan setiap Mpu dengan sendirinya menarik banyak orang untuk belajar padanya.

Walaupun negara tidak mengadakan pusat-pusat atau lembaga-lembaga pengajaran, namu pengajaran menempati kedudukan yang penting, karena setiap ahli hampir dengan sendirinya juga seorang guru.

Dalam cerita-cerita wayang banyak dikedepankan fragmen-fragmen tentang kehidupan di madrasah atau padepokan, sejauh hal itu menyangkut adanya siswa-siswa penting dari keturunan Raja. Dalam fragmen-fragmen ini hampir-hampir tak pernah ditampilkan peranan siswa-siswa dari keturunan sudra atau waisya apalagi paria, sedang siswa-siswa yang kadang-kadang ditampilkan, yaitu para “cantrik” tidak lain daripada siswa-siswa yang mendapat kemajuan, tetapi bukan keturunan satria.

b. Selama Penyebaran Islam

Di masa penyebaran Islam pengajaran diberikan secara lebih demokratik. Apabila di masa-masa sebelumnya madrasah-madrasah berada di tempat-tempat yang tenang atau sunyi, dalam penyebaran Islam tempatnya adalah di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan interinsular dan internasional. Mudah untuk memahami sebabnya, ialah karena penyebar Islam pertama-tama adalah pedagang-pedagang dari atas angin, sehingga pelabuhan-pelabuhan internasionallah yang menjadi tempat berdirinya madrasah-madrasah Islam yang pertama-tama. Setelah pedagang-pedagang penyebar agama itu berhasil mendirikan tempat-tempat pengajian, baru kemudian didatangkan guru-guru yang lebih kompeten dari negeri-negeri atas angin. Dan karena para penyebarnya yang berasal dari golongan pedagang, dan dalam pada itu Islam sendiri tidak mengenal kasta-kasta, maka jalannya pengajaran adalah bersifat demokratik, apalagi karena masuknya golongan feodal kedalam agama Islam terjadi jauh di kemudian hari. Dengan demikian masuknya Islam ke daerah-daerah Hindu merupakan suatu revolusi sosial dalam batas-batas tertentu, dan juga merupakan perombakan dan tantangan terhadap masyarakat lama. Itulah sebabnya kaum feodal, yang justru mendapat keuntungan luar biasa dari adanya kasta-kasta, dan dimana mereka menduduki kasta atasan, memasuki agama ini pada taraf belakangan, setelah dipaksa oleh kenyataan, bahwa para pemeluk agama Islam makin lama makin banyak dan merupakan kekuatan politik yang tidak boleh dianggap kecil, dan juga kemudian menumbangkan kerajaan-kerajaan non Islam di Indonesia. Pendukung-pendukungnya yang pertama-tama adalah juga lapisan masyarakat yang lebih demokratik : pedagang, tukang, tani, nelayan.

Masuknya Islam berarti juga dimulainya pengajaran massa sebagai suatu aksi massa yang luar biasa deras. Karena pengajaran massa yang dipentingkan, maka pengajaran kejuruan yang secara tradisional telah mengalami peningratan, seperti dibidang arsitektur, seni lukis dan seni pahat terlupakan, karena seni-seni tersebut nampaknya dianggap belum dibutuhkan massa.

Dengan masuk dan berkembangnya Islam ini mulai tumbuh kaum terpelajar dari kalangan Rakyat biasa, yang bergaul dengan Rakyat biasa pula. Apabila para cendekiawan sebelum Islam pada umumnya juga guru, demikian pula para ulama dan para wali.

Berhubung Islam masuk ke Indonesia dengan membawa serta perpustakaan Islam dari luar negeri, maka dimulai kembali hubungan dengan luar negeri dibidang perpustakaan. Pengaruh langsung dari pengajaran secara Islam adalah berkurangnya jumlah kasta, makin banyaknya orang dari kalangan Rakyat menjadi guru. Tetapi setelah Islam berhasil

mendirikan kerajaan, nampaknya feodalisme lama dihidupkan kembali, dan sejak itu terjadi perpisahan antara kekuasaan kaum feodal Islam dengan Rakyat jelata yang beragama Islam. Yang pertama meneruskan tradisi feodalisme sebelum masuknya Islam, sedang yang belakangan meneruskan dengan pengajaran massa.

c. Pengajaran Eropa Pertama-tama :

Taraf permulaan dalam sejarah hubungan antara Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropa dilandasi oleh 2 hal, a) perdagangan dan b) penyebaran agama Nasrani. Perdagangan ini kemudian berkembang menjadi kekuasaan dagang, dan kekuasaan dagang berkembang menjadi kekuasaan politik kekerasan, sedang penyebaran agama Nasrani sebagai bagian dari yang pertama, lama-kelamaan berkembang menjadi kekuatan pelaksana asimilasiasi.

Sebelum Belanda berkuasa di bagian manapun di Indonesia, agama Katolik Rum telah masuk ke Blambangan dan Panarukan di Jawa Timur, yang disebarkan oleh misi Portugis, yaitu kaum Dominikan di Panarukan sejak 1560 - ±1570, dan oleh kaum Fransiskan di Panarukan dan Blambangan sejak 1584-1599. Disana mereka mendirikan gereja-gereja dan biara-biara, tetapi kemudian dibinasakan sama sekali oleh Bala tentara Sultan Agung, yang datang untuk mengembangkan Islam dan menggulingkan kerajaan Hindu terakhir di Jawa Timur.

Sebagaimana halnya dengan pengajaran Islam di kota-kota pelabuhan, dapat diduga, bahwa masuknya agama Katolik di Blambangan dan Panarukan – dua buah kota pelabuhan ini – dimaksudkan untuk perembesan kekuasaan Portugis di Jawa.

Sejak tahun 1538 agama Katolik telah disiarkan dengan giat di Ambon dalam rangka asimilasiasi. Pengkatolikan ini ditingkatkan oleh pastor Franciscus Xaverius sejak tahun 1546. Dalam usaha peningkatan itu telah didirikan sekolah rendah berdasarkan agama. Hal ini menyebabkan Ambon menjadi daerah Indonesia pertama-tama yang mempunyai sekolah dengan program pengajaran Eropa pada masa itu. Apabila sebelum datangnya Franciscus Xaverius di Ambon telah aa 7 buah sekolah rendah, dalam masa jabatannya sebagai pastor di daerah itu jumlahnya diperganda menjadi 31 buah.

Pada tahun 1605 penjajah Portugis dihalau oleh penjajah Belanda. Laksamana Don Andrés Furtado de Mendonça meninggalkan Ambon tanpa melalui suatu pertumpahan darah, karena Rakyat Ambon pada mulanya menganggap, bahwa Belanda adalah sahabatnya dalam usaha mengusir Portugis. Setelah yang belakangan ini pergi, ternyata Belanda tidak ikut pergi, tetapi menggantikan penjajah lama.[28] Setelah Laksamana Portugis menyerah kepada komandan armada Belanda, Steven van der Hagen, agama Katolik secara teratur mulai didesak oleh agama Protestan sebagai agama negara bangsa Belanda. Maka untuk melenyapkan pengaruh saingannya itu Belanda terpaksa mengorganisasi pengajaran, yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat dipergunakannya membantu dalam pekerjaan tulis-menulis, baik untuk keperluan pemerintahan maupun perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian pada tahun 1607 oleh Gubernur Maluku, Matelieff, didirikanlah sebuah sekolah rendah, sedang pengajarnya adalah guru zending : dokter Johannes Wogman. Tidak jelsa apakah sekolah ini diteruskan atau tidak, tetapi dapat diduga dengan merosotnya perdagangan rempah-rempah karena kelebihan produksi sehingga terpaksa diadakan

[28] Pengalaman Belanda membantu Rakyat mengusir Portugis, kemudian menggantikan Portugis menjajah Rakyat kemudian juga mendapatkan Rakyat Sulawesi Utara.

"hongitochten", yaitu ekspedisi penghancuran kebun-kebun rempah-rempah di Maluku, maka sekolah-sekolah inipun dapat diduga ikut dibasmi karena memang tidak dibutuhkan lagi.

Pada tahun 1615 Belanda mengirimkan pendeta pertama ke Ambon bernama Casparus Wiltens. Setelah itu dikirimkan juga pendeta kedua, ketiga dan seterusnya. Kedatangan Gubernur Jenderal J.P.Coen di Ambon pada tahun 1619 mempercepat jalannya pendesakan agama Katolik. Dimasa inilah di Ambon timbul istilah *"Rijst Christenen"* atau "Kristen-Beras", karena atas siasat Coen dibagi-bagikan beras kepada para murid sekolah rendah sebanyak 1 pon sehari agar mereka meninggalkan agama Katolik yang disebarkan Portugis itu memasuki Protestan.[29]

Waktu Gubernur Jenderal Pieter Both – Gubernur Jenderal pertama – tiba di Jakarta pada tahun 1610, ternyata sudah ada sekolah rendah buat anak-anak Eropa dan anak-anak Kristen. Sekolah ini sebagaimana yang ada di negeri induk penjajahan sendiri, sebenarnya tidak lain daripada sekolah agama. Sekolah-sekolah ini belum mempunyai, sebenarnya tidak lain daripada sekolah agama. Sekolah-sekolah ini belum mempunyai makna sebagai sekolah dasar, dan sekolah-sekolah yang demikian terus hidup selama dua abad setelah itu.[30]

Setelah *Nederlandsche Zendingsgenootschap* atau Lembaga Jemaah Belanda, yang didirikan pada tanggal 29 Desember 1797 di Rotterdam, mendapat tugas khusus mendesak agama Katolik dari Maluku, Sunda Kecil, Timor, dan kemudian juga Minahasa, pemerintah Hindia Belanda kemudian bersama dengan Lembaga ini menandatangani kontrak untuk melakukan rancangan-rancangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian bersama dengan Lembaga ini menandatangani kontrak untuk melakukan rancangan-rancagan yang dibuat oleh pemerintah untuk membuka pusat-pusat penyegaran agama Nasrani di Jawa, yang sengaja ditempatkan didekat pusat-pusat pengajaran Islam, dengan servis pengobatan kepada orang-orang sakit tanpa mengutip bayaran.[31]

Dalam pada itu pengajaran tradisional terus berjalan tanpa gangguan. Tidak jarang surau-surau yang menggantikan madrasah-madrasah atau padepokan-padepokan ini, disamping menjadi pusat-pusat pengajaran tradisional setempat, juga menjadi pusat-pusat kegiatan politik diluar kabupaten-kabupaten. Dari surau-surau ini dilahirkan patriotisme yang mempelopori pemberontakan-pemberontakan terhadap imperialisme Belanda, Inggris di Indonesia, khususnya di Jawa, Madura, Sumatera, Kalimatan, dan beberapa pulau di Nusa Tenggara.

Pengajaran Eropa pada waktu itu tak berbeda jauh daripada pengajaran tradisional di Indonesia sendiri. Pengajaran pokok adalah agama, baru kemudian menyusul pengajaran baca tulis..). Pengajaran Eropa yang memberikan pelajaran dasar untuk pembentukan kecerdasan tidak ada. Hanya anak-anak dari masyarakat pilihan saja dapat mendatangkan guru-guru Eropa, sedang guru-guru Eropa itu kebanyakan hanyalah pelarian-pelarian sosial dari tanah airnya masing-masing, atau mereka itu pensiunan serdadu, yang tidak mempunyai wewenang untuk mengajar.

Pengajaran tradisional pada masa ini dapat dilihat dari laporan Abdullah bin Abdulkadir Munsji dalam karyanya *"Hikayat Abdullah"*, sekalipun karya ini ditulis pengarangnya,

---

[29] M. Sapija : "Sejarah Perjuangan Pattimura", cetakan ke-2, 1957, hlm. 11.

[30] A. Algra : "De Kerke Christi te Batavia", 1946.

[31] Ibid.

pegajaran itu segera berubah dengan adanya pemerintahan Raffles dan perubahan ini bukan hanya terjadi di daerah penjajahan Inggris di Semenanjung dan Sumatera, juga di Jawa waktu kemudian ia menjadi letnan gubernur di Jawa.

Walaupun pemerintahan Inggris di Jawa berjalan sangat sebentar, namun ia telah berhasil dapat mengalaskan dasar-dasar yang agak sehat bagi pengajaran yang bertujuan membentuk kecerdasan para pelajar. Setelah pemerintahannya ini (di Jawa : 1811-1816; di Bengkulu : 1817-1824) diserahkannya kembali kepada Belanda, dasar-dasar pengajaran yang telah dialaskannya tetap berlaku, dan mulailah pemerintah Hindia Belanda mempunyai sedikit perhatian dalam soal ini. Mulai waktu itu diadakan rehabilitasi terhadap sekolah satu-satunya yang ada di Jakarta, dan dalam cakupan yang tidak berarti mulailah dibangunkan pengajaran sesuai dengan kebutuhan bagi penjajahanannya. Pengajaran ini bukanlah untuk Pribumi, tetapi untuk anak-anak penduduk Eropa dan orang-orang Pribumi yang telah masuk Nasrani. Mata anggaran khusus untuk pengajaran ini sama sekali belum ada (lihat hlm. 35)

Di zaman Tanam Paksa, yang mendatangkan keuntungan besar itu, mata anggaran untuk pengajaran ini juga tidak ada, sedang sekolah-sekolah agama yang ada itu dibiayai oleh Lembaga Jemaah yang berpusat di Rotterdam tersebut. Benar sekali bahwa dengan dimulainya Tanam Paksa pada tahun 1930, Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik tenaga yang bisa baca tulis, tetapi mata anggaran yang dipergunakan ialah dari No. 5 (lih. Anggaran Belanja Hindia Belanda, 1840, hlm. 35)

Halaman selanjutnya (41) tidak ada, setelah halaman 40, langsung ke halaman 42. Ada beberapa catatan kaki dari lembar yang hilang tersebut. Tercantum di bawah ini.[32][33]

Dipergunakan adalah bahasa daerah, sedang para murid yang diperbolehkan mengikuti pelajaran adalah juga dari golongan priyayi.

Empat tahun kemudian didirikan sekolah rendah Pribumi di Maros (1853), sedang di Banjarmasin pada tahun 1863, untuk menampung para pelajar dari daerah pesisir. Untuk daerah pedalaman Kalimantan pemerintah kolonial tidak pernah mendirikan sekolah sampai dengan tumbangnya kekuasaannya. Sekolah rendah yang ada di Banjarmasin ini merupakan salah satu pancingan kolonel Happe untuk melunakkan hati para pejuang dalam Perang Banjar.

Dengan semakin meningkatnya perusahaan-perusahaan swasta, kebutuhan akan tenaga baca tulis mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi pun menjadi semakin meningkat. Tenaga Eropa tidak begitu banyak dibutuhkan untuk keperluan ini karena terlalu mahal upahnya untuk macam kerja yang bisa dilakukan oleh Pribumi kebanyakan, sehingga menurut perhitungan dagang adalah tidak menguntungkan menggunakan tenaga Eropa. Juga permintaan akan tenaga kejuruan meningkat, sehingga pengajaran dasar terpaksa harus

---

[32] Van Hinloopen-Lamberton : *"Geillustreerd Handboek van Insulinde"*, 1910.

[33] Salah seorang anak Pribumi dibawah penjajahan Inggris ialah patriot Raden Saleh (alias Raden Ario Notodiningrat), yang pada tahun 1812 telah meneruskan pelajaran di Durrumtolah Academy di Calcutta. Oleh Belanda dibuang ke Ambon dan Sumenep. Lihat : Dr. Soekanto : *"Dua Raden Saleh, Dua Nasionalis Dalam abad ke-19"*.

diperbaiki untuk menjadi persiapan bagi mereka yang hendak meneruskan sekolahnya kependidikan kejuruan dan sekolah-sekolah lanjutan. Berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan swasta yang berkembang pesat ini, pemerintah kolonial merasa perlu menyesuaikan pengajaran rendah itu dengan kebutuhan yang sedang berlaku. Maka pada tahun 1893 diputuskan membuat perombakan-perombakan atas pengajaran rendah Pribumi ini menjadi dua bagian :

i. sekolah rendah kelas-I, sebagai tempat bersekolah anak-anak priyayi yang terbuka kemungkinannya untuk meneruskan ke sekolah menengah dan pengajaran kejuruan. Masa sekolahnya lebih lama, guru-gurunya terdidik lebih baik (biasanya lulusan sekolah pendidikan guru), sedang mata pelajaran yang diberikan pun lebih luas.
ii. sekolah rendah kelas-II, yang hanya memberikan pelajaran dasar yang disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan pokok daripada masyarakat yang pada umumnya buta huruf, sehingga pengajaran dari sekolah ini jauh lebih banyak artinya bagi masyarakat yang buta huruf itu sendiri.[34]

Dibawah ini adalah daftar sekolah rendah Pribumi sebelum dan sesudah diadakan perombakan tersebut. Batas-batas ini terdapat antara tahun 1897 sampai dengan tahun 1904.

Jumlah dan Macam Sekolah Rendah Pribumi, 1877-1907[35]

Dihitung pada setiap 31 Desember	Jawa dan Madura				Luar Jawa & Madura				Jumlah
	Negeri		Swasta		Negeri		Swasta		
			Subsidi				Subsidi		
			Dengan	Tanpa			Dengan	Tanpa	
1877	147		117	24	207		2	49	546
1882	193		80	23	318		2	50	666
1887	201		85	21	318		3	56	654
1892	205		82	36	311		5	151	790
			Netral	Agama			Netral	Agama	
1897	207		164	44	296		31	461	1.203
	Kelas I	Kelas II			Kelas I	Kelas II			
1904	47	258	281	78	--	345	72	704	1.785
1907	50	278	468	93	4	382	257	257	2.423

Macam sekolah rendah tersebut, -- negeri, swasta, netral, agama, subsidi dan tanpa subsidi – oleh pemerintah kolonial juga dipergunakan untuk menanamkan benih-benih perpecahan, terutama dengan adanya perombakan yang memisahkan sekolah rendah negeri kedalam 2 golongan, yakni golongan Kelas I dan golongan Kelas II. Kelas-kelas yang dipergunakan disini adalah juga kelas-kelas sosial menurut pembagian pemerintah kolonial. Dari daftar tersebut pun nampak usaha pemecahbelahan dari jumlah sekolah yang didirikan, dimana Jawa dan Madura, mendapat sekolah negeri lebih banyak, sebaliknya sekolah swasta pada mulanya lebih banyak di Jawa dan Madura. Bahwa luar Jawa dan Madura mendapatkan lebih banyak sekolah, dan lebih banyak pula sekolah swasta tanpa subsidi mencerminkan kebutuhan perusahaan-perusahaan swasta akan tenaga bersekolah untuk mencukupi kebutuhan perusahaan-perusahaan mereka yang mendapat kemajuan pesat di luar Jawa dan

[34] Van Hindloopen-Lamberton, ibid.

[35] Ibid.

Madura. Sedang banyaknya sekolah rendah Pribumi swasta tanpa subsidi berdasarkan agama di luar Jawa dan Madura, adalah sebagian daripada manifestasi pekerjaan Zending dan Misi, yang menjadi salah satu lembaga pengnasranian di daerah-daerah luar Jawa dan Madura.

Perluasan pengajaran rendah pemerintah kolonial adalah produk daripada perkembangan kapital asing di Indonesia. Karena kapital asing di Indonesia hanya mencari keuntungan, yang kemudian diangkutnya keluar Indonesia, mereka tidak mempunyai kebutuhan memperluas perindustrian ataupun usaha-usaha lain yang dititikberatkan pada kebutuhan bangsa Indonesia. Pengusahaan demikian bersifat hanya menguras kekayaan bumi dan manusia Indonesia, dan akibatnya yang langsung ialah tidak merasai adanya kebutuhan untuk berkembangnya kebutuhan akan tenaga terpelajar Indonesia. Dan pada gilirannya inipun tidak menimbulkan kebutuhan akan perluasan pengajaran.

Pada tahun 1854 dikeluarkan sebuah RR yang dalam pasalnya yang ke-127 menyatakan, bahwa *"Gubernur Jenderal berkewajiban mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk Pribumi"*, tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam daftar tersebut diatas, kewajiban itu tidak pernah dijalankan dengan sepenuh hati.

Dalam pengajaran ini makin lama permintaan untuk dapat mempelajari bahasa Belanda semakin banyak dan setiap tahun tidak pernah ada suratnya. Permintaan ini terutama datang dari pembesar-pembesar Pribumi untuk meninggikan prestise anak-anaknya di kemudian hari, sedang bahasa Belanda diberikan hanya pada sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Karena itu juga, hanya apabila tidak ada jalan lain saja, anak-anak para priyayi itu masuk ke sekolah untuk Pibumi. Dalam pada itu sekolah rendah Eropa didirikan terutama untuk kepentingan anak-anak Eropa. Dapat tidaknya anak-anak Pribumi memasuki sekolah tersebut ditentukan oleh kebijaksanaan direktur sekolah masing-masing, sedang semua direktur sekolah rendah Eropa adalah juga orang Eropa. Tidak selamanya ada tempat tersedia untuk anak-anak Pribumi, dan tidak setiap direktur sekolah rendah Eropa menjadi tempat persemaian pertama dari jiwa kolonial dan semangat perpecahan. Anak-anak kecil itu sejak masuk telah dididik berpikir dalam perpecahan dengan golongan penduduk lainnya, baik secara lisan maupun secara tercetak, baik dalam bentuk kalimat-kalimat maupun dalam bentuk gambar-gambar.[36] Berhubung di sekolah-sekolah tersebut tidak jarang terdapat anak-anak pembesar Pribumi dan Tionghoa ataupun Timur Asing lainnya, percampuran antara berbagai murid dari segala bangsa itu menjadi tempat menyemaikan kosmopolitisme yang menentang dan merendahan segala apa yang ada di luar lingkungan sekolah dan lingkungan mereka. Diskriminasi rasial antara mereka sendiri kadang-kadang dengan sengaja dimunculkan sebagaimana dilaporkan dengan cara yang mengharukan oleh Kartini dalam karyanya *"Door Duisternis tot Licht"*.[37]

---

[36] Pengajaran dan pendidikan bagi pemerintah kolonial menjadi alat untuk memimpin para murid dalam dunia perpecahan yang antagonistik. Para pelajar dipimpin untuk menanggap, bahwa "Pribumi adalah pemalas" (de Iuie inlander), bahwa "orang Tionghoa adalah litjik" (de sluwe Chinees), bahwa "orang Arab adalah pengotor" (de vuile Arabier). Bila dipertentangkan pemecahbelahan yang terkandung dalam program pengajaran dan pendidikan ini dengan gagasan asosiasi, yang muncul menjelang abad ke-20 dengan Snouck Hugronje sebagai kreatornya, yang sementara itu juga seorang pendasar dari teori rasialisme dan perbedaan bahasa di lapangan pengajaran dan pendidikan, tidak lain yang tergambar dalam pikiran kita terkecuali suatu permainan sandiwara.

[37] Surat R.A. Kartini tgl. 12 Januari 1900, kepada Estelle Zeehandelaar, dimana ia menyatakan, bahwa : "sejumlah besar anak-anak Eropa yang baru masuk sekolah itu pengetahuannya tentang bahasa Belanda sama saja dengan aku, sewaktu aku baru masuk". Jadi maklumat Abendanon bukan tertuju pada Pribumi, tetapi pada calon-calon murid bangsa Eropa, agar dengan demikian, pengetahuan terjadinya penghinaan di depan umum

Berhubung dengan sulitnya memasuki sekolah rendah Eropa, sedang sekolah rendah Pribumi, baik sebelum maupun setelah direorganisasi (1892, 1904), tidak memuaskan para priyayi yang menginginkan anak-anaknya bisa menguasai bahasa Belanda, maka didorong oleh ketidakpuasan ini banyak diantara para priyayi tinggi dan menengah sengaja memondokkan anak-anak mereka pada keluarga-keluarga Eropa dengan harapan agar dengan jalan "asosiasi" bukan saja anak-anak mereka dapat baca tulis dalam bahasa Belanda, tapi juga dapat meresapi peradaban Eropa secara langsung dan "tepat".

Mendekati dan melewati tahun 1900 cara demikian semakin banyak dilakukan orang, walaupun hasil "asosiasi" ini tidak selamanya berhasil atau memuaskan, bahkan banyak diantara mereka tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dan hanya memperoleh *complex inferior,* sebagai hasil daripada hubungan yang tidak serasi. Sebaliknya, hubungan yang tidak serasi ini, telah menghasilkan kekuatan-kekuatan yang justru kelak menjadi penentang imperialisme Belanda sendiri.[38]

Keluarga-keluarga Eropa ang suka menerima pemondok-pemondok Pribumi ini mempunyai berbagai alasan untuk menerima mereka. Ada yang karena motif mendapat predikat etikus, dari golongan kolonial yang maju, dan ada pula yang karena motif mencari tambahan penghasilan saja. Dalam pada itu mereka masih terbagi dalam berbagai golongan, yaitu :

i. yang menerima pemondok, yang dengan sungguh-sungguh hati, dan mendidiknya sebagaimana diharapkan oleh gagasan "asosiasi", dan memandang anak-anak pemondok tersebut sebagai anak Eropa biasa, dan diantara mereka ini kelak ada yang benar-benar berhasil menjadi pejabat-pejabat kolonial yang memenuhi kehendak kolonial secara tepat,
ii. yang tidak percaya, bahwa anak-anak Pribumi bisa mempelajari sesuatu dari Eropa, dan memperlakukan pemondoknya tidak lebih daripada seorang bujang,
iii. yang menerima pemondok dengan sadar untuk memberinya kebalikan daripada yang diharapkan, dan
iv. yang dengan sadar mengambil anak angkat, dan mempergunakan "anak angkat" itu sebagai kelinci percobaan untuk dapat mengamati bekerjanya pengaruh peradaban Eropa di dalam jiwanya. Jadi golongan terakhir ini bukan sekedar penganut "asosiasi", tapi telah menjadi eksperimentalis "asosiasi".

Di luar mereka yang menerima pondokan itu pada umumnya – terutama pada golongan Indo – berkuasa pendapat, bahwa meningkatnya pengetahuan Pribumi hanya akan menghasilkan peningkatan pembangkangan terhadap kekuasaan dan kewibawaan pemerintah kolonial, sedang sebaliknya, para pembesar Pribumi yang telah diresapi jiwa liberal berpendapat, bahwa meningkatnya pengetahuan Pribumi akan menyebabkan Pribumi tidak lagi hanya pandai "mengamin" dan merangkak-rangkak dihadapan para pembesar ataupun mandor-mandor kulit putih. Disamping itu golongan Indo Belanda itupun menaruh hati cemburu terhadap orang-orang Pribumi yang mengerti dan bisa menggunakan bahasa Belanda dengan baik, karena segala tanda-tanda peningkatan pada Pribumi mereka anggap sebagai ancaman terhadap golongan-golongannya, yang menganggap lebih dekat pada kekuasaan imperialisme Belanda daripada Pribumi. Hal ini segera dapat dipahami bila

---

kepada orangtuanya masing-masing. Surat Kartini adalah sebuah dokumen sejarah yang sangat penting di bidang edukasi.

[38] Pejuang-pejuang yang pernah hidup dalam keluarga Eropa adalah : Semaun, Alimin, Tan Malaka, Djojopranoto, S. Hassannoesi dll., dan sudah barang tentu mereka yang pernah belajar di Eropa.

dipelajari dari perimbangan penduduk di daerah jajahan Belanda di Indonesia, yang menunjukkan, bahwa dalam dunia kepegawaian, sebagian terbesar golongan penduduk Indo Eropa adalah pegawai, bila bukan milter, demikian pula halnya dengan orang-orang Eropa totok, sedang dalam pada itu orang-orang Pribumi memandang – sebagai warisan dari alam feodal – bahwa kepangrehprajaanlah pekerjaan yang paling tinggi, karena ia ikut memerintah dengan imperialisme Belanda. Mereka takkan memilih pekerjaan lain sebelum gagal mendapatkan pekerjaan pada kantor pemerintah.

Dalam pada itu para pembesar Pribumi yang lebih mampu, biasanya bupati-bupati, bila tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah rendah Eropa (karena faktor-faktor pribadi), dan juga tidak suka memondokkan anak-anaknya karena prestise, tidak jarang mendatangkan guru rumah bangsa Eropa. Biasanya anak-anak pejabat tinggi lainnya ikut belajar sedang orangtuanya ikut memikul pembiayaan. Cara demikian juga telah dilakukan, mungkin dipelopori oleh keluarga Tjondronegoro, kakek Kartini, pada pertengahan abad ke-18.

Sementara itu bahasa Belanda bukan saja menjadi bahasa resmi dan bahasa kekuasaan juga menjadi bahasa elite. Orang tak bisa menjadi anggota elite tanpa menguasai bahasa ini. Dengan demikian permintaan akan tempat di sekolah rendah Eropa makin menjadi banyak juga. Pada tahun 1900 dengan didirikannya Departemen-Departemen dalam administrasi kolonial, diantaranya Departemen Pengajaran & Ibadah, dengan mr J.H. Abendanon sebagai direktur yang pertama. Untuk membatasi kemungkinan semakin mendesaknya jumlah murid Pribumi dalam sekolah rendah Eropa, pada tahun 1903, ia terpaksa mengeluarkan maklumat sesuai dengan kehendak masyarakat Eropa di Indonesia, yang membatasi jumlah murid Pribumi yang memasuki sekolah rendah Eropa ini sampai dengan 60 anak saja dengan tiada pemeriksaan pendahuluan akan kemampuannya berbahasa Belanda. [39] Disamping itu ditetapkan pula, bahwa mereka yang 60 orang itu kelak akan meneruskan pelajaran ke sekolah Opleiding, atau sekolah calon pegawai Pangreh Praja. Ketentuan lain didalam maklumat tersebut menyebutkan, bahwa dari 60 kesempatan itu 55 disediakan untuk Jawa dan Madura sedang 5 kesempatan selebihnya untuk diluarnya.

Uang sekolah yang dikenakan pada murid-murid Pribumi di sekolah rendah Eropa ini sangat tinggi, yaitu 10% dari penghasilan orang tuanya dalam sebulan untuk anak pertama, 5% untuk anak kedua, 2,5% untuk anak ketiga dan seterusnya. Uang sekolah naik dengan seperempatnya bila anak-anak tidak naik kelas.

Dalam pada itu sampai tahun 1903 pemerintah kolonial belum lagi mendirikan sebuah sekolahan pun di pedalaman Kalimantan. Dua puluh buah sekolah yang telah ada disana semuanya didirikan oleh Zending, dan sekolah-sekolah itu biasanya dinamai “Sekolah Zending” dengan dasar pengajaran agama. Sampai tahun 1903 ini jumlah murid di pedalaman Kalimantan adalah sebanyak ± 750 orang, diantaranya 60 gadis.

Untuk mengikuti kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang tidak menyetujui adanya ko-edukasi, Abendanon banyak mempropagandakan perlunya didirikan sekolah-sekolah gadis, karena sekolah gadis memang tidak banyak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Tetapi ia sendiri, sebagai direktur Departemen Pegajaran dan Ibadah, tidak pernah melaksanakan propagandanya sendiri. Dan apabila pada waktu itu di Bandung, Jepara,

[39] Menilik dari Surat R.A. Kartini tgl. 12 Januari 1900 tersebut. (lih : catatan no. 37), sebelum maklumat Abendanon itu keluar, sudah lama berlaku prosedur “tiada pemeriksaan pendahuluan akan kemampuan murid-murid berbahasa Belanda”

didirikan sekolah gadis permulaan, hal itu sama sekali bukan karena usaha Departemen Pengajaran & Ibadah, tetapi usaha dari masyarakat atau perseorangan.

Awal abad ke-20 sebagai kelanjutan daripada usaha kaum kapitalis Eropa untuk mengembangkan kapitalnya di Indonesia, dengan politi etis sebagai buntutnya, telah memberanikan Pribumi untuk semakin bersemangat mempelajari bahasa Belanda sebagai jalan kearah penghidupan, dan bukan hanya kekuasaan. Pegaruh modal asing yang mendatangkan perlengkapan modern dan membangunkan alat-alat dan komunikasi baru di Indonesia buat kepentingan kapitalnya, telah menimbulkan suasana penghidupan baru, juga menimbulkan syarat-syarat penghidupan baru pula, yang harus dapat menyesuaikan diri dengan permintaan peralatan dan perkembangan kapital yang diusahakan secara modern. Semua ini yang memberanikan Pribumi untuk dimasukkan anak-anaknya ke sekolah untuk kelak dapat ikut berlomba dalam penghidupan.

Berpikir dalam perpecahan bukan saja perpecahan rasial, juga perpecahan antara lapisan-lapisan kelas sosial, seperti pada pembukaan *Menadosche School* di Manado (1901), dimana pencalonan murid dipanggil masuk menurut tinggi rendahnya kedudukan orang tua atau walinya yaitu :

i. anak-anak kepala distrik-I
ii. anak-anak kepala distrik-II
iii. anak-anak bekas kepala distrik
iv. anak-anak dokter Jawa dan guru
v. anak-anak mantri cacar, guru Injil, guru bantu dan pegawai negeri lainnya
vi. anak-anak orang berbangsa yang lain dan anak-anak orang kaya[40]

Sedang untuk menjaga agar tidak terjadi keonaran, pemerintah mengeluarkan maklumat, bahwa untuk luar Jawa dan Madura, "anak-anak raja yang bersahabat dengan pemerintah Hindia Belanda juga berhak mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah negeri, demikian juga keluarganya yang lain, selagi tempat itu masih terbuka", dan ditambahkan, bahwa di dalam kelas tidak diadakan perbedaan kedudukan orang tua mereka, terkecuali di luar sekolah. Hamba-hamba para murid anak raja tidak diperkenankan masuk atau ikut ke dalam kelas, terkecuali kalau lomba-lomba itu juga murid di sekolah bersangkutan. Dan murid anak-anak raja inipun diwajibkan tunduk pada peraturan sekolah tanpa memandang orang tuanya.[41]

Mendesaknya Pribumi untuk mendapat pengajaran Eropa dapat dilihat dari daftar dibawah ini, sekalipun pemerintah kolonial berusaha kuat-kuat untuk melakukan pembatasan-pembatasan :

Jumlah Murid Pada Sekolah Rendah Pribumi[42]

Dihitung pada	A = Jawa dan Madura	B = Luar Jawa dan Madura	

[40] TAMAN PENGADJARAN V/15 Djuli 1903 – 15 Djuni 1904. A.J. Kairoepan : "Menadosche School", hlm. 102-103.

[41] Maklumat ini tidak lain daripada sebuah prasyarat berhubung kaum raja belum semuanya dapat menerima anaknya harus tunduk pada seorang guru yang notabene bukan keluarga raja, yang menurut sopan santun feodal, tingkatnya berada dibawah anak raja.

[42] Van Hinloopen-Lamberton, Op.cit.

setiap 31 Desember											
	Sekolah Negeri				Sekolah Swasta						
	Pria	Wanita	Jumlah	Gratis	Pria	Wanita	Jumlah	Gratis	Pria	Wanita	Jumlah
1877											
A	12.533	28	12.561	2.195	5.665	1	5.666	343	877	1	873
B	14.096	-	2.065	2.065	94	-	94	-	2.792	-	2.792
1882											
A	16.171	43	16.214	4.196	3.112	1	3.113	429	594	-	594
B	18.694	-	18.694	2.663	61	-	61	-	1.594	-	1.594
1887											
A	18.950	77	19.027	4.711	2.420	1	2.421	373	704	9	713
B	21.088	5	21.093	18.263	147	1	148	?	1.985	120	2.105
1892											
A	22.302	244	22.546	5.027	4.659	12	4.671	531	1.869	15	1.884
B	22.319	7.320	30.139	3.851	187	38	225	86	3.697	1.025	4.722
1897											
A	24.800	302	27.302	3.563	9.127	57	9.184	879	2.587	962	3.549
B	24.201	7.739	31.940	4.658	1.025	9	1.032	349	14.038	4.936	18.974
1904											
A	39.780	1.236	41.016	2.473	17.039	565	17.604	2.485	3.947	1.445	5.392
B	34.958	10.368	45.326	8.329	2.995	44	3.039	839	26.164	9.597	35.761
1907											
A	55.931	8.415	56.346	1.545	24.028	11.087	25.115	2.093	4.890	1.430	6.320
B	41.565	11.975	53.540	35.694	6.128	258	6.386	3.408	31.575	11.088	42.663

Situasi baru yang ditimbulkan dibidang pengajaran sebelum mulai berakhirnya abad ke-19 dimana setiap tahun semakin banyak para priyayi yang menghendaki pengajaran yang lebih baik kepada anak-anaknya, telah banyak menarik perhatian para politisi di dalam Parlemen Nederland, para wartawan, dan juga Lembaga-Lembaga Injil dan yang terakhir serta terpenting terutama adalah modal asing di Indonesia. Apabila dilihat daftar diatas nampaklah seakan-akan telah terjadi perlombaan antara pemerintah, agam (Nasrani) dan modal asing dalam menyemaikan kader-kadernya. Tapi perlombaan itu tidak ada, karena ketiga-tiga kekuatan tersebut, adalah satu kekuatan raksasa yang sangat berkuasa diseluruh dunia pada waktu itu, yaitu kekuatan imperialis-kolonialis. Kekuatan-kekuatan lain yang berkuasa, yang nampaknya berdiri sendiri, sebenarnya tidak lain daripada anggota kekuasaannya, yang sama sekali tidak berdiri sendiri dan tidak pernah berdiri sendiri.

Adalah menarik, bahwa jumlah sekolah swasta ternyata jauh lebih banyak terdapat di luar Jawa dan madura. Juga jumlah murid sekolah swasta di luar Jawa dan Madura adalah jauh lebih banyak. Tetapi lebih penting untuk diketahui adalah, bahwa kesempatan belajar gratis terutama diberikan oleh sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta yang didasarkan pada agama (Nasrani). Tetapi hal ini segera akan merubah dengan dilewatinya abad ke-19, karena kemajuan-kemajuan yang diperoleh modal asing di Indonesia telah melahirkan kondisi sedemikian rupa sehingga modal asing tidak begitu membutuhkan bantuan dari Lembaga-Lembaga Injil, dan membiarkan Lembaga-Lembaga tersebut berkembang menempuh jalannya sendiri.

d. Pengajaran Rendah Pada Golongan-Golongan Lain :

Tentang tingkat dan kondisi pengajaran pada golongan Tionghoa sebelum tutup abad ke-20 tidak dapat dikatakan mempunyai perbedaan yang prinsipal daripada Pribumi sendiri. Bagi mereka pun bukan suatu hal yang mudah untuk dapat memasuki sekolah-sekolah rendah Eropa. Bahkan untuk suatu masa tertentu pemerintah memutuskan menutup sama sekali pintu masuk bagi mereka. Kedalam sekolah-sekolah rendah Pribumi mereka pun tidak bisa diterima berhubung kedudukan mereka sebagai Timur Asing dan bukan Pribumi. Anak-anak

keturunan Tionghoa, yang mendapatkan keberuntungan kemajuan dibidang pembentukan kecerdasan, adalah mereka yang mendapat pelajar dirumah orangtuanya sendiri.[43] Makin jauh tempat mereka dari kota, makin sulit kesempatan untuk mendapatkan pengajaran. Di dalam pendidikan sekolah mereka kapiran sama sekali sekali. Di kota-kota besar dan kecil tidak ada sekolah bagi anak mereka. Orang hartawan terpaksa mengundang sendiri guru Tionghoa, yang mengasih pelajaran Tionghoa secara kuno di rumahnya kepada anak-anaknya dan memberi ketika juga untuk anak-anak sahabat kenalannya ikut serta belajar. Di satu dua tempat ada juga guru Tionghoa yang membuka sekolah di rumahnya, semacam sekolah Tionghoa partikelir yang tidak mempunyai guru lain daripada tuan rumah sendiri.

Selanjutnya "di *Jakarta Kongkoan* (*Raad-Tionghoa*) mendirikan *Gie-oh* (*Beng-Seng Ie Wan*) untuk menerima anak-anak Tionghoa, terbanyak anak-anak miskin untuk belajar Tionghoa dengan tidak membayar uang sekolah. Hanya anak-anak laki-laki yang diterima di sekolah-sekolah itu. Beberapa hartawan besar saja yang memberikan pendidikan Eropa kepada anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Anak-anak laki-laki dikirim-kos ke rumah keluarga Eropa dan anak-anak perempuan diberikan pelajaran di rumah, terutama dalam bahasa-bahasa Eropa modern dan main piano, hingga didalam tahun sembilan puluhan abad yang lalu telah terdapat nona Tionghoa yang pandai main piano dan menggunakan bahasa Perancis.[44]

Tingkat dan kondisi pengajaran ini berubah setelah masyarakat Tionghoa menyadari keterbelakangannya sebagai golongan penduduk di Indonesia. Dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (disingkat THHK), yang antara lain menugaskan diri mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan untuk menyiarkan pengetahuan umum. Setahun setelah berdirinya THHK, pada tanggal 17 Maret 1901, berdiri sekolah THHK yang pertama-tama. Sebagaimana halnya dengan sekolah-sekolah Eropa yang pertama-tama di Indonesia yang merupakan kopi dari sekolah-sekolah di Eropa, demikian pula halnya dengan sekolah THHK yang pertama-tama ini, sehingga tidaklah banyak manfaatnya bagi murid-murid itu sendiri yang tidak bermaksud menetap di Tiongkok. Ditambah lagi dengan kenyataan, bahwa murid-murid sekolah ini kebanyakan adalah anak-anak yang tidak mampu dan tenaganya dibutuhkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga harus meninggalkan sekolahnya setelah beberapa tahun saja belajar.

Walaupun demikian, dalam waktu yang cepat diberbagai tempat didirikan juga sekolah-sekolah semacam ini dimana THHK mempunyai cabang-cabangnya. Sumbangan-sumbangan yang diterima dari para dermawan Tionghoa mempercepat perkembangan ini serta memperbaiki mutu pada ajaran yang diberikan. Dengan sumbangan-sumbangan itu THHK mendatangkan guru-guru dari Tiongkok, yang dianggap lebih berwenang memberikan pelajaran.

Diantara sekian banyak guru-guru yang dimpor ke Indonesia tidak sedikit jumlahnya pemuda-pemuda yang sengaja meninggalkan tanah airnya karena terlibat dalam gerakan revolusioner yang semakin berkembang setelah keributan-keributan Boxer dalam tahun 1900, tetapi terutama setelah digabungannya tenaga-tenaga revolusioner dibawah "Tung Meng Hui" dengan dr Sun Yat Sen sebagai salah seorang pemukanya yang penting.

---

[43] Tio Ie Soei, Op.cit.

[44] Ibid.

Guru-guru yang diimpor inilah yang meniupkan kesadaran nasional Tionghoa pada bocah-bocah muridnya, sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir akan perkembangan selanjutnya yang bakal terjadi dan untuk menahan kemajuan sekolah-sekolah THHK, secara terburu-buru didirikan HCS (*Hollandsch Chineesche School* atau Sekolah Tionghoa Belanda) untuk menampung bocah-bocah Tionghoa, yang diharapkan dapat dibentuk menjadi pendukung kekuasaan imperialisme Belanda. Tanpa kemajuan-kemajuan yang nyata yang dicapai oleh THHK, tak mungkin Hindia Belanda mengadakan HCS, apalagi sebelum adanya sekolah-sekolah THHK tersebut anak-anak Tionghoa hampir-hampir tak mungkin dapat memasuki-memasuki sekolah-sekolah berbahasa Belanda.

Maksud pemerintah kolonial dengan pendirian sekolah-sekolah tersebut selain menahan – setidak-tidaknya mengurangi pengaruh bangkitnya nasionalisme Tionghoa – juga status kependudukan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam lingkungan hukum dagang dan pidana Eropa, sekalipun mereka masih diperbolehkan meneruskan hukum adatnya sendiri.

Dengan timbulnya HCS muncullah warna baru, yaitu warna biru atau warna imperialis pada golongan Tionghoa di Indonesia sebagai produk dari pengajaran Eropa, sehingga dengan demikian imperialisme berhasil melanjutkan usaha memecah belah.

Hasil yang telah dicapai oleh THHK pada giliranya juga memberikan rangsangan pada golongan penduduk Arab untuk merebut kemajuan. Dalam usahanya menandingi prestasi golongan Tionghoa dibidang pengajaran merekapun mendirikan organisasi semacam THHK bernama Djamiatul Chair (Organisasi Budi Utama), yang juga mendirikan sekolah-sekolah Djamiatul Chair, yang merupakan kopi daripada sekolah yang dianggap paling ideal pada waktu itu di negeri-negeri Arab, terutama Mesir. Juga program pengajarannya yang mula-mula tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, tapi lebih banyak untuk negeri-negeri Arab. Guru-guru didatangkan dari negeri-negeri Arab, terutama Tunisia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1905 di Jakarta oleh seorang Arab bernama Alkatiri. Sebagaimana pemerintah kolonial mengimbangi THHK dengan HCS, juga kelak pemerintah kolonial mencoba meneruskan pekerjaan pemecah belahan ini dengan jalan mendirikan HAS (Hollands Arabische School, Sekolah Arab-Belanda), yang mendapat banyak tentangan dari masyarakat, sedang pada tahun 1908, untuk makin mengimbangi THHK oleh organisasi ini didirikan juga organisasi pengajaran bagi pemuda-pemuda Muslimin yang bernama Sumatra-Batavia Alchairah (Organisasi Sumatra-Batavia).

e. Babak Baru Dalam Pengajaran Rendah :

Babak baru dalam pengajaran rendah di dalam Zaman Gelap ini pada umumnya dianggap dimulai dalam pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz, dan terutama karena "jasa"nya dibidang pengajaran ini ia dianggap mempunyai tempat yang terhormat dalam barisan kaum etis.

Dalam pemerintahannya ini rangsang untuk maju telah berkembang disemua lapisan masyarakat terutama yang tinggal di kota-kota. Semakin banyak permintaan akan pengajaran rendah modern Eropa tidak lain artinya daripada semakin terdesaknya sekolah-sekolah yang berdasarkan agama. Ini berarti, bahwa pengajaran yang didasarkan pada program pembentukan kecerdasan makin mendapatkan pengertian dari masyarakat.

Pada waktu itu telah berkembang suatu anggapan, bahwa kesusilaan mestilah timbul sebagai akibat daripada adanya kesadaran yang terjadi karena perkembangan yang metodis daripada pikiran, watak dan kehidupan jiwa dan kesusilaan itu harus didasarkan pada pimpinan perkembangan bakat dan kemampuan berpikir. Maka itu perkembangan

kemampuan berpikirlah yang menjadi pegangan dalam pengajaran rendah modern, dan latihan-latihan berencana pun dilakukan di sekolah-sekolah demikian, sedang yang menjadi titik beratnya adalah metodik. Bahkan pengajaran itu sendiri menjadi soal kedua.[45]

Sebelum memasuki sekolah rendah modern yang mengutamakan perkembangan berpikir telah ada pada waktu itu taman kanak-kanak tempat mempersiapkan si murid dalam kemampuan menanggap secara benar.

Pemerintah kolonial sendiri tidak pernah mendirikan sekolah taman kanak-kanak, karena sekolahan demikian tidak akan pernah mendatangkan keuntungan baginya. Taman kanak-kanak ini biasanya didirikan oleh Gereja-Gereja RK (Reformasi Katolik) atau oleh kaum Vrijmetselaar melalui loge-logenya. Sedang kemajuan yang pesat dari sekolah taman kanak-kanak ini terutama sekali disebabkan karena banyaknya didirikan biara-biara RK baru.[46]

Para pembesar pribumi lebih suka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah taman kanak-kanak ini untuk mempelajari bahasa Belanda secara perlahan-lahan daripada mendatangkan guru sendiri yang lebih mahal biayanya, yang biasanya adalah orang-orang Eropa pengangguran atau pensiunan atau bekas militer yang tinggal di kampung-kampung.

Dalam pemerintahan van Heutsz ini pengajaran dibagi dalam :

i. pengajaran rendah Eropa dengan bahasa pengantar Belanda,
ii. pengajaran rendah Pribumi dengan bahasa pengantar daerah,
iii. pengajaran rendah Eropa dengan bahasa pengantar Belanda tetapi untuk anak-anak Tionghoa.

Ketiga-tiga macam pengajaran rendah tersebut diatas sama, tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang esensial, sedang perbedaan-perbedaan yang diadakan yaitu yang didasarkan atas Hurgronje,[47] yang kemudian dianggap menjadi unsur-unsur penting bagi pemerintah kolonial dalam menciptakan kontradiksi-kontradiksi rasial dan sosial.

Sesuai dengan kategorinya, pengajaran rendah Eropa adalah dengan bahasa pengantar Belanda, dan diadakan untuk anak-anak Eropa. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Eropa. Maka apabila disesuatu tempat telah mencukupi untuk menampung 25 orang murid bangsa Eropa, berarti bahwa sekolah rendah Eropa telah mencukupi syarat untuk dan harus didirikan. Gedung sekolahnya dibangun menurut rencana yang telah ditentukan dan diatur secara mewah. Tenaga-tenaga pengajarnya tergantung pada jumlah murid. Pada sekolah-sekolah ini bisa diterima murid-murid Pribumi ataupun Tionghoa menurut kebijaksanaan kepala sekolah. Penerimaan murid-murid Pribumi atau Tionghoa tergantung pada kebijaksanaan direktur sekolah masing-masing, tapi biasanya peraturannya semakin keras di kota-kota besar, dan semakin longgar semakin kecil kotanya.

---

[45] Van Hinloopen-Lamberton sda. Bahwa bahan pengajaran tidak penting, sedang yang penting adalah metodik dan latihan belaka, tidak lain daripada suatu penggelapan terhadap kenyataan adanya program yang teratur dan berencana untuk tetap membuat para murid terus berpikir dalam perpecahan, serta menghalangi sedapat mungkin tumbuhnya kesadaran nasional. Hal ini mulai menjadi masalah bagi gerakan nasional pada dasawarsa kedua abad ini, dan mencapai klimkas dengan keluarnya “Ordonansi Sekolah Liar” serta perlawanan terhadapnya (1933-1934).

[46] Van Hinloopen-Lamberton, Ibid.

[47] Robert van Niel : *“The Emergence of the Modern Indonesian Elite”*, 1960, hlm. 12.

Adalah sangat penting untuk mempelajari angka-angka dibawah ini untuk diperbandingkan dengan angka-angka lain kelak :

Sampai tahun 1908 telah terdapat 190 rumah sekolah demikian dengan rata-rata 4 orang guru pada setiap sekolah yang bermurid rata-rata 114 anak. Seluruh murid sekolah rendah Eropa berjumlah 16.491 anak Eropa, diantaranya 45% wanita, 3.683 murid Pribumi diantaranya 13,5% wanita dan 1.530 murid campuran tapi kebanyakan Tionghoa dengan diantaranya 15% wanita.

47 % dari seluruh murid ini tidak membayar uang sekolah, artinya gratis, sedang 47% tersebut, 61% adalah murid-murid Eropa (lih : Daftar Pengadjaranrendah Eropa milik Negeri, 1864-1908, pada hlm. 41).

Disamping sekolah negeri ini masih ada sekolah-sekolah demikian milik swasta yang bersikap netral terhadap ras, politik, sosial ekonomi serta agama, terkecuali sekolah-sekolah yang didirikan oleh Lembaga-Lembaga keagamaan. Pada tahun ini jumlahnya ada sebanyak 40 buah dengan rata-rata 6 orang guru dan 128 murid setiap sekolah, sedang jumlah muridnya adalah 4.332 anak Eropa diantaranya 73% gadis, 420 murid Pribumi dengan 26% gadis dan 364 anak Tionghoa dengan 30% gadis.

Lain pula halnya pada pengajaran rendah Pribumi.

Dalam pengajaran ini bahasa setempat (daerah) yang dipergunakan sebagai pengantar, sedang bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dipergunakan dialek Surakarta. Sekolah-sekolah di daerah negeri Melayu, bahasa Melayulah yang jadi bahasa pengantar. Huruf yang dipergunakan ialah huruf setempat (daerah), kadang-kadang juga huruf Arab dimana huruf setempat tidak ada atau telah terdesak tapi sudah pada waktu itu telah timbul keinginan yang kuat untuk hanya menggunakan huruf Latin.

Dalam pemerintahan van Heutsz, ini pengajaran Pribumi terbagi-bagi lagi dalam 3 macam :

i. pengajaran rendah yang "sangat elementer" di Jawa dan Madura, yang didirikan sendiri oleh desa-desa kadang-kadang dengan mendapat bantuan sedikit dari pemerintah. Biasanya sekolah ini dinamai "sekolah desa". Dalam sekolah ini semua urid diwajibkan membayar uang sekolah sebanyak beberapa ketip atau sen. Berdiri tidaknya sekolah-sekolah desa ini tergantung pada kekayaan desa dan keinsyafan warga desanya. Sampai pada tahun belasan kemudian masih terdapat pejabat-pejabat pangreh praja yang menghalang-halangi dengan sengaja pendirian sekolah desa seperti tersebut. Sebaliknya ditempat-tempat lain terdapat juga pejabat-pejabat yang bukan saja menganjurkan pendiriannya, bahkan juga memberikan bantuannya dalam bentuk uang.
   Menurut perhitungan tahun 1908, di Jawa dan Madura telah terdapat 367 sekolah desa yang didirikan atas inisiatif desa sendiri. Disamping itu terdapat juga sekolah demikian yang didirikan oleh pihak swasta (tuan tanah-tuan tanah Eropa, pahter tanah, perkebunan-perkebunan dsb). Di daerah Aceh dan sekitarnya sekolah-sekolah demikian juga terdapat, sedang di wilayah-wilayah lain belum diketahui dengan pasti. Sedikitnya jumlah sekolah-sekolah semacam ini sekaligus menerjemahkan rendahnya kemakmuran pada desa-desa dalam penjajahan Belanda.
   Maka apabila sekolah-sekolah desa ini didirikan dengan biaya desa-desa sendiri, maka sekolah rendah Eropa didirikan secara mewah dan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dan apabila sekolah-sekolah desa ini gunanya untuk

melayani sebagian terbesar anak-anak Indonesia, sebaliknya sekolah rendah Eropa sudah harus berdiri apabila disesuatu tempat telah ada paling sedikit 25 orang bocah Eropa. Dan apabila di sekolah-sekolah desa setiap murid diwajibkan membayar uang sekolah, maka 47% dari murid-murid sekolah rendah Eropa ini dibebaskan dari kewajiban itu, sedang 61% dari murid-murid yang dibebaskan dari kewajiban bayar uang sekolah 47% daripadanya adalah anak-anak bangsa Eropa. Sebaliknya murid-murid Pribumi yang masuk sekolah ini dikenakan wajib bayar uang sekolah sebanyak 10% dari penghasilan orang tuanya.

ii. pengajaran rendah Kelas I pada akhir tahun 1907 tercatat sejumlah 50 buah di Jawa dan Madura, dan hanya 4 buah diluarnya. Program pengajarannya adalah lebih luas daripada di dalam pengajaran rendah Kelas II, sekalipun kedua-duanya didasarkan pada sistem pengajaran Barat, terkecuali pada penggunaan bahasa pengantar.

iii. pengajaran redah Kelas I pada akhir tahun 1907 berjumlah 278 di Jawa dan Madura, sedang diluar itu tercatat sebanyak 382 buah.

e. Pengajaran Lanjutan :[48]

Sekolah lanjutan di Indoneisa telah ada pada tahun 1879/1880, dengan didirikannya Hoofdenschool atau lazim juga disebut Sekolah Raja, untuk mendidik anak-anak Bupati dalam pengetahuan dan pekerjaan administrasi. Sekolah ini didirikan karena semakin banyaknya pekerjaan administrasi disebabkan dengan semakin meluasnya perusahaan-perusahaan partikelir, yang membutuhkan pelayanan lebih cepat. Sekolah ini mendidik para siswa untuk menjadi calon-calon pegawai negeri. Sebelum itu, untuk bisa menjadi pegawai negeri yang bertanggung jawab, mereka belajar sebagai magang sambil menunggu terbukanya lowongan. Tetapi dengan berkembagnya perusahaan-perusahaan swasta, teryata bahwa pihak swasta itu tidak melihat pada keturunan atau bangsa dari pejabat-pejabat yang memerintah, tetapi pada kecakapannya memerintah. Demikianlah maka sekolah lanjutan pertama-tama ini didirikan untuk menjawab kebutuhan perusahaan-perusahaan swasta tersebut.

Pada mulanya Sekolah Raja ini menggunakan bahasa daerah, dan didirikan di tempat-tempat dimana perusahaan-perusahaan swasta mempunyai kegiatan yang cukup menarik. Lambat laun dalam sekolah-sekolah ini dipergunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah Raja ini kelak menjadi sekolah yang menjadi idaman anak-anak priyayi tinggi setelah berkembang menjadi OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren* = Sekolah Pendidikan untuk Pegawai-Pegawai Pribumi).

Sekolah lanjutan yang pertama-tama ada di Indonesia ia sekolah kesehatan yang mulai diadakan pada tahun 1851, dan terkenal dengan nama Sekolah Dokter Jawa. Tugas Sekolah ini ialah mendidik mantri-mantri cacar yang baik. Tetapi dengan semakin meningkatnya permintaan akan tenaga-tenaga kesehatan, terutama setelah hapusnya tanam paksa, pendidikan ini lambat laun disesuaikan dengan permintaan perusahaan-perusahaan swasta yang segan mendatangkan tenaga dokter dari Eropa yang mahal gajinya itu. Dengan semakin berkembangnya pengajaran yang diberikan, kemudian sekolah ini dinamai STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* = Sekolah Pendidikan untuk Dokter Jawa). Kemajuan program pengajaran dari sekolah ini hanyalah sambungan daripada tuntutan perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan pihak swasta, seperti perusahaan perkebunan tembakau di

---

[48] Tentang “Pengadjaran Lanjutan” ini sebagian terbesar diambil dari dr H.J. de Graaf *“Geschiedenis van Indonesie”*. Secara agak luas akan diuraikan dalam Bagian Kedua. Dalam pokok tentang “Edukasi” ini juga belum disinggung tentang Pengajaran Tinggi – karena belum ada di Indonesia – serta perjuangan para mahasiswa Indonesia di Eropa, terutama di Nederland dan Mesir pada perguruan tinggi di Al-Azhar.

Sumatera dan perusahaan tambang timah Bangka Belitung dan Singkep yang paling berkepentingan dalam memberikan sokongan keuangan.

Anak-anak para priyayi tinggi mempunyai perhatian pada sekolah ini, karena seorang dokter Jawa tidak ikut memerintah bersama dengan imperialis Belanda, dan karenanya “kurang kebesaran”nya. Hanya anak-anak priyayi rendahan yang berbakat atau menengah, terutama anak-anak priyayi yang tidak termasuk dalam korps Pangreh Praja, yang mau memasuki sekolah ini, sekalipun dengan banyak ragu-ragu, apalagi mengingat, bahwa kedudukan mereka setelah tamat sekolah ini tidaklah akan melebihi kedudukannya dan gajinya daripada seorang wedana.

Bersamaan waktunya dengan berdirinya Sekolah Dokter Jawa (1851) didirikan pula Sekolah Guru atau Kwekschool di Solo untuk mendidik calon-calon guru. Juga pada mulanya sekolah ini menggunakan bahasa daerah, tetapi lama-kelamaan bahasa daerah digantikan oleh bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Setelah itu didirikan oleh juga Sekolah Pertanian dan Sekolah Dokter Hewan.

Lulusan dari sekolah-sekolah lanjutan inilah kelak yang mempelopori gerakan kemerdekaan, baik dari sayap lunak-kanan, sayap radikal, maupun kiri.

BAGIAN KEDUA

KEBANGKITAN NASIONAL

1. <u>Tahun 1904 : Permulaan Dari Suatu Awal</u> :

Pada tahun ini sejarah bangsa Indonesia ditandai dengan wafatnya Kartini. Pers memberikan perhatian pada peristiwa ini, sejauh yang dimaksudkan adalah pers Belanda di Nederland dan pers Indo-Eropa di Indonesia. Sambutan-sambutan sungkawa mengisi kolom-kolom mereka. Dikalangan Rakyat jelata ia belum lagi dikenal, sebagaimana halnya dengan tokoh-tokoh lain semasa. Penghisapan luar biasa baik dari pihak pemerintah dalam bentuk berbagai macam pajak dan wajib serah-padi maupun dalam bentuk rodi, serta penghisapan dari kaum lintah darat, yaitu pejabat-pejabat setempat, pengijon dan periba, telah menyebabkan Rakyat mengalami keterbelakangan kultur dan ekonomi yang luar biasa pula. Hanya kaum terpelajar, yang mengenal bahasa Belanda dan mengikuti pers pada umumnya, mengenal dan mengaguminya.

Beberapa bulan sebelum wafatnya, ia telah menerima telegram dari seorang pemuda yang tak dikenalnya – kelak menjadi salah seorang pengambil inisiatif pendirian Budi Utomo dan masyhur dengan sebutan Pak Tom, yang menyatakan simpati dan penghargaan atas tulisan-tulisannya yang disiarkan oleh pers. Surat telegram itu datang dari Batavia, dengan alamat : Sekolah Dokter Jawa, *Weltervreden*.

Untuk menghormati mendiang pejuang wanita ini pensiunan Bupati Karanganyar, Raden Adipati Tirtokusumo, kelak menjadi Presiden Budi Utomo, telah mendirikan sekolah gadis dirumahnya menurut contoh yang digariskan oleh Kartini.

Pada tahun ini juga seorang pensiunan dokter Jawa, Mas Ngabehi Wahidi Sudiro Husodo, mulai pegang pimpinan redaksi surat kabar tengah mingguan *"Retno Dhoemilah"*, Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh penerbit H. Buning, Yogyakarta.

Arus politik etis pada tahun itu, terutama dengan pengangkatan van Heutsz, sebagai pelaksananya oleh Ratu, mencapai titik perkembangan tertinggi dalam kehidupan intelek kaum terpelajar. Karena pada waktu itu kaum terpelajar menganggap, bahwa keterbelakangan dan nasib buruk bangsanya disebabkan karena kurang mendapatkan pengajaran Barat dan modernisme, mereka menganggap bahwa kunci segala kemajuan adalah pengajaran secara Barat. Kartini, lebih daripada yang lain-lain telah dapat melihat, bahwa keterpelajaran seorang Pribumi tidak akan menaikkan derajatnya selama ia masih berada dibawah perintah Belanda, tetapi ia belum lagi melihat, bahwa soalnya adalah kekuasaan, politik. Hal ini menyebabkan kaum terpelajar Pribumi menyambut politik etis dengan antusias, belum lagi memahami, bahwa apapun politik yang dilakukan oleh penjajah Belanda, hal itu semata-mata untuk kepentingan penjajahannya, bukan untuk bangsa yang dijajahnya. Pada umumnya mereka mempercayai kebaikan politik baru tersebut. Mereka belum sampai pada kesadaran, bahwa keterbelakangan kultur dan ekonomi mereka justru berasal dari adanya penjajahan.

Memang ada beberapa orang terpelajar yang menganggap, bahwa keterbelakangan itu berasal dari adanya penjajahan, tapi anggapan ini pada umumnya belum berpengaruh.

Dalam masa kekalahan moril dan materiil terhadap Barat dengan modernismenya, Wahidin Sudiro Husodo mencoba dengan *"Retno Dhoemilah"*nya – sebagai surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa – mengajak masyarakat memperhatikan masalah utama ini. Usahanya yang nyata ialah mendirikan *"studio-fonds"* kecil, yang berusaha membantu pemuda-pemuda pelajar yang maju. Ia sendiri, dengan biaya sendiri, telah membantu

beberapa pemuda, diantaranya yang dalam gerakan kemerdekaan kelak terkenal dengan nama dr. Radjiman Wedyodiningrat. Wahidin juga membaca tulisan-tulisan Kartini, bukan saja karena wanita itu telah terkenal di seluruh Jawa dan Madura yang berbahasa Belanda, juga karena beberapa tulisannya diumumkan dalam majalah terbitan Yogyakarta *"Eigen Haard"*. Juga ia telah terkenal sebagai wanita yang telah berhasil dapat menanggalkan kompleks-inferiro terhadap bangsa kulit putih, dan karenanya sangat menarik kaum terpelajar, sebaliknya menimbulkan kebencian dari kaum bangsawan yang konservatif. Mereka yang berhasil dapat menanggalkan kompleks inferior di masa itu telah terpandang sebagai "pahlawan", dan menjadi pusat kekaguman kaum terpelajar.

Dalam masa mulai pasangnya semangat kemajuan ini makin lama makin banyak pemuda belajar di Eropa, terutama Nederland. Kontak langsung dengan dunia Barat dengan ilmu dan pengetahuannya, dengan modernismenya, dengan demokasi (liberal) nya, yang tidak mereka kenal di Tanah air sendiri, telah mengubah mereka menjadi manusia baru yang mempunyai kepercayaan pada hari depan. Walaupun pada umurnya mereka belum sadar politik, namun telah memandang, bahwa bila bangsanya mendapatkan modernisme, mereka pun akan berkembang maju sebagaimana halnya dengan bangsa-bangsa Eropa. Prestasi-prestasi mereka yang menggema di Indonesia menyebabkan mereka dianggap sebagai semacam bangsawan baru, yang untuk waktu yang lama dinamai "bangsawan pikiran" seperti: Sosrokartono, Radjiman Wedyodiningrat, Notosuroto, Abdul Rivai, Sultan Casajangan dll. Secara tidak langsung prestasi-prestasi mereka telah ikut membangkitkan kebanggaan nasional, dan membantu menumbuhkan kepercayaan, bahwa nasib bangsa dan Tanah airnya akan dapat diperbaiki, bila diperoleh kesempatan secukupnya untuk belajar. Yang paling representatif dalam melukiskan masa ini adalah Sosrokartono dalam seruannya, yang diucapkannya dihadapan Kongres Bahasa & Sastra Belanda di Gent, Belgia (1899) :

> "..... Dan tuan-tuan, putra-putra Jawa, yang mana aku memberanikan diri bicara dengar, waktunya telah tiba, bahwa tuan-tuan bangkit dari tidur nyenyak untuk membela hak tuan-tuan; hak untuk berlomba di lapangan kemajuan dan peradaban dengan atasan tuan-tuan akan jadi rahmat bagi negeri tuan-tuan ! Bebaskan diri tuan-tuan dari belenggu prasangka, yang masih mengikat tuan-tuan, berkembanglah bebas sesuai dengan bakat dan tingkatkan watak tuan-tuan dalam kemegahannya ! Capailah tanpa jera cita-cita : kemajuan ; kembangkan seluruh energi tuan-tuan untuk menolong Rakyat mendewasakan dirinya.
>
> Sama sekali bukanlah maksudku membelandakan tuan-tuan. Pertama-tama tuan-tuan harus tetap Jawa. Tuan-tuan dengan baik bisa menguasai peradaban Eropa tanpa kehilangan sedikitpun dari kepribadian tuan-tuan, ciri tuan-tuan. Tuan-tuan harus mengenal bahasa tuan-tuan sendiri dan disamping itu bahasa Belanda ; bukan untuk menggantikannya tapi untuk memperkayanya. Tanaman itu membutuhkan air, udara, buat pertumbuhannya ; ia tidak bakal tumbuh bagai musuh dari semua mereka, yang mau membuat kita jadi orang Eropa atau setengah Eropa, dan hendak menginjak-injak tradisi dan adat kebiasaan kita yang keramat. Selama matahari dan bulan masih bersinar, aku akan berantas mereka.
>
> ..... Kita rasai, kita sadari, selain nasi dan ikan asin kita membutuhkan juga makanan bagi otak. – Kita melihat kereta bergerak laju tanpa kuda diatas jalanan besi ; kita melihat perahu-perahu melancar melintasi samudera tanpa layar ; kita melihat cahaya tanpa perlu dinyalakan; kita melihat banyak hal, yang bagi kita tinggal jadi keajaiban dan kegaiban. – Atau dapatkah kita diam saja melihat orang Jepang maju bebas dan cepat, melihat orang Amerika menciptakan keajaiban-

> keajaiban, yang kita dengar laksana dongengan belaka, tanpa sedikitpun timbul keinginan, dorongan, untuk mengetahui lebih banyak. – Waspadalah terhadap aspirasi-aspirasi kita sendiri ; tentang kemauan baik tiada kekurangan pada kita; pada kita hanya kekurangan kesempatan.
>
> ..... Ayolah kawan-kawan dan saudara-saudara, mari berjabatan tangan dan mari kita kerja tanpa mengenal lelah buat kepentingan bersama.
>
> Mari kita eratkan ikatan persahabatan dan persaudaraan, agar .... cita-cita dari suatu Rakyat seluruhnya akan tercapai.
>
> Dan ada kulihat subuhnya hari depan, dalam sore haru sejuk dibawah sinar bulan purnama, orang Jawa, dalam pimpinan irama merdu gamelan memanjakan lagu puji-pujian terima kasih buat hormati saudaranya bangsa kulit putih.

Suara lantang ini merupakan seruan pertama dalam sejarah modern bangsa Indonesia, dan sekaligus mengedepankan acuan pikiran kaum terpelajar di waktu itu yang terdiri dari unsur-unsur :

i. takhayul modernisme, bahwa modernisme menjadi kunci dari hari depan yang gemilang
ii. nasionalisme kultur (provinsialisme)
iii. kebutuhan akan persatuan
iv. anggapan bahwa bangsa Eropa adalah guru dan bukan penjajah
v. daya dorong dari kebangunan Jepang
vi. kecenderungan berasosiasi dengan bangsa Eropa
vii. kurangnya kesadaran politik.

Ketujuh-tujuh unsur ini bekerja dalam organisasi-organisasi modern pertama-tama terkecuali unsur ke-ii dan ke-vii pada organisasi-organisasi lainnya sampai tahun 1912.

i. Takhayul modernisme adalah takhayul yang menganggap bahwa keterbelakangan kultural dan ekonomi bangsa disebabkan karena tidak menguasai modernisme, kurang berpengajaran secara Barat. Berdasarkan kepercayaan pada takhayul ini, sebagaimana halnya dengan Abdullah bin Abdulkadir Munsji [1], menyebabkan orang masih sulit untuk dapat memisahkan antara Barat sebagai guru daripada Barat sebagai penjajah. Kepercayaan pada takhayul ini pula yang menyebabkan individu-individu atau organisasi yang memeluk takhayul ini menempatkan pekerjaan edukasi sebagai garapan utama untuk berbakti pada nusa dan bangsa.

ii. Nasionalisme kultur atau nasionalisme suku sebagai kriteria untuk kelak menjadi landasan dari nasionalisme politik, tetapi yang untuk waktu yang cukup lama juga menghalang-halangi terciptanya nasionalisme politik. Nasionalisme ini baru membuat batas pemisah antara suku sendiri daripada selebihnya. Pemisahan ini didasarkan atas kelainan kultur, bahasa (yang segera kemudian ternyata tak dapat dipertahankan), dan letak geografi. Jadi nasionalisme ini tidak terjadi karena semangat untuk bersatu, atau jiwa hendak bersatu[2], tetapi pada ciri lahiriah yang telah tersedia. Kelak nasionalisme kultur ini bukan hanya dipertahankan oleh Budi Utomo, juga dirumuskan secara tepat oleh R.M. Sutatmo

1

2

Suryokusumo, sesorang pemuka Budi Utomo, dimana pengaruh theosofi Annie Bessant merupakan salah satu dasar ideal yang ikut menentukan.[3]

iii. Kebutuhan akan persatuan sebagai tuntutan dari kenyataan, bahwa kaum terpelajar pribumi yang kecil jumlahnya itu tidak mungkin dapat melakukan sesuatu pekerjaan sosial tanpa bantuan massa.

iv. Anggapan bahwa bangsa Eropa adalah guru dan bukan penjajah sebagai warisan sejarah pada kaum bangsawan, yang beratus tahun ikut menjajah bersama penjajah Eropa masih belum mampu sebagai kelas untuk menarik garis terhadap penjajah Eropa. Hal ini akan segera berubah pada organisasi-organisasi dimana kekuatan kaum bangsawan telah dapat disingkirkan.

v. Daya dorong dari kebangunan Jepang yang dirasakan oleh seluruh bangsa-bangsa Asia yang terjajah, tidak terkecuali oleh kaum terpelajar Indonesia, telah menanamkan kepercayaan, bahwa kesempatan untuk menguasai modernisme itu sajalah yang menyebabkan terjadinya kenyataan adanya bangsa-bangsa yang dipertuan dan bangsa yang dijajah, tanpa atau belum mempertimbangkan, bahwa Jepang adalah negara merdeka, yang mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam mengatur bangsa dan negerinya sendiri. Dengan demikian dorongan yang diberikan oleh Jepang bersifat sangat pribadi, dan tidak atau belum mungkin secara langsung dipergunakan sebagai landasan kerja nasional.

vii. Kurangnya kesadaran politik sebagai kenegatifan masa itu yang menyebabkan mereka belum melihat persoalan-persoalan nasional dari jurusan kekuasaan, bahkan banyak yang menganggap, bahwa kekuasaan berasal justru dari unsur ke-i.

Ciri tersebut diatas segera nampak pada organisasi (pertama) yang segera akan lahir, yakni Budi Utomo. Tetapi baik di Eropa maupun di Indonesia pada waktu itu belum dilahirkan organisasi sebagai wadah perasaan dan cita-cita bersama mereka, sekalipun perasaan dan cita-cita demikian sudah mulai hidup juga dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Yang paling kuat ialah hidup dalam jiwa para pelajar Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di Jakarta. Dari bacaan mereka terpengaruh akan mengagumi Revolusi Perancis sebagaimana halnya dengan seluruh dunia pada waktu itu. Sedang salah sebuah nyanyian dari Revolusi Perancis ini telah menjadi nyanyian mereka.[4] Nyanyian ini kadang-kadang dinyanyikan dalam bahasa Perancis dan kadang-kadang pula di dalam bahasa Belanda[5], sedang dalam terjemahan Belanda adalah sebagai berikut :

Kent gij dat volk vol heldenmoed	Kenal kau Rakjat penuh keperwiraan
En toch zoo lang geknecht?	Namun lama nian terbelenggu
Het heeft geofferd goed en bloed	‘Lah dikurbankannja harta dan darah
Voor zijn vrijheid en voor recht	Buat kemerdekaan dan buat hak
Kom, burgers, laat de vlaggen wapp'ren	Ajoh, kawan, pandji-pandji kibarkan
Ons lijden is voorbij	Lewat sudah kita punja derita
Laat hun roem de zegen zijn onzer dapp'ren	Kemashurannja biar rahmati pahlawan kita
Dat vrije Volk zijn wij!	Rakjat merdeka itulah kita
Dat vrije Volk	Rakjat merdeka
Dat vrije Volk	Rakjat merdeka
Dat vrije Volk zijn wij	Rakjat merdeka itulah kita

3

4

5

Belum juga terbentuknya organisasi, sekalipun telah ada gelagak kemerdekaan, tidak lain daripada suatu manfiestasi daripada pertumbuhan idealisme yang belum mampu melahirkan wadah. Sebaliknya, diluar golongan terpelajar yang belum mampu melahirkan wadah. Sebaliknya, diluar golongan terpelajar yang mencicipi kesempatan belajar dari pihak penjajah, sampai dengan tahun 1904 masih menunjukkan vitalita perlwanan dibidang kemiliteran, terutama diluar Jawa dan Madura, yang dipimpin oleh kaum feodal. Di Jawa perlawanan tidak lagi dipimpin oleh kaum feodal, tetapi oleh petani-petani dalam kondisi yang lebih buruk, yang meletus di desa-desa, dan tidak mempunyai arti militer yang penting. Bila para siswa Sekolah Dokter Jawa menjanjikan nyanyian tersebut dengan idealisme yang meluap-luap, di medan gerilya di Tanah Gayo, Alas dan Toba, Jenderal van Daalen belum lagi dapat menundukkan pasukan-pasukan Sisingamaradja. Di Jambi, Sultan Taha masih membuka perlawanan dengan dibantu seorang kolonel Hungaria, sekalipun ia akhirnya gugur juga. Di Banjarmasin perlawanan terhadap Belanda belum dapat ditumpas seluruhnya. Di Bone, perlawanan semakin memuncak, bahkan keberanian para patriot semakin meningkat dan dengan kapal-kapalnya yang kecil Bone membentuk armada untuk menyisiri laut sekitarnya sampai ke Flores. Pulau Seram pada tahun itu baru saja dapat “diterbitkan” dalam arti militer. Tapi pada tahun 1904 itu pers lebih mengutamakan berita-berita yang berasal dari medan pertempuran Bali. Dan tidak lain dari Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo sendiri yang lebih tahu, bahwa batalyon Mangkunegara telah menolak perintah berangkat ke Bali[6], sedang setahun sebelum itu (1903) secara front perlawanan bangsa Indonesia di daerah paling utara, Aceh, dinyatakan telah selesai. Tetapi perlawanan kaum partisan masih tetap perkasa dan baru sepuluh tahun setelah itu dapat dipatahkan sama sekali secara militer.

Pada tahun 1904 ini sejarah Indonesia menampilkan kenyataan, bahwa betapapun hebat perlawanan terhadap penjajahan, selama belum terciptakan kesatuan perlawanan, penjajah tiada bisa dialahkan. Disamping itu, sebagaimana dirumuskan oleh dr. Tjipto Mangunkusumo pada tahun belasan kelak, musuh bangsa Indonesia bukan hanya satu, yaitu penjajahan Belanda, tapi diluar itu masih ada dua macam lagi, yaitu a) ketidaktahuan dan b) perpecahan, atau dengan perkataan lain bukan saja harus terciptakan kesatuan perlawanan terhadap imperialisme, juga perlawanan itu harus memenuhi syarat keilmuan yang tinggi.

Pada pihak penjajah sendiri, tahun 1904 juga merupakan babak baru. Dengan dianggapnya kalah perlawanan bangsa Indonesia di Aceh, pembangunan imperialisme secara lebih baik barulah bisa dimulai. Hal ini disebabkan karena Acehlah yang dalam sejarah penjajahan Belanda menelan biaya lebih daripada 40% dari Anggaran Belanja Hindia Belanda, dan menghisap separuh dari seluruh kekuatan angkatan perangnya. Maka sebagai balas jasa kepada J.B. van Heutsz, “sang penakluk Aceh”, pada bulan Juli 1904 oleh Ratu Wilhelmina ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Pada gilirannya, sebagai terima kasih Gubenur Jenderal baru ini pada angkatan perang Hindia Belanda, pada tahun kekuasaannya itu serdadu-serdadu Pribumi untuk pertama kali dalam sejarah penjajahan mendapat pembagian sepatu.

Van Heutsz, mendapat tugas melaksanakan pidato tahta pada tahun 1901, yakni melaksanakan politik etis, sebagaimana menjadi kehendak golongan besar dalam parlemen Belanda (*Tweede Kamer*). Maka kaum terpelajar Pribumi, yang pada umumnya telah terpengaruhi oleh “politik kemakmuran”[7] itu, menyambut pengangkatan ini dengan bersuka hati, dan melihat kenyataan akan kekalahan-kekalahan militer perlawanan bangsa Indonesia di luar Jawa dan Madura sebagaimana banyak disiarkan oleh pers, nampaknya lebih suka

---

6

7

menunggu apa yang akan dihasilkan oleh perombakan-perombakan administrasi ini kelak hanyalah pelaksanaan daripada desentralisasi yang peraturannya telah dikeluarkan pada tahun 1903. Dalam peraturan ini, yang mengandung ketentuan pendirian kotapraja-kotapraja, hanyalah menyalurkan keinginan penduduk Eropa bagi nafsunya untuk memerintah sendiri, dan karenanya sama sekali tidak mempunyai persangkutpautan dengan keinginan kaum terpelajar Pribumi. Desentralisasi, yang lazim dinamai "desentralisasi kecil" ini melahirkan berdirinya Dewan-Dewan provinsi dan kotapraja, yang tugas utamanya adalah mengurus kepentingan penduduk Eropa, sedang kotapraja dan Dewan-dewannya didirikan apabila penduduk Eropa telah mencukupi jumlahya, sedang kampung-kampung Pribumi bukan saja tidak mendapatkan perhatian, bahkan didesak keluar apabila daerahnya dibutuhkan untuk kepentingan penduduk Eropa, [8] dan berhubung dewan-dewan ini diadakan untuk membicarakan kepentingan penduduk Eropa, pemerintah tidak merasa adanya kebutuhan akan adanya anggota-anggota bangsa Pribumi di dalam Dewan-dewan tersebut.

Pada tahun ini perbandingan kekuasaan antara orang Eropa dengan Pribumi adalah 1 orang Eropa menguasai 240 orang Pribumi jajahan, atau sama halnya dengan seorang kapten berbanding dengan satu kompi serdadu. "Serdadu-serdadu" itu tidak mengalami sesuatu perubahan dengan adanya perombakan-perombakan yang dilaksanakan oleh van Heutsz. Perombakan itu hanya untuk golongan kapten. Masa ini oleh ahli-ahli sejarah Belanda diutarakan sebagai masa pencerahan dalam politik kolonialnya dengan mengedepankan fakta-fakta antara lain pelarangan pembakaran janda di Bali, pembukaan tanah di Lampung untuk petani-petani yang tidak mampu dengan biaya pemerintah, penambahan jumlah untuk mata anggaran pengajaran. Sebaliknya van Heutsz, dengan telah ditariknya sebagian terbesar angkatan perang Hindia Belanda dari Aceh, bertindak lebih keras dibidang militer terhadap perlawanan-perlawanan yang terjadi di luar Jawa dan Madura. Untuk menundukkan seluruh Bali, ia telah memerintahkan pemblokadean seluruh pesisir Bali dengan armadanya. Alasan : penduduk Badung telah merampas muatan kapal layar Tionghoa yang telah terdampar. Blokade ini kemudian ditingkatkan lagi oleh van Heutsz, dengan jalan menuntut penduduk Badung untuk membayar ganti kerugian pada Belanda sebanyak ƒ7.500,- Penduduk Badung menolak, dan dengan demikian Belanda mempunyai alasan untuk melancarkan aksi mliter terhadap Rakyat Bali. Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi seorang perwira artileri Rusia telah ikut berperang dipihak pasukan-pasukan Bali.[9]

Dalam pada itu peperangan, yang kelak jadi titik perkisaran dalam sejarah Asia-Afrika, telah terjadi : negeri raksasa Rusia memaklumkan perang pada negeri kecil Asia yang bernama Jepang. Seluruh Asia, termasuk di dalamnya kaum terpelajar Indonesia, yang sudah lama menaruh simpati pada Jepang, makin menajamkan perhatiannya. Pada Jepang mereka mendapatkan wakil Asia sebagaimana juga dirasakan oleh kaum terpelajar India.[10] Kurangnya kesadaran politik pada waktu itu menyebabkan kaum terpelajar Indonesia belum memahami, bahwa perang tersebut adalah perang memperebutkan daerah jajahan. Sedang negara imperialis yang tumbuh menjadi kuat merupakan ancaman langsung terhadap bangsa-bangsa yang belum mendapat kesempatan cukup untuk membela dirinya (lih : Kemiliteran, hlm. 32).

Kemenangan Jepang atas Rusia sebagai kelanjutan dari kemenangannya atas Tiongkok disamping memberikan sokongan moril secara semu kepada bangsa-bangsa Asia-Afrika yang terjajah, juga propagnada yang baik politik serta gagasan etis. Tidak lain daripada politisi kolonial yang lebih mengerti, bahwa juga bangsa-bangsa yang dijajahnya mampu dan bisa

---

8

9

10

tumbuh sekuat bangsa Jepang asal tersedia kemerdekaan politik untuk mengembangkan dirinya secara bebas, juga sebagaimana telah dicontohkan oleh Jepang, dan juga yang dipahami dengan rendah hati oleh kaum terpelajar Pribumi. Tak pernah kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh sebelum kemenangan Jepang atas Rusia tersebut. Maka tidak lain daripada kaum etis ini yang memikirkan dan merencanakan politik kolonial dengan mengingat kemungkinan bisanya bangsa-bangsa jajahan itu pada suatu kali menjadi merdeka. Mereka tahu, bahwa komunikasi dunia adalah sudah sedemikian rapatnya sehingga tidak mungkin pikiran-pikiran dari luar Indonesia bisa dibendung terkecuali dengan kekuasaan yang berlebih-lebihan. Karena itu harus ada cara untuk menghadapi kemungkinan tibanya bangsa-bangsa yang dijajahnya itu merdeka tanpa melalui suatu bentrokan yang kasar, tapi seboleh mungkin arus yang menuju pada kemerdekaan itu dikendalikan untuk kepentingan penjajah. Juga karena kemenangan Jepang, yang pada satu pihak menanamkan kepercayaan pada kaum terpelajar Pribumi, bahwa mereka menghadapi masa depan yang cerah, pada segi lain menerima dan mempercayai gagasan asosiasi Snouck Hurgronje, yang mencoba melenyapkan batas antara mereka yang terjajah daripada mereka yang menjajah. Dalam politik praktis juga terjadi tindakan-tindakan yang mempunyai persangkutan langsung dengan kemenangan Jepang ini : Mr. C.Th. van Deventer, misalnya, merasa perlu mendorong-dorong Abdul Rivai untuk menempuh ujian *arts*, sedang Mr. J.H. Abendanon, yang secara tradisional itu dianggap sebagai “penyelamat” karya Kartini “Habis Gelap Terbitlah Terang”, merasa perlu mengulurkan tangan pada Abdul Muis untuk menjadi pegawainya, pengarang Belanda Augusta de Wit secara berlebih-lebihan mengagungkan Rakyat Indonesia di desa-desa dalam karyanya *“Orpehus in de Dessa”*, dan demikian pula halnya dengan pengarang wanita Belanda lainnya, Nyonya Kooy van Zeggelen, yang mengedepankan pahlawan-pahlawan Rakyat Indonesia di dalam roman-romannya. Perhimpunan *Oost en West* secara periodik membuka pameran kerajinanan tangan Pribumi, baik di Eropa maupun di Jakarta. Sedang tetesan-tetesan kecil Anggaran Belanja Hindia Belanda, yang tadinya dituang ke medan perang Aceh, dilepas buat meningkatkan pengajaran Pribumi.

Politisi kolonial, yang ingin melihat Pribumi disuntingi dengan sedikit kecerdasan, merasa puas dan menepuk dada, bahwa zaman liberal telah mulai dimasuki oleh Hindia Belanda. Di Nederland mahasiswa-mahasiswa Indonesia ditepuk-tepuk bahunya, dan menganggap mereka sebagai hasil terbaik dari asimilasi dengan peradaban modern Eropa, untuk tidak mengatakan Belanda. Sebaliknya para terpelajar Pribumi, yang ditepuk-tepuk bahunya itu, dalam hatinya merasa, bahwa sesungguhnya apa yang diperbuat oleh pemerintah dan Jemaah-jemaah Nasrani untuk meningkatkan kemajuan Rakyat, tidak dapat dikatakan mempunyai sesuatu arti yang penting. Berdasarkan kenyataan ini, dengan inisiatif dan biaya sendiri, mereka mendirikan kursus-kursus bahasa Belanda di kota-kota besar. Tapi hasil kursus-kursus tersebut tidak dapat dikatakan memuaskan, karena golongan Indo-Eropa, yang merasa terancam kedudukan sosialnya dengan semakin banyaknya jumlah Pribumi yang mengetahui bahasa Belanda, menolak untuk mengakui surat-surat tanda lulus, yang dikeluarkan oleh kursus-kursus tersebut, bahkan menolak Pribumi bicara dalam bahasa Belanda dengan mereka.

Untuk menancapkan kaki lebih kuat pada bumi dan manusia Indonesia, pemerintah membiayai dan memberanikan sarjana-sarjana ketimurannya untuk menyelidiki sebanyak mungkin latar belakang serta asas kultur dalam kebudayaan-kebudayaan dan peradaban-peradaban Pribumi. Jemaah-jemaah Nasrani semakin diperluas, dan dalam hubungan dengan pekerjaan ini, terutama di daerah-daerah penghasil tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan besar Eropa.

Perusahaan-perusahaan baru bermunculan di Indonesia dalam permulaan zaman etis ini. Setiap bula diajukan permohonan-permohonan baru untuk membuka perkebunan dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan secara Eropa dan menurut pola pengusahaan Eropa tidak pernah dalam mendapatkan tenaga kerja murah, dan dengan sedikit sogokan pada Pangreh Praja setempat, dengan mudah ia akan dapat membangunkan persekongkolan baru. Pada masa inilah dipopulerkan pemeo: berilah orang-orang kerja ini sedemikian murahnya sehingga tidak jarang hanya mendapat upah makan dan sedikit tembakau.

Juga administrasi resmi – tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan swasta – melakukan penghisapan atas pegawai-pegawai rendahan, terutama para magang, yaitu tenaga administrasi yang tidak terdidik, dan dalam keadaan belajar kerja di kantor. Para pejabat tinggi Pribumi memperlakukan para magang sebagai bujang di rumahnya masing-masing. Para pejabat Eropa juga memperlakukan mereka seperti itu. Tetapi, baik mereka merangkap jadi bujang pada pejabat-pejabat Eropa maupun Pribumi, mereka tidak menerima gaji, sekalipun mereka sudah belasan tahun jadi magang, dan sekalipun pemerintah Hindia Belanda menyediakan mata anggaran sebesar ƒ3.000.000 setahun. Baru kelak dalam tahun belasan sistem magang dihapuskan, dan para magang dijadikan juru tulis atau, bila kondisinya dianggap kurang memuaskan, dijadikan opas.[11]

Dalam sistuasi demikian perlawanan terhadap imperialisme tidak terjadi di kota-kota, tetapi di desa-desa dan di kampung-kampung, tidak dalam bentuk militer saja, seperti yang masih terus terjadi secara kecil-kecilan di Jawa, dan secara agak besar-besaran di luar Jawa. Di Jawa perlawanan lebih banyak bersifat kultur yang masih tidak mudah untuk dapat dibuktikan[12], dan sesuai dengan kondisi agrarik mereka, perlawanan yang sudah letih itu selalu tertuju pada pelaksana administrasi penjajahan, belum dan tidak pada penjajahan itu sendiri sebagai suatu sistem penghisapan. Dalam perlawanan yang bersifat kultur pada umumnya para senimanlah yang menjadi inspirator serta kretaor perlawanan tersebut dengan media pewayangan, tari, nyanyi, bahkan juga dibilang klenik. Tidak pernah sebelumnya terjadi kontradiksi yang demikian tajam antara kota dan desa. Kota terseret dalam arus kooperasi yang dipelopori oleh kaum bangsawan, dan kaum bangsawan menurunkan kaum terpelajar Indonesia yang pertama-tama. Desa yang menjadi basis penghisapan imperialisme tetap berlawan dengan cara-caranya sendiri yang masih mungkin. Rakyat di desa-desa mengerti benar, bahwa penindas mereka adalah bangsa kulit putih dan pelaksana-pelaksananya adalah bangsanya sendiri. Ronggowarsito, yang secara kreatif melakukan perlawanan terhadap imperialisme Belanda telah menciptakan "Ramalan Djojobojo", yang disambut oleh Rakyat dengan antusias, bahkan banyak diantara bait-bait ramalannya telah menjadi kalimat-kalimat atau firman-firman keramat, seperti *"kebo bulé mulih njang kandangé déwé"*, atau kerbau putih pulang ke kandangnya sendiri, sebagai sindiran terhadap imperialisme Belanda yang pada suatu kali akan terpaksa pulang kembali ke Nederland. Juga ramalan-ramalan akan tibanya kemerdekaan setelah "bangsa kuning" yang akan menjajah "seumur jagung". Tidak pernah di dalam sejarah sastra di Indonesia dilahirkan karya yang sedemikian jernihnya tentang nasib imperialisme di Indonesia, dan juga tidak pernah ada karya yang sedemikian dikeramatkan. Dan adalah bukan suatu kebetulan bila Ronggowarsito (1803-1875) tidak membubuhkan nama pada karyanya tersebut, serta melenyapkan jejak pada dirinya dengan menampilkan nama raja Jayabaya dari zaman yang jauh silam. Tokoh legendaris Ratu Adil Hanyokrokusumo dalam karya ini hampir setiap tahun meluapkan perlawanan di desa-desa. Sedang dalam pewayangan tokoh-tokoh khadam seperti Petruk,

---

11

12

Gareng dan Semar, memberikan keleluasaan dalam permainan wayang dan wayang wong untuk melancarkan kecaman-kecaman terhadap imperialisme dan pelaksana-pelaksananya. Perlawanan-perlawanan dalam bentuk nyanyian – pada umumnya dalam bentuk-bentuk simbolik – memenuhi nyanyian-nyanyian Rakyat dimasa penjajahan. Semua ini terus hidup sampai jauh di kemudian hari.[13]

2. KEHIDUPAN ORGANISASI

Timbulnya industri-industri baru telah menarik tenaga-tenaga kerja dari daerah pertanian, mengakibatkan terjadinya perpindahan dan urbanisasi serta proletariatisasi, sekalipun belum timbul kesadaran pada kaum proletar tersebut sebagai kelas. Pada pihak lain terjadi juga pemencaran pada golongan terpelajar. Kota-kota industri bermunculan, dan desa-desa yang tidak pernah dikenal, dalam beberapa tahun kemudian telah menjadi sebuah kota industri yang penting, seperti Cepu, Balikpapan, Pangkalan Brandan, Wonokromo, dan hampir semua tempat dimana didirikan pabrik gula. Kota baru dilahirkan bersama-sama dengan masyaraat baru. Kota-kota baru merupakan pertemuan dari berbagai suku. Dan dengan demikian terjadilah pengelompokan-pengelompokan di kota-kota tersebut berdasarkan asal suku, kesukaan bersama atau perhatian bersama. Pengelompokan-pengelompokan pada taraf pertama ini tidak pernah berdasarkan pandangan politik dan hanya merupakan perkumpulan sosial. Disamping itu pengelompokan juga di kota-kota yang sudah lama, dengan berbagai dasar.

Organisasi-organisasi yang tersusun menurut acuan modern, artinya dipimpin berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, belum menjadi kebiasaan, sekalipun memang telah ada, baik yang telah menerima pengakuan sebagai badan hukum, pengakuan Anggaran Dasarnya saja, ataupun yang belum kedua-duanya. Organisasi belakangan ini biasanya adalah organisasi orang-orang Barat atau orang-orang Indo Eropa, juga tidak pernah didasarkan pada asas politik, sebagaimana halnya dengan *Indische Bond* (1898) dan Soerja Soemirat, yang kedua-duanya didirikan menjelang tutup abad ke-19. Kedua-duanya adalah organisasi sosial, dengan catatan, bahwa Soerja Soemirat lebih daripada yang pertama, telah sedemikian pesatnya pada tahun 1904 sehingga telah mempunyai perusahaan, organ dan sekolah-sekolah sendiri, diantaranya sekolah vak pertukangan.

Pada tahun 1904 diantara orang-orang yang mencoba mempolitikkan organisasi-organisasi sosial tersebut satu tokoh besar, yakni E.F.E. Douwes Dekker yang mencoba mengubah *Indische Bond* menjadi partai politik, tetapi ia gagal. Pada sekitar permulaan abad ke-20 memang telah timbul masyarakat-masyarakat (societion) politik, namun belum pernah berhasil melahirkan organisasi politik, berhubung dengan kerasnya sikap dan tindakan pemerintah kolonial terhadap segala yang bersifat politik diluar kekuasaan kolonial sendiri. Secara tradisional sebelum tahun 1911, yaitu tahun pengakuan golongan Indo-Eropa sebagai sederajat dengan bangsa Eropa, pada golongan Indo hidup suatu ilusi ras, bahwa pada suatu ketika kelak, golongan Indo-Belanda atau lebih tepat Indo-Eropa akan memerintah Indonesia sebagai sebuah negara merdeka, terlepas dari Nederland. Ilusi ini hidup sejak Peter Erbervelt, bahkan pernah juga menjadi ilusi E. Douwes Dekker atau Multatuli, sedang usaha mempolitikan *Indische Bond* oleh E.F.E. Douwes Dekker sulit untuk dapat dilepaskan daripada ilusi ras ini, apalagi setelah ia pernah ikut berjuang di Afrika Selatan dibawah Paul Kruger, dimana golongan kolonialis Belanda telah mendirikan sebuah negara sendiri, melepaskan diri dari kekuasaan Inggris dan tidak diperintah oleh Nederland.

---

[13]

Organisasi-organisasi sosial yang tak terhitung banyaknya, bersifat setempat, baik yang didasarkan atas kesamaan pekerjaan, kesenangan, suku ataupun ras, adalah organisasi kerukunan, dan karena itu pula nama-nama organisasi tersebut banyak yang menggunakan predikat "rukun" atau "Kerukunan" atau "Paguyuban", sedang rumah-rumah pertemuan mereka disebut "perukunan", yang mengikuti *sociteit* dalam tradisi kepegawaian Belanda di Indonesia. Sedang perukunan ini biasanya berdiri apabila Bupati di tempat-tempat bersangkutan menolak pendopo kabupaten dipergunakan menjadi pusat kegiatan kebudayaan setempat.

Dalam perukunan-perukunan ini anggota-anggota itu setiap bulan melakukan tayub bersama, atau saban minggu belajar menabuh gamelan. Dan banyak juga menggunakannya untuk bermain judi disetiap hari.

Para pemuda pada umumnya mempunyai organisasinya sendiri yang disebut "sinoman". Juga sinoman-sinoman melakukan kegiatan kebudayaan – tanpa judi dan tanpa tayub – dan hampir dapat dipastikan diperlengkapi dengan perpustakaan sendiri, sedang olahraga yang judi adalah pencak atau silat. Pada waktu-waktu tertentu juga diadakan malam-malam perdebatan dengan mengedepankan berbagai pokok, biasanya tentang kebatinan, sedang yang lebih maju mengedepankan pokok-pokok yang merupakan aktualita nasional atau internasional.

Organisasi tolong menolong pada galibnya ada disetiap kampung dalam setiap kota.

Di desa-desa, organisasi-organisasi semacam tersebut diatas tidak ada, apalagi organisasi tolong menolong, karena kehidupan kolektif telah menyebabkan semua hal bukan menjadi soal individu, tapi soal seluruh desa, lagipula belum berkembangnya diferensiasi sosial menyebabkan belum lagi terjadi pengasingan satu kegiatan daripada kegiatan yang lain.

Walaupun organisasi pada masa ini pada umumnya merupakan badan sosial semata, namun telah mulai muncul juga sebuah oganisasi sosial yang dipimpin oleh politik, dan merupakan organisasi paling militan pada waktu itu, yaitu *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK), yang berdiri pada tahun 1900. Organisasi ini timbul sebagai akibat dialektik terhadap pengakuan pemerintah Nederland (1899) terhadap kesamaan derajat orang Jepang dengan bangsa Eropa, setelah semenjak 1895 terus menrus mendapat kemenangan di daratan Tiongkok, dan dengan demikian muncul di dunia internasional sebagai negara imperialis baru. Dalam tahun yang sama dengan sendirinya menerbitkan amarah minoritas Tionghoa di Indonesia, dan THHK didirikan sebagai jawaban terhadap pengakuan tersebut. Dengan timbulnya organisasi ini sekaligus juga timbul nasionalisme Tionghoa di Indonesia.

THHK diakui badan hukumnya pada tanggal 3 Juli 1900, dengan tidak meninggalkan acuan organisasi-organisasi sosial sebelumnya, sebagaimana nampak dari nama *Hwee Koan* juga berarti pirukunan atau kamar bola atau sociteit. THHK disebut juga *"Jong Chinezen Beweging"* atau Gerakan Pemuda Tionghoa. Tujuannya ialah menaikkan derajat bangsa Tionghoa di Indonesia secara modern, sesuai dengan kondisi politik yang tersedia pada waktu itu, ialah melalui peningkatan kultur serta penyebarannya, dengan pengajaran dan pendidikan sebagai titik berat usahanya, sebagaimana dipolakan oleh gerakan nasional di daratan Tiongkok.

Pendiri-pendiri utamanya adalah Khouw Kim An, Lie Kimhok, Khouw Lam Tjiang, Tan Kim San, Lie Hin Liam, sedang ketua pertama adalah Phoa Keng Hek, yang memegang jabatan ketua berturut-turut selama 20 tahun.

Berdirinya THHK merupakan suatu peristiwa sejarah yang penting, karea dialah maka berdiri organisasi semacamnya, baik sebagai reaksi maupun sebagai peniruan. Sedang nasionalisme Tionghoa yang dihamilkan oleh THHK menjadi pola umum daripada organisasi lain yang timbul sebagai reaksi maupun peniruan, yaitu nasionalisme yang mengandung nada dasar religi. Program kerja pada tahun-tahun permulaan adalah menggerakan *renaissance* ajaran Kong Fu Tse, dan menganggap, bahwa dengan renaissance itu dapatlah dibangunkan kembali bangsa Tionghoa di Indonesia, yang menurut penilaian mereka telah terjatuh dalam kebiasaan sjarak yang banyak meminta pembiayaan tanpa guna, sedang biaya itu seyogyanya diserahkan pada organisasi untuk pekerjaan pendidikan.

Organisasi ini didirikan sebagai kelanjutan dari perkembangkan bangkitnya golongan muda Tionghoa di Jakarta, Bogor, Sukabumi, Semarang, Pontianak dan merupakan sambungan daripada berkobarnya gerakan pemuda di daratan Tiongkok sendiri, dan disemangati oleh pengakuan kesamaan Hindia Belanda pada orang Jepang.

Setelah organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, maka melalui pendidikan ini diletakkan dasar-dasar bagi kesadaran nasional Tionghoa, dan melalui sekolah-sekolah itu pula dibentuk manusia nasionalis Tionghoa menurut yang diacukan oleh angkatan muda Tiongkok. Dengan demikian secara konkrit mulai dibasmi kosmopolitanisme dari kehidupan angkatan muda Tionghoa di Indonesia.

Antara tahun 1904-1912 ke dalam THHK mulai banyak masuk anasir-anasir Tung Meng Hui[14] baik dari Jepang maupun dari daratan Tiongkok sendiri. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meneruskan perombakan, sehingga di dalam organisasi mulai timbul tiga pandangan, yakni :

i. pandangan keagamaan,
ii. pandangan nasional lama, dan
iii. pandangan nasional baru.

Pandangan keagamaan makin lama makin terdesak oleh dua macam pandangan yang belakangan, yaitu pandangan-pandangan yang menentukan perkembangan organisasi ini untuk waktu-waktu selanjutnya.

Pandangan nasional lama pada umumnya nampak dari cirinya yang membatasi diri pada ketionghoaan, sedang pandangan baru selain nampak dari cirinya yang pertama juga nampak dari usahanya untuk mengutamakan internasionalisme. Antara kedua macam pandangan ini oleh THHK diusahakan adanya cara-cara penampungan agar tiada terjadi bentrokan di dalam tubuh organisasi. Karena itu THHK menyelenggarakan dua jenis sekolahan, yang terus dipertahankan hingga jatuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekolah yang didirikan berdasarkan pandangan pertama menggunakan bahasa Tionghoa, sedang yang berdasarkan pandangan kedua ditambahkan mata pelajaran bahasa Inggris. Namun, baik yang pertama maupun yang kedua menolak dimasukannya bahasa Belanda di dalamnya.

Organisasi yang dari luar nampaknya tenang-tenang saja dan damai ini disamping menjadi tempat kelahiran nasionalisme Tionghoa, juga menjadi kelahiran kesetiakawanan golongan penduduk Tionghoa di Indonesia, yang luar biasa dahsyatnya, dan yang dengan kegigihan luar biasa pula menggariskan batas perpisahan antara golongan Tionghoa dengan golongan-golongan lain diluarnya. Dari setiakawan yang luar biasa ini muncul semacam jiwa

---

[14]

golongan, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi kunci untuk mengetahui sumber pengaruh dan kemajuan golongan keturunan Tionghoa di bidang sosial dan ekonomi.

THHK yang mendukung ideologi borjuasi Tionghoa di Indonesia dan yang menjadi sumber kemajuan borjuasi Tionghoa tersebut dengan segera menimbulkan reaksi-reaksi dari kalangan borjuasi minoritas lainnya di Indonesia karena segera merasa terancam kepentingannya. Reaksi pertama-tama datang dari borjuasi minoritas Arab, yang segera mendrikan Djamiatul Chair (Organisasi Budi Utama) pada tahun 1904, kemudian diikuti oleh berdirinya Djamiah Tarbiah Islamiah dan Sumatera-Batavia-Archairah.

Walaupun lahir sebagai reaksi, Djamiatul Chair dalam organisasi dan garapan mengikuti jejak THHK, yakni hendak menggembleng manusia Islam yang modern sebagaimana diacukan di negeri-negeri Arab, dan untuk kepentingan ini mendatangkan guru-guru dari Tunisia. Maka Djamiatul juga mendirikan sekolah-sekolah diberbagai kota pesisir utara Pulau Jawa, tetapi pengaruhnya tidak sampai menimbulkan perkembangan baru di dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan Sumatera-Batavia Alchairah, sebuah organisasi pemuda, yang kemudian berubah menjadi organisasi dagang, yang bergerak justru untuk menandingi dan menyaingi secara antagonis dominasi Tionghoa di lapangan perdagangan. Organisasi ini didirikan oleh pedagang-pedagang Sumatera bersama-sama dengan pedagang-pedagang Arab, sehingga organisasi, yang tidak pernah merupakan badan hukum yang diakui ini, akhirnya berubah menjadi Batavia Alchairah saja (1911), tanpa melakukan pengubahan atas Anggaran Dasarnya. Setelah itu tak terdengar sesuatu tentang organisasi ini.

Pada tahun 1905 berdiri *SS Bond*, yaitu organisasi pegawai-pegawai Belanda pada *SS* (*Staatspoorwegen*, yaitu perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda). Organisasi ini juga sebuah organisasi sosial, dan didirikan setelah mendapat ilham dari aksi buruh kereta api di Nederland yang dalam pemogokannya pada tahun 1903 telah melumpuhkan kota Amsterdam, dan memaksa pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang perburuhan, yang menimbulkan bencana lalu lintas serta bentrokan-bentrokan keras antara kaum buruh dengan militer, dan mengakibatkan dua orang dari *SS Bond* dengan buruh luka-luka dan seorang tewas. Dari pemogokan, yang mengguncangkan ini, para pegawai kereta api di Indonesia menjadi sadar akan kekuatannya terhadap perusahaan yang mempekerjakannya.

Tetapi *SS Bond* tidak dapat dikatakan sebuah organisasi buruh kereta api, karena anggota-anggotanya terdiri atas pegawai menengah dan tinggi bangsa Eropa. Ada juga beberapa pegawai menengah Pribumi yang menjadi anggota, tetapi tidak mempunyai sesuatu pengaruh, dan merupakan minoritas yang tidak berarti. Juga *SS* memperlakukan buruh dan pegawainya berdasarkan politik rasial Hindia Belanda. Dan karena *SS Bond* terutama melayani pegawai menengah dan tinggi Belanda, yang mendapatkan keuntungan dari politik rasial ini, maka tidak pernah organisasi tersebut, mempunyai sikap politik terhadap masalah ras. *SS Bond* tidak mempuyai anggota yang terdiri atas buruh kasar Pribumi, dan karenanya tak pernah mempunyai kekuatan sebagai organisasi sosial sejak berdirinya sampai memasuki tahun belasan. Dan walaupun *SS* dan perusahaan-perusahaan kereta api lainnya di seluruh Indonesia secara tradisi menghasilkan keuntungan sebanyak 50% dari seluruh penghasilan negeri, namun tak pernah *SS Bond* melakukan penuntutan kenaikan upah bagi buruh kereta api ataupun bagi para anggotanya sendiri.[15]

3. TAHUN 1906 SEBAGAI KELANJUTAN PERKEMBANGAN

[15]

Di kalangan kaum terpelajar Pribumi, yang bersemangat kooperasi, ilusi, bahwa ilmu dan pengetahuan adalah kunci segala kemajuan dalam mencapai kesamaan derajat dengan bangsa-bangsa Eropa, makin lama makin menjurus kearah pelaksanaan gagasan asosiasi Snouck Hurgronje. Mereka semakin menjadi yakin akan kebenaran politik etis, yang dilaksanakan oleh van Heutsz, karena melihat semakin banyak kaum terpelajar Pribumi mendapat jabatan-jabatan yang lumayan dalam dinas-dinas negeri. Reorganisasi di bidang pengajaran, dimana Gubernur Jenderal tersebut telah memisahkan pengajaran rendah untuk anak-anak priyayi daripada anak-anak Rakyat kebanyakan telah memberikan kepuasan pada kaum feodal-birokrat, dan sebagian besar kaum terpelajar yang berasal dari kaum feodal-birokrat ini. Walaupun sekolah-sekolah makin banyak didirikan dalam pemerintahan van Heutsz, dan diperluas program pengajarannya, namun tak pernah mampu menampung semakin banyak pelajar-pelajar baru.

Hal-hal tersebut mengajarkan kepada pensiunan dokter Jawa Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, bahwa usaha perseorangan dalam membiayai beberapa orang pemuda pelajar yang maju tidak dapat mencakup arus pelajar baru yang tidak tertampung itu, sedang dana siswa yang telah didirikannya pun tidak mampu menampungnya, karena untuk garapan itu diperlukan perhatian dan bantuan yang lebih luas. Karangan-karangan serta seruan-seruan yang disiarkannya melalui surat kabar *"Retno Dhoemilah"* tidak banyak membantu usahanya. Ia berpendapat, bahwa harus diadakan kampanye melalui pertemuan-pertemuan agar para pembesar Pribumi suka mengeluarkan iuran-bersama untuk membantu siswa-siswa yang maju tapi tak mampu, serta mendirikan sekolah rendah sebanyak mungkin.

Didorong oleh kepercayaan akan kekeramatan modernisme ini menyebabkan ia meninggalkan pekerjaannya sebagai redaktur, dan dengan sisa uang yang masih ada pada dana siswa yang teah didirikannya itu, ia membuat perjalanan keseluruh Jawa, dan menemui para priyayi dari rendahan sampai atasan, yang dianggapnya berpikiran maju. Para priyayi tersebut adalah orang-orang yang tercatat sebagai langganan *"Retno Dhoemilah"*.

Tingkat kebangsawanannya yang rendah (gelarnya hanya : Mas Ngabehi) menimbulkan pengaruh yang kurang menyenangkan, bahkan tidak menguntungkan bagi kampanyenya, sekalipun jabatannya cukup terpandang, yakni pensiunan dokter pribadi Mangkunegara. Pembesar-pembesar Pribumi pada umumnya menutup pintu baginya, karena mereka sudah merasa puas bila anak-anaknya sendiri mendapat pengajaran yang baik, lagipula mereka lebih percaya pada hasil-hasil politik etis daripada usahanya yang belum menampakkan sesuatu perspektif itu. Bahkan para priyayi tinggi pada umumnya tidak suka apabila anak-anak Rakyat itu menjadi maju.

Pada suatu kali arah perjalanannya adalah ke Barat, dan dengan demikian bertemulah ia dengan Pangeran Achmad Djajadiningrat. Pertemuan ini telah ditulis oleh orang yang belakangan ini dengan nada puas diri :

> Di dalam museum *Bataviaasch Genootschap van Kunston en Wetenschappen* di Batavia terdapat seperangkat gamelan berasal dari kraton Banten. Gamelan itu adalah campuran antara perangkat "pelog" dan perangkat "slendro" ; dan kombinasi ini bernama "Sukarame". Untuk memeriahkan pembukaan Pasar Gambir pertama, gamelan itu akan dimainkan. Buat keperluan itu ku datangkan para niyaga dari Banten. Ternyata gamelan itu tak pernah dimainkan selama lebih seabad, sehingga bunyinya agak sumbang. Publik Batavia yang tidak mengerti itu tak banyak mengetahui ini. Hanya seorang diantara publik waktu itu duduk diatas tanah di depan kantor Komite dengan rendah hatinya, terdengar olehku berkomat-

kamit pelan dalam bahasa Jawa : "Gamelan itu tentunya dahulu indah. Jelas sudah lama tak pernah dimainkan".

Ahli yang mengetahui ini ternyata Mas Wahidin Sudiro Hoesodo, pensiunan dokter Jawa dari Yogyakarta. Ia mencari aku, karena ingin berkenalan. Beberapa kali ia telah datang ke rumah Pleyte, tempat aku menginap, tapi selalu tak berhasil menjumpai aku, sehingga salah seorang bujang Pleyte menasehatinya agar mencari aku di Pasar Gambir, karena disanalah aku harus membantu Pleyte mengurus beberapa hal yang bersangkutan dengan Pasar Gambir. Pleyte menyilakan kami duduk di kantor daruratnya tapi dokter Wahidin menolak, apapun yang kuusahakan agar ia sudi duduk diatas kursi. Dari lahir dan tindak tanduknya, dokter Wahidin adalah seorang-orang Jawa tulen. Ia menggenakan kain, blangkon dan baju Jawa potongon kolot dari kain lurik, yaitu tenunan kampung. Lagipula ia bertelanjang kaki. Sopan santun Jawa dipegangnya teguh-teguh. Bukan saja terhadap aku sebagai Bupati, tapi juga terhadap orang-orang Eropa berpangkat. Demikian pula ia selalu duduk di tanah dihadapan kawanku Pleyte. Dokter Wahidin menyampaikan kepadaku, bahwa ia sedang melakukan perjalanan keliling Jawa mempropagandakan pendirian sebuah dana siswa nasional yang besar, yang akan memberikan pertolongan pada pemuda-pemuda Hindia yang berbakat untuk dapat meneruskan pelajarannya di Nederland, agar Pribumi sekali waktu dapat mengambil tempat sederajat di lapangan politik dan ekonomi dengan orang-orang Eropa di Hindia. Untuk keperluan itu dokter Wahidin juga hendak pergi ke Serang. Ia mengharap bisa memperoleh kerjasamaku dengan jalan misalnya mengumpulkan semua priyayi Pribumi di ibukota Serang.[16]

Di luar nada tulisan Djajadiningrat tersebut banyak yang bisa didapatkan tentang pribadi Wahidin Sudirohusodo, pertama-tama, bahwa ia seorang yang memahami kebudayaannya sendiri pada situasi waktu itu, dan sebagaimana dipidatokan oleh Sosrokartono di Gent (1899), ia adalah seorang yang mengukuhi kebiasaan dan tradisi sendiri yang dianggapnya keramat, ketiga benarkah ia mengukuhi "sopan-santun" Jawa untuk menghormati pangkat Pribumi dan Eropa ? Tidak mungkinkah kiranya "sopan santun" itu justru salah satu alat untuk memudahkan usahanya dalam mendapatkan simpati, dan dengan demikian usahanya akan lebih cepat berhasil ?

Permunculannya yang hampir-hampir menyerupai Gandhi di kemudian hari, bila dikurangi dengan "sopan santun" itu, dengan cita-cita dalam hati yang sedang diperjuangkan pelaksanaanya, ia dapat dikatakan mewakili tipe kaum terpelajar yang berhasil mendapat pangkat tinggi saja tidak akan mengukuhi "sopan santun" tersebut, seperti halnya dengan P.A.A. Djajadiningrat sendiri, atau Pangeran Hadiningrat, ataupun Kusumo Utojo, yang ketiga-tiganya adalah berpangkat Bupati.

Di Serang ia mendapatkan kerjasama dari Djajadiningrat, Bupati Serang pada waktu itu, tetapi seperti di tempat-tempat yang lain, hasilnya tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Para pendengarnya memahami apa yang dimaksudkannya, tetapi tiada sesuatupun yang mereka perbuat. Apalagi karena istilah "nasional" dalam hubungan dengan "dana siswa nasional yang besar" waktu itu sama sekali asing bagi kaum priyayi, kaum feodal birokrat, yang hanya tahu mengabdi pada para penguasa Eropa.

16

Perjalanan kampanye ini "belum dikabulkan oleh Tuhan seru sekalian alam" maka "perjalanan yang sebegitu membuang ongkos dan tempo sia-sia belaka"[17]

Untuk pertama kali Wahidin Sudirohusodo berhasil dengan kampanyenya ialah sewaktu ia memasuki asrama, yang dahulu juga ditinggalinya : asrama siswa Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA. Disini ia bertemu dengan siswa-siswa yang telah terbiasa dengan semangat revolusi Perancis, yang telah jadi nyanyian mereka sehari-hari. Beberapa orang siswa termaju – Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, Sulaean, Ramelan, Slamet, – telah menyambut pidato kampanyenya dengan antusias. Mereka ini sudah lama memang mengandung maksud untuk mendirikan organisasi yang tenang lagi damai menyusul, dan mengakibatkan semangat berorganisasi makin berkobar-kobar. Pensiunan dokter Jawa itu berhasil dapat menyakinkan mereka, bahwa kemajuan Pribumi tidak mungkin bisa dicapai tanpa organisasi. Su – pada waktu itu menjadi pembicaraan umum di kalangan mereka, bahwa juga kemajuan Jepang tidak mungkin tercapai tanpa organisasi yang cukup kuat.

Sejak menjelang tutup abad ke-19, Jepang bukan hanya telah memberikan dorongan pada siswa STOVIA, juga menjadi bahan diskusi. Apalagi setelah Rusia pada tahun 1905 memaklumkan perang kepada Jepang. Titik bakar persengketaan adalah Port Arthur. Dalam usahanya untuk memperluas daerah jajahannya, Jepang hendak me negeri ini. Tetapi Rusia menghalanginya, Jepang kesal, dan lebih kesal lagi waktu melihat Rusia sendirilah akhirnya yang mencaploknya untuk mendapatkan jalan laut yang baik dan strategis di Timur Jauh. Jadi perang ini telah lama dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Karena diberanikan oleh perjanjian dengan Inggris, yang tidak suka pada kemajuan Rusia. Jepang mulai mem diri untuk berperang. Setelah persiapannya mencukupi, ia menuntut pada Rusia untuk terus menyerahkan Mancuria kepadanya. Dalam perang yang kemudian meletus Rusia terus menerus mengalami kekalahan baik di darat maupun di laut. Dan sesuai dengan perjanjian Portsmouth bulan September 1905, Port Arthur jatuh ketangan Jepang ditambah dengan semenanjung Liao Tung, sebagian besar jalan kereta api yang telah dibangun oleh Rusia di Mancuria, ditambah lagi dengan separuh pulau Sachalin, ditambah lagi dengan dibatalkannya tuntutan Rusia atas Korea. Dengan kemenangan tahun 1905 Jepang sekaligus masuk dalam daftar negara-negara besar imperialis.

Tahun 1905 merupakan patahnya mitos supremasi Eropa. Orang Asia merasai kemenanga Jepang tersebut sebagai kemenangannya sendiri, dan berhubung dengan kurang atau tiadanya kesadaran politik, tidak menginsafi bahaya daripada setiap kekuatan imperialis yang sedang menumbuh. Bahkan pada masa itu Asia pada umumnya tidak ikut berduka cita dengan Tiongkok ataupun Korea. Juga pada waktu itu kenyataan ; bahwa kemenangan Jepang adalah kemenangan dari persekutuan dunia imperialisme Barat dengan imperialisme Timur untuk membatasi menjalarkan imperialisme Rusia, yang menakutkan imperialisme Barat karena kedudukan geografisnya yang besar lagi merupakan sebuah kesatuan, juga kurang dipahami oleh Asia. Kekurang pahaman ini tidak lain daripada lebih majunya Jepang dibandingkan dengan bangsa-bangsa Asia selebihnya. Bahkan seorang yang kelak menjadi pemimpin bangsa India menyatakan dalam salah sepucuk surat kepada putrinya :[18]

> Demikianlah Jepang menang dalam peperangan, dan dia memasuki golongan negara-negara besar. Kemenangan Jepang, negara Asia, amatlah besar pengaruhnya di semua negara Asia. Telah kuceritakan padamu, bagaimana aku sebagai anak kecil biasanya merasa girang tentang itu. Kegirangan itu disertai juga oleh banyak anak lelaki dan perempuan dan orang dewasa di Asia. Sebuah

---

17

18

negera Eropa yang besar telah ditaklukan ; oleh karena itu Asiapun masih dapat mengalahkan Eropa, sebagai sering dilakukan di zaan yang silam. Nasionalisme meluas dengan cepat diseluruh egara-negara timur dan kedengaranla pekik “Asia untuk Asia”. Tetapi nasionalisme ini bukanlah hanya kembali pada yang silam, anutan pada cara-cara dan kepercayaan lama. Orangpun yakinlah bahwa kemenangan Jepang disebabkan oleh keunggulannya dalam cara-cara industri modern Barat, dan pikiran-pikiran serta cara-cara ini menjadi lebih masyhur diseluruh negeri Timur.

Kebangkitan nasionalisme diseluruh Asia pada waktu itu sebenarnya bukan hanya karena kemenangan Jepang atas Rusia, tetapi terutama karena alat-alat komunikasi imperiaisme sendiri, yakni :

i. telegram, telepon dan pos, yang memungkinkan pers dapat bekerja
ii. pers, dengan menggunakan telegram, telepon dan pos dari menerima kemudian menyebarkan berita, dalam pada itu juga tidak dapat dilupaka tugas pers imperialis Inggris, yang dengan berita-beritanya tersebut, membuat kampanye :
iii. membentuk pendapat dunia, bahwa imperialisme Rusia adalah sangat lemahnya, dan tidak mungkin sebagaimana dikehendaki oleh imperialisme Rusia untuk memegang hegemoni Asia dan mengusir Inggris dari India.[19]

Tetapi hampir-hampir tak pernah dikedepankan fakta-fakta pada waktu itu, bahwa kekalahan Rusia terutama disebabkan karena perjuangan buruh Rusia dalam membebaskan tanah airnya sendiri dari imperialisme Rusia dan membuat perlawanan dimana-mana sehingga banyak kota-kota besar menjadi pusat perlawanan terhadap imperialisme bangsanya sendiri, dan sebagai akibatnya juga menjadi pusat pertarungan yang banyak menumpahkan darah. Karena itupun tidak mengherankan, apabila setelah kekalahannya, pemerintah Rusia mengambil pembalasan dendam terhadap kaum buruh yang merupakan teror yang luar biasa kejamnya.[20]

Tetapi apapun yang terjadi dengan Perang Jepang-Rusia tersebut, pertarungan antara sesama imperialis ini telah melahirkan kekuatan baru, yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh mereka, yakni kebangkitan nasionalisme di Asia. Dengan demikian, pendapat, bahwa kemenangan Jepang disebabkan oleh “cara-cara industri modern Barat, dan pikiran-pikiran dan cara-cara modern” adalah suatu kesimpulan yang kurang menyeluruh.

Di Indonesia sendiri pihak imperialis Belanda tidak banyak menaruh perhatian terhadap peristiwa ini sebagaimana ditercerminkan oleh persnya yang lebih banyak bersorak sorai tentang kemenangan kaum Boer di Afrika Selatan, yang dibawah pimpinan Paul Kruger akhirnya dapat membuat imperialisme Inggrs bertekut lutut. Sebaliknya pihak Inggris lebih banyak membisu tentang kekalahannya di Afrika Selatan dan bersorak soorai tentang kemenangan Jepang di Port Arthur.

Kemenangan Jepang selain bergema dalam hati para terpelajar di kota-kota besar dan kecil yang dikuasai oleh Belanda, juga di daerah-daerah yang masih merdeka, bahkan juga di daerah Aceh yang telah “dipatahkan perlawanannya” secara front. Kemenangan Jepang oleh Hindia Belanda dikonstatasi telah meluapkan kembali perlawanan Rakyat Aceh secara militer. Pasukan-pasukan partisan Aceh mulai kembali melancarkan serangan-serangan.

19

20

Kemenangan Jepang ini pula yang menyentakkan dokter Wahidin Sudirohusodo yang menyebakan ia gita kembali mengkampanyekan cita-citanya, menurut acuan pikiran yang berkuasa pada waktu itu, bahwa hanya ilmu dan pengetahuan Eropa, hanya modernisme lah yang dapat menolong bangsanya. Gagasannya mendapat dukungan dari kaum terpelajar Yogyakarta, diantaranya Pangeran Notodirojo, R. Dwidjosewojo, Mas Budiarjo, R. Sosrosugondo dsb, dan dengan demikian organisasi dana siswa tersebut dapatlah didirikan. Tetapi usaha yang bersifat sangat setempat itu tidak mungkin dapat menjawab masalah, yang telah menjadi masalah nasional. Dalam pada itu kebangkitan nasional di India telah memunculkan nama Gandhi dalam daerah perhatian internasional, sedang revolusi di Turki pun telah mendapat kemenangan di bawah Kemal Pasha. Kebangunan di Tiongkok menampilkan Sun Yat Sen sebagai tokoh yang juga menjadi perhatian dunia internasional. Rangsang-rangsang ini tak dapat lain daripada menggerakan putra bumi yang paling tinggi kesadaran nasionalnya.

Situasi umum di kalangan terpelajar, pada waktu itu adalah sedemikian terpengaruh oleh politik etis kolonial Belanda, sehingga melupakan dua hal :

i. Jepang bukan negeri jajahan, tapi sebuah negara merdeka, yang dapat mengatur bangsa dan negerinya sendiri sebagaimana dikehendaki.[21]
ii. Jepang tidak mempunyai problem bahasa asing, yang menjadi problem, bahkan dianggap sebagai syarat pokok untuk menguasai kemajuan. Khusus mengenai pokok-ii yang dilupakan itu, kaum terpelajar justru menganggap, bahwa bahasa Belanda lah jembatan kearah kemajua tersebut. Dan untuk sampai pada jembatan itu orang harus memasuki sekolah dengan bahasa pengantar Belanda. Dan didalam hal pengajaran bahasa Belanda ini kaum terpelajar Pribumi lupa, bahwa :
iii. sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melaksanakan program pendidikan kolonila, membentuk manusia kolonial, dan sama sekali bukan membentuk manusia merdeka.

Dengan kelupaan-kelupaan ini Wahidin Sudirohusodo mulai bekerja meningkatkan dana siswa yang bersifat sangat setempat itu menjadi bersifat nasional. Sedang pada waktu ia menghimpun dana-dana untuk dapat membiayai pelajar-pelajar yang maju untuk dapat meneruskan pelajaran baik di Indonesia sendiri maupun di Eropa, Jepang dengan biaya negara mengirimkan pelajar-pelajarnya keseluruh dunia untuk membawa pulang segala ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan negeri dan bangsanya, dan menyebarkannya tidak dalam bahasa asalnya, tetapi dalam bahasa Jepang. Sebaliknya situasi edukasi dimasa itu di Indonesia masih tetap tidak berubah, yakni bila bukan program kolonial yang dilaksanakan, maka program gerejalah yang berlaku.

Orang sebagai Wahidin Sudirohusodo tahu benar, bahwa juga pemerintah Hindia Belanda mengirimkan pelajar-pelajar ke Nederland, tetapi, iapun mengetahui, bahwa mereka mendapat kesempatan belajar yang semahal itu bukan untuk memindahkan ilmu pengetahuan Eropa ke Indonesia, tetapi menjadi pelaksana politik kolonial Hindia Belanda. Hanya pelajar-pelajar yang mempunyai harga diri saja kelak menolak jadi pelaksana politik kolonial, tapi berubah menjadi pejuang-pejuang, seperti halnya dengan Sutan Casajangan dan Tan Malaka, sedang tidak kurang-kurangnya orang yang mendapat kesempatan belajar itu justru

---

21

meleburkan diri menjadi "Belanda" sebagaimana halnya dengan seorang yang kemudian mengubah namanya menjadi Hekker.[22]

Tetapi apapun kelupaan-kelupaan pada Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawannya, ia telah melangkah satu tindak lebih maju daripada Kartini, karena garis yang ditariknya dalam usahanya ini ialah meningkatkan "kecerdasan dan budi siswa-siswa yang maju tapi tidak berkemampuan meneruskan pelajarannya karena tiada biaya, sedang keturunan tidak menjadi pertimbangan". Pada Kartini justru kebangsawanan yang mula-mula sekali menjadi syarat untuk mendapat pendidikan dan pengajaran lebih baik, karena anak-anak bangsawan itu – sesuai dengan kondisi administrasi pada waktu itu – adalah anak-anak yang dicalonkan untuk memerintah, dan karena itu harus mendapat prioritas, agar Rakyatnya yang diperintah kelak hidup dalam pemerintahan yan baik dan maju. Dalam hal ini juga Kartini lupa pada tugas yang harus dijalankan oleh program dalam sistem pengajaran kolonial di Indonesia.[23]

Watak etis dari kaum terpelajar Indonesia ini kelak ternyata meninggalkan pengaruh yang mendalam dan sulit untuk dikoreksi ataupun dibetulkan, dan bisa dikendalikan ekses-eksesnya hanya apabila gerakan revolusioner mempunyai cukup kekuatan. Karena itu juga ekses-ekses ini mencapai puncaknya yang dalam manakala gerakan revolusioner mengalami kemerosotannya.

4. AKSI IMPERIALIS PADA TAHUN 1906.

Dalam tahun ini, tanpa mengindahkan apa orang Asia sanggup lakukan terhadap supremasi Eropa, Belanda di Indonesia meneruskan perang kolonialnya. Dengan penuh kepercayaan diri van Heutsz, menyebarkan bala tentaranya ke berbagai daerah di luar Jawa. Di Sulawesi Selatan tentara kolonial Belanda menusuk makin dalam. Parepare diduduki dengan alasan, bahwa tempat itu menjadi pusat penyelundupan senjata. Waktu melihat Makasar memungut bea keluar masuk, Belanda, yang menganggap hal itu sebagai haknya, menjadi marah dan menuntur supaya uang yang dipungut itu diserahkan haknya, menjadi marah dan menuntut supaya uang yang dipungut itu diserahkan kepadanya. Tuntutan yang tak masuk akal ini tentu saja ditolak oleh Makasar. Setelah berhasil dapat menarik bala tentaranya dari Aceh itu Belanda memang selalu mencari-cari alasan untuk dapat berkelahi dengan kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri yang masih merdeka di dalam wilayah Indonesia, sebagai jalan untuk dapat memukul dan kemudian menjajahnya. Dalam pemeritahan van Heutsz, ini pula Bone, yang menguasai Makasar, diserbu. Dengan 3 buah kapal perang pelabuhan Makasar diblokade. Tentara kolonial dengan perlengkapan modern dan merupakan tentara sewaan yang terlatih itu berhasil dapat menghancurkan ibukota Bone, Watampone, sedang Raja Bone, yang tertawan, dibuang ke Semarang. Sebelum itu Bone telah tiga kali melawan dan menghancurkan ekspansi Belanda, yaitu dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20, tetapi pertahanannya dalam tahun 1906 itu patah sama sekali. Tetapi partisan Bone, sebagaimana halnya dengan Partisan Aceh, tewas melakukan perlawanan.

Di Kalimantan, tentara kolonial berhasil dapat memadamkan sama sekali perlawanan patriotik Rakyat Banjar(masin).

Perpindahan perang kolonial dari Aceh ke daerah-daerah lain di luar Jawa dan Madura telah membenani pemerintah Hindia Belanda dengan lebih berat, yang berarti makin beratnya pajak yang harus dibayar oleh Rakyat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah yang telah dialahkannya. Maka apabila pada tahun 1904, Anggaran Belanja yang ditanggung Hindia

22

23

Belanda karena perang kolonialnya itu mencapai jumla 255,2 juta gulden, ternyata pada tahun ini Anggaran Belanja telah meningkat menjadi 371,4 juta gulden, sebagai bukti, bahwa pada tahun ini kegiatan transport pasukan dari Jawa ke daerah-daerah diluarnya, yakni Indonesia bagian Timur, luar biasa besarnya.

Sementara itu posisi baik yang dapat direbut Jepang di dunia internasional, karena kemenangannya terhadap Rusia, telah mempengaruhi jalannya pemilihan umum di Nederland. Sikap lunak terhadap negeri-negeri jajahan mendapat tempat dalam jantung kehidupan politik. Kaum Sosial Demokrat atau lebih terkenal sebagai kaum Radikal Demokrat, yang sejak menjelang tutup abad yang lalu banyak membuat kampane agar politik kolonial Hindia Belanda diubah, dengan kemenangan Jepang itu mereka seakan-akan mendapat gambaran, dan dengan demikian sebagian besar kursi di dalam Tweede Kamer telah mendapat mereka rebut. Mr. C.Th. van Deventer, yang oleh Mr. Brooshooft, yaitu orang yang membaptis politik kolonial baru itu sebagai “politik etis”, dinamai salah seorang dewa pencipta politik etis, terpilih menjadi anggota *Tweede Kamer*. Golongan Radikal Demokrat di dalam Parlemen merupakan tenaga yang menentukan dalam pembentukan kabinet. Dalam hubungan dengan politik kolonial yang disesuaikan dengan kemenangan politik gaya baru itu, tokoh liberal Mr. D. Fock terangkat menjadi Menteri Jajahan. Untuk waktu ia dianggap “progresif” dan dimasyhurkan sebagai tangan kuat, dianggap akan bisa melaksanakan politik etis dan melaksanakan perluasan dan kemajuan dibidang pengajara Pribumi. Perluasan dan kemajuan dibidang pengajaran Pribumi walaupun ala kadarnya memang ada termaktub di dalam program pemerintah Nederland.

Di Indonesia sendiri, dalam masa ini dijalankan politik bermuka dua, yaitu :

i. dengan kekerasan senjata atau diplomasi menaklukan daerah-daerah Indonesia yang belum takluk pada Belanda,
ii. dengan kelunakan luar biasa mencoba menarik hati kaum terpelajar Pribumi, dan lebih lunak lagi terhadap golongan penduduk keturunan Tionghoa, yang sejak berdirinya THHK telah mendapatkan kemajuan luar biasa dibidang sosial dan ekonomi.

Tetapi dalam pada itu penghisapan terhadap petani dan buruh terus dijalankan tanpa sesuatu perubahan.

Segala politik dan gerak-gerik imperialisme Belanda ini bersumber pada adanya bahaya terhadap kekuasaannya yang setiap waktu bisa datang dari sebelah utara : Jepang. Kemenangan Jepang di Tiongkok maupun dalam peperangannya dengan Rusia, bagi imperialisme mana pun menimpulkan kesadaran, bahwa bila Jepang bisa mendapatkan sukses militer di bagian Asia sebelah utara, iapun bisa mendapatkan sukses militer dibagian Asia sebelah selatan. Selang dalam pendidikan, Jepang mengajarkan pada generasi muda Jepang untuk “menyerbu kedaerah Selatan”.

Situasi dunia imperialis pada waktu itu memaksa imperialisme Belanda membutuhkan orang kuat yang pada waktu itu hanya didapatkan pada pribadi van Heutsz, orang perbuatan yang cepat, cerdik dan berani bertindak. Kemenangan Jepang telah merangsang negara-negara imperialis untuk semakin giat berlomba dalam memperebutkan daerah jajahan memperkuat negara mereka masing-masing dengan jalan melakukan penghisapan lebih keras pada bangsa-bangsa jajahan. Agar Belanda tidak ketinggalan dalam perlombaan memperebutkan daerah jajahan, maka ia harus segera memasukkan daerah-daerah Indonesia lainnya yang masih merdeka – sekalipun bersahabat dengan Belanda – ke dalam kekuasaannya, agar tidak didahului oleh Inggris dari utara, oleh Jerman dari timut (Irian Timur), oleh Australia dari

selatan, dan terutama sekali oleh Jepang dari utara. Tetapi terhadap Jepang, kini Hindia Belanda merasa agak aman, berhubung adanya benteng imperialisme Barat di Singapura dan Filipina. Bahaya yang nyata justru berasal dari negara-negara Barat sendiri : Inggris, Amerika, Jerman dan Asutralia. Untuk mendahului mereka itu Belanda terlebih dahulu harus menyelesaikan perangnya di Aceh, karena Perang Aceh menelan 40% dari Anggaran Belanja Hindia Belanda dan akan menghisap 50% dari seluruh Angkatan Perangnya. Sedang bila Aceh tidak ditundukkan, akan merupakan ancaman langsung yang paling berbahaya, karena dengan dibukanya Terusan Suez, meningkatnya lalu lintas laut, bukan saja akan menyebabkan Aceh akan menjadi kuat dalam bidang ekonomi, kemiliteran dan diplomasi, juga akan mengurangi arti Singapura sebagai benteng perlindungan bagi Hindia Belanda. Itulah sebabnya jatuhnya perlawanan Aceh secara front tidak dapat diartikan lain daripada pangkalan untuk merubuhkan negeri-negeri merdeka dalam wilayah Indonesia. Dengan diperoleh sukses-sukses oleh van Heutsz, ini bukan saja imperialisme Belanda terhindar dari kemungkinan penyerbuan dari negeri-negeri sekutunya sendiri, juga berhasil dapat meningkatkan wilayah jajahannya dalam bentuk daerah luas dengan kesatuan geografis sebagai negara kepulauan.

Berhasilnya diciptakan kesatuan geografis, yang berarti kesatuan politik oleh Gubernur Jenderal van Heutsz ini, terjaminlah suplai bahan mentah untuk industri-industri Belanda, serta dapat dipertahankan supremasinya di pasar dunia akan bahan mentah.

Untuk menyesuaikan perkembangan baru ini van Heutsz akhirnya harus juga melakukan peng-eropa-an atas sistem administrasi, lalu lintas dan pengangkutan, pengajaran – semua dalam rangka pelaksanaan politik etis – dan juga : emigrasi.[24]

Dalam pemerintahannya jumlah untuk pertama kali emigrasi sebagai salah satu garapan politik etis dilaksanakan. Dalam tahun 1902 pemerintah pernah menugaskan Asisten Residen Sukabumi, H.G. Hevting, untuk mempelajari pemindahan petani-petani dari Jawa ke daerah-daerah diluarnya. Pada akhir tahun 1903 Hevting telah siap dengan rencana anggaran belanja, yang meliputi pembiayaan sejumlah ± ƒ7.000.000 untuk 5 proyek di Jawa dan 6 proyek di luar Jawa. Tetapi rencana itu ditolak karena terlalu mahal. Dalam pada itu rencana proyek di Jawa, dalam membicarakan rencana Anggaran Belanja Hindia Belanda dalam Parlemen Nederland juga, ditolak oleh Cramer dan Fock, karena perpindahan penduduk antar karesidenan di pulau Jawa sudah lama berjalan tanpa pembiayaan pemerintah, seperti Madura dan Kedu ke Banyuwangi.

Baru pada tahun 1905 perpindahan penduduk dilakukan, yaitu dari Jawa ke Gedung Tataan didalam Karesidenan Lampung, sebagai pelaksanaan dari ketetapan Gubernur Jenderal yang dikeluarkan dalam bulan Maret 1905. Untuk melaksanakan pekerjaan ini Heyting lah yang memegang pimpinan dengan bantuan seorang asisten wedana dan dua orang mantri irigasi. Dalam hubungan ini 155 keluarga petani dari Jawa dipergunakan sebagai kelinci percobaan, dan karena itu juga seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 1906 jumlahnya dinaikkan sehingga menjadi 550 keluarga. Demikianlah perpindahan penduduk ini dilaksanakan dalam pemerintahan van Heutsz. Setelah pemerintahannya digantikan oleh Gubernur Jenderal lain kelak, maka petani-petani yang dipindahkan itu diwajibkan membayar kembali biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah penduduk ini mengandung dua tujuan, yaitu :

---

[24]

i. membuka sumber kemakmuran baru dibidang agraria, sehingga pemerinatahan Hindia Belanda bisa menarik pajak-pajak baru, baik dari penghasilan pertanian tersebut maupun dari perdagangan yang terjadi atas hasil pertanian itu,
ii. mengisi daerah-daerah strategis dengan tenaga manusia untuk mendatangkan bahan makanan, dan dengan demikian bukan saja perpindahan penduduk itu bisa menjadi proyek penjagaan daerah kosong, juga untuk ikut mengawasi keamanan Selatan Sunda, karena pada masa ini melalui pers dunia Jepang berulangkali menyatakan mempunyai klaim atas Selat Sunda dan Sabang.

Propaganda besar kemudian dilakukan oleh Hindia Belanda di semua desa-desa yang padat di Jawa agar mereka mau pindah ke daerah Selat Sunda secara sukarela. Propaganda ini dibantu juga oleh kolonis-kolonis itu sendiri, yang telah "mampu" dan atas biaya pemerintah mendapat tugas "menengok keluarga" di Jawa.[25]

5. SAREKAT PRIYAYI

Organisasi pertama-tama yang didirikan oleh Pribumi sebagai organisasi modern adalah Sarekat Priyayi oleh R.M. Tirto Adhisurjo pada tahun 1906. Tak banyak yang diketahui tentang organisasi ini selain daripada namanya yang aneh, dan beberapa dari tokoh-tokohnya yang terus menerus giat dalam lapangan organisasinya sendiri, yaitu *"Soeloeh Keadilan"* yang hidup sejak 1907 sampai 1912. Organ ini menghidangkan berita-berita dan pokok-pokok yang aktual tentang hukum, dengan maksud meninggikan pengetahuan para priyayi atau pegawai negeri, sedang organnya yang lain ialah *"Medan Prijaji"*, yang kelak memegang peranan penting dalam tahun-tahun sebelum berdirinya *Indische Partij* (1912).

Keanehan dalam nama organisasi ini bukan saja nampak dari adanya kontradiksi tarihi antara "Sarekat" dan "Prijaji", dimana "Sarekat" memanifestasikan semangat demokrasi, sedang "Prijaji" memanifestasikan semangat feodal-birokrat, juga karena dalam wujudnya organisasi ini memang kontradiksional di dalam dirinya sendiri. Dengan anggota-anggotanya, yang terdiri atas para priyayi dan Raja-Raja yang masih memerinah di negeri-negeri di Indonesia bagian timur, organisasi ini berusaha membiayai pelajar-pelajar yang tidak mampu serta pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu, dan juga berusaha mendirikan usaha-usaha yang pengusahaannya dilakukan berdasarkan "ilmu dagang Eropa", yang sampai sejauh itu belum dikenal dalam kehidupan niaga Pribumi.

Organnya yang kedua *"Medan Prijaji"*, walaupun dalam 3 tahun penerbitannya yang permulaan terutama tertuju dan diperuntukkan para priyayi yang menjadi langganannya, namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi surat kabar pertama-tama yang mendukung suatu program nasional, menjadi koran perjuangan pertama-tama dalam sejarah pers Indonesia, dan karenanya berhak dinamai pers Indonesia pertama-tama.

Pendiri organisasi ini, R.M. Tirto Adhisurjo, dalam pimpinan sementara menduduki jabatan sebagai "sekretaris-bendahara", sedang diantara anggotan Dewan Pimpinan duduk Thamrin Mohamad Tabri.[26] Bertindak sebagai Presiden sementara adalah R.M. Prawirodiningrat, jaksa-kepala di Jakarta, yang sebagaimana halnya dengan Wahidin Sudirohusodo juga seorang yang telah dikaruniai *ridder-orde*.

25

26

Organisasi, yang tidak banyak dikenal ini, adalah organisasi pertama-tama di dalam sejarah gerakan nasional, yang memiliki perusahaan yang dipimpin secara Eropa. Sedang bagaimana berdirinya dapat diikuti dari laporan dibawah ini :

> Dalam tahun 1906 ketika kita keliling di Hindia Belanda, maka pada pertemuan kita dengan Raja-Raja yang memerintah sendiri kerajaannya dan dengan berjenis-jenis orang dari rupa-rupa kasta, maka hampir terbit dari satu mulut, kita dapat persilahan akan mencari daya upaya, supaya adalah perserikatan umum yang memperhatikan hal kita anak Hindia yang sia-sia itu.[27]

Sepulangnya dari perjalanan keliling – pengalaman ini kelak ditulisnya dalam novel semi otobiografi *"Boesono"* (1912) – ia menemui pembesar-pembesar Pribumi di Jakarta, diantaranya Thamrin Mohamad Tabri, waktu itu menjabat *"Commandant District Mangga Besar"*, dan dengan demikian Sarekat Prijaji didirikan. Segera setelah itu dikirimkan surat edaran keseluruh Indonesia, baik melalui pers Pribumi maupun Tionghooa, ataupun perseorangan, yang menjelaskan tujuan organisasi ini – diantaranya hendak membentuk dana siswa – dan mengajak orang-orang Pribumi untuk menjadi anggota dan penyumbang.

Dalam waktu cepat organisasi ini telah memiliki 700 orang anggota dari seluruh Indonesia, sedang seorang Raja berkenan menyumbang uang sebanyak ƒ1.000,- dan menasehatkan agar perhimpunan "mesti mempunyai surat kabar sendiri". Tunjangan lain diluar itu tidak ada nampaknya, atau setidak-tidaknya tak ada yang besar jumlahnya, terkecuali, bahwa semua anggota bersedia menjadi langganan dari surat kabar yang hendak diterbitkan itu, dan dengan demikian pada tanggal 1 Januari 1907 terbit untuk pertama kali majalah (kemudian surat kabar) *"Medan Prijaji"*. Sebagai redaktur kepala bertindak R.M. Tirto Adhisurjo sendiri, yang telah berpengalaman di bidang jurnalistik, baik pada surat kabar Belanda, Indo-Belanda maupun Pribumi, sejak sebelum tutup abad yang lalu.

Langganan yang beberapa ratus orang ternyata tidak dapat menutupi ongkos-ongkos eksploitasi, sehingga diserukan agar para peminat sudi mengulurkan sumbangan keuangan. Seruan ini didengarkan oleh Kongsi H.M. Arsad & Co, yang dengan sukarela telah menambahi kapital sebagai penyalur advertensi-advertensinya. Adanya advertensi yang memuat pengumuman-pengumuman Kongsi Arsad & Co membukalah kesempatan bagi Kongsi tersebut untuk membuka usaha penerbitan, dan dengan demikian menjadi penerbit Pribumi pertama-tama dalam sejarah modern Indonesia setelah Dja Endar Muda. Tetapi baik Arsad maupun Dja Endar Muda belum dapat dikatakan dengan pasti sebagai penerbit nasional pertama-tama, karena belum adanya kejelasan adakah kedua penerbit tersebut telah mendukung dan melaksanakan suatu program yang dapat dinilai sebagai tugas nasional.

Dengan masuknya Kongsi Arsad & Co ini secara otomatis Haji Mohammad Arsad duduk dalam perusahaaan penerbitan Sarekat Prijaji sebagai direktur. Pada tanggal 10 Desember 1908 perusahaan ini mendapat badan hukum sebagai NV dengan modal ƒ75.000,- terbagi atas 3.000 saham. Walau demikian ini bukanlah perusahaan Pribumi pertama-tama yang diatur secara modern. Sebelum itu telah ada, yaitu *Landbouw Maatschappij* (Maskapai Pertanian), yang didirikan oleh R.M. Djojodiningrat, bekas wedana Bulang, disamping perusahaan-perusahaan percetakan di Bandung milik Haji Mohamad Apandi, di Cirebon milik Raden Aha, serta percetakan di Padang dan Aceh milik Dja Endar Muda, sebagai perusahaan-perusahaan percetakan pertama-tama milik Pribumi.[28]

27

28

6. BUDI UTOMO BERDIRI.

Pada suatu hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, atau setengah tahun setelah berdirinya Sarekat Prijaji, atau setahun setelah pemimpin besar India, Tilak, dihadapan rapat raksasa di Surate terang-terangan menyatakan, bahwa "yang dikehendaki India tak lain daripada kemerdekaan sejati" dan dalam tulisan yang kemudian menyusul menyatakan, bahwa "bagi tiap-tiap bangsa tak ada jalan lain terkecuali Revolusi yang dapat memerdekakannya", seorang pemuda berumur 20 tahun, siswa sekolah Dokter Jawa tingkat ke-7 telah membuka rapat, yang diadakan dengan diam-diam di dalam ruang kelas pertama sekolahnya. Pemuda itu "masih takut-takut dan malu-malu rapatnya diketahui umum".[29] Pemuda ini tidak lain daripada Sutomo. Rapat ini memang sengaja disembunyikan, bukan hanya karena khawatir akan adanya tindakan dari direktur sekolah juga karena pengunjungnya hanya berasal dari Tanah Jawa, sedangkan banyak terdapat pemuda seasrama yang tidak berasal dari Tanah Jawa. Diantara yang hadir dapat disebut Gunawan Mangunkusumo, Suwarno, Gumbreg, Saleh, Sulaeman, Suradji, Sumarno dan Ramelan.

Apapun macamnya rapat ini, dan apapun penilaian orang tentangnya, adalah kurang tepat bila dikatakan semata-mata sebuah usaha budaya atau sosial tanpa suatu latar belakang politik. Gerakan kemerdekaan di Aljazair dan India telah mencapai babak yang penting, dan gelombang pengaruh gerakan kemerdekaan India telah ikut membentuk semangat kaum terpelajar itu. Pemberontakan-pemberontakan bersenjata di Filipina terhadap penjajahan Amerika Serikat, yang banyak disiarkan oleh pers putih di Indonesia dengan maksud membentuk pendapat umum, bahwa penjajahan Amerika Serikat disana masih goyah dan tidak disukai Rakyat, juga ikut membentuk pandangan kaum terpelajar terhadap dunia internasional. Dalam pada itu pengaruh kampanye dokter Wahidin Sudirohusodo ikut pula menentukan jalan dan perkembangan rapat. Dan waktu rapat yang dipimpin oleh semangat patriotik itu selesai, telah terbentuk sebuah organisasi yang bernama *"Budi Utomo"*, yang berarti budi yang utama, tetapi diantara para peserta pembentukan itu ada pula yang mengartikannya dengan "budi dari pemuda Sutomo", yang menyebabkan organisasi itu sampai berdiri.

Rapat kecil, yang diadakan secara sembunyi-sembunyi ini akhirnya diketahui juga oleh para pejabat sekolah. Beberapa orang guru mempunyai prasangka, bahwa pemuda Sutomo telah melakukan kegiatan yang bukan-bukan, merusakkan tata tertib sekolah, tanpa izin telah berani-berani menggunakan ruangan tingkat pertama bukan untuk kepentingan pelajaran, dan berusaha agar pemuda itu diusir dari sekolah.[30]

Peraturan-peraturan sekolah memang keras. Siswa mendapat beasiswa dari pemerintah kolonial, dan merasa bersekolah untuk kelak menjadi pegawai pemerintah. Barang siapa tidak bisa melanjutkan sekolah harus mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterimanya, dengan sanksi hukuman kurang atas orang tua ataupun walinya, bila karena siswa yang tidak meneruskan itu wali atau orang tuanya tidak mampu mengembalikan. Peraturan peninggalan Portugis, bahwa para siswa wajib menggenakan pakaian daerahnya masing-masing merupakan satu ketentuan tersendiri yang tidak kurang kerasnya, sehingga para pelanggar bisa terkena hukuman sel atau bahkan diusir dari sekolah.[31]

Kesalahan Sutomo dalam mengadakan rapat ini adalah kesalahan prinsip, yaitu membuat sebuah badan di dalam daerah tata tertib tidak boleh diganggu gugat lagi. Ancaman

---

29

30

31

usiran bagi Sutomo menarik perhatian semua siswa, dan dengan demikian terkenalah organisasi baru ini, apalagi pada setiap angkatan siswa selamanya terdapat pemuda yang dengan berapi-api suka menyatakan pendapatnya di surat kabar. Hukuman usir adalah hukuman yang sangat berat, terutama bagi seorang calon pegwai negeri, karena dengan itu mungkin ia kehilangan kesempatan untuk menjadi pegawai buat selama-lamanya, karena namanya yang dianggap buruk akan diperhatikan oleh seluruh sistem dan aparat pemerintahan kolonial.

Tetapi pengusiran itu tidak terjadi. Apabila dalam tahun 1903 Kartini menyesali, bahwa di kalangan Pribumi tidak ada setia kawan – maksudnya sudah tentu Pribumi tingkatan atasan – dalam peristiwa ini, berlandaskan organisasi yang sudah dibangun, timbul secara spontan setia kawan yang diimpikan oleh Kartini tersebut. Mereka yang telah tergabung dalam Budi Utomo bersama-sama mengancam untuk meninggalkan sekolah bila benar-benar diambil tindakan terhadap Sutomo. Ancaman ini rupanya telah dinilai sebagai terlalu berani, karena dalam tindakan ini nasib semua wali atau orang tua murid telah ikut dipertaruhkan. Direktur sekolah tersebut, dr. Roll, seorang etikus yang dianggap jujur, juga ikut terancam oleh sikap para siswa itu. Sudah pada waktu itu orang menyadari, bahwa ancaman para siswa itu bukan saja bisa menyebabkan tergulingnya dr. Roll, juga mengancam nama baik pemerintah kolonial, dan secara langsung mengancam perusahaan-perusahaan swasta, yang dengan sokongan keuangan pada perusahaan tersebut mengharapkan akan mendapatkan tenaga-tenaga kesehatan yang berpendidikan.

Mereka yang pernah mengenal dr. Roll dengan jujur mengakui, bahwa ia adalah seorang yang bijaksana dengan catatan bila disingkirkan kepentingan kolonial sebagai latar belakang. Dalam rapat darurat para maha guru untuk memutuskan tindakan yang akan diambil, dr. Roll ternyata berdiri pada pihak Sutomo dkk, dengan alasan yang kurang jelas. Tindakan ini merupakan sokongan konkret dari etikus tersebut kepada organisasi para peajar itu. Bahkan kemudian iapun memberikan sokongannya dalam bentuk uang, dan akibatnya para siswa diberanikan dalam berorganisasi.

Dokter Wahidin Sudirohusodo waktu itu telah menetap di Yogyakarta setelah kampanyenya tidak mendatangkan sesuatu hasil yang konkret. Segera setelah berdirinya Budi Utomo di Jakarta, ia menerima kabar, dan dalam keadaan terburu-buru ia mendirikan cabang Yogyakarta. Karena terburu-buru itu menyebabkan cabang itu tidak bernama Budi Utomo, tetapi : Budyo Tomo.

Apapun kekurangan yang terjadi pada cabang Yogya, namun sambutan yang cepat ini semakin meluapkan semangat para pemuda dari Sekolah Dokter Jawa, dan mereka anggap bukan saja sebagai kemenangan pertama, juga sebagai pertanda zaman bahwa waktunya telah masak untuk kehidupan organisasi.

Dalam rapat tanggal 20 Mei 1908 tersebut telah dihasilkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga[32], dan terpilihlah Sutomo sebagai Ketua dan Suwarno sebagai Sekretaris. Setelah mendapatkan sukses di Yogyakarta, Sekretaris Suwarno mengambil inisiatif meluaskan organisasi keluar sekolahannya. Jalan yang diambilnya ialah sesuai dengan kesempatan yang dapat dipergunakan sebagai siswa yang terkurung dalam asrama dan peraturan-peraturan yang keras, ialah melalui sirkuler atau surat edaran yang ditujukannya pada para siswa *Landbouwschool* atau Sekolah Pertanian dan *Veeartsenijschool* atau Sekolah Dokter Hewan, kedua-duanya di Bogor. Baik Ketua maupun Sekretaris pada waktu itu masih berpikiran, bahwa organisasi adalah soalnya kaum terpelajar, belum menjadi kepentingan golongan atau

---

32

perseorangan dalam masyarakat, adapula massa. Kemudian sirkuler diluaskan juga penyebarannya ke *Hoofdenschool* atau Sekolah Raja di Magelang dan Probolinggo dan ke *Burger-Avondschool* atau Sekolah Teknik di Surabaya.

Waktu yang telah masak untuk kehidupan organisasi itu segera mengajarkan, bahwa landasan yang mereka pergunakan, yaitu kepentingan penduduk Jawa saja, ternyata sudah tidak dapat dipergunakan, sehingga mereka harus meluaskannya dengan Priangan, Madura dan Bali, jadi menurut pembagian administrasi Hindia Belanda.

Surjopranoto, abang Suwardi Surjaningrat, waktu itu siswa pada Sekolah Pertanian dan ikut bergerak sejak hari-hari pertama berdirinya Budi Utomo berpendapat dalam hubungan ini, bahwa organisasi yang tersusun menurut cara-cara Barat atau modern pada waktu itu sudah ada memang, tetapi tidak di kalangan Pribumi, hanya dikalangan orang Belanda sendiri dan golongan Indo. Sedang nilai organisasi golona Indo adalah lebih baik bila dibandingkan dengan Pribumi, meskipun garapan kedua-duanya sama, yaitu terbatas pada bidang sosial, dan justru karena "tertarik pada contoh perkumpulan kaum Indo timbulah lebih keras keinginan untuk menyelenggarakan ideo kesadaran nasional yang baru bangkit itu dalam satu organisasi yang teratur".[33]

Seorang yang mengikuti kegiatan THHK pada tahun-tahun pertama berdirinya menerangkan, bahwa pengaruh gerakan Tung Meng Hui di Indonesia juga merupakan faktor dari berdirinya organisasi Budi Utomo, karena memang sering terjadi diskusi antara orang-orang Tung Men Hui, yang bergerak di bawah tanah, dan mengurus perpustakaan-perpustakaan dengan para siswa Sekolah Dokter Jawa.[34] Sedang pada pihak lain dijelaskan, bahwa Budi Utomo mendapat pengaruh langsung dari Djamiatul Chair, baik menilik dari makna namanya, maupun dari programnya.

Tentang peristiwa yang membuka babak baru dalam sejarah Indonesia ini Pangeran Achmad Djajadiningrat menulis dalam memoarnya :

> ..... Dalam pertengahan kedua tahun 1908 oleh para siswa perguruan yang itu juga, yang waktu itu bernama "Sekolah Dokter Jawa" telah diletakkan asas untuk membentuk sebuah perkumpulan umum. Oleh pimpinan sementara telah disebarkan surat edaran di semua kalangan terpelajar Indonesia. Alasan pendirian perkumpulan itu jelas sebagaimana diucapkan oleh salah seorang pendirinya, Sutomo .... Tuan Sutomo mengatakan dalam mempropagandakan perkumpulannya sebagai berikut : "Kami hendak membentuk perikatan bagi seluruh orang Jawa, Sunda dan Madura, bangsa-bangsa yang kami duga mempunyai satu kebudayaan. Kekayaan ataupun kedudukan tidak boleh menjadi syarat-syarat keanggotaan. Kita akan merangkum semua, agar negeri dan bangsa dapat berkembang secara harmoni. Alam, bakat, sastra, seni, musik, suka duka, harapan dan hari depan, semua itu harus mendapat kesempatan untuk menyatakan dirinya di dalam ikatan ini. Perkumpulan ini arus mengawasi pengajaran Pribumi maupun pertanian yang serasi dengan pangreh praja. Kesehatan orang Jawa pun akan diusahakan secermat mungkin, sebagaimana halnya dengan orang-orang miskin sebangsa yang dikirim ke Sumatera Timur. Kita akan memberikan sesuatu sehingga seluruh Jawa dan Madura merupakan kesatuan geografi dan kultur."
> ..... Terutama sekali oleh kaum terpelajar Pribumi Budi Utomo diterima dengan antusias. Walau demikian aliran yang lambat laun hidup di dalam gerakan Hindia

33

34

> Belanda disebabkan perkumpulan tersebut tidak menggelisahkan pangreh praja. Hampir semua mereka adalah kaum terpelajar yang mewakili aliran itu, sehingga karenannya setidak-tidaknya pangreh praja Pribumi tidak mengharap terjadinya sesuatu perbuatan tanpa pikir.[35]

Tulisan tersebut dapat dibenarkan, terkecuali masa kelahiran organisasi Budi Utomo yang semestinya "pertengahan pertama tahun 1908", sedang kutipan atas pidato Sutomo menjelaskan, bahwa sekalipun nasionalisme (sempit) telah timbul, namun kesatuan geografi dan kultur, yang menjadi dasar daripada nasionalisme (sempit) ini dan karenanya nasionalisme Budi Utomo ini tidak didasarkan pada politik, dan karenannya tepat bila dinamai : nasionalisme kultur, dimana yang menjadi syaratnya bukanlah semangat manusia, tetapi kesatuan geografi dan kesamaan kultur. Tetapi setindak lebih maju daripada Wahidin Sudiro Husodo ialah bahwa Budi Utomo tidak membuat dana siswa, tapi organisasilah garapan utama. Juga lebih daripada itu Sutomo, yang dalam kampanyenya mewakili Budi Utomo, bukan hanya memperhatikan kepentingan kemajuan pengajaran dan kesehatan, kebudayaan dan kesenian, juga nasib bangsanya yang menjadi budak belian model baru, yang pada waktu itu terkenal dengan nama "kuli kontrak".

Bahwa nasionalisme Budi Utomo terbatas saja pada negeri dan bangsa di Tanah Jawa dan Madura – kemudian juga ditambah dengan Bali – telah menimbulkan banyak kesulitan di kemudian hari untuk mengkoreksinya, dan itupun dengan susah payah pula. Tetapi hal inipun dapat dipahami seluruhnya, karena :

i. nasionalisme ini adalah bayi yang baru dilahirkan, dan karenanya tidak akan sempurna dalam segala isi dan bentuknya,
ii. kontak antara Jawa & Madura dengan pulau-pulau lain diluarnya, terutama Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur pada umumnya masih terlalu mahal, sedang
iii. bagi kaum terpelajar Pribumi pada waktu itu suku-suku dan negeri-negeri Nusantara di luar Jawa & Madura sama asingnya dengan negeri-negeri Asia lainnya, dan program pengajaran pada waktu itu membikin mereka lebih mengetahui Nederland dan bangsanya khususnya dan Eropa pada umumnya daripada sebangsanya dan senegerinya di luar Jawa & Madura.[36]

Tetapi ketiga alasan tersebut adalah faktor obyektif pada waktu itu, dan seluruhnya sesuai dengan ucapan Rabindranath Tagore dalam melukiskan gerakan kemerdekaan India dalam salah sebuah pidatonya di Inggris, bahwa "sejarah manusia dibentuk menurut kesukaran-kesukaran yang dijumpainya" dan bahwa "kesukaran-kesukaran ini berbeda-beda sifatnya, selaras dengan perbedaan bangsa-bangsa di dunia, dan dalam cara kita menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini, terletaklah keistimewaan kita". Bukanlah suatu kebetulan apabila Tagore yang dikemukakan disini, karena juga pengaruhnya dalam gerakan kebangkitan Asia waktu itu dapat dirasakan, juga di Jawa & Madura. Nasionalisme Budi Utomo tidak lain daripada produk dari perjuangan kaum terpelajar pada waktu itu dalam memecahkan kesulitan-kesulitannya sebagai "bangsa". Faktor berikutnya adalah :

iv. belum berkembangnya kritisisme, sehingga kurangnya kemampuan membedakan antara Eropa sebagai guru dari Eropa sebagai penjajah, untuk waktu yang cukup lama telah berhasil membentuk watak non-revolusioner pada golongan terpelajar Pribumi pertama-tama ini. Sedang watak non revolusioner

---

35

36

ini, dengan semakin meningkatnya kesadaran politik massa, menjadi perintang yang besar bagi berhasilnya program perjuangan untuk memenangkan kemerdekaan politik yang menyeluruh ; dan

v. faktor sosial ekonomi, dimana kaum terpelajar itu berada pada masa peralihan antara kondisi feodal dan cita-cita borjuis kecil, yang kedua-duanya belum pernah teruji dalam kehidupan-tanpa-pengabdian-pada-imperialisme-Eropa; dan akhirnya adalah :

vi. faktor politik dalam mana secara tradisional Jawa bukan saja merupakan gudang serdadu, juga menjadi pusat pengaturan kolonial Hindia Belanda buat seluruh Indonesia, sehingga menimbulkan anggapan yang keliru, bahwa Jawalah yang terpenting dari seluruh negeri di Indonesia yang berada dalam penjajahan Belanda.

Timbulnya faktor terakhir tersebut lebih tepat dinilai sebagai produk dari belum berkembangnya kritisisme yang dikombinasi dengan kenyataan belum adanya pengertian, bahwa semua bangsa di Indonesia, tidak peduli apapun sukunya, tak pernah menyukai penjajahan, dan semua menderita karena penjajahan itu. Pengertian semacam ini hanya mungkin timbul bila di kemudian hari telah lahir organisasi atau partai yang mendasarkan dirinya pada kekuatan Rakyat, dan bukan pada kekuatan kaum terpelajar, yang pada waktu itu merupakan angkatan yang justru ikut mendapat keuntungan dari adanya penjajahan.

Demikianlah tentang organisasi (pertama) ini dengan keterbatasan-keterbatasannya, baik di bidang program, pandangan politik, serta pahamnya tentang nasionalisme. Tindakan-tindakannya selanjutnya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Belum ada timbul pada organisasi untuk mendobrak faktor-faktor tersebut dan menciptakan kondisi-kondisi baru, sehingga secara mudah – bila dilihat dari segi revolusi – mereka adalah golongan reformis yang sejak dalam konsepsinya telah berkapitulasi terhadap imperialisme Belanda. Tapi, sejalan dengan ucapatan Tagore, “jalan yang termudah bagi seseorang bukanlah jalan yang sesungguhnya”.[37]

7. TAHUN-TAHUN PERTAMA KEHIDUPAN BUDI UTOMO.

Antara Budi Utomo Jakarta dengan Budyo Tomo Yogyakarta, sekalipun resminya berkedudukan sebagai Pusat dan Cabang, pada tahun pertama kehidupannya itu belum mempunyai persambungan yang mesra. Baik Jakarta maupun Yogya mempunyai rancangan Anggaran Dasarnya sendiri-sendiri, sedang Anggaran Dasar Yogya disusun 3 bulan setelah Cabang itu didirikan, atau pada tanggal 29 Agustus 1908, yang ditandantangani oleh pimpinan sementara terdiri atas Wahidin Sudirohusodo sebagai Presiden. Dwijosewojo sebagai Sekretaris-I dan Sosrosugondo sebagai Sekretaris ke-II.[38]

Belum adanya hubungan mesra ini mau tak mau melahirkan perbedaan, sedang perbedaan-perbedaan ini baik Jakarta maupun Yogya merasa perlu untuk melakukan pertemuan secepat mungkin. Korespodensi yang ramai antara kedua kota itu akhirnya menelurkan kebulatan pendapat akan perlunya diadakan Kongres, yang akan diadakan pada liburan besar Oktober tahun itu juga, sebagaimana nampak dari pengumuman yang berfaal juga sebagai undangan seperti tersebut dibawah ini :

> YOGYAKARTA. Presiden “Budyo Tomo” telah membikin surat edaran dalam *“Retno Dhumilah”* angka 74, menentukan akan bikin kumpulan besar nanti 3

37

38

> Oktober yang akan datang pada hari Sabtu mulai jam 9 malam, dan 4 Oktober hari Minggu mulai jam 8 pagi di Kweekschool, Yogyakarta.
> Malam sementara kumpulan itu, sekalipun redaktur surat kabar disediakan tempat sendiri, dan lagi segala orang yang akan mendengarkan apa yang dibicarakan di dalam perkumpulan itu, bolehlah datang dengan vrij, begitu juga orang-orang perempuuan boleh datang melihat disitu serta disediakan tempat sendiri.[39]

Siaran undangan tersebut bukan saja merupakan dokumen pemberitaan akan adanya kongres nasional pertama-tama dari sebuah organisasi (pertama-tama) juga merupakan dokumen sosial tentang kehidupan organisasi pada waktu itu, yang mengandung suatu petunjuk, bahwa :

i. kongres nasional itu bersifat terbuka untuk umum tanpa melalui sesuatu penyaringan, baik bagi mereka yang mendapat undangan ataupun tidak, yang kelak, untuk waktu yang cukup lama akan menjadi tradisi dalam kehidupan organisasi-organisasi dan partai-partai yang non-revolusioner,
ii. kongres nasional pertama-tama telah membukakan pintu bagi emansipasi wanita dalam kehidupan organisasi dan mimbar umum, yang bukan hanya secara teori, juga secara praktek.

Dalam Kongres ini diundang juga pemerinah kolonial, Bupati-Bupati dari luar dan dalam swapraja Yogyakarta dan Surakarta, orang-orang swasta terkemuka, serta tokoh-tokoh diseluruh Priangan, Madura dan Bali, sedang acara Kongres terdiri atas :

+ Ceramah-ceramah penjelasan tentang Dasar dan Tujuan organisasi,
+ Perbincangan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga,
+ Pemilihan anggota-anggota Dewan Pimpinan Pusat.

Dalam kongres ini, sebagai penghormatan pada golongan tua sesuai dengan tradisi lama Jawa khususnya dan Asia pada umumnya, golongan muda membenarkan langkah-langkah yang diambil oleh golongan tua dalam mengambil inisiatif, dan Jakarta dengan sengaja tidak mengedepankan Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya, serta menamakan diri sebagai delegasi dari Pimpinan Sementara Cabang Jakarta, dan menempatkan Yogyakarta dengan demikian sebagai Pusat.

Tetapi ternyata tata krama tradisonal ini tidak dapat lebih lama dipertahankan setelah nyata, bahwa persoalannya menyangkut prinsip, sedang dalam Kongres itu sendiri terdapat bukan hanya satu atau dua kekuatan, tetapi tiga, yaitu :

- pertama : kekuatan angkatan muda, yang diwakili oleh delegasi Jakarta,
- kedua : kekuatan angkatan tua, yang diwakili oleh pimpinan Delegasi Yogyakarta, dan
- ketiga : kekuatan pribadi Wahidin Sudirohusodo dengan beberapa orang pengikutnya yang tidak padu.

Angkatan muda yang diwakili oleh Jakarta pada pokoknya menghendaki agar organisasi didasarkan atas asas *"Javaansch Nationalisme"* atau Nasionalisme Jawa[40], sedang angkatan tua yang diwakili oleh Yogyakarta menitikberatkan persoalan pada bentuk dan tugas organisasi, ialah memperluas badan dana siswa secara nasional sebagaimana telah dimulai

---

39

40

beberapa tahun sebeumnya oleh dokter Wahidin Sudirohusodo, sedang tokoh terakhir ini menghendaki agar persoalannya hanya dititikberatkan pada tugas organisasi, dan terntara tidak mendapatkan sokongan sama sekali dari Kongres. Tetapi setelah Kongres selesai, dibentuk badan dana siswa khusus yang dipegang sendiri olehnya.

Pertarungan yang sengit terhadi antara Angkatan Muda dan Angkatan Tua. Tjipto Mangunkusumo bahkan mengajukan konsep yang sangat maju, ialah, bahwa mula-mula organisasi harus mempunyai sikap politik, yang akhirnya meluapkan perdebatan yang tidak mengenal kompromi dengan angakatn tua, yang pada umumnya adalah pejabat-pejabat pemerintah yang cukup terpandang. Bagi Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat, berbeda halnya dengan Sutomo dkk yang juga dari Jakarta, politiklah yang harus jadi dasar dari nasionalisme. Angkatan Tua Yogya, yang konservatif, menolak dan berpegangan teguh, bahwa kulturlah dasar yang paling riil bagi nasionalisme, yaitu nasionalisme Jawa. Tanpa kultur yang telah tersedia tidak mungkin ada “bangsa Jawa”. Sebaliknya Angkatan Muda menegaskan, bahwa kultur tanpa politik, tidak mempunyai sesuatu arti bagi kultur itu sendiri, karena setiap waktu ia harus menyingkir terhadap kultur mereka yang lebih berkuasa.

Perdebatan yang tak kenal kompromi itu menyebabkan dokter Wahidin Sudirohusodo dengan air mata bercucuran naik keatas mimbar dan menerangkan bukan maksud Kongres untuk mengadakan pertentangan, tapi justru untuk mengadakan kerukunan, dan ia menyatakan akan menarik diri sama sekali dari organisasi, bila pertentangan-pertentangan diteruskan. Pertentangan berakhir. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Angkatan Muda sendiri pecah jadi dua sayap, sayap Tjipto Mangunkusumo & Suwardi Surjaningrat sebagai sayap kiri, dan Sutomo & Gunawan Mangunkusumo sebagai sayap tengah. Angkatan Yogya seluruhnya mewakili sayap kanan. “Jalan yang termudah bagi seseorang” kata Tagore, memang “Bukanlah jalan yang sesungguhnya”. Tidak puas dengan Budi Utomo ini akhirnya Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat keluar dari organisasi , dan bersama E.F.E. Douwes Dekker mendirikan Indische Partij, yang semata-mata berdasarkan asas politik (1912).

Kongres akhirnya memutuskan Yogyakarta sebagai Pusat, sedang Jakarta sebagai Cabang. Dalam pemilihan Dewan Pimpinan Pusat terpilih :

R. Adipati Tirtokusumo, pensiunan Bupati Karanganyar sebagai Presiden, didasarkan pada kenyataan, bahwa ia di Jawa Tengah telah terkenal akan jasa-jasanya “untuk memajukan Rakyat terutama dibidang peternakan.

- Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil Presiden,
- Mas Ngabehi Wadono Dwijosewojo sebagai Sekretrasi-I, dan
- Sosrosugondo sebagai Sekretrais-II.

Dengan terpilihnya dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota Dewan Pimpinan dan Dwidjosewojo – dua-duanya adalah tokoh-tokoh muda kebanggaan Paku-Alaman – mulailah organisasi ini bukan saja mendapat simpati, juga sokongan dari kaum bangsawan Mangkunegaran. Dan sesuai dengan konsepsi mereka, Budi Utomo pun dipimpin berdasarkan kebijaksanaan yang telah mereka susun, yaitu ketugasan kultur dalam dan bagi organisasi.

Dalam Kongres sama sekali tidak dibicarakan tentang pemerintahan sendiri, sekalipun lebih dari 35 tahun sebelumnya telah diajukan oleh Pangeran Hadiningrat yang bukan saja tidak menggabungkan diri pada Budi Utomo malahan dengan *Regentenbond* nya kelak mencoba mengimbangi kemajuan yang pertama, dalam usahanya untuk mengukuhi dan merehabilitasi kedudukan Bupati yang dirasainya terancam oleh semakin mendesaknya kaum

terpelajar yang bukan berasal dari kelas bangsawan tinggi, dan sebagai kelanjutan dari usaha ini justru *Regentenbond* lah yang selalu menuntut diperluasnya otonomi daerah demi merehabilitasi kedudukan golongannya sebagai Bupati, sebagai jalan ke arah pemerintahan sendiri.

Dengan disahkannya Anggaran Dasar Budi Utomo dan diakuinya sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda, maka kedudukan organisasi ini dihadapan hukum dan pengadilan adalah sama dan sederajat dengan seorang pribadi kulit putih. Sedang dengan diangkatnya Pangeran Notodirodjo sebagai Presiden pada tahun 1911 menggantikan R.A. Tirtokusumo mulai nampak adanya tanda-tanda, bahwa organisasi ini akan dipergunakan sebagai basis untuk merehabilitasi swapraja Paku Alam. Hal demikian tentu tidak akan dibiarkan oleh swapraja-swapraja lainnya, untuk juga dapat menggunakan organisasi ini sebagai basis rehabilitasi swapraja masing-masing. Dibawah Presiden Pangeran Notodirodjo terbuka zaman baru bagi Budi Utomo, karena banyak bangsawan tinggi dari Solo dan Yogyakarta yang mendaftarkan diri sebagai anggota. Akhirnya untuk mengakhiri ilusi tersebut, Sultan Hamengkubuwono merasa perlu turun tangan dengan menghadiahkan pada Budi Utomo sebidang tanah seharga ƒ100.000 dan uang kontan sebanyak ƒ45.000,- untuk pendirian sekolah netral yang sudah lama jadi perjuangan Budi Utomo.

Sampai dengan pertengahan kedua tahun 1914, organisasi ini terus menolak dasar-dasar politik, sampai akhirnya terjadi kekosongan Presiden, dan Dwidjosewojo sebagai pejabat Presiden secara lebih keras berusaha untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak imperialis, sedang sayap kiri Budi Utomo pada waktu itu oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuang di Nederand.

8. PENGARUH BERDIRINYA BUDI UTOMO.

Berdirinya Budi Utomo telah menjadi pertanda, bahwa kehidupan di Indonesia telah membutuhkan organisasi. Dengan berdirinya organisasi ini golongan-golongan di dalam masyarakat, yang tidak mempunyai kepentingan dengan edukasi sebagai pokok perhatian, mulai mendirian organisasinya masing-masing. Dibidang edukasi itu sendiri pun telah timbul berbagai studiefonds, diantaranya yang termasuk terkemuka adalah *Ambonsch Studiefonds*. Tetapi kebanyakan studiefonds-studiefonds itu kemudian menjadi bangunan-bawah organisasi kedaerahan. Budi Utomo adalah sebuah organisasi kedaerahan, dan karenanya pun menimbulkan reaksi timbulnya organisasi-organisasi kedaerahan pula seperti *Daja Upaja* di Jakarta (20 April 1912) dan setelah mengalami berbagai nama dan pimpinan menjadi organisasi politik *Kaum Betawi*, *Pagujuban Pasundan* (1914), *Regentbond* (1909), *Regentbond Narpo Wandono*, *Sarekat Anak Alam Minangkabau* (SAAM), *Sumatranen Bond*, *Perserikatan Minahasa*, *Ambonsche Volksbond*, *Sarekat Ambon*, *Moluksch Verbond*, *Timorsch Verbond* dsb.

Apapun kekurangan dari Budi Utomo ini, dalam sejarah Indonesia adalah laksana matahari yang melahirkan planet-planet baru. Pengakuan hukum pemerintah Hindia Belanda lah terutama yang memberanikan berdirinya organisasi-organisasi lainnya. Tonggak sejarah yang telah dicapai oleh Budi Utomo ialah, bahwa dengan timbulnya organisasi ini :

i. terbukanya prospek dari pendemokrasian kehidupan,
ii. dimulainya babak baru dimana individu-individu secara sukarela menggabungkan diri didalam organisasi, dengan sukarela menentukan peraturan-peraturan sendiri (Angaran Dasar dan Rumah Tangga) untuk dipatuhinya sendiri, sebagai syarat pertama dan terutama daripada keanggotaan organisasi modern,

iii. terbukanya prospek dari pencapaian cita-cita bersama dalam suatu ikatan yang sukarela.

iv. mendapatkan kedudukan sama tinggi dengan bangsa Eropa melalui permintaan badan hukum bagi organisasi, sebagai jalan yang lebih luas dan rata untuk membuat dialog dengan pemerintah tertinggi Hindia Belanda serta pejabat-pejabatnya, bahkan juga dengan Kabinet Nederland dan Ratu.

Organisasi-organisasi penting yang segera timbul setelah Budi Utomo adalah *Indische* (*Studenten*) *Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia di Nederland dengan pendiri dan Ketuanya, R.M. Notosuroto. Diantara para pendirinya *xxxx* sebut juga Sutomo tetapi tidak jelas peranannya. Pada mulanya organisasi ini didirikan hanya untuk mempererat persahabatan diantara para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Nederland, tetapi setelah datangnya E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Surjaningrat dan Tjipto Mangunkusumo di Nederland sebagai orang-orang buangan politik, organisasi ini berubah menjadi partai politik tidak resmi, sebuah partai politik salon tanpa basis (Tanah Air) dan tanpa kekuatan (massa). Namun demikian, meningkatnya aksi-aksi politik di Tanah Air, organisasi inipun memberikan dorongan bagi perkembangan selanjutnya di Tanah Air, bahkan kelak resolusi-resolusinya selalu menjadi perhatian Kementerian Penjajahan, Parlemen dan *Volksraad*.

Comment [M1]: Halaman 83, baris terakhir.

Organisasi lain yang penting yang timbul sebagai akibat langsung dari berdirinya Budi Utomo ialah Sarekat Dagang Islamijah (SD-ijah) sebagai pembaharuan daripada Sarekat Prijaji yang tidak mempunyai daya hidup. Juga, sebagaimana halnya dengan Sarekat Prijaji, SDI-ijah didirikan oleh R.M. Tirto Adhisurjo, yang di dalam organisasi duduk sebagai Sekretaris Adviseur – suatu kedudukan dalam organisasi yang unik.

Maka apabila organisasi ini mempengaruhi langsung berdirinya organisasi-organisasi lain, barang tentu ia sendiri mengalami perkembangan yang pesat. Dalam tahun 1909, atau beberapa bulan setelah Kongres Nasionalnya yang pertama telah berdiri cabang-cabang hampir diseluruh pulau Jawa : Surabaya, Trenggalek, Kedungjati, Kudus – bahkan ditempat ini berhasil memfusikan dua organisasi setempat, yaitu Panglipur Sungkowo dan Leesgezelschap –, Magelang, Klaten, Kediri, Ponorogo, Nganjuk, Bangkalan, Blora, sedang di Sumatera pada tahun 1909 itu juga telah berdiri sebuah Cabang di Serdang.[41] Pada tahun 1908 itu saja telah berdiri 10 buah cabang, semua ditempat-tempat dimana terdapat sekolah lanjutan.

Sebuah ciri khas dari organisasi ini ialah, bahwa sejak berdirinya, terutama yang menaruh perhatian adalah golongan terpelajar, setelah itu kemudian menyusul pegawai-pegawai negeri, dan setelah itu pegawai-pegawai swasta. Perkembangan ini menyebabkan Budi Utomo, tanpa dikehendakinya sendiri, berubah dari organisasi pelajar menjadi organisasi pegawai, dan dengan sendirinya menjadi wadah kegiatan dari kaum priyayi.

Hampir disetiap Cabang pendiri-pendiri Cabang adalah pegawai pangreh praja dan kaum guru. Di beberapa tempat bahkan Bupati sendiri, sedang bila demikian halnya, Cabang tersebut akan menjadi Cabang yang mempunyai banyak anggota, karena sejak Wedana kebawah, seperti mendapat perintah halus dari Bupatinya terpaksa mengambil inisiatif pendirian di kecamatannya masing-masing, sebagaimana yang telah terjadi di Kudus, Blora dan Bangkalan.

Kampanye pendirian Cabang-cabang tidak dipimpin oleh Yogya sebagai Pusat, karena itu tema kampanye juga bermacam-macam sesuai dengan harapan atau ilusi dari

[41]

kampanyewan-kampanyewan masing-masing. Di Surabaya, misalnya, tema kampanye adalah "untuk memperbaiki penghidupan Pribumi", yang dipergunakan di Kedungjati adalah "menciptakan kehidupan bertali damai", sedang di Semarang adalah pendirian "sekolah-sekolah yang menjadi pintu masuk ke HBS dan Sekolah Dokter". Bagaimanapun berbeda tema-tema tersebut pada pokoknya adalah menyingkapkan aspek-aspek baru yang terkandung di dalam kehidupan organisasi, dan sekalipun para inisiatornya adalah pegawai-pegawai negeri dan swasta, namun telah menunjukkan adanya perintisan jalan kearah kontak dengan massa besar. Hal ini segera nampak dalam kampanye pendirian ranting-ranting di desa-desa di Magelang, dimana kampanye pendirian adalah melalui pencalonan lurah, dengan hasil terpilihnya seorang calon yang juga anggota Budi Utomo. Dalam pemilihan lurah ini pula untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia kaum wanita desa ikut menggunakan hak pilihnya. Seorang peninjau sampai-sampai melaporkan, bahwa kenyataan tersebut memberi alasan untuk meramalkan, bahwa dalam waktu yang tidak lama Budi Utomo akan mendapat seorang "adiknya : yaitu Sarekat Perempuan Djawa"[42] – suatu ramalan yang segera akan menjadi kenyataan dengan berdirinya organisasi wanita pertama-tama dalam sejarah Indonesia, yakni Putri Merdika (1912).

Organisasi wanita pertama-tama yang didirikan oleh Budi Utomo adalah juga organisasi wanita pertama-tama yang menyatakan bertujuan menlanjutkan cita-cita Kartini memajukan pendidikan anak-anak perempuan untuk kelak mendapatkan kedudukan sosial yang baik. Sedang organisasi wanita yang kedua lahir pada tahun yang sama di Bandung dengan nama Keutamaan Istri. Organisasi yang belakangan ini tidak mempunyai persangkutan organisasi dengan Budi Utomo. Pada tahun itu juga berdiri sebuah organisasi yang menyatakan diri memuliakan dan melaksanakan cita-cita Kartini, didirikan oleh orang-orang Belanda di Semarang, bernama Kartini Vereeniging, yang tujuannya adalah mendukung gagasan asosiasi Snouck Hurgronje. Sedang adanya organisasi asosiatif ini, hanya setahun kemudian, menyingkapkan fakta baru, bahwa dalam gagasan asosiasi ternyata terkandung juga taktik untuk meneliti sikap politik kaum terpelajar *xxxx* tidak dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang pribadi kaum terpelajar Pribumi mempunyai sikap yang dianggap mencurigakan pemerintahan Hindia Belanda.[43] Sedang masih dalam hubungan dengan pengaruh Wanito Hadi di Jepara, Pawijatan Wanito di Magelang pada tahun itu juga, sedang jauh kemudian juga organisasi Wanito Susilo di Palembang.

Pengaruh Budi Utomo secara langsung juga menyebabkan berdirinya organisasi kepanduan pertama-tama dalam Sejarah Indonesia, yang dirintis oleh Sartono dan Muljadi Djojomartono di Solo pada tahun 1911. Tahun ini juga untuk pertama kali berdiri perkumpulan vak *xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx* ini Persatuan Buruh Pabrik (PBP) dan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), sedang pada tahun 1908 itu juga telah berdiri sebuah perkumpulan Vak campuran, Indonesia dan Belanda, *Vereeniging van Spoor en Tram Personeel* (VSTP) yang sejak berdirinya telah menjadi modal dari gerakan revolusioner di Indonesia dan berpusat di Semarang, serta dapat dikatakan sebagai tandingan terhadap SS Bond, yang berpusat di Jakarta. Dibawah pengaruh majalah *"Pewarta Spoor dan Tram"* (Bandung), pada tahun 1909 sebagian dari anggota Pribumi dalam SS Bond melakukan eksodus dan menggabungkan diri dengan VSTP.

Adalah sulit untuk dapat mengatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut bisa lahir tanpa mendapat dorongan dari berdiri dan suksesnya Budi Utomo.

Comment [M2]: Halaman 84, paragraf terakhir.

Comment [M3]: Halaman 85, paragraf kedua.. dugaanku sih itu berbau vaksentral bla bla bla gitu. Atau memang coretan karena salah tulis. Karena di halaman tersebut termasuk jelas tulisannya.

42

43

9. TENTANG "JAVAANSCH NATIONALISME" DAN TANGGAPAN UMUM TENTANGNYA.

Publikasi-publikasi di dalam pers tentang berdirinya organisasi baru ini, bagaimanapun tidak jelas program serta asas-asas politiknya, pada angkatan muda di luar grup Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat, yang tidak mengikuti sendiri perdebatan-perdebatan di dalam Kongres, melahirkan khayalan yang kadang-kadang melewati proporsi. Publikasi-publikasi dalam *"Bintang Soerabaja"*, *"Tjaja Timoer"*, *"Tjaja Soematra"*, *"Medan Prijaji"*, *"Pembrita Betawi"* banyak kali menggambarkan optimisme yang mendekati suatu khayalan, sekalipun dalam optimisme itu pada satu pihak melahirkan keberanian-keberanian dalam mengadili pemerintah kolonial, pada pihak lain terlalu banyak mengelu-elukan organisasi ini, yang setelah menyingkirnya Angkatan Mudanya ternyata tidak mempunyai prestasi sebagaimana diharapkan itu.

Publikasi tersebut yang kebanyakan dikendalikan oleh redaktur-redaktur keturunan Tionghoa, nampak sekali sedang berusaha keras untuk mensejajarkan gerakan Pribumi yang sedang bangun itu dengan kebangkitan nasional di daratan Tiongkok. Nama-nama mereka hampir tak pernah dicantumkan pada tulisan-tulisan demikian sesuai dengan kebiasaan pers pada waktu itu, yang menganggap nama pengarang belum begitu penting.[44] Untuk menarik perhatian kaum terpelajar adalah lazim saja pada waktu itu seorang penulis menggunakan nama samaran Eropa. Sebuah diantara contoh yang tipikal daripada tulisan yang termaksud adalah seperti yang terkutip dibawah ini,

> *Gouvernement-Nederland* senantiasa menanam bijinya kuwasa diatas cidra, yang mana membikin dan menjauhkan kerukunan anak bumi, sedang B.U. hendak menjadikan karukunan anak bumi diantara mereka itu, hingga semua bisa menjadi satu. Rusaknya karukunan ini disebabkan dari salahnya orang yang menjalankan peperintahan *Gouvernement*, yang mana senantiasa mengasingkan dirinya satu antara lain, dan menaruh pager antara kaum yang memerintah dan kaum yang diperintah.
>
> Pagar yang kuat dan tinggi yang dipasangkan antara kaum pemerintah dan anak bumi yang disaingi dengan kekuasaan yang ditujukan dengan gertak sampai cukup akan menjauhkan hati si gogol kepada kaum priyayi. Dalam hal yang begini setianya anak bumi tidak boleh diharapkan sebab yang memerintah senantiasa menjauhkan hati si gogol dan priyayi satu maksud, satu hati dan satu pikiran, yaitu pencarian dan pelajaran harus diluaskan.
>
> Kita amat menyesal sekali kalau kita merencanakan dan memandang tabiat ambtenaar B.B. (*Binnenlands Bestuur*) yang diwajibkan jadi penuntunannya peperintahan pada si gogol. Antara priyayi dari *Opleiddingschool* atau yang cuma dari sekolah setalenan, tabiatnya satu rupa kemudian dia jadi priyayi itu cuma digunakan sebagai perkakas akan menggembungkan dadanya saja, dan derajat priyayi itu cuma dibuat menaruk pagar antara priyayi dan si gogol. Tidak perdulikan anaknya Pak Kromo atau Pak Tiko, kalau dia sudah bisa menunjukkan kancing baju gula kelapa yang disaingi letter W, sudah sampai cukup dia akan masuk ke golongannya satria dan tidak patut sekali-kali yang dia mau bercampur dengan bangsa Sudra, sebab derajatnya amat rendah. Tidak berbeda dengan derajatnya anjing. Perbedaan yang begini dengan bangsa sama bangsa – meninggalkan kurang percayanya si gogol pada *ambtennar* B.B. yang mana tidak

[44]

> jijik kalau dia kepaksa menghisap darah bangsanya, dan tidak punya hati kasian sama sekali pada bangsanya yang kepaksa mencari sesuap nasi dengan bersusah payah, yang mana kemudian menjadi makanan, yang mana sudah tidak hampir keluar darahnya kalau dihisap sebab sudah kurus kering..... Lantaran derajatnya yang dianggap sebagai wakilnya orang putih, musuh yang berpengaruh memang besar kuasanya makin si gogol bodoh, itulah makin diharapkan, sebab satu kerbau yang buta bakal tidak mau mengamuk kalau kiranya dihadapkan pada kain merah meskipun banyaknya, kain merah itu lebih dari cukup. Buat menggumpan penjalanya peperintahnya *Bestuur* lebih menyukai si gogol tinggal goblok sebagai kerbau, tidak peduli dia teraniaya, atau ditipu. Lebih bodoh lebih diharapkan, sebab menyiksa dan menganiaya pada kaum sudra itu tidak terhitung dosa.
>
> Sungguh memang banyak priyayi yang tidak ambil pusing, tidak memuji dan tidak mencela akan gerakan anak bumi, tetapi yang kebanyakan akan merandengan akan B.U. umpama satu perkumpulan yang khianat, vereeniging yang murtad yang didirikan kaum bekasakan, yang mana tidak pantas dan tidak patut diadakan sebab menghilangkan dasarnya *"verdeeldheid"* pusakanya leluhur kaum Brahmana. Kita rasa pikiran kolot dan politiek kuno ini tidak harus misi tinggal tetap hingga sekarang ini, yang mana pada sekarang ini perkara yang begitu cuma dianggap menanam bibitnya kebencian saja yang pada kemudian hanya bisa menimbulkan perkara yang kurang baik saja pada antara bangsa dengan bangsa sendiri.
>
> Sekarang mata orang sudah mulai terbuka dan mulai bisa membedakan antara barang hitam dengan putih, hati yang bersih dengan yang jahat, ini orang harus pikirkan baik-baik dan tidak berguna sekali kalau politik peperintahan cara kuno yang menggengam tabiat cidra itu dilanjutkan hingga sekarang ini.[45]

Tulisan tersebut sebagaimana diduga berasal dari redaktur keturunan Tionghoa, sekalipun menggunakan nama Belanda, adalah tulisan yang paling representatif dan juga paling keras, yang terbit sampai pada bulan terakhir tahun 1909, tetapi juga tulisan yang memberanikan para terpelajar Pribumi untuk menyatakan pendapatnya.

Nama Belanda sebagai nama samaran merupakan senjata publikasi yang agak ampuh pada waktu itu, karena bisa menimbulkan efek psikologi yang luas, karena orang bisa menganggap, bahwa yang menulis benar-benar orang Belanda, maka pada satu pihak menimbulkan keseganan pada aparat Pribumi dalam pemerintahan untuk bertindak, sedang pada pihak lain memberanikan Pribumi untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendakinya sendiri. Akan lain efeknya, apabila tulisan tersebut dibubuhi dengan nama Pribumi. Tidaklah mengherankan, apabila tulisan orang yang menamakan diri Toewan Korteling, yang berarti tuan pendek itu, dalam waktu cepat dikutip oleh hampir semua koran berbahasa Indonesia, termasuk juga surat kabar yang sejak berdirinya BU telah menjadi setengah organ BU.

Tulisan yang juga keras dan terbit sebagai sambutan terhadap kelahiran BU adalah buah tangan seorang yang menamakan diri Ahmad Ali Baij, yang diterbitkan pada bulan Februari 1909, yang karena nama yang dipergunakannya, tidak mendapatkan banyak pengaruh sebagaimana halnya tulisan Toewan Korteling. Penulis mendasarkan tulisannya pada artikel *"Succession de Hollande"*, yang diumumkan dalam *"Revue de Paris"*, telah menyoroti sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang bakal datang, sikap Belanda terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya sudah ada di Indonesia, serta bentuk dan

---

[45]

semangat pemerintahan Belanda yang terlampau berat bagi Rakyat, terhadap kemungkinan pemerintahan sendiri bagi Pribumi dsb. dsb.

Berdirinya Budi Utomo memang memberanikan orang tampil kedepan umum untuk menyatakan pandangan politiknya. Hal ini terutama karena telah didapatkannya badan hukum oleh organisasi ini, yang mempunyai derajat yang sama dengan seorang individu Eropa dihadapan hukum. Dan apabila sebelumnya telah dikatakan, bahwa harapan orang terhadap organisasi ini banyak kali berada diluar proporsi ialah karena Budi Utomo sebagai organisasi, sebenarnya belum mampu mengunyah masalah-masalah politik semacam itu.

Sehubungan dengan kelahiran organisasi ini redaktur surat kabar *"Soerabaiasch Handelsblaad"*, van Geuns, memerlukan menginterviu Menteri Jajahan Idenburg yang mendapat keterangan, bahwa Budi Utomo "sekarang ini baru satu rencana saja, artinya belum berbuat sesuatu apapun."

Xxxx xxxx Budi Utomo *xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx* 1909 *xxxx* mengumumkan tulisan seorang yang menamakan dirinya F.F, yang menggugat, bahwa "kekuasaan di Hindia kita ada ditangannya pegawai-pegawai Eropa, sedang aturan, hak dan kewajiban buat orang-orang penduduk ada berlainan. Negeri ada leluasa bikin sesukanya sendiri, segala perkara yang dipikirnya baik atau perlu buat rakyatnya, betul sekali bagaimana kebiasaan di negeri sebelah Timur. Di Hindia Inggris lain rupa sekali. Sesuatu pekerjaan tidak ada larangannya. Hinggapun pekerjaan mengobatin orang, dengan leluasa sembarang orang boleh dijalankan, negeri atau Gouvernement melainkan ada mengurus keperluannya orang banyak dan jaga jalannya keadilan. Begitulah juga maunya kemajuan sekarang. Kekuasaan negara dalam keperluannya orang-orang seboleh-boleh dibikin ringkas. Hatta di Hindia Ollanda bangsa Eropa ada dibawah pemerintahan sendiri, terpisah dari bumiputra, yang diperintah oleh kepala-kepala desa, distrik dll yang harus dari bangsanya juga. Orang Eropa ada mempunyai hukum sendiri dalam perkara civiel dan perkara kejahata, begitupun bumiputra ada mempunyai lain hukum dalam mana adat kebiasaannya ada jadi alasan dan berpengaruh besar."

Comment [M4]: Halaman 86, kalimat paling akhir.

F.S. menggugat adanya diskriminasi hukum, yang pada permulaan abad ke-20 memang sudah mulai banyak digugat, terutama oleh golongan Indo-Eropa, yang juga menderitakan diskriminasi itu. Kaum etis mencoba secara munafik mengatasi diskriminasi rasial ini pada lapisan-lapisan teratas penduduk melalui asosiasi (lihat hlm. 16, 17, 18-19), sedang dibidang hukum hendak dicarikan penyelesaian melalui gagasan "unifikasi".[46] Tetapi semua usaha munafik tersebut hanya suatu kekenesan belaka dari kaum etis.

Sama halnya dengan Toewan Korteling dalam bulan Februari 1909, sekali ini Toewan Krenken menulis dalam *"Bintang Soerabaja"* dibawah judul *"Gouvernement dan Anak Boemi"* sebagai *"Soewaranja Bangsa Seperempat Orang"* menulis, bahwa :

> lebih daripada 300 tahun lamanya pemerintah Ollanda memerintah Hindia kita, begitu lamanya, toh anak bumi tinggal ¼ orang saja, yang wajib kurang berharga daripada sepatunya toko Henderson..... Dulu-dulu, orang Belanda berharap, supaya anak bumi bisa menolong badannya sendiri dengan upa-daya, yaitu mencari kemajuannya sendiri. Harapan itu sampai juga pada masa ini. Maar ..... apa kabar ? apa yang diharapkan tukang cemburuan, sana-sini mencela Budi Utomo, sana-sini mencaci perkumpulan Kasan Muknin enz. enz. Sana-sini khawatir pada anak bumi nanti jadi setara derajatnya dengan bangsa satu orang

[46]

> dengan yutuhan (?) itu. Apa kabar Gouvernement ? cuci-cuci tangan ! diam saja ! tidak turut sana, tidak turut sini seperti bingung apa yang dibuatnya. Apa sebab bingung ? Beruntung sekali anak Gouvernement Belanda mempunyai rakyat Jawa, yang terlalu jinak hati, dan tidak tahu membuat ruginya pemerintah, bilang milliun setahun susu-susu sapi negeri Jawa menjadi gemuknya orang Belanda, sapinya sendiri ngrokok, toh masih nrimo saja panduming Allah. Apa jadinya kalau Gouvernement punya jajahan seperti Filipina ? yang sebentar-sebentar opstand ?[47]

Comment [M5]: Halaman 87, paragraf ke 4.

Dari tulisan tersebut jelas bahwa pengarangnya, sekalipun menggunakan nama Belanda, jelas bukan orang Belanda, dan juga jelas bukan seorang anggota Pangreh Praja. Seorang pegawai pemerintah akan menyebut Gouvernement dengan gelarnya, yaitu : kanjeng. Juga dapat diduga, bahwa penulisnya bukan seorang anggota BU, mengingat dari ekspresinya yang tidak nampak adanya ciri-ciri feodal birokrat. Penulisnya dapat diduga seorang yang berada diluar pemerintahan, dengan pengetahuan tentang sejarah serta mengikuti percaturan dunia. Gayanya menjadi petunjuk, bahwa nasib negeri dan bangsanya menjadi kepentingan dirinya sendiri, sehingga memberikan alasan untuk menduga, bahwa pengarangnya adalah seorang Pribumi.

Demikianlah sejak berdirinya BU mulai diumumkan orang pikiran-pikirannya mengenai nasib negeri dan bangsa, dan yang demikian terus berlangsung sampai melewati dasawarsa pertama abad ke-20 itu, dan kemudian mendapatkan bentuknya dalam rumusan R.M. Sutatmo Surjokusumo sebagai "*Javaansch Nationalisme"*. Istilah ini kemudian dipergunakan terus oleh BU, hampir tak pernah dimelayukan atau dijawakan. Katanya tentang *"Javaansch Nationalisme"* ini :

> Seorang nasionalis adalah seorang egois.
>
> Si-nasionalis ingin melihat batas pemisah yang jelas dari rakyatnya, yang dalam kerja dan ikhtiarnya tinggal dalam batas-batas negeri rakyatnya, harus mengambil sikap terhadap tetangganya yang terdekat, yang banyak menyerupai egoisme. Tapi macam egoisme ini sama sekali tidak jahat atau buruk dalam arti yang biasa dikenakan pada kata ini, yaitu ketamakan pribadi. Sebaliknya ikhtiar egois kaum nasionalis memberikan kemungkinan luas untuk berkorban, *xxxx xxxx* dengan sema*xxx xxxx xxxx xx*sama, *xxxx xxxx xxxx xxxx* is *xxxx* murni akan dihindari dengan sekuat-kuatnya.

Comment [M6]: Halaman 87, kalimat terakhir.

> ..... Sebagai satu bangsa kita dapat melawan penjajah. Tetapi sesudahnya ? Apakah alat pengikat untuk mempersatukan Rakyat Pribumi atau Hindia ? Agama sudah mencoba usaha itu. Islam takkan dapat mengikatkan kita pada orang Sumatera, juga tidak pada orang Ambon atau Manado, yang bukan Islam. Agama sebagai alat pengikat adalah tidak bijaksana, kalau bukan berbahaya.
>
> Semua berikhtiar kesatu tujuan, kearah kehidupan bangsa yang berharga. Insulinde ke arah Rakyat Hindia, Sarekat Islam ke arah Rakyat Pribumi, dan Budi Utomo ke arah Rakyat Jawa. Siapa menggarap ini dengan bijaksana, aku biarkan, tapi siapa menganggap Budi Utomo mengambil sikap dangkal, sebenarnya tidak memperhitungkan adanya pengelompokan-pengelompokan penduduk yang wajar ..... Budi Utomo sebagai perhimpunan kaum terjajah adalah bagian dari Insulinde

---

47

dan Sarekat Islam, tapi Budi Utomo sebagai perhimpunan orang Jawa mempunyai kehidupannya sendiri.

..... Jelaslah, bahwa kewajiban orang Jawa menurut kodratnya sebagai orang Jawa adalah yang pertama-tama, yang kedua dan ketiga berikhtiar mencapai masyarakat kehidupan yang lebh baik sebagaimana dinyatakan Budi Utomo dalam Anggaran Dasarnya, ialah ke arah kehidupan Rakyat yang berharga.

Kenyataan itu saja, bahwa kami bukan orang Tionghoa, Arab atau Eropa, bagi kami adalah bukti terbaik, bahwa kami menghadapi masalah yang harus diperhitungkan. Kita harus sering bertanya pada diri sendiri, mengapa dan buat apa kami justru orang Jawa.[48]

Sekalipun perumusan tentang *"Javaansch Nationalisme"* tersebut berbau pengaruh teosofi Annie Besant – karena sebagaimana model yang berlaku pada waktu itu kaum terpelajar Pribumi suka pada teosofi dan mengikuti Annie Besant dan kemudian hari juga Krishna Murti – yaitu suatu ajaran yang memegang peranan penting dalam mengkapitulasikan mental kaum terpelajar India dalam perlawanannya terhadap imperialisme Inggris, namun perumusan R.M. Sutatmo Surjokusumo tersebut menampilkan kriteria tentang nasionalisme kultur, nasionalimse suku, atau juga nasionalisme etnik, yang kelak akan berkembang menjadi politik fedarlis yang membahayakan gerakan revolusioner.

Perumusan tersebut merupakan sari penglaman selama hampir 9 tahun dalam kehidupan Budi Utomo, dan menjadi pegangan terus, dan hanya mengalami sedikit pencerahan, setelah organisasi ini berfusi dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) pada tahun 1935 kemudian menjadi Parindra. Walaupun perumusan ini dilakukan pada tahun 1917, namun berlaku surut sejak berdirinya Budi Utomo.

Tanggapan terhadap *"Javaansch Nationalisme"* Budi Utomo, baik oleh mereka yang berada diluar maupun di dalam organisasi adalah kurang lengkap dalam memahami masa itu tanpa melengkapinya dengan tanggapan pihak pendukung imperialis.

Bahwa organisasi ini dapat memperoleh badan hukum dari pemerintah kolonial, tidak lain artinya daripada tak adanya kecurigaan pihak imperialis terhadapnya. Sekalipun demikian kaum kapitalis Eropa di Indonesia secara langsung merasa adanya kekuatan sosial baru itu, bahwa kekuasaan dan kewibawaannya terhadap pejabat-pejabat negeri dan buruh-buruh perkebunan bisa terganggu. Surat kabar Semarang, *"De Locomotief"*, dalam terbitan tanggal 19 November 1908, atau satu setengah bulan setelah selesainya Kongres Nasional, merasa perlu memperingatkan telah munculnya tanda-tanda bahaya. Peringatan ini menjadi lantaran bahwa beberapa direktur sekolah lanjutan yaitu *Opleidingschool* dan *Kweekschool*, merasa perlu mengeluarkan peringatan, bahwa siswa-siswanya dilarang menjadi anggota Budi Utomo, atau mereka harus keluar dari sekolah.

"Tjaja Timoer" edisi April 1909 memuat laporan ceramah A.J.H. Eijken dihadapan *Vereeniging van Ambtenaaren bij het Binnenlandsch Besturr* di 's-Graveninge, Nederland, tentang *"De Jong Javaansche Beweging"* atau Gerakan Djawa Muda, bahwa "buat kaum yang diperintah, semua gerakan tentu ada politiknya. Dua-duanya ini tiada pisah satu sama lain". Penceramah mengakui adanya hubungan batin antara berdirinya Budi Utomo dengan kebangkitan Asia seumumnya yang terjadi di Tiongkok, India dan Turki, dan meramalkan, bahwa dengan berdirinya organisasi tersebut gerakan Pribumi akan berkembang lebih cepat

[48]

daripada diduga kebanyakan orang. Dalam penutupnya Eijken menyarankan agar Pribumi dipimpin untuk bisa memerintah negerinya sendiri, membuka kemungkinan agar Hindia menjadi Republik, "dimana bangsa kulit putih dan coklat bekerja bersama-sama, diperintah oleh Nederland dan dihubungkan seperti tidak pakai *xxxx*. Walaupun perbantahan-perbantahan terjadi saat ceramah selesai, tetapi *xxxx xxxx xx*tih terhadap berdirinya Budi Utomo telah mencapai perkembangan tertentu. Adanya Budi Utomo bukan saja menyebabkan orang mulai berpikir tentang Indonesia dengan kemungkinan berpemerintahan sendiri sebagai dominion dengan bentuk republik, tapi terutama sekali bahwa orang mulai berpikir bahwa memang Pribumi sudah mulai bergerak.

Comment [M7]: Halaman 88, paragraf terakhir.

Ceramah Eijken meninggalkan pengaruh yang mendalam pada Budi Utomo. Kemungkinan pemerintahan sendiri mulai mendapatkan perhatian, sehingga persoalan organisasi bukan tinggal berkisar-kisar pada edukasi dan peningkatan mutu pengetahuan para priyayi, tetapi telah membuka prospek politik, sedang penamaan *"De Jong Javaansche Begewing"* akhirnya pun diambil oleh Budi Utomo untuk nama lain daripada organisasinya.

Menteri Jajahan Idenburg sejak berdirinya organisasi ini telah menyatakan persetujuannya sebagaimana disampaikannya dalam interviu dengan redaktur *"Soerabaiaasch Handelsblad"*. Beberapa bulan setelah interviu itu ia meletakkan jabatan sebagai Menteri Jajahan karena diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Dalam jabatannya ia banyak mendengarkan permintaan dan saran-sarannya, sehingga oleh organisasi-organisasi lain ia dinamai "anak-mas" imperialisme Belanda. Sikap lunak Idenburg ini, sekalipun Sindikat Gula telah merasa khawatir akan adanya organisasi, didasarkan pada faktor-faktor obyektif – sebagaimana dikatakannya sendiri – tetapi untung sekali Budi Utomo masih tergantung pada rupa-rupa hal, dan pertama-tama pada kondisi para pemimpinnya.

Pemerintahan sendiri yang dikedepankan oleh Eijken, sekalipun dalam ceramah itu sendiri tidak mendapatkan perhatian sewajarnya, nyatanya bergaung dalam hati banyak orang Belanda pada waktu itu. Salah satu contoh yang tipikal adalah tulisan Mr. Thomas dalam majalah *"Jong Indie"* yang menanggapi tentang berdirinya Budi Utomo, dimana ia menyatakan, bahwa "selama Hindia tiada mempunyai pemerintahan sendiri, maka tak boleh Hindia dengan cepat akan maju sebagaimana patutnya". Dengan kata-katanya itu Thomas mencoba menerangkan, bahwa kemajuan-kemajuan di Indonesia tidak bisa diharapkan sebelum Indonesia mendapatkan pemerintahan sendiri, atau merdeka. Hanya kemerdekaanlah syarat kemajuan itu. Ia mengambil Jepang sebagai contoh, yang justru karena memiliki kemerdekaannya serta menggunakannya dengan sebaik-baiknya telah menjadi maju, sedang kemajuan-kemajuannya betul-betul mengherankan seluruh dunia. Berdasarkan kenyataan ini akhirnya ia menyarankan, agar Nederland memberikan pemerintahan sendiri sebagaimana yang telah "dipikirkan oleh pemerintah Nederland sendiri" yang dua macam jalannya, yaitu :

i. Tanah Hindia dilepaskan sama sekali dari kekuasaan Nederland sebagai Amerika melepaskan Tanah Cuba, atau
ii. Tanah Hindia diberi pemerintahan sendiri sebagai Tanah Australia pada orang-orang Inggris hingga orang Australia "harus atur segala hal dalam negerinya dan dalam pada itupun Australia patut menyokong uang belanja kapal-kapal perang Inggris yang menjaga Tanah itu sejumlah beberapa ribu rupiah setiap tahun".

Akhirnya Thomas mengakhiri tulisannya dengan pertanyaan, karena toh pemerintahan sendiri telah memikirkan kemungkinan itu : "Kapankan kemerdekaan Hindia itu diakui ?"

Tetapi apabila pada masa itu orang bicara tentang "Tanah Hindia" atau Indie, maka pemerintahan sendiri "Tanah Hindia" tidak mesti diartikan sebagai pemerintahan yang

dilakukan oleh kaum atau bangsa Pribumi, karena bisa jadi pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang dipegang oleh golongan Eropa penetap atau Indo Belanda, sebagaimana terjadi di Amerika Latin, Selandia, Afrika Selatan, Australia. Malahan kemungkinan semacam ini pernah juga dibayangkan oleh E.F.E. Douwes Dekker yang mengatakan, bahwa "jikalau Nederland berani dan mau ..... asal pertolongan itu menuju kepada perhubungan Nederland dan Hindia yang merdeka satu dari yang lain, tetapi keduanya menghormati satu pada yang lain ....." dan dengan demikian "seperti dilakukan pada republik-republik kecil di Zuid Afrika (bangsa Boer) hingga bangsa sarekat Boer itu sampai tak bisa dikalahkan oleh suatu tindakan yang amat hebat".[49]

Bangsa Boer yang ditampilkan Douwes Dekker tidak lain daripada bangsa Belanda yang bermigrasi ke Afrika Selatan, atau bangsa Afro Belanda – kemudian menamakan diri sebagai bangsa Afrikan – jadi bukan bangsa Pribumi Afrika. Sukses bangsa Afrikan ini banyak menimbulkan ilusi pada kalangan Indo Belanda di Indonesia tentang kemerdekaan "Tanah Hindia". Itu pula yang mungkin menjadi maksud Mr. Thomas.

Suara-suara tentang "pemerintahan sendiri", "kebebasan dari Nederland", bahkan juga "kemiliteran sendiri" ini kelak mendorong Budi Utomo dibawah pejabat Presiden Dwidjosewojo mengambil inisiatif-inisiatif penuh ambisi untuk memohon parlemen serta milisi untuk menghadapi Perang Dunia ke-2, sehingga mengakibatkan bentrokan yang pertama kali terjadi secara terbuka antara Budi Utomo dengan gerakan revolusioner dalam hubungan dengan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*). Mendengar dan mengunyah suara-suara tersebut lah yang menyebabkan Budi Utomo dari organisasi sosial kultur menjadi partai politik pada tahun 1915.

Harapan dan tanggapan diluar organisasi nampaknya jauh lebih serius daripada apa yang dapat dikerjakan dan dipikirkan oleh Budi Utomo sendiri. Ini pula sebabnya mengapa para peninjau yang mengikuti perkembangannya sejak berdirinya, atau sejak organisasi ini berumur setahun, telah menjadi kecewa, karena selama 3 tahun lamanya ternyata tiada sesuatu yang penting yang dikerjakannya, dan kemudian telah tersusul oleh lahirnya organisasi modern (pertama-tama) ini telah memberikan dorongan moril bagi lahirnya organisasi-organisasi lain sesuai dengan kebutuhan sosial yang berlaku, dan dengan demikian membuka babak baru dalam sejarah nasional dalam mana bangsa Indonesia mulai mengorganisasi diri secara demokratik.

10. TAHUN 1908-1909 SEBAGAI PERMULAAN KEBANGKITAN

Tahun 1908-1909 merupakan permulaan kebangkitan yang sangat penting dalam sejarah modern Indonesia. Pada waktu setahun itu telah berdiri puluhan Cabang, yang menyisihkan atau melebur organisasi kecil-mengecil yang sangat setempat sifat dan landasannya, tertelan oleh raksasa yang baru muncul.

Rahasia permunculan Budi Utomo yang luar biasa mengesani serta luar biasa pesatnya itu, disamping bangsa Indonesia memang telah sampai waktunya untuk berorganisasi, ialah karena pendiriannya di Jakarta dilakukan ditengah-tengah suatu masyarakat terkurung dengan pemuda-pemuda yang secara tradisional memang suka menulis di surat kabar. Sementara itu Cabang Yogya, yang dipresideni oleh Wahidin Sudirohusodo, sebelum berdiri pun telah mempunyai pers sebagai media sosial, yakni *"Retno Dhoemilah".* Acuan historis ini, yakni perpaduan antara perjuangan nasional dengan kegiatan pers, yang dimulai oleh Budi Utomo, untuk seterusnya akan berlaku dalam gerakan nasional.

---

[49]

Dalam bulan Agustus 1909, Dewan Pimpinan Pusat BU di Yogyakarta telah memutuskan untuk mengadakan Kongres Nasionalnya yang kedua. Sebagaimana halnya pada Kongres-I, waktunya dicocokkan dengan liburan sekolah, untuk memberikan kesempatan terutama pada kaum pelajar dari sekolah lanjutan dan para siswa Sekolah Dokter untuk dapat ikut menghadiri. Kongres akan diadakan pada bulan Oktober.

Adalah menarik untuk mengetahui bagaimana organisasi modern (pertama-tama) ini menggalang organisasi. Dalam bulan Agustus 1909 Dewan Pimpinan Pusat telah menyebarkan pemberitahuan dan undangan pada Cabang-Cabang diseluruh Jawa dan Madura, serta juga kepada perseorangan yang berminat diseluruh Jawa dan Madura pula. Undangan yang bertanggal 5 Oktober itu berbunyi sebagai berikut :

> Atas nama *Hoofd Bestuur* Budi Utomo, maka yang tertanda tangan dibawah ini dengan segaa hormat unjuk bertahu :
>
> I. Kepada orang besar-besar, baik bangsa Belanda, baik bangsa Bumiputra di Tanah Jawa dan Madura,
> II. Kepada tuan-tuan dan priyayi-priyayi dan lainnya di bawah Hindia Nederland, yang memperhatikan hal Budi Utomo, dan
> III. Kepada Bestuur segala perkumpulan di Hindia Nederland yang serupa Budi Utomo akan tetapi bukan Cabangnya,
>
> Bahwa Hoofd Bestuur itu mengharap sekali akan hadirnya orang besar-besar, tuan-tuan, priyayi-priyayi, Bestuur-Bestuur dan lainnya itu pada 2e Kongres Budi Utomo, yang akan kejadian pada tanggal 18 ini bulan (dan seterusnya lama-lamanya sehingga 4 hari) di rumah Malija Bara (*Loge Bouw*) di kota Yogyakarta ; perkumpulan mulai dibuka jam 9 sore.
>
> Kemudian maka *Hoofd Bestuur* itu dengan segala hormat mohon maaf dari keberaniannya mempersilahkan itu ; hanya pada halaman surat kabar sahaja, sebab temponya sudah terlalu terburu adanya.[50]

Undangan kepada umum tersebut ditandatangani oleh Sekretaris ke-2, Sosrosugondo.

Kongres ini oleh organisasi dianggap penting, terutama karena banyak terdapat Cabang, yang menolak subordinasi organisasi didasarkan atas kenyataan adanya peraturan, bahwa Cabang harus menyerahkan 75% dari iuran yang diterimanya dari para anggotanya. Dalam Kongres ke-II terpaksa diputuskan bahwa iuran Cabang untuk selanjutnya diturunkan menjadi 10%. Di dalam Kongres-II ini pula dilaporkan tentang keluarnya dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat, yang menerbitkan banyak sesalan para hadirin, karena mereka adalah tokoh-tokoh pertama-tama Budi Utomo yang paling giat memajukan organisasi ini. Dalam Kongres ini juga dilaporkan berdirinya Cabang-cabang baru, sehingga jumlah Cabang telah meningkat menjadi 17.

Kongres juga memutuskan untuk menarik para santri agar mau menjadi anggota BU, sedang cara yang diusulkan ialah dengan jalan mendirikan masjid di Jakarta, karena justru di kota, yang dianggap paling banyak penduduknya yang terpelajar ini, paling kurang perhatian orang pada BU.

Penilaian atas pengalaman organisasi dalam setahun yang telah lewat telah memunculkan perumusan, bahwa “sekarang ini bangsa-bangsa di dunia berlomba-lomba

---

50

dalam kemajuan internasional", tetapi dalam perlombaan ini "orang Jawa boleh diumpamakan kuda balapan yang sakit, mustahil bisanya datang diwates". Tapi sampai sebegitu jauh masih tetap tidak diadakan peninjauan bagaimana jalan untuk mengubah situasi dan kondisi "kuda balapan yang sakit" itu, dan juga tidak dihasilkan sesuatu sikap terhadap imperialisme-kolonialisme yang menyebabkan si kuda itu sakit.

Adalah tidak kurang pentingnya untuk mengetahui suasana Kongres Nasional-II BU yang menghasilkan keputusan-keputusan dan penyimpulan-pengalaman tersebut. Hal itu dapat diikuti dari kutipan dibawah ini :

> Maka terdapatlah pemandangan yang permai, bagi orang-orang yang masuk dalam tempat vergadering itu. Pada meja-meja yang diatur seperti bulan setengah (*halve maan*), adalah duduk *Leden Hoofd Bestuur* dan wakil-wakil Cabang BU serta pjmk. Regent Karanganyar, menjadi President, duduk ditengah-tengah. Pada sebelah kanannya adalah duduk dokter Jawa pensiun, M. Wahidin, yang pada tahun dulu sudah membuka kongres, dan pada sebelah kirinya duduklah Secretaris; semuanya berpakaian cara Jawa
>
> Di dalam *zaal vergadering* ada bangsa berjenis rupa. Di muka dua baris bangsa Eropa, dimana paduka tuan *Inspecteur Inl. Onderwijs* ada hadir. Diantara tuan-tuan inilah ada beberapa orang Jawa bangsawan yang berpakaian cara Eropa. Dibelakang dua baris itu terdapat bangsa anak negeri dan bangsa Cina dan asing, yang berjenis-jenis pakaiannya. Ada orang Jawa berpakaian cara Jawa, ada yang pakaian putih pakai topi cara Eropa. Juga ada banyak perempuan-perempuan Bumiputra dengan anak-anaknya serta di belakang sendiri ada beberapa haji, yang mana yang seorang pakai handuk dikepalanya.
>
> Pada sebelah kanan kiri mejanya *Bestuur*, disediakan meja buat pers.
>
> Setelah pt. Kandjeng Regent Karanganyar berdiri akan buka bicara maka dalam zaal itu diamlah. Paduka yang mulia bersabda dengan banyak terima kasih bagi datangnya tuan-tuang yang sama hadir.....[51]

Ada yang tidak terulang dalam Kongres-II tersebut, ialah pertarungan asas antara Angkatan Muda lawan Angkatan Tua, karena sayap kiri yang dipimpin oleh Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat telah keluar dari organisasi.

Kongres-II ini tidak menghasilkan resolusi-resolusi yang mengubah jalannya sejarah. Keputusan-keputusan lebih banyak berhubungan dengan pembangunan organisasi dan penyimpulan dari pengalaman-pengalaman yang telah lewat serta usaha-usaha untuk mengkonsolidasikan diri. Dalam program kerja ditempatkan sebagai garapan terutama adalah edukasi, serta menaruh perhatian yang mendalam akan mempelajari saran-saran Notosuroto pendiri *Indische Verreniging* di Nederland, yang diumumkan dalam *"Bataviaasch Nieuwsblad"*. Sebaliknya daripada itu saran-saran Tirto Adhisurjo dibidang pengajaran, yang juga mendapat dukungan dari kawan seperjuangannya, Gunawan, bahwa edukasi tidak menjamin tercapainya kemajuan, tidak pernah mendapat perhatian. Saran ini pada pokoknya *xxxx*, *xxxx xxxx xxxx xxxx* saran yang diterima serta dianggap *"intelectueel"* di mata orang putih, bila hasil pengajaran itu cuma dipergunakan untuk dirinya sendiri, dan hanya untuk mencapai pangkat tinggi buat diri sendiri pula, maka tiada kemajuan sesuatupun yang telah terjadi, apapula untuk bangsanya. Setiap keterpelajaran harus diabdikan kepada bangsanya.

Comment [M8]: Halaman 91, paragraf akhir.

51

Saran selanjutnya ialah, bahwa semakin si terpelajar itu menggabungkan diri dengan bangsanya dari lapisan yang terbawah, bertambah ia memajukan bangsanya.

Saran-saran dari seorang tokoh terkemuka zamannya, seorang tokoh yang mempunyai kewaspadaan nasional yang cukup tinggi untuk masa itu, yang ternyata tidak mendapat perhatian sewajarnya, menjadi salah satu sebab mengapa ia sendiri tidak menggabungkan diri dengan BU, dan sebaliknya proses BU dalam melaksanakan program edukasi berdasarkan keputusan Kongres Nasional-II, yang tidak mengindahkan tujuan politik daripada edukasi, dan hanya mengekor program kolonial, dengan cepat menyebabkan BU menjadi pembantu yang tidak langsung dari pemerintah kolonial. Itu pula sebabnya pemerintah kolonial dengan tidak segan-segan telah memberikan subsidi dalam jumlah-jumlah yang besar pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh BU. Keadaan seperti ini berkembang terus sampai dalam tahun-tahun permulaan dasawarsa ketiga, justru pada waktu pemerintah kolonial hendak menyapu bersih semua sekolah nasional, yang pada masa itu menjadi benteng terakhir dari gerakan revolusioner.

11. PENGARUH KEBANGKITAN NASIONAL DALAM KEHIDUPAN PERS PRIBUMI

Kegiatan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan muncul diberbagai kota, bahkan dikecamatan dan desa-desa karena adanya Budi Utomo, ialah membanjirnya laporan-laporan kepada pers, ditambah lagi dengan organisasi serupa yang juga membutuhkan publikasi, *"Java Bode"* dalam tahun 1909 sampai-sampai merasa perlu membuat ulasan tentang kehidupan pers Pribumi dan Tionghoa, yang mulai tumbuh sebagai jamur di musim hujan.

Dengan timbulnya organisasi-organisasi sebagai masalah baru dalam pemberitaan, pers Pribumi dan Tionghoa, menurut penilaian *"Java Bode"* tidak lagi menimbulkan "kecengengan", dan bahwa "surat kabar-surat kabar yang mengutip surat kabar-surat kabar Ollanda, pada masa ini boleh dibilang sudah tidak ada, tetapi mereka itu memakai pendapatnya sendiri". Selanjutnya dikatakannya, bahwa "Pribumi sudah berdiam diri sekian lama, tetapi sekarang sudah mulai nampak hasrat hendak maju, dan pers putih sudah berteriak panjang lebar. Oleh karena itu maka sekarang pers Melayu sudah diindahkan oleh pers Belanda". Untuk melayani perkembangan itu majalah *"Koloniaal Weekblad"* merasa perlu membuka 2 ruangan buat pers Melayu yang dikendalikan oleh orang-orang Pribumi dan pers Melayu yang dikendalikan oleh orang-orang keturunan Tionghoa.

Dari Nederland, R.M. Notosuroto mencoba memberikan penilaian atas perkembangan pers Pribumi ini, yang diumumkan di dalam *"Nieuwe Rotterdamsche Courant"* tertanggal 13 Juli 1909, bahwa "pers Melayu sudah meriah. Kalau mereka itu menulis hal pemerintahan, kiranya ada bermaksud baik, tetapi alasan-alasan yang diambilnya masih dilakukan secara terburu-buru dan karenanya belum sempurna. Dalam pada itu masih dipergunakan caci maki, perkataan mana tidak disukai oleh orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda menjadi melecehkannya dan tidak suka membacanya".

Sebenarnya penilaian Notosuroto adalah tidak tepat dan tidak adil, karena justru pers putih yang dipimpin oleh orang-orang putih – Indo maupun totok – yang murah sekali menghamburkan caci maki. Dan menambahi penilaian ini E.F.E. Douwes Dekker mengatakan dalam *"Bataviaasch Nieuwsblad"*, bahwa "belum ada anak Hindia yang bisa jadi jurnalis". Terhadap penilaian ini Tirto Adhisurjo, yang merasa tersinggung prestasinya, merasa perlu untuk membantah, bahwa "dalam hal kepandaian, *journalist-journalist* Melayu tidak perlu lagi sebagai *journalist-journalist* Ollanda, tetapi paling perlu yaitu yang kedua pers itu bisa

rapat bertukar pendapatan”. Sedang pengaruh penilaian Douwes Dekker itu bekerja sedemikian dalamnya pada Budi Utomo, sehingga untuk melaksanakan maksud menerbitkan organ sendiri – yaitu sebuah harian *“Boedi Oetomo”* – Budi Utomo terpaksa meminta kepadanya untuk menjadi redaktur kepala.

Maksud Budi Utomo untuk menerbitkan organ sendiri dinyatakan dalam bulan Juni 1909, kemudian disiarkan juga oleh *“Bintang Soerabaja”* dan *“Retno Dhoemilah”*. Alasan penerbitan organ sendiri ialah karena *“Retno Dhoemilah”*, yang selama beberapa bulan setelah berdirinya terlalu banyak menyiarkan berita-berita BU, sehingga secara tidak resmi dapat dikatakan seratus persen organ Budi Utomo. Dan hal ini menimbulkan perasaan kurang senang pada direksi *“Retno Dhoemilah”*, yang tugasnya justru melayani kapital gula di daerah swapraja Yogyakarta, sedang Sindikat Gula jelas tidak menyukai adanya organisasi Pribumi berbentuk apapun.

Dalam bulan Juli 1909 diumumkan rencana oleh Dewan Pimpinan BU untuk mendirikan sebuah Nv (*Naamloze vennootschap*), sebagaimana telah dirintis oleh Nv. *“Medan Prijaji”* di Bandung. BU bermaksud menyediakan kapital sebesar *ƒ*30.000,- untuk keperluan itu, yang terbagi atas 3.000 saham dari *ƒ*10,- sedang bahasa yang akan dipergunakan adalah Melayu dan Belanda, tetapi bila perlu orangpun boleh menulis dalam bahasa daerahnya masing-masing. Akan bertindak sebagai direktur adalah dokter Wahidin Sudirohusodo yang didampingi oleh dua orang komisaris, yaitu Dwidjosewojo dan Sosrosugondo.

Nampaknya persiapan-persiapan menerbitkan harian ini tidak berhasil, sekalipun Yogya adalah salah sebuah pusat kegiatan borjuasi Pribumi, dan diantara para borjuis Pribumi itu banyak juga yang bersimpati pada Organisasi ini. Atau mungkin juga telah terjadi perselisihan pendapat tentang apa sesungguhnya yang lebih urgen telah diterbitkan. Akhirnya yang diterbitkan adalah majalah *“Goeroe Desa”*. Tetapi diluar dugaan malahan BU Cabang Semarang yang menerbitkan mingguan *“Boedi Oetomo”*, yang dipimpin oleh R. Pramu dan R. Tirtodanudjo, seorang yang kelak menjadi publisis penting Sarekat Islam. Harian *“Boedi Oetomo”* ini terbit baru pada tahun 1920. Karena publikasi organisasi tak mungkin dapat disiarkan didalam majalah vak seperti *“Goeroe Desa”* itu, BU menggunakan cara-cara yang lama, yaitu “mendompleng” pada surat kabar *“Darmokondo”* sampai 1917, surat kabar *“Medan Boediman”* sampai tahun 1916, dan baru pada tanggal 15 November 1916 menerbitkan organnya sendiri, sebuah majalah *“Boedi Oetomo”*, yang diterbitkan di Yogyakarta, yang berturut-turut dipimpin oleh R. Sutoro, R.M. Surjopranoto, dan M. Ng. W. Dwijosewojo. Majalah *“Boedi Oetomo”* ini akhirnya terpaksa diterbitkan juga, karena pada waktu Nederland berada dalam kesulitan Perang Dunia ke-II, Budi Utomo merasa perlu untuk menyatakan kesetiaannya dimasa duka pada Nederland, dan dengan demikian pada tahun 1915 mulai membentuk dirinya menjadi partai politik, sebagai *follow-up* dari realisasi resolusi-resolusinya dalam Kongresnya di Bandung pada tahun yang sama (lihat dalam Bagian Ketiga).

Pada waktu Dewan Pimpinan Pusat BU masih ragu-ragu tentang siapa-siapa yang sepatutnya duduk didalam redaksi – maksudnya siapa-siapa adalah wartawan-wartawan Belanda yang bisa diterima oleh Budi Utomo, karena “pekerjaan *hoofdredactie* akan dipangku oleh seorang tuan, yang suka menyebelah pada segala bumiputra didalam segala perkara yang memang adil” ..... “tapi itu tuan pada masa ini masih menjadi redaktur dari salah satu surat kabar Ollanda di Jawa sini” – yang dimaksudkannya adalah E.F.E. Douwes Dekker – maka disebuah kota kecil, Rangkasbitung, terbitlah sebuah tengah bulanan *“Soeling Hindia”*, yang

menggunakan bahasa Melayu dan Sunda, sedang pada tahun itu juga, dr. M. Bunjamin tanpa banyak bimbang telah menerbitkan sebuah majalah berbahasa Belanda dan Jawa.

Pers Pribumi pada waktu ini sedang naik gengsinya, sebagaimana diakui juga oleh *"Jawa Bode"*. Hal ini disebabkan karena kemenangan Tirto Adhisurjo dalam perkara *delict*, akibat gugatan *aspirant controleur* Purworejo, sebuah perkara *delict* yang melibatkan pers Pribumi dengan seorang pejabat negeri bangsa Eropa. Dalam perkara ini untuk pertama kali pers Indonesia keluar sebagai pemenang (1909) dalam menghadapi seorang pejabat Eropa, dan berakibat tergulingnya *aspirant controleur* tersebut. Tidak mengherankan apabila peristiwa ini menjadi isu nasional yang terpenting sampai waktu itu dalam sejarah pers Indonesia. Baik pers putih maupun Pribumi ataupun Tionghoa hampir-hampir menganggap peristiwa ini sebagai suatu keajaiban.

Kemenangan Tirto Adhisurjo dengan *"Medan Prijaji"*nya juga telah menerbitkan berbagai penilaian. *"Sinar Borneo"* menyatakan dalam hubungan ini, bahwa "pers Melayu bisa akan menimbulkan perkara-perkara, yang keluar dari anak negeri, perkara mana tadinya seperti tertutup, yaitu hal kurang terima dan sebagainya". Sedang kemenangan ini menyebabkan *"Medan Prijaji"* menerbitkan majalah baru, khusus tentang hukum, yaitu *"Soeloeh Keadilan"*, dan sebuah majalah wanita Pribumi pertama-tama dengan nama *"Poetri Hindia"*, yang dipimpin oleh Raden Aju Hairani Hendraningrat, dan diredaksii antara lain oleh dua orang istri Tirto Adhisurjo sendiri, yaitu Puteri Fatimah, yaitu puteri Sultan Batjan, dan Siti Habibah. Ketiga-tiga wanita tersebut adalah redaktris Indonesia pertama-tama dalam sejarah pers nasional.

Tahun 1909 adalah tahun membiaknya pers Pribumi. Belum pernah sebelumnya terjadi pembiakan yang sedemikian pesat. Pada tahun itu telah terbit surat kabar *"Sinar Djawa"*, Semarang, yang diterbitkan oleh Ien Boe Kongsi, surat kabar yang kelak sangat berpengaruh dalam kehidupan politik, setelah mengalami berbagai kelak sangat berpengaruh dalam kehidupan politik, setelah mengalami berbagai kelak sangat berpengaruh dalam kehidupan politik, setelah mengalami berbagai pertukaran nama. Di Surabaya terbit surat kabar baru *"Soerat Chabar Bahasa Melajoe"*, disamping 4 buah surat kabar Belanda. Dalam tahun itu juga terbit untuk pertama kali dalam sejarah pers majalah khusus untuk pelajar-pelajar sekolah lanjutan yang bernama *"Soeloeh Peladjar"*. Persatuan Katholik, yang berdiri pada tahun itu juga di Manado, telah menerbitkan majalah *"Soeara Katholiek"*, sedang di Jakarta terbit mingguan *"Boemi Poetra"* dibawah pimpinan Sutan Mohamad Salim, pensiunan *Hoofddjaksa Riauw*, yang tidak lain dari ayah orang yang kelak terkenal sebagai Haji Agus Salim. Di Bukittinggi terbit majalah *"Tijdschrift Minangkabau Vereeniging van Inlandsche Ambtenaren ter Soematra's Westkust"*, organ dari perkumpulan para pegawai negeri di Sumatera Barat, dan sebuah organisasi yang didirikan mengikuti jejak Budi Utomo.

Bagaimana nasib organ Budi Utomo sendiri yang begitu banyak diributkan itu ? Sebagaimana diketahui, orang yang dicalonkan memegang jabatan kepala redaksi adalah E.F.E. Douwes Dekker diserangnya dalam *"Bataviaasch Nieuwsblad"*, sehingga merasa nama baiknya dirugikan dan mencabut sama sekali janjinya. Akibatnya organ tersebut tak kunjung terbit sampai 7 tahun kemudian. Sementara itu Douwes Dekker pun bukan hanya telah mendirikan partai politik sendiri, juga telah dibuang ke Nederland bersama dua orang bekas pelopor Budi Utomo : Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat.

12. TENTANG EKONOMI

Dalam penjajahan sekitar awal abad ke-20, umumnya yang langsung dirasakan oleh Rakyat adalah pukulan ekonomi dari perusahaan-perusahaan swasta raksasa, pedagang-

pedagang menengah dan kecil non-Nusantara dan Pribumi, dan terutama sekali lintah darat serta pengijon yang luar biasa rakus dan keji. Penghisapan yang mendalam terjadi baik di kota maupun di desa, tetapi terasa lebih berat di desa dimana sumber penghasilan hanya berkisar pada pertanian serta yang bertalian dengan itu. Kaum terpelajar, yang sinonim dengan kaum yang telah "jauh dari Rakyat" tidak suka tinggal di desa. Mereka lebih suka tinggal di kota sambil menunggu keuntungan-keuntungan pribadi. Tetapi juga di kota-kotalah para terpelajar – yang juga jauh dari Rakyat itu – dalam usahanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi telah meniru cara-cara yang pada waktu itu sedang-sedangnya dipropaganda di duia Barat, yakni : kooperasi. Juga koperasi-koperasi yang kemudian timbul di Indonesia meniru pandangan dunia Barat, yaitu sebagai suatu cara untuk tinggal hidup secara kolektif dalam masyarakat yang terhisap oleh kapitalisme tanpa melawan kapitalisme itu sendiri, tetapi hanya memperdekat jarak antara produsen dengan konsumen untuk menghemat harga pokok dengan beberapa prosen. Koperasi yang demikian barang tentu tidak sama bentuk dan jiwanya daripada kooperasi penduduk golongan Tionghoa yang berwatak berjuang, dan setiap waktu dapat menjadi senjata untuk menghadapi lawan-lawannya.

Menjelang abad ke-20 telah mulai banyak timbul koperasi Pribumi, biasanya menggunakan awal nama *"Eka"*. Salah sebuah yang tercatat dalam sejarah ialah koperasi *"Mardi Kaskaja"* di Yogyakarta, yang didirikan oleh Surjopranoto pada tahun 1900. Justru karena usaha-usahanya untuk membangkitkan Rakyat daerah Yogya, diantaranya mendirikan koperasi tersebut, oleh Asisten Residen ia diusahakan betul-betul agar dapat dikeluarkan dari dari daerah Yogya, karena gerakan tanpa nama yang dipimpinnya makin lama makin mengambil bentuk pembangunan organisasi kekuatan. Ini dilakukannya setelah ia lulus *"kleinambtenaar-Examen"* ia menjabat sebagai juru tulis pada kantor Gubernur. Organisasi kekuatan ini melakukan perkelahian, yang tidak terbatas di Yogya saja, dan sebagai seorang yang mempunyai forum privilegiatum ia akan terus terbebas dari perkara kepolisian (lihat pokok "Forum Privilegiatum" dalam Bagian Ketiga). Hal ini menyebabkan orang berusaha membuangnya dari Yogya dan dipekerjakan pada kantor Kontrolir di Gresik.

Surjopranoto adalah anak pertama Pangeran Surjaningrat, sedang yang belakangan ini adalah putra sulung Sri Paku Alam ke-III. Ia dilahirkan pada tahun 1871 di Yogyakarta. Setelah menamatkan sekolah rendah kelas-I, menempuh ujian *Klein-Ambtenaar-Examen*, bekerja sebagai juru tulis di Yogya dan Gresik, kemudian karena sepak terjangnya yang tidak disukai oleh pemerintah daerah dibuang ke Bogor dengan alasan melanjutkan sekolah di *Landbouwschool*. Beberapa kali sebelum berdirinya Budi Utomo ia mencoba mempersatukan para pelajar sekolah lanjutan tetapi belum pernah berhasil dapat mempersatukannya. Kampanye persatuan itupun dilakukannya di Sekolah Dokter Jawa, pun tanpa hasil.

Suatu kombinasi daripada kekuatan fisik dan organisasi kerakyatan – suatu kecenderungan yang selalu ada padanya – memimpin ia mendirikan *Arbeidsleger* (pasukan kerja) Adhi Dharma pada tahun 1915 yang bertujuan melakukan perjuangan dibidang sosial ekonomi. Organisasi yang disusun bertingkat secara militer ini bermaksud mencapai perbaikan di bidang sosial ekonomi bagi Rakyat kecil secara cepat dan militan. Tetapi masa untuk itu belum sampai.

Di zaman kebangkitan nasional perekonomian Pribumi di Jawa dan Madura telah amat merosot terkecuali di daerah-daerah swapraja. Walaupun di zaman-zaman yang silam leluhurnya adalah pelaut-pelaut yang ulung – artinya pedagang-pedagang yang sangat berpengalaman dalam perdagangan internasional – namun semasa hidupnya Budi Utomo telah sampai pada puncak kemerosotannya. Leluhurnya itu telah terdesak dari laut ke darat menjadi petani belaka, sampai-sampai seorang anggota *Mindere Welvaart Commisse*, J.H.

London, yang juga sep *Firma Maclaine Watson* menyatakan (1909) bahwa ia sudah enggan mempergunakan tenaga Pribumi sekalipun hanya untuk perantara dalam perdagangan hasil bumi. Rouffaer menduga bahwa Pribumi memang sedang dalam zaman surutnya, bukan hanya dalam perdagangan saja, tetapi juga dalam banyak hal. Diluar daerah-daerah swapraja di Jawa dan Madura pada waktu itu hanya orang-orang yang berasal dari pulau Bawean saja yang menunjukkan kemampuan untuk berdagang, dan hal ini dianggap keluarbiasaan serta diduga bahwa sebabnya tidak lain karena pulau Bawean bukanlah daerah subur untuk pertanian, karenanya tak ada jalan lain bagi penduduk yang ingin maju daripada berdagang.

Menurut laporan *Commissie* tersebut, bahwa dari 31 *Afdeeling* di Jawa dan Madura pada tahun 1909, keadaannya adalah tinggal demikian. Dalam 4 *Afdeeling* diantaranya jumlah petani meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah tukang. Dalam 13 *Afdeeling* diantaranya tidak terdapatkan perubahan dalam perbandingan antara jumlah petani dan tukang. Dalam 17 *Afdeeling* ternyata jumlah tukang meningkat dibandingkan dengan petani. Dalam perniagaan kecil laporan itu menyebutkan, bahwa dalam 43 *Afdeeling* dinyatakan terdapat kemajuan, tetapi dalam 9 *Afdeeling* perniagaan semacam itu dinyatakan mundur. Sedang naiknya pendpatan negeri yang berasal dari pajak faal atau pajak penghasilan diperoleh dari pajak transport tukang gerobak, yang menghubungkan desa dengan kota. Ini tidak lain artinya daripada semakin meningkatnya kebutuhan petani akan uang kontan dan tidak tepat bila dikatakan disebabkan meningkatnya kemakmuran Rakyat.

Perniagaan pada umumnya dapat dilihat dari imbangan impor dan ekspor untuk Jawa dan Madura pada tahun 1907, ialah ƒ135.000.000, sedang pada tahun 1891 hanya ƒ103.000.000. Ekspor kopra, kapuk, kapas, tapioka, beras dsb pada tahun 1903 adalah seharga ƒ12.000.000, sedang pada tahun 1907 seharga ƒ29.000.000. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan perniagaan yang sangat besar, tetapi tidak berarti bahwa perniagaan Rakyat yang maju, apapula penghasilan petani. Lebih tepat bila dikatakan, bahwa yang memajukan perniagaan itu adalah kegiatan tengkulak kecil, dan bukan disebabkan naiknya produksi pertanian, sekalipun menurut laporan *Kamer van Koophandel* (Dewan Perniagaan) di Surabaya dalam tahun 1908 telah diekspor sebanyak 230.000 pikul jagung sedang dalam tahun 1907 cuma 60.000 pikul, (Jagung diekspor ke Nederland, Jerman, Australia dan Tiongkok)

Dalam pada itu dalam laporan *Commissie* tersebut dikatakan juga, bahwa walaupun "perniagaan maju" namun diberbagai, bahkan dibanyak tempat, orang masih berniaga secara tukar-menukar barang. Dengan sendirinya perniagaan demikian tidak menghasilkan angka-angka yang bisa dicatat.

Apa yang terjadi di Jawa dan Madura sangat berlainan daripada di daerah-daerah diluarnya. Mengikuti jejak perkebunan-perkebunan asing, di Sumatera Barat, dan dimulai dari Kota Gadang, orang mulai mendirikan maskapai-maskapai perkebunan kecil-kecilan dengan modal antara ƒ1000,- sampai ƒ2.000,- Diantara maskapai pelopor di Sumatera Barat adalah "Perserikatan Setia".

Pada waktu yang bersamaan (1909) di Madiun telah berdiri sebuah Nv. Pribumi dengan modal ƒ20.000,- bernama *"Soekoprojo"*.

Pengaruh Kebangkitan Nasional dibidang ekonomi yang positif ialah timbulnya kesadaran ekonomi, bahwa ekonomi bukan lagi hanya soal perseorangan atau paling-paling keluarga sendiri, tetapi adalah soal masyarakat dan seluruh bangsa. Bahwa buruknya ekonomi bangsa sendiri mempunyai hubungan yang langsung dengan adanya penjajahan. Seorang penulis yang menamakan diri *Si Secerat* dalam surat kabar *"Taman Sari"* 1909 bulan Juli

mencoba menyimpulkan sebab-sebab dari nasib buruk Pribumi dibidang ekonomi, dan menurut dia sebab-sebab itu ialah karena Pribumi :

i. penakut
ii. kurang damai (antara satu dengan yang lain)
iii. kurang terpelajar
iv. terlalu pecaya pada pembesar bangsanya sendiri
v. hanya mencari keuntungan dan “kabegjan” sendiri, tidak mau menengok bangsa yang sedang dirundung susah.

Menurut penulis tersebut pembesar-pembesar Pribumi, yang sudah senang hidupnya, mengusulkan jalan keluar dari kesulitan ekonomi kepada pemerintah saja pun mereka tidak mau, bahkan main tindih dan main larang, mereka yang baru hendak maju sajapun telah ditekan sampai tenggelam kembali. Ada beberapa pembesar yang membantu bangsanya sendiri, tapi jumlahnya terlalu sedikit dan tidak berpengaruh pada pemerintah agung. Akhirnya ia membuat penggolongan, bahwa bangsanya terdiri atas 3 lapisan : atasan, tengahan dan bawahan. Atasan adalah konservatif (tua), tengahan adalah “kaum muda (yang) mengadakan ini-itu supaya bisa maju, jangan sampai ketinggalan, sebab kalau masih sebagai sekarang sudah tentu ketinggalan”, dan akhirnya ia menyatakan simpati dan pemihakannya kepada golongan tengahan.

Dalam masa ini dibidang ekonomi Pribumi baru meraba-raba dalam kegelapan. Cahaya-cahaya ekonomi yang terang dan berada di tempat yang sangat jauh dan tinggi adalah perusahaan-perusahaan orang Tionghoa. Mereka sendiri praktis belum mempunyai cahaya sendiri. Koperasi-koperasi yang timbul disetiap distrik adalah kopi yang setia dari semacamnya di Eropa Barat, yaitu suatu modus untuk dapat tetap hidup dalam penghisapan kapitalisme internasional. Koperasi semacam ini terus hidup dan dihidupkan terus, dan terutama sekali dalam Babak Pencoba dibawah dr. Sutomo bahkan ditempatkan sebagai suatu sistem untuk tetap hidup dalam penghisapan internasional tersebut. Tak banyak diantara usaha-usaha Pribumi dibidang ekonomi dan perusahaan yang mempunyai daya hidup yang mencukupi.

Pada tahun 1910 atas usul Dwidjosewojo, Kongres Budi Utomo menerima untuk mendirikan sebuah Maskapai Asuransi Jiwa, tetapi kelak ternyata BU tidak mampu untuk melaksanakannya. Pada tahun 1912 ia mengemukakan kembali usul itu – tidak pada BU – tetapi pada Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) dalam Kongresnya yang pertama di Magelang. Pada bulan berikutnya, yaitu tanggal 12 Februari 1912 usul yang diterima itu direalisasi dengan nama *“Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* PGHB”. Karena belum banyaknya langganan yang menyebabkan pembiayaan terlalu berat, maskapai ini akhirnya meminta subsidi dari Dewan Pimpinan Pusat BU dan mendapatkan *f*300,- dengan syarat, bahwa perusahaan asuransi itu tidak menerima langganan lain terkecuali pegawai-pegawai negeri Pribumi. Perusahaan ini kelak diubah namanya menjadi *“O.L. Mij Bumi-Putra”* yang hidup sampai zaman kemerdekaan, namun sebagaimana yang lain-lain iapun tidak mempengaruhi ekonomi Pribumi secara umum, dan hanya sebagai usaha reformis.

Sebaliknya dari semua semua itu penghasilan pemerintah kolonial semakin lama semakin meningkat sedari tahun 1900 sampai 1910, sekalipun pengeluaran-pengeluarannya juga semakin meningkat dalam hubungan dengan persiapan-persiapan perang. Hal itu dapat dilihat dari daftar dibawah ini :

PENGHASILAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA, 1903-1910
Dihitung dalam ribuan gulden

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
A. Pajak								
I. Pacht (kecuali candu)	3.543	3.581	3.567	3.562	3.567	3.772	3.882	3.746
II. Bukan Pacht								
1. bea keluar masuk	11.521	11.899	12.872	14.263	15.648	16.848	14.491	18.374
2. cukai	6.218	6.359	6.649	7.137	7.374	8.808	7.479	8.088
3. pegawai	959	1.009	1.058	1.024	1.097	1.274	1.193	1.274
4. penghasilan	1.460	1.490	1.665	3.895	4.940	3.501	4.880	4.954
5. Verponding	2.858	2.298	1.097	2.978	2.780	2.451	2.232	2.315
6. Zegel	1.338	1.364	1.467	1.530	1.575	1.632	1.555	1.646
7. baliknama dll	642	648	740	894	772	860	813	844
8. penjualan umum	649	598	602	637	661	690	665	692
9. perusahaan	3.099	3.209	3.491	3.686	3.522	4.855	4.713	4.859
10. kekayaan	2.340	2.264	2.449	2.635	2.740	2.827	2.713	2.860
11. bumi	18.292	18.746	18.893	18.564	18.825	19.567	19.263	19.548
12. potong hewan	1.880	1.913	1.927	1.888	2.051	2.078	2.090	2.213
13. kepala	3.378	8.405	3.468	3.574	3.627	3.675	3.627	3.675
14. lain-lain	1.136	1.188	1.191	2.453*	1.860*	1.051	1.092	930
Jumlah :	58.808	59.909	60.734	68.920	71.039	73.089	70.638	76.018
B. Monopoli								
1. pacht candu	5.876	4.244	4.290	4.171	3.732	3.753	3.543	3.434
2. resi candu	11.775	14.663	15.815	16.351	17.970	19.251	19.497	22.230
3. pegadaian	73	229	364	1.581	3.153	4.480	5.803	7.303
4. garam	9.773	10.676	10.860	10.979	11.563	11.956	11.685	12.181
Jumlah :	27.497	29.812	31.329	33.082	36.418	39.440	40.528	45.178
C. Hasil bumi								
1. kopi	8.386	8.195	7.580	3.831	5.887	4.677	2.922	1.790
2. kina	716	628	457	911	746	593	622	624
3. timah Bangka	24.250	18.682	18.449	21.672	25.689	20.394	19.058	21.754
4. timah Belitung	2.699	2.353	2.278	4.137	2.963	1.437	1.050	730
5. batubara Ombilin	2.353	2.473	2.486	2.636	3.040	2.809	3.093	3.230
6. kehutanan	2.899	2.948	3.671	4.229	4.595	4.922	5.008	5.956
7. geta perca	--	--	--	5	3	1	20	60
8. caoutchouk	--	--	--	--	--	--	--	6
Jumlah :	40.808	35.2841	34.921	37.421	42.923	34.833	31.773	34.150

(sambungan lihat halaman selanjutnya)